BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Peranan Pelaporan dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bidang keuangan, untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan tahun 2024 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

Pelaporan keuangan memiliki peran krusial dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Pelaporan keuangan adalah tulang punggung dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana publik, membuat keputusan yang tepat, dan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Berikut adalah beberapa peran utamanya:

a. Akuntabilitas

Pelaporan keuangan menyediakan informasi yang jelas dan terperinci sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola dan menggunakan dana publik ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memungkinkan masyarakat, DPRD, dan pihak terkait lainnya untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

b. Pengambilan Keputusan

Laporan keuangan memberikan informasi yang relevan dan andal bagi para pengambil keputusan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat. Informasi ini terkait mengambil keputusan strategis untuk membantu kepala daerah juga DPRD dalam pelaksanaan kegiatan, merencanakan anggaran, mengevaluasi kinerja program kerja, mengelola aset serta kewajiban secara lebih efektif juga membuat keputusan strategis lainnya.

c. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

d. Kepatuhan terhadap peraturan

Pelaporan keuangan memastikan bahwa pemerintah daerah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ini mencakup kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, peraturan pengelolaan keuangan daerah, dan peraturan lainnya.

e. Perencanaan dan Pengendalian

Laporan keuangan menyediakan dasar untuk perencanaan keuangan yang lebih baik di masa depan.

Informasi dari laporan keuangan juga membantu dalam pengendalian internal, yang penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pengelolaan keuangan yang sehat.

f. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan laporan keuangan yang transparan, masyarakat dapat mengetahui bangaimana dana mereka dialokasikan dan digunakan untuk kepentingan publik.

g. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Pelaporan keuangan juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja entitas pelaporan dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Melalui analisis laporan keuangan, pihak-pihak terkait dapat menilai apakah tujuan-tujuan pemerintahan telah tercapai dan seberapa efisien dana publik telah digunakan.

h. Evaluasi Kinerja

Pelaporan keuangan juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja entitas pelaporan dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Melalui analisis laporan keuangan, pihak-pihak terkait dapat menilai apakah tujuan-tujuan pemerintahan telah tercapai dan seberapa efisien dana publik telah digunakan. Ini mencakup penilaian efisiensi, efektivitas dan kepatuhan terhadap anggaran.

Dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Perundangan-undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang relevan berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social maupun politik, dengan menyediakan informasi mengenai:

LKPD Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai;

a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

f. Perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejak Tahun 2003 beberapa peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan telah diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.

Pada tahun 2005 mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka kepala daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

a. BAB I PENDAHULUAN

   Memuat peranan pelaporan dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

b. BAB II KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN, EKONOMI MAKRO, SERTA PENCAPAIAN TARGET PERDA APBD

   Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran dan pencapaian target Perda APBD.

c. BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

d. BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta kesesuaian penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

e. BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan; pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbal sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

f. BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

g. BAB VII PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN, EKONOMI MAKRO, SERTA PENCAPAIAN TARGET PERDA APBD

2.1. Kebijakan Fiskal/Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya Anggaran Daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik, atau disebut dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024, pada dasarnya telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan sosial ekonomi daerah. Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh dalam rangka mengantisipasi kondisi Tahun 2024 berupa kebijakan dan peraturan berkaitan dengan peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, kestabilan perekonomian serta penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, kebijakan yang ditempuh berupa terus berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor karena merupakan potensi dan sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Kebijakan efisiensi belanja diupayakan dengan mengutamakan prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal, dengan melakukan penghematan melalui peningkatan disiplin anggaran, serta mengarahkan tersusunnya anggaran berbasis kinerja. Sedangkan kebijakan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan, yaitu apabila diperoleh surplus akan ditentukan pemanfaatan surplus dalam pengeluaran pembiayaan, namun apabila diperoleh defisit akan ditentukan sumber-sumber pembiayaan dalam penerimaan pembiayaan.

Sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Pada penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, pemerintah diberikan kewenangan berupa kebijakan desentralisasi fiskal untuk mengelola seluruh sumber keuangan daerah untuk pencapaian tujuannya secara efektif, efisien dan ekonomis, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kepala Daerah memerlukan informasi keuangan untuk meningkatkan efektifitas proses manajemen pemerintah daerah dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) yang dapat memberikan hasil kesejahteraan masyarakat. *Steven Cohen, et all* (2011:196) mengidentifikasikan jenis kebutuhan informasi antara lain: (a) Masalah data, (b) data lingkungan, (c) pilihan solusi, (d) dampak solusi yang diproyeksikan, (e) tindakan internal, (f) pengeluaran sumber daya, (g) keluaran yang dihasilkan, dan (h) dampak solusi aktual. Salah satu kebutuhan informasi keuangan pemerintah daerah yang disediakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi keuangan tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar dalam pengelolaan manajemen pemerintahan daerah yaitu untuk menyusun perencanaan (anggaran), pelaksanaan program pemerintahan, serta keluaran (*output*) berupa posisi kekayaan daerah yang digunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara berkala, Kepala Daerah memerlukan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan kekayaan dan keuangan daerah, dan pengambilan keputusan untuk melakukan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

2.2. Kondisi Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk mempelajari, mengevaluasi dan menentukan mekanisme arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dapat dilihat dengan meneliti fenomena ekonomi secara lebih luas, seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan situasi perekonomian pemerintah daerah lainnya.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023. Defisit APBN 2024 tercatat sebesar Rp507,8 triliun, yang setara dengan 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan tahun 2023, defisit APBN mencapai Rp347,6 triliun atau 1,65% dari PDB. Ini menunjukkan bahwa defisit pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, meskipun defisit APBN 2024 menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya dan mendekati batas maksimum yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara (yaitu tidak lebih dari 3% dari PDB). Meskipun ada defisit total dalam anggaran, pemerintah masih mampu menjaga keseimbangan primer relatif terkendali dan berhasil menutup defisit tersebut dengan pembiayaan anggaran yang terencana dan tetap dalam batas aman secara fiskal.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator ekonomi makro Tahun Anggaran

2023 atau tahun sebelumnya berdasarkan data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik meliputi;

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70;

b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,85;

c. Gini Ratio sebesar 0,347;

d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,69;

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,39;

f. Tingkat Inflasi sebesar 0,44; dan

g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB/ADHB) sebesar 187.374,29,- (Milyar Rupiah).

2.2.1. Tingkat Kemiskinan

Berbicara mengenai kemiskinan di Sulawesi Utara, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain kurangnya penguasaan teknologi, pendidikan, investasi, pengangguran, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, demokrasi, inflasi, pengangguran terbuka dan pendapatan. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan – kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu.

Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, makin parah tingkat kemiskinannya.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan memainkan peran krusial dalam menentukan kondisi ekonomi makro Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, negara menghadapi tantangan serius dalam hal pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, serta efektivitas kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan harus menjadi prioritas utama agar perekonomian Sulawesi Utara dapat tumbuh secara berkelanjutan. Berikut ini disajikan tren persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.2.1.1 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara Periode 2022 s.d. 2024

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Provinsi (persen)	7,28	7,38	7,25
2	Provinsi (Ribu Jiwa)	185,14	189,00	186,86
3	Nasional (persen)	9,54	9,36	9,03

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tabel di atas menunjukkan adanya tren jumlah penduduk miskin periode Tahun 2022 s.d. 2024 yang mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 mencapai sebesar 7,25 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2023. Jika dibandingkan rata-rata provinsi/nasional, menunjukkan presentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara masih berada dibawah nasional. Penurunan tingkat kemiskinan ini didorong oleh beberapa faktor kunci, antara lain;

a. Program Bantuan Sosial: Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial yang efektif untuk membantu masyarakat miskin dan rentan;

b. Pertumbuhan Ekonomi Domestik: Aktivitas ekonomi domestik yang solid juga berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat; dan

c. Stabilitas Inflasi: Inflasi yang terkendali membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.

Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Pemerintah Indonesia memiliki target ambisius untuk mencapai angka kemiskinan ekstrem sebesar nol persen pada akhir tahun 2024. Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan dan memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran.

Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah penyebaran penduduk miskin (Ribu Jiwa) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan wilayah Nasional secara kesseluruhan.

Tabel 2.2.1.2 Tingkat Penyebaran Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara

No	Penduduk Miskin	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Berdasarkan Wilayah Provinsi (Ribu Jiwa)	185,14	189,00	188,65
2	Berdasarkan Wilayah Nasional (Ribu Jiwa)	26.161,16	25.898,55	25.219,20

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.2.1.3 Tingkat Kedalam Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,15	1,09	1,10
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,59	1,53	1,46

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 2.2.1.4 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,26	0,26	0,24
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,39	0,38	0,35

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah merencanakan program/kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan terutama terhadap tenaga kerja dengan alokasi anggaran sebesar seperti yang ada pada tabel dan telah

direalisasikan sesuai dengan yang ada pada satuan kerja perangkat daerah terkait. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1.5 Rekapitulasi Program/kegiatan dalam Upaya Menekan Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara TA 2024

No	Nama Program/Kegiatan Pengentasan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	228.973.000,00	226.399.117,00	98,75
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.702.989.400,00	2.696.332.823,00	99,63
3	Program Hubungan Industrial	14.503.058.500,00	14.472.527.639,00	99,79

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

b. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, perberdayaan usaha ekonomi mikro dan program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan upaya lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain berupa program perlindungan dan jaminan sosial, program penganrusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program pengelolaan pendidikan, pengelolaan aspek ketenagalistrikan, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. 2. 2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. TPT merupakan indikator penting untuk menilai kesehatan pasar tenaga kerja dan dapat memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam perekonomian. Ketika tingkat pengangguran meningkat, jumlah individu yang tidak berkontribusi pada produksi barang dan jasa juga meningkat, sehingga mengurangi output ekonomi secara keseluruhan. Pengangguran terbuka meliputi (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi kondisi ekonomi makro Indonesia dengan cara menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta menciptakan tantangan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran harus menjadi prioritas bagi pembuat kebijakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Pengangguran Provinsi (persen)	6,51	6,19	5,85
2	Tingkat Pengangguran Nasional (persen)	5,86	5,32	4,91

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara

TPT di Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,91 persen. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 5,32 persen pada Agustus 2023. Begitu pula dengan Sulawesi Utara yang pada tahu 2024 mengalami penurunan, yaitu 5,86 persen. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam kondisi pasar tenaga kerja dan dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menganggarkan program/kegiatan dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran terbuka pada APBD TA 2024 sejumlah anggaran pada tabel berikut dan telah dengan rincian Program/Kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.2.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam Upaya Menekan Angka Pengangguran Provinsi Sulawesi Utara TA 2024

No	Nama Program/Kegiatan Pengentasan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan UMKM	947.464.400,00	818.410.400,00	86,38
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	226.973.000,00	226.398.117,00	99,75
3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	83.211.000,00	82.901.920,00	99,63

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil menekankan tingkat ketimpangan pendapatan sesuai dengan angka yang ditargetkan dalam APBD.

b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menekan tingkat ketimpangan pendapatan, antara lain berupa program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

2. 2. 3 Indeks Gini (Gini *Ratio*) – Khusus untuk Entitas Provinsi

Tingkat indeks gini mempengaruhi kondisi ekonomi makro Indonesia dengan cara yang signifikan, di mana ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tingkat kemiskinan, dan mempengaruhi stabilitas sosial. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara indeks gini dan pertumbuhan ekonomi. Ketika ketimpangan pendapatan meningkat (indeks gini lebih tinggi), akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi menjadi tidak merata. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan

daya beli masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, penelitian oleh *Azis Maulana, et al.* (2022) menunjukkan bahwa ketidakmerataan pendapatan berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Secara nasional, angka indeks gini mengalami trend yang fluktuatif. Adanya peningkatan harga-harga bahan makanan yang menyebabkan angka indeks gini Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan tetapi kembali lagi menurun dalam kurun waktu tertentu trend ketimpangan semakin menurun. Indeks gini merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks gini sama dengan 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
b. Indeks gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Tingkat indeks gini mempengaruhi kondisi ekonomi makro Indonesia dengan cara yang signifikan, di mana ketimpangan pendapatan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta memicu ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi masalah ini demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dapat diketahui bahwa tren data pencapaian indeks gini Provinsi Sulawesi Utara untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.3.1 Gini Ratio Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 s.d. 2024

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Provinsi	0,385	0,370	0,360
2	Tingkat Nasional	0,383	0,388	0,379

Sumber Dokumen:BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tabel diatas menunjukan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2024 mencapai sebesar 0,360 Angka pencapaian indeks gini tersebut menurun 10 point jika dibandingkan Tahun 2023 dan menurun 5 point berbanding dengan tahun 2022. Indeks gini ini dihitung berdasarkan garis kemiskinan di wilayah bersangkutan. Berikut disajikan garis kemiskinan pada Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional untuk periode Tahun 2022 s.d. 2024:

Tabel 2.2.3.2 Garis Kemiskinan Periode Tahun 2022-2024

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Provinsi	427.016	463.432	490.719
2	Tingkat Nasional	505.060	550.458	582.932

Sumber Dokumen:BPS Provinsi Sulawesi Utara

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah merencanakan program/kegiatan dari berbagai satuan kerja perangkat daerah yang ditujukan untuk menekan tingkat ketimpangan pendapatan dengan tujuan guna untuk menekan garis kemiskinan. Adapun anggaran dan realisasi atas masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan dalam Upaya Mengurangi Ketimpangan Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara TA 2024

No	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.794.716.999,00	1.827.615.569,00	101,83
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.270.338.358,00	2.066.462.781,00	91,02
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	2.875.868.500,00	2.875.563.317,00	99,99

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil menekan tingkat ketimpangan pendapatan sesuai dengan angka yang ditargetkan dalam APBD.

b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menekan tingkat ketimpangan pendapatan, antara lain berupa Program peningkatan sistem Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian, Program Pengembangan Kemitraan, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

2. 2 .4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu negara dalam hal pembangunan sosial dan ekonomi. IPM menggabungkan tiga dimensi utama: kesehatan (diukur dengan harapan hidup), pendidikan (diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi pendidikan), serta standar hidup (diukur dengan pendapatan per kapita). Dengan demikian, IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat dibandingkan hanya menggunakan indikator ekonomi seperti PDB.

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perlambatan IPM terjadi pada tahun 2020 akibat pandemic Covid-19, tetapi pada tahun 2022 sampai dengan 2024 perlahan lahan IPM Kembali mengalami peningkatan seiring dengan penanganan pandemic Covid-19 yang berjalan dengan baik serta pemulihan kinerja ekonomi Sulawesi Utara.

Peningkatan IPM Sulawesi Utara didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama dimensi standar hidup layak. Indikator untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara IPM dan pertumbuhan ekonomi. Ketika IPM meningkat, biasanya diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Masyarakat yang lebih sehat dan terdidik cenderung memiliki kemampuan untuk berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Misalnya, dalam konteks Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan IPM pada tahun 2020, tidak selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam aspek sosial, tantangan struktural masih ada dalam perekonomian.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu;

a. Rendah (< 60);

b. Sedang (60 ≤ IPM < 70);

c. Tinggi (70 ≤ IPM < 80); dan

d. Sangat Tinggi (>80).

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia mempengaruhi kondisi ekonomi makro Indonesia melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan tingkat pengangguran, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa peningkatan IPM sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dapat diketahui tingkat capaian IPM Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebesar 75.68 poin yang berarti masuk kategori tinggi dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Provinsi	74,52	75,04	75,68
2	Indonesia/Nasional	72,91	74,39	75,02

Sumber Dokumen BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 2.2.4.2 IPM Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota Periode Tahun 2022 – 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Bolaang Mongondow	68,95	69,82	70,29
2	Minahasa	76,18	76,98	77,74
3	Kepulauan Sangihe	71,63	72,22	72,71
4	Kepulauan Talaud	70,43	71,14	71,77
5	Minahasa Selatan	72,89	73,66	74,17
6	Minahasa Utara	74,69	75,31	75,89
7	Bolsang Mongondow Utara	68,05	68,84	69,32
8	Siau Tagulandang Biaro	70,43	69,57	70,31
9	Minahasa Tenggara	71,48	71,93	72,66
10	Bolaang Mongondow Selatan	65,90	66,40	67,14
11	Bolaang Mongondow Timur	67,21	67,96	68,53
12	Kota Manado	79,66	80,14	80,63
13	Kota Bitung	74,70	75,11	75,71
14	Kota Tomohon	77,44	78,10	78,89
15	Kota Kotamobagu	73,96	74,43	75,27

Sumber Dokumen:BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tabel di atas menunjukkan tren capaian IPM Provinsi Sulawesi Utara dalam periode Tahun 2022 s.d. 2024 yang mengalami fluktuasi. Kota Manado menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Bolaang Mongondow selatan menduduki

peringkat terendah. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

Tabel 2.2.4.3 Indikator Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan UHH, RLS dan HLS

No	Indikator	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	72,08	72,40	72,69
2	Pendidikan			
	a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,68	9,77	9,84
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,95	12,96	12,97
3	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan	11.179	11.497	11.998
	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	74,52	75,04	75,68

Sumber Dokumen:BPS Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Adanya tren yang kenaikan atas pencapaian IPM di Provinsi Sulawesi Utara. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya peningkatan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) sebesar 72,69 persen, atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,97 persen, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 9,84 persen, dan atau Standar Hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

b. Indikator Kesehatan UHH, menunjukkan adanya tren yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan UHH sejak lahir dengan merencanakan program/kegiatan dalam APBD sebagai berikut:

Tabel 2.2.4.4 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan UHH TA 2024

No	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Rehabilitasi Sosial	3.121.410.968,00	3.016.810.488,00	96,65
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.354.676.303,00	1.206.042.461,00	89,03
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	26.833.196.462,00	23.360.033.220,00	87,13

c. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka RLS dan HLS yang dalam tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.4.5 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan RLS dan HLS TA 2024

No	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Daya Saing Kelembagaan	449.792.600,00	446.047.700,00	99,17
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.605.242.654,00	14.924.120.507,00	89,88
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.198.067.299,00	1.174.048.721,00	98,00

d. Indikator Pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan dalam tiga tahun terakhir cenderung menurun. Terkait dengan indikator ini, Provinsi Sulawesi Utara juga telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan indikator ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.4.6 Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan Angka Per Kapita Disesuaikan

No	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pembinaan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	217.064.622,00	209.292.189,00	96,42
2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, pengelolaan sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan tinggi dan Prajabatan	1.449.477.259,00	1.385.328.164,00	95,57

2. 2. 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Laju pertumbuhan ekonomi diukur melalui perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) dari waktu ke waktu.

PDB mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Pertumbuhan positif menunjukkan bahwa perekonomian sedang berkembang, sedangkan pertumbuhan negatif dapat menandakan resesi. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Perekonomian Sulawesi Utara secara keseluruhan diperkirakan masih berada dalam *trajektori* pemulihan dan tumbuh menguat ditahun berjalan dan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Tabel 2.2.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Provinsi		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Juta Rupiah)	96.768,15	102.070,48	107.272,32
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,42	5,48	5,39

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Selama kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan 2024, laju perekonomian Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan. Ekonomi Sulawesi Utara bertumbuh terus ditopang oleh beberapa komponen. Dari keseluruhan komponen pengeluaran yang bertumbuh hanya komponen Import Barang dan Jasa. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Melayani Rumah tangga (LNPRT) merupakan komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi seiring dengan meningkatnya aktivitas tatap muka yang diikuti dengan meningkatnya biaya operasional LNPRT.

Secara umum PDRB mengalami pertumbuhan pada hamper seluruh lapangan usaha kecuali Jasa Asuransi. Penyediaan Akomodasi Makan Minum tumbuh paling besar sebagai 39 dampak dari meningkatnya aktivitas tatap muka *Meeting, Incentives,* dan *Conferences, Exhibitions* (*MICE*) baik pelaksanaannya di hotel, pemerintah, swasta atau *family gathering* pada Sulawesi Utara termasuk juga *events* berskala internasional dan nasional. Berdasarkan rilis Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dimana penyaluran kredit perbankan tumbuh cukup

signifikan, khususnya untuk Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumsi. Terlihat pada kondisi perekonomian regional Sulawesi Utara yang bergerak positif pada periode yang sama.

Dilaporkan juga bahwa kredit untuk UMKM meningkat mencapai dua digit. Hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang otonomi daerah yakni untuk memberi kelcluasan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki daerah yang pada gilirannya dapat ikut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional.

Laju pertumbuhan ekonomi memiliki dampak luas terhadap kondisi ekonomi makro Indonesia, mempengaruhi berbagai aspek seperti konsumsi rumah tangga, investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (*FDI*), inflasi, serta tingkat pengangguran. Untuk menjaga momentum positif ini di masa depan, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang mendukung stabilitas makro ekonomi sambil mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

2. 2. 6 Inflasi

Tim Pengedali Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara meninjau dari pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara melalui tingkat inflasi yang terjadi telah menyusun program pengendalian inflasi dalam *roadmap* Pengendalian Inflasi Sulut melalui *High Level Meeting* (HLM) dan Rapat Koordinasi Teknis. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaliknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yaitu;

a. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya kurang dari 10 persen dalam satu tahun;

b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30 persen setahun;

c. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100 persen setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan

d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100 persen setahun.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat menyebabkan tekanan inflasi jika permintaan melebihi penawaran. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi keputusan belanja konsumen serta investasi perusahaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang positif, tantangan inflasi tetap harus dikelola dengan hati-hati. Inflasi tinggi mengancam kesejahteraan masyarakat. Target ideal inflasi berbeda tiap negara, tergantung struktur ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Inflasi yang rendah dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Meskipun ada kenaikan pada inflasi inti (yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan dan energi) sebesar 2,26 persen pada Desember 2024, daya beli masyarakat tetap terjaga karena harga barang kebutuhan pokok lebih stabil. Meskipun inflasi rendah bisa dianggap positif, ada kekhawatiran mengenai penurunan konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menunjukkan penurunan dari bulan ke bulan, mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi

Tabel 2.2.6.1 Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Inflasi Provinsi (persen)	5,51	2,61	0,44
2	Tingkat Inflasi Nasional (persen)	5,51	5,51	1,57

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat inflasi daerah tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 dan 2022 sebesar 0,44 persen menjadikannya sebagai provinsi dengan inflasi terendah secara nasional. Hal tersebut terjadi perubahan signifikan dalam inflasi di Sulawesi Utara antara 2022 hingga 2024 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah daerah, kondisi pasar lokal, dan faktor eksternal lainnya. Sementara itu, inflasi nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,57 persen.

Tetapi pada akhir tahun 2024 terjadi penurunan daya beli masyarakat. Upaya-upaya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara nasional melalui rapat antara pemerintah pusat dan daerah juga berperan dalam menjaga stabilitas harga. Untuk itu, mengendalikan tingkat inflasi diuraikan sebagai berikut;

a. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM;

b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; dan

c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.

Dalam upaya untuk program/kegiatan penanganan inflasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah merencanakan program/kegiatan dari berbagai satuan kerja perangkat daerah yang ditujukan untuk penanganan inflasi. Upaya pengendalian inflasi tersebut dilakukan melalui empat pilar 4K mencakup Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, yang selanjutnya diturunkan ke dalam beberapa sub-program kegiatan.

Melalui HLM TPID Provinsi Sulawesi Utara, dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi teknis bersama dengan dinas dan lembaga terkait, Peta Jalan Pengendalian Inflasi Sulawesi Utara tahun 2023-2024 telah disepakati bersama. Peta jalan tersebut kemudian menjadi pedoman bagi peta jalan Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Utara. Adapun anggaran dan realisasi atas masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2.6.2 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan dalam Upaya Penanganan Inflasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara TA 2024

No	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Operasi pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah Provinsi	940.000.000,00	505.660.020,00	53,79
2	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	18.940.300,00	16.597.000,00	87,63
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	378.837.800,00	373.096.360,00	98,48

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil mengupayakan penanganan inflasi sesuai dengan angka yang ditargetkan dalam APBD. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah melaksanakan upaya lain terlihat pada program/kegiatan, antara lain berupa penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal, koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal.

2. 2. 7 Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara

Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Utara dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.7.1 PDRB seri 2024 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam milyar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	32.816,26	35.165,39	38.586,08
2	PDRB	157.039,46	171.969,42	187.374,29
3	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	156.581,49	171.512,74	186.888,97
4	PDRB Nasional	96.788,15	102.070,48	107.272,32

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara

2.3. Pencapaian Target Perda APBD/Perubahan APBD

Secara umum capaian target dan realisasi APBD/Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Capaian Target dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran Induk 2024	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi APBD 2024
1	Pendapatan Daerah	3.905.319.788.596,00	3.966.839.628.596,00	3.653.838.603.399,79
2	Belanja Daerah	3.616.277.183.348,00	3.956.669.432.277,00	3.707.934.255.582,00
3	Surplus/Defisit	289.042.605.248,00	7.170.396.319,00	(54.095.652.182,21)
4	Penerimaan Pembiayaan	36.000.000.000,00	253.121.347.253,00	253.119.165.404,89
5	Pengeluaran Pembiayaan	324.042.605.248,00	260.291.743.572,00	136.790.020.220,00
6	Pembiayaan Netto	(289.042.605.248,00)	(7.170.396.319,00)	116.329.145.214,89
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00	62.233.493.032,68

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan Perubahan APBD sehubungan dengan adanya;

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan tahun anggaran berjalan;

d. Keadaan darurat; dan

e. Keadaan luar biasa.

Disamping itu, yang menjadi latar belakang pertimbangan strategis adalah sebagai berikut;

a. Menampung Pendapatan Asli Daerah, berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperkirakan diantaranya mengalami penurunan dan yang lainnya melampaui target;

b. Revisi kegiatan yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024;

c. Menampung adanya pergeseran dan pelampauan anggaran; dan

d. Memenuhi beberapa kewajiban yang belum tertampung, untuk kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah.

2.4. *Mandatory Spending* Tahun Anggaran 2024

Belanja wajib pada APBD adalah belanja atau pengeluaran pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang. Kebijakan belanja wajib merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Tujuan utama dari belanja wajib adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Hal ini memastikan bahwa alokasi anggaran daerah terfokus pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pembiayaan pembangunan sosial dan ekonomi demi terciptanya kesejahteraan dan kesejahteraan. Dalam perencanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah, belanja wajib mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran guna memenuhi aspek pelayanan dasar.

Berdasarkan sumber yang tersedia, beberapa alokasi belanja wajib pada APBD meliputi rekapitulasi belanja Untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*), terdiri dari:

a. Fungsi Kesehatan

Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

1) Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;

2) Peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting;

3) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

4) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

5) Penguatan jejaring layanan primer; dan

6) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Tabel 2.4.1 *Mandatory Spending* Tahun 2024 Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024
1.	a.	**BELANJA PADA DINAS KESEHATAN**	**532.228.262.917,00**	**489.700.187.367,00**
	1)	**Belanja Operasi**	**464.564.826.482,00**	**429.112.564.261,00**
		a. Belanja Pegawai	198.774.207.454,00	184.205.200.249,00
		b. Belanja Barang dan Jasa	264.390.619.028,00	243.507.364.012,00
		c. Belanja Hibah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
		d. Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2)	**Belanja Modal**	**67.663.436.435,00**	**60.587.623.106,00**
	b.	**BELANJA DI LUAR DINAS KESEHATAN YANG MENUNJANG KESEHATAN**	-	-
	1)	Belanja Transfer	-	-
		Belanja Bantuan Keuangan	-	-
	2)	Dst....	-	-
2.	ANGGARAN KESEHATAN (a-b)		**532.228.262.917,00**	**489.700.187.367,00**
3.	TOTAL BELANJA DAERAH		**3.958.669.432.277,00**	**3.707.934.255.582,00**
4.	GAJI ASN		945.957.521.084,02	865.423.397.368,00
5.	TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN (3-4)		**3.012.711.911.192,98**	**2.842.510.858.214,00**
	RASIO ANGGARAN KESEHATAN (2:5) X 100		**17,67**	**17,23**

b. Fungsi Pendidikan,

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.

Pemetaan atas perhitungan alokasi fungsi pendidikan terdiri atas belanja pada subkegiatan pada urusan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, bidang kepemudaan dan olahraga serta belanja di luar urusan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan yang menjadi bagian informasi yang tersedia dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan atas perhitungan alokasi fungsi pendidikan, dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tabel 2.4.2 *Mandatory Spending* Tahun 2024 Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024
1.	a.	**Urusan Bidang Pendidikan**	**1.202.561.956.529,00**	**1.146.373.411.939,00**
	1)	**Belanja Operasi**	**1.038.869.539.710,00**	**991.971.748.282,00**
		a. Belanja Pegawai	755.669.736.256,00	720.752.221.985,00
		b. Belanja Barang dan Jasa	124.920.203.454,00	108.329.974.501,00
		c. Belanja Hibah	158.279.600.000,00	162.889.551.816,00
		d. Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2)	**Belanja Modal**	**163.692.416.819,00**	**154.401.663.657,00**
	b.	**Urusan Bidang Kebudayaan**	**2.826.511.775,00**	**2.792.327.074,00**
	1)	**Belanja Operasi**	**2.724.711.775,00**	**2.691.412.074,00**
		a. Belanja Barang dan Jasa	2.524.711.775,00	2.491.412.074,00
		b. Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00
		c. Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2)	**Belanja Modal**	**101.800.000,00**	**100.915.000,00**
	c.	**Urusan Bidang Perpustakaan**	**1.331.496.336,00**	**1.219.368.941,00**
	1)	**Belanja Operasi**	**1.172.926.064,00**	**1.071.408.941,00**
		a. Belanja Barang dan Jasa	1.172.926.064,00	1.071.408.941,00
		b. Belanja Hibah	-	-
		c. Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2)	**Belanja Modal**	**158.570.272,00**	**147.959.000,00**
	d.	**Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**35.321.472.692,00**	**34.676.287.781,00**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024
	1) Belanja Operasi	35.257.934.072,00	34,813.237.781,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.332.934.072,00	6.121.257.781,00
	c. Belanja Hibah	28.925.000.000,00	28.691.980.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2) Belanja Modal	63.536.620,00	63.050.000,00
	e. BELANJA DI LUAR DINAS PENDIDIKAN YANG MENUNJANG PENDIDIKAN	-	-
	1) Belanja Transfer	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
	2) Dst....	-	-
2.	ANGGARAN PENDIDIKAN (a-e)	1.242.041.437.332,00	1.185.261.385.735,00
3.	TOTAL BELANJA DAERAH	3.958.668.432.277,00	3.707.934.255.582,00
	RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2:3) X 100	31,38	31,97

c. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.4.3 *Mandatory Spending* Tahun 2024 Fungsi Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Total Belanja Daerah	3.958.668.432.277,00
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa: a) belanja bagi hasil b) bantuan keuangan	 578.569.316.876,00 0,00
2	Jumlah (a+b)	578.569.316.876,00
3	Selisih (1-2)	3.380.100.115.401,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	1.352.040.046.160,40

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	a) Belanja Modal	445.810.358.954,00
	1) Tanah	30.300.000.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	110.528.418.456,00
	3) Bangunan dan Gedung	176.794.054.397,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	112.038.002.734,00
	5) Aset tetap lainnya	14.944.324.805,00
	6) Aset lainnya	1.205.548.562,00
	b) Belanja pemeliharaan	38.073.142.993,00
2	a) Belanja Hibah	429.671.607.765,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	1.216.393.097,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan (hanya yang berdimensi infrastruktur)	0,00
3	Jumlah Belanja Infraastruktur Daerah (1+2)	914.971.702.809,00
Persentase Belanja Infrastruktur Tahun 2024		27,07

d. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan pada *mandatory spending* adalah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang ditetapkan oleh undang-undang digunakan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan ini

mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah dan negara. Fungsi pengawasan pada *mandatory spending* sangat krusial dalam memastikan bahwa belanja negara tidak hanya memenuhi ketentuan hukum tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, fungsi pengawasan pada *mandatory spending* memiliki tujuan yaitu;

1) Transparansi dan Akuntabilitas;

2) Evaluasi Kinerja;

3) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan; dan

4) Mendorong Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi.

Tabel 2.4.4 *Mandatory Spending* Tahun 2024 Fungsi Pengawasan

NO		KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024
1.	a.	BELANJA PADA INSPEKTORAT	37.076.402.304,00	34.501.752.451,00
	1)	Belanja Operasi	36.863.578.774,00	34.291.512.252,00
		a. Belanja Pegawai	27.585.574.927,00	25.276.450.980,00
		b. Belanja Barang dan Jasa	9.278.003.847,00	9.015.061.272,00
	2)	Belanja Modal	211.823.530,00	210.240.199,00
	b.	BELANJA DI LUAR INSPEKTORAT YANG MENUNJANG PENGAWASAN	-	-
	1)	Belanja Transfer	-	-
		Belanja Bantuan Keuangan	-	-
	2)	Dst....	-	-
2.		ANGGARAN PENGAWASAN (a-b)	37.076.402.304,00	34.501.752.451,00
3.		TOTAL BELANJA DAERAH	3.958.889.432.277,00	3.707.934.255.582,00
		RASIO ANGGARAN PENGAWASAN (2:3) X 100	0,94	0,93

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu ringkasan atau laporan yang menyajikan informasi mengenai hasil dan capaian dari pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangannya, serta seberapa efektif dan efisien penggunaan dana publik dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Juga merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen perencanaan.

Komponen Utama Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan;

a. Pendapatan Daerah: Menyajikan informasi mengenai total pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, dan dana transfer dari pusat;
b. Belanja Daerah: Menggambarkan total belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk berbagai program dan kegiatan, termasuk belanja operasional dan belanja modal;
c. Surplus atau Defisit Anggaran: Menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Surplus menunjukkan bahwa pendapatan lebih besar daripada belanja, sedangkan defisit menunjukkan sebaliknya;
d. Rasio Keuangan: Menyediakan analisis rasio-rasio penting seperti rasio ketergantungan terhadap dana transfer, rasio efisiensi belanja, serta rasio likuiditas untuk menilai kesehatan keuangan pemerintah daerah; dan
e. Capaian Program Prioritas: Menggambarkan sejauh mana program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah telah tercapai berdasarkan anggaran yang dialokasikan.

Manfaat Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan;

a. Meningkatkan Partisipasi Publik: Dengan adanya laporan ini, masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap penggunaan anggaran;
b. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan: Pemerintah daerah dapat menggunakan informasi dari ikhtisar ini untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangannya; dan
c. Memfasilitasi Audit dan Pengawasan: Laporan ini menjadi salah satu dokumen penting bagi auditor eksternal maupun internal dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan alat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara

transparan, akuntabel, dan efektif demi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara s.d 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi 2024	%
PENDAPATAN	**3.965.839.828.596,00**	**3.653.838.603.399,79**	**92,13**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.635.996.697.596,00**	**1.521.049.403.395,79**	**92,97**
Pendapatan Pajak Daerah	1.275.468.222.377,00	1.236.030.479.089,00	96,91
Pendapatan Retribusi Daerah	256.969.215.233,00	182.910.540.123,66	71,18
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	70.817.711.445,00	71.762.262.545,00	101,33
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.721.548.541,00	30.346.101.638,13	92,74
PENDAPATAN TRANSFER	**2.328.968.131.000,00**	**2.131.577.594.004,00**	**91,52**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**2.328.968.131.000,00**	**2.131.577.594.004,00**	**91,52**
Dana Perimbangan	2.315.067.912.000,00	2.120.937.395.004,00	91,61
Dana Insentif Fiskal	13.900.219.000,00	10.640.199.000,00	76,55
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**875.000.000,00**	**1.211.606.000,00**	**138,47**
Pendapatan Hibah	875.000.000,00	1.211.606.000,00	138,47
BELANJA	**3.958.669.432.277,00**	**3.707.934.255.582,00**	**93,67**
BELANJA OPERASI & MODAL	**3.370.591.459.303,00**	**3.129.058.316.132,00**	**92,83**
Dinas Pendidikan	**1.194.843.246.370,00**	**1.138.893.452.345,00**	**95,32**
UPTD Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Dikda)	497.460.419,00	481.209.777,00	96,73
Cabang Dinas Siau Tagulandang Biaro (DIKDA)	203.711.520,00	182.564.000,00	89,62
Cabang Dinas Tomohon - Minahasa (DIKDA)	166.814.125,00	166.116.200,00	99,58
Cabang Dinas Minahasa Utara Dan Bitung (DIKDA)	165.670.831,00	164.204.150,00	99,11
Cabang Dinas Minahasa Selatan - Minahasa Tenggara (DIKDA)	173.334.484,00	160.039.780,00	92,33
Cabang Dinas Bolaang Mongondow (DIKDA)	216.127.938,00	212.793.726,00	98,46
Cabang Dinas Sangihe (DIKDA)	223.889.731,00	218.560.400,00	97,63
Cabang Dinas Talaud (DIKDA)	229.549.340,00	228.664.790,00	99,62
Cabang Dinas Bolaang Mongondow Selatan (DIKDA)	192.151.419,00	191.691.971,00	99,76
Cabang Dinas Bolaang Mongondow Utara (DIKDA)	207.025.860,00	205.795.750,00	99,41
Cabang Dinas Bolaang Mongondow Timur Dan Kotamobagu (DIKDA)	189.099.492,00	185.488.224,00	98,09
Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Kalasey (DIKDA)	5.253.895.000,00	5.082.798.826,00	96,74
Dinas Kesehatan	**237.104.584.109,00**	**221.670.072.796,00**	**93,49**
Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)	1.429.295.146,00	1.320.840.782,00	92,41
UPTD Rumah Sakit Mata Masyarakat	63.452.867.332,00	52.632.032.906,00	82,95
UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan	36.443.867.099,00	35.437.513.874,00	97,24
UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof.dr. V. L. Ratumbuysang	32.742.748.985,00	26.838.060.052,00	81,97
UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Type B	90.672.564.402,00	84.551.840.539,00	93,25
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	15.305.323.550,00	13.808.279.717,00	90,21
UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung	55.077.012.314,00	53.443.546.711,00	97,03
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**272.873.720.559,00**	**259.040.685.095,00**	**94,93**
UPTD Wilayah I Manado, Minahasa, Minut, Mitra, Minsel, Bitung Dan Tomohon (PU)	1.648.410.449,00	1.618.117.618,00	98,16
UPTD Wilayah II Bolmong, Bolmut, Boltim dan Kotamobagu (PU)	1.072.107.813,00	967.315.801,00	90,23
UPTD Wilayah III Sitaro dan Sangihe (PU)	464.584.347,00	463.289.300,00	99,72

Uraian	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi 2024	%
UPTD Balai Peralatan dan Pengujian (Pu)	808.046.466,00	772.835.555,00	95,64
UPTD Air Minum (PU)	204.439.000,00	197.229.800,00	96,47
UPTD Wilayah IV Talaud (PU)	537.876.421,00	536.606.409,00	99,76
UPTD Balai Bina Teknik (PU)	723.218.218,00	704.793.133,00	97,45
UPTD Persampahan (PU)	215.216.548,00	211.745.617,00	98,39
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	**75.811.926.693,00**	**62.817.876.185,00**	**82,86**
Satuan Polisi Pamong Praja	**31.148.986.527,00**	**28.216.192.007,00**	**90,58**
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**11.597.766.361,00**	**10.034.964.814,00**	**86,52**
Dinas Sosial	**19.225.162.706,00**	**17.978.491.083,00**	**93,52**
UPTD Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar "Senja Cerah"	1.240.524.980,00	1.207.344.526,00	97,33
UPTD Balai Penyantunan Sosial Anak dan Remaja Terlantar "Maka'aruyen"	579.145.438,00	536.753.246,00	92,68
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**30.589.421.027,00**	**28.836.120.106,00**	**94,27**
UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	1.109.883.107,00	883.792.276,00	79,63
UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja	753.665.582,00	591.258.983,00	78,45
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	**10.186.139.600,00**	**9.499.614.713,00**	**93,26**
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	854.365.837,00	850.591.766,00	99,56
Dinas Pangan Daerah	**12.462.600.385,00**	**11.168.183.675,00**	**89,77**
UPTD Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan Daerah	165.730.696,00	158.327.075,00	95,53
Dinas Lingkungan Hidup Daerah	**9.816.257.902,00**	**8.987.424.879,00**	**91,56**
Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah	**6.553.790.861,00**	**6.125.707.883,00**	**93,47**
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**29.944.048.502,00**	**29.352.096.576,00**	**98,02**
Dinas Perhubungan Daerah	**16.055.579.083,00**	**14.802.258.940,00**	**92,19**
UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.002.889.522,00	966.226.310,00	96,34
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah	**46.001.581.538,00**	**45.347.981.479,00**	**98,58**
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	13.057.842.237,00	11.466.088.772,00	87,81
UPTD Balai Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi dan UKM	555.658.990,00	554.395.589,00	99,77
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**12.883.084.112,00**	**11.314.163.121,00**	**87,82**
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**43.131.023.022,00**	**42.075.249.020,00**	**97,55**
Dinas kebudayaan Daerah	**9.373.178.417,00**	**8.643.636.962,00**	**92,22**
UPTD Taman Budaya dan Museum	265.532.352,00	257.946.989,00	97,14
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	**9.345.788.768,00**	**8.528.347.719,00**	**91,25**
Dinas Kelautan dan Perikanan	**50.324.500.314,00**	**47.308.292.381,00**	**94,01**
UPTD Balai Perbenihan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan (DKP)	200.299.951,00	199.501.193,00	99,60
UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa (DKP)	176.474.411,00	161.865.000,00	91,72
UPTD Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung (DKP)	188.610.113,00	186.966.455,00	99,13
UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah I (Sangihe, Sitaro, Talaud) (DKP)	159.366.778,00	156.561.250,00	98,24
UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah II (Mitra) (DKP)	156.257.139,00	153.102.740,00	97,98
UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah III (Bitung, Minut, Minahasa, Minsel dan Tomohon) (DKP)	178.235.827,00	171.529.000,00	96,24
UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah IV (Bolmong, Kotamobagu, Bolmut, Bolsel, Boltim) (DKP)	152.827.800,00	152.817.300,00	99,99
Dinas Pariwisata	**15.820.695.726,00**	**14.579.331.134,00**	**92,15**
Dinas Pertanian dan Peternakan	**54.891.668.696,00**	**45.757.822.532,00**	**83,36**
UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distanak)	317.618.186,00	275.852.126,00	86,85

Uraian	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi 2024	%
UPTD Balai Perlindungan Dan Pengujian Mutu Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Distanak)	294.400.500,00	315.162.230,00	107,05
UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian (Distanak)	298.735.880,00	284.417.824,00	95,85
UPTD Balai Pengembangan Bibit Ternak dan Benih Pertanianprovsulut (Distanak)	348.497.262,00	344.244.088,00	98,78
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Distanak)	306.214.440,00	305.705.892,00	99,83
Dinas Perkebunan	**18.970.751.775,00**	**16.986.651.875,00**	**89,54**
UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan	426.188.862,00	415.584.959,00	97,51
UPTD Balai Pengujian Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan	491.485.250,00	465.762.712,00	94,77
Dinas Kehutanan Daerah	**48.450.877.406,00**	**46.195.185.670,00**	**95,34**
UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam (Dishut)	242.865.989,00	239.903.340,00	98,78
UPTD Model Unit IV Poigar (Poigar Bolmong dan Poigar Minahasa) (Dishut)	232.240.914,00	231.420.139,00	99,65
UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Tumpa HV Worang (Dishut)	246.019.534,00	244.502.500,00	99,38
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit I Bolmong dan Bolmut (Dishut)	224.991.880,00	224.339.049,00	99,71
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II Wilayah Boltim Dan Bolsel (Dishut)	231.399.160,00	231.306.300,00	99,96
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III Sangihe, Talaud dan Sitaro (Dishut)	230.059.810,00	227.244.650,00	98,78
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit V (Minahasa- Mitra- Minsel dan Tomohon) (Dishut)	235.202.450,00	235.099.200,00	99,96
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Wilayah Manado-Minut-Bitung (Dishut)	257.318.371,00	252.408.200,00	98,09
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	**12.827.970.317,00**	**11.535.335.677,00**	**89,92**
UPTD Balai Pengujian dan Peralatan Pertambangan	359.745.091,00	304.781.846,00	84,72
Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Mitra, Minsel, dan Tomohon)	209.799.912,00	208.740.568,00	99,50
Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut dan Bitung)	212.620.181,00	182.553.888,00	85,86
Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmut, Bolsel dan Kotamobagu)	253.664.810,00	214.790.976,00	84,68
Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud dan Sitaro)	270.890.040,00	259.136.962,00	95,66
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**25.273.079.414,00**	**21.749.436.657,00**	**82,78**
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	432.005.852,00	393.608.912,00	91,11
Sekretariat Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.450.792.361,00	1.311.122.203,00	90,37
Biro Hukum	3.330.725.722,00	3.128.362.522,00	93,92
Biro Kesejahteraan Rakyat	22.843.376.144,00	17.935.613.552,00	78,52
Biro Perekonomian	1.462.357.591,00	1.394.709.306,00	95,37
Biro Administrasi Pembangunan	1.307.528.150,00	1.228.843.069,00	93,98
Biro Organisasi	2.224.486.249,00	1.974.191.880,00	88,75
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4.667.158.926,00	4.224.579.758,00	90,52
Biro Umum	154.683.622.729,00	145.607.552.977,00	94,13
Biro Administrasi Pimpinan	14.007.383.166,00	12.959.309.089,00	92,52
Inspektorat	37.075.402.304,00	34.501.752.451,00	93,06
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**17.835.318.158,00**	**16.993.659.465,00**	**95,28**
Badan Pendapatan Daerah	**63.519.746.561,00**	**57.903.674.890,00**	**91,16**
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Manado	2.321.470.805,00	1.870.848.186,00	80,59
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Minahasa	1.126.121.707,00	831.495.874,00	73,84
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bitung	970.867.810,00	851.541.166,00	87,70

Uraian	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi 2024	%
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Sangihe, Talaud Dan Sitaro	1.227.621.767,00	1.059.520.953,00	86,31
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Kotamobagu Dan Bolsel	1.315.480.959,00	1.183.132.661,00	89,94
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Minahasa Selatan	1.095.580.440,00	972.340.520,00	88,75
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Tomohon	891.477.942,00	666.948.050,00	74,81
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Minahasa Utara	1.096.604.703,00	932.228.165,00	85,01
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Minahasa Tenggara	690.113.052,00	646.273.430,00	93,65
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bolmong, Bolmut, Dan Boltim	1.342.514.847,00	1.126.571.106,00	83,91
Badan Keuangan dan Aset Daerah	**67.184.679.825,00**	**41.189.958.407,00**	**61,31**
Badan Kepegawaian Daerah	**24.563.434.607,00**	**22.620.300.770,00**	**92,09**
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	**19.261.806.276,00**	**17.338.173.265,00**	**90,01**
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	**6.439.290.796,00**	**5.376.692.012,00**	**83,50**
Sekretariat DPRD	**99.778.217.000,00**	**89.206.926.165,00**	**89,41**
Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Utara	**10.685.006.030,00**	**10.299.306.933,00**	**96,39**
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	**6.847.752.222,00**	**6.034.113.273,00**	**88,12**
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**157.404.326.921,00**	**154.730.354.509,00**	**98,30**
BELANJA TIDAK TERDUGA	**9.508.656.099,00**	**450.377.558,00**	**4,74**
TRANSFER	**578.569.316.876,00**	**578.425.561.892,00**	**99,98**
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	**578.569.316.876,00**	**578.425.561.892,00**	**99,98**
Bagi Hasil Pajak	578.569.316.876,00	578.425.561.892,00	99,99
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	**7.170.396.319,00**	**(54.095.662.182,21)**	**(754,43)**
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN DAERAH	**253.121.347.253,00**	**253.119.165.434,89**	**100,00**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	253.121.347.253,00	253.119.165.434,89	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN DAERAH	**260.291.743.572,00**	**136.790.020.220,00**	**52,55**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Pokok Utang	230.291.743.572,00	106.790.020.220,00	46,37
PEMBIAYAAN NETTO	**(7.170.396.319,00)**	**116.329.145.214,89**	**(1.622,35)**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**62.233.493.032,68**	**0,00**

Untuk ikhtisar pencapaian kinerja berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dan tujuan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2004, secara rinci dijelaskan dan dapat dilihat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Dalam konteks pemerintahan daerah, entitas akuntansi berfungsi sebagai dasar bagi pelaporan pemerintah daerah. Setiap unit pemerintahan daerah harus dianggap sebagai entitas akuntansi yang terpisah dengan tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangannya sendiri. Dengan demikian, pelaporan pemerintah daerah tidak hanya mencerminkan aktivitas finansial tetapi juga menunjukkan bagaimana sumber daya publik dikelola. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Tujuan utama dari entitas akuntansi adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan kepada para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan masyarakat umum. Informasi ini biasanya disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Entitas akuntansi harus mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) atau standar internasional (IFRS) tergantung pada yurisdiksi dan jenis entitas tersebut.

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah harus mampu memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat agar mereka dapat menilai kinerja pemerintahan dalam mengelola anggaran serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memenuhi tanggung jawab fidusia. Yang merupakan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, terdiri dari;

a. Pemerintah pusat;
b. Pemerintah daerah;
c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; dan
d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan Perundang-undangan, satuan organisasi wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas, dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merupakan entitas pelaporan serta seluruh SKPD adalah entitas akuntansi yang menurut peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan SKPD. Sedangkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merupakan gabungan (konsolidasi) dari seluruh laporan keuangan SKPD.

Entitas akuntansi adalah organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan sedangkan pelaporan pemerintah daerah adalah proses penyampaian informasi

keuangan oleh pemerintah lokal kepada publik. Keduanya saling terkait dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

4.2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi adalah prinsip yang menentukan kapan dan bagaimana transaksi keuangan diakui dalam laporan keuangan. Dalam konteks pemerintah daerah, pemilihan basis akuntansi sangat penting karena mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Dengan demikian, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Penyusunan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan asumsi bahwa;

a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan;
b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan; dan
c. Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang, berdasarkan asumsi keterukuran dalam satuan mata uang.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 tahun 2010). Namun demikian dalam penyajiannya berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka memperbandingkan antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan Perda APBD/Perubahan APBD. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan *basis*

akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam Laporan Operasional serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas dan untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan LO, beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Penggunaan basis akrual dalam laporan pemerintah daerah memberikan beberapa manfaat;

a. Memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai posisi keuangan;
b. Mempermudah pengendalian defisit anggaran; dan
c. Meningkatkan efisiensi dalam evaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan.

Kebijakan akuntansi lainnya yang diterapkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tertuang pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2023 mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari kebijakan akutansi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengambil keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sistem akuntansi pemerintah daerah harus memenuhi standar akuntansi yang ditetapkan, termasuk menggunakan basis akrual dalam pencatatan transaksi keuangan, menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dan melakukan rekonsiliasi antara catatan akuntansi dan laporan keuangan secara berkala. Bagan akun standar harus disusun untuk memudahkan pengelompokan dan pencatatan transaksi, meliputi klasifikasi akun berdasarkan jenis pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas, penentuan kode akun yang jelas dan konsisten untuk setiap kategori transaksi.

Audit internal maupun eksternal perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi serta efektivitas sistem pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara berkala oleh auditor independen untuk memberikan penilaian objektif terhadap laporan keuangan. Hasil audit harus digunakan sebagai dasar untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan di masa mendatang dan diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara dapat berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, basis akuntansi, peraturan dan kebijakan pada laporan pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan benar dan transparan, sehingga mendukung pertanggungjawaban kepada publik serta pengelolaan sumber daya negara yang lebih baik. Implementasinya diharapkan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah secara holistik.

4.3. Basis Pengukuran

Basis pengukuran pada laporan pemerintah daerah merujuk pada metode yang digunakan untuk menentukan nilai dari aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, basis pengukuran sangat penting karena mempengaruhi bagaimana informasi keuangan disajikan dan dipahami

oleh pengguna laporan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (*Historical Cost*) tanpa memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam nilai mata uang.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Ketika tidak tedapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Pemilihan basis pengukuran yang tepat sangat penting bagi pemerintah daerah karena;

a. Transparansi Keuangan: Memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya dari aset dan kewajiban;
b. Pengambilan Keputusan: Memberikan informasi yang diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang informasional; dan
c. Akuntabilitas: Meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya publik.

Dengan demikian, pemahaman tentang basis pengukuran dalam laporan pemerintah daerah adalah kunci untuk memastikan bahwa informasi keuangan disajikan dengan cara yang jelas dan dapat dipercaya bagi semua pihak terkait.

4.4. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan dengan Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh suatu entitas pemerintah harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). PSAP merupakan pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Dalam menjawab pertanyaan mengenai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan PSAP, kita perlu menganalisis beberapa aspek penting.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah harus sesuai dengan PSAP yang diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No.77 Tahun 2020, dan pedoman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencakup prinsip-prinsip dan prosedur yang digunakan oleh entitas untuk menyusun laporan keuangan. Ini termasuk pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan liabilitas, serta penyajian informasi dalam laporan keuangan. Kebijakan ini harus jelas dan terdokumentasi agar dapat diikuti secara konsisten. Untuk menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan PSAP, berikut adalah beberapa kriteria yang perlu diperhatikan;

a. Pengakuan Pendapatan: Kebijakan akuntansi harus mengikuti prinsip pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAP, yaitu pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi atau ketika hak atas pendapatan tersebut telah diperoleh;
b. Pengukuran Aset dan Liabilitas: Penilaian aset dan liabilitas harus dilakukan berdasarkan nilai wajar atau biaya perolehan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan entitas;

c. Penyajian Laporan Keuangan: Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan format dan struktur yang ditetapkan dalam PSAP, termasuk laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas; dan
d. Pengungkapan Informasi: Kebijakan akuntansi juga harus mencakup pengungkapan informasi tambahan yang diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disertai lampiran-lampiran berbentuk daftar sebagai referensi terhadap pos-pos laporan keuangan utama maupun Catatan atas Laporan Keuangan.

Kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah. Kebijakan tersebut harus memenuhi semua kriteria pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan liabilitas, penyajian laporan keuangan, serta pengungkapan informasi sesuai dengan standar PSAP agar dapat memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan.

4.5. Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan LRA menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Lampiran Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan. Pengakuan atas pendapatan LRA dan belanja secara konsisten dilaksanakan atas dasar kas (*Cash Basis*) dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima untuk tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara tersanding. Selanjutnya, penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan Perundang-undangan.

a. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Semua penerimaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Yang termasuk Pendapatan-LRA Tidak Melalui RKUD adalah Pendapatan Dana Kapitasi dan Pendapatan Dana BOS

(Pendapatan-LRA Dana BOS untuk Tahun anggaran 2017 keatas).

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pengakuan Pendapatan LRA sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat;

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dariBUD;
3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.;
4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah;

1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan atau dari entitas lain (pemerintah/pemerintah daerah lain) yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah, Dana Kapitasi JKN dan Dana BLUD).

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah –LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara FKTP, Bendahara BOS maupun oleh BUD.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah –LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Pendapatan Transfer;

Pendapatan Transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005).

Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD. Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah– LRA merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

a) Pendapatan Hibah – LRA,
b) Dana Darurat – LRA,
c) Pendaptan Lainnya – LRA.

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diteimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Belanja

Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Semua pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang termasuk pengeluaran yang tidak melalui RKUD adalah belanja Dana Kapitasi dan Belanja Dana BOS. Belanja terdiri dari:

1) Belanja operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Pengakuan Belanja Operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD, bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bendahara FKTP dan Bendahara BOS berdasarkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil,

Pengukuran Belanja Operasi dilakukan dengan azaz bruto yaitu sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan Belanja Operas Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Belanja modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Belanja Modal merupakan akun yang akan dikelola oleh unit SKPD.

Pengakuan Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan pengeluaran kas tidak melalui RKUD berdasarkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) untuk Dana Kapitasi dan Dana BOS.

Pengukuran Belanja Modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyajian dan Pengungkapan Belanja Modal disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3) Belanja tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pengakuan Belanja Tidak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Tidak Terduga berdasarkan nilai yang diterima dalam bukti pengeluaran atas belanja tidak terduga atau berdasarkan jumlah nilai dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyajian dan Pengungkapan Belanja Tidak Terduga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) Belanja transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah

desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah. Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas bantuan keuangan antar daerah Provinsi/kota, bantuan keuangan Provinsi ke daerah provinsinya atau daerah provinsi lainnya dan bantuan keuangan Provinsi kepada desa

Pengakuan Belanja Transfer hanya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD. Belanja Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah dinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja Transfer ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Belanja Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan Belanja Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sedangkan transfer keluar merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Utara. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan dan transfer keluar dicatat sebesar

pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Transfer pemerintah pusat, terdiri dari:

1) Dana Alokasi Umum : Ini adalah bagian dari dana transfer yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antara daerah. DAU digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan dasar dan operasional.

2) Dana Bagi Hasil : Dana ini dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kinerja tertentu. DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daerah nonpenghasil. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH 3(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

3) Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) : Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dana ini ditujukan untuk mendanai proyek-proyek tertentu yang bersifat strategis dan prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program lainnya yang mendukung pembangunan daerah.

4) Insentif Fiskal: Ini adalah dana yang diberikan kepada daerah sebagai insentif untuk mendorong pencapaian program-program prioritas nasional, seperti pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting.

5) Dana Otonomi Khusus: Dana ini dialokasikan untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki status otonomi khusus, seperti Papua dan Aceh, guna mendukung pembangunan di wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal.

6) Dana Desa: Merupakan alokasi dana yang diperuntukkan bagi desa-desa untuk meningkatkan pembangunan desa melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

d. Surplus atau Defisit

Surplus atau defisit pada laporan keuangan pemerintah daerah adalah istilah yang merujuk pada selisih antara pendapatan dan belanja dalam periode tertentu. Dalam konteks laporan keuangan, surplus menunjukkan bahwa pendapatan melebihi belanja, sedangkan defisit menunjukkan bahwa belanja melebihi pendapatan. Dalam laporan realisasi anggaran (LRA), surplus atau defisit dihitung sebagai selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

Memahami konsep surplus dan defisit sangat penting bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah karena dapat mempengaruhi keputusan kebijakan publik, alokasi sumber daya, serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial di masa depan. Pemerintah daerah yang konsisten mengalami surplus dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi dalam infrastruktur atau program sosial lainnya, sedangkan yang mengalami defisit mungkin perlu melakukan penyesuaian anggaran atau mencari sumber pendanaan tambahan. Secara keseluruhan, analisis terhadap surplus dan defisit dalam laporan keuangan pemerintah daerah memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan suatu daerah serta efektivitas pengelolaan anggaran oleh pemerintah setempat.

e. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang bersumber dari SILPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari trnasksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian Pinjaman Daerah dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA merupakan istilah yang digunakan dalam akuntansi pemerintah untuk menggambarkan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama satu periode pelaporan. SiLPA merupakan singkatan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, sedangkan SiKPA adalah Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran. Keduanya mencerminkan hasil akhir dari perhitungan anggaran yang menunjukkan apakah ada surplus (lebih) atau defisit (kurang) dalam pembiayaan anggaran.

SiLPA/SiKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Ada pun komponen yang diperhitungkan dalam Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), antara lain;

1) Realisasi Pendapatan: Total pendapatan yang diterima oleh pemerintah selama periode tertentu;
2) Realisasi Belanja: Total belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah selama periode tersebut; dan
3) Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan: Ini mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan, seperti pinjaman atau investasi.

Pentingnya SiLPA/SiKPA adalah sebagai indikator kinerja keuangan SiLPA/SiKPA menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja keuangan mereka. Surplus menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mengelola pendapatannya lebih baik daripada pengeluarannya, sedangkan defisit menunjukkan sebaliknya. Informasi mengenai SiLPA/SiKPA membantu debagai dasar pengambil keputusan dalam merencanakan anggaran di masa depan dan menentukan kebijakan fiskal yang tepat.

Dengan adanya laporan mengenai SiLPA/SiKPA, masyarakat dapat melihat bagaimana pemerintah mengelola sumber daya keuangannya, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam kesimpulannya, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah alat penting dalam akuntansi pemerintahan yang mencerminkan selisih antara pendapatan dan belanja serta

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja keuangan tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan anggaran di masa depan.

4.6. Kebijakan Akuntansi atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan. Dalam Permendagi Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

a. Surplus/Defisit - LRA
   Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
b. Pembiayaan Netto
   Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
c. SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
   Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
d. Perubahan SAL
   Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL) diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

4.7. Kebijakan Akuntansi atas Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2024. Klasifikasi aset meliputi aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. (PSAP 03 Paragraf 8). Setara kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Setara kas terdiri dari:

1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Meliputi:

1) Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan;
2) Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran; dan
3) Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah; dan
4) Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat (IPSAP 02).

Pengukuran Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. (PSAP 01 paragraf 69 dan IPSAP 01).

Terkait Pengakuan Kas dan Setara Kas dengan pengakuan aset dalam paragraf 67 dan 68 PSAP 01, secara umum pengakuan aset dilakukan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal juga pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Atas dasar tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas ada hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

1) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
2) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

Kas terdiri dari kas:

1) di kas daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah. (PSAP 03 Paragraf 8).

2) Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (IPSAP 02).

3) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (IPSAP 02).

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5) Kas di Bendahara FKTP/Kapitasi adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh Bendahara Kapitasi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan kepada kepala FKTP. (Perpres Nomor 32 Tahun 2014).

6) Kas di Bendahara BOS adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh Bendahara Dana BOS masing-masing satuan pendidikan negeri/sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS.

7) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 paragraf 6 dan 10).

Pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving*

deposits) sampai 12 bulan; Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat yang biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah sewaktu-waktu namun dapat dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Pengukuran investasi jangka pendek untuk deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

2) Surat Utang Negara (SUN) adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya yang terdiri dari: Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pengukuran investasi jangka pendek untuk SUN dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

3) Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Pengukuran investasi jangka pendek untuk SPN dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga. Pengukuran investasi jangka pendek untuk SBI dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek, terdiri dari:

1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek melalui penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah; Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah; Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada); Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan

penyebab penurunan tersebut; Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek dapat dilihat berdasarkan jenis investasi jangka pendek, antara lain:

1) Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
2) Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

c. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Sesuai dengan PMK No.238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi:

1) Piutang pendapatan, dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari dibedakan menjadi: Piutang berdasarkan peraturan Perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah; Piutang berdasarkan perikatan perjanjian; dan Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan.
2) Piutang Lainnya. Piutang berdasarkan peraturan Perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang – PP No. 24 Tahun 2005). Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan Perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain

maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan antara lain meliputi: Piutang Transfer Pemerintah Pusat seperti Piutang Bagi Hasil, Piutang DAU, Piutang DAK; Piutang Transfer Pemerintah Pusat-lainnya seperti Piutang Dana Otonomi Khusus, Piutang Dana Penyesuaian, dan Piutang Dana Darurat.

Piutang Lainnya dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, yang dibedakan menjadi Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dan Piutang berdasarkan peristiwa lainnya. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian Daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan. Uang Muka adalah suatu pengeluaran kas kepada pihak lain yang menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Uang muka ini misalnya adalah uang muka pengadaan barang/jasa. Panjar Kegiatan adalah suatu pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagai pada awal pelaksanaan suatu kegiatan dan menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah dengan penyelesaian kegiatan yang dilaksanakan.

Pengukuran Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Unsur utama piutang karena ketentuan Perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas Daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1) Untuk metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
    a) Dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
    b) Dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding; dan
    c) dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum

ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.

2) Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
3) Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:
   a) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
   b) Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
   c) Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
   d) Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
   e) Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar pemerintah daerah.

Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut;

1) Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
2) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah; dan
3) Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran Piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan;

1) Mencatatnya sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
2) Mencatatnya sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

Pengakuan Piutang. Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundangundangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang harus dipenuhi kriteria, sebagai berikut:

1) Telah diterbitkan surat ketetapan;
2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2) Jumlah piutang dapat diukur;
3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

1) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.

2) Piutang Dana Alokasi Umum, apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

3) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.

4) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak pemerintah daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah.

5) Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang

pemerintah daerah.

Penyajian dan Pengungkapan Piutang yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
3) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4) Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

1) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau;
2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

1) Pengakuan Uang Muka Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan.
2) Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

Penyajian dan Pengungkapan Piutang dimana hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
3) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4) Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

d. Piutang Tidak Tertagih

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara Metode Penghapusan Langsung dan Metode Penyisihan. Metode Penghapusan Langsung adalah

Penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar. Metode Penyisihan adalah Penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas Piutang Lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2) Kualitas Piutang Kurang Lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3) Kualitas Piutang Diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
4) Kualitas Piutang Macet adalah piutang yang:
   a) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
   b) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*), Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

No	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau	Umur piutang 1 s/d 2 tahun; dan/atau	Umur piutang 3 s/d 5 tahun; dan/atau	Umur piutang Diatas 5 tahun; dan/atau
2	Wajib Pajak Menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau	Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau	Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau	Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3	Wajib Pajak kooperatif; dan/atau	Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau	Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau	Wajib Pajak bangkrut/me ninggal dunia; dan/atau
4	Wajib Pajak likuid; dan/atau	Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding	Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas	Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure)*
5	Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding			

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut;

Tabel 4.2 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah

No	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau	Umur piutang 1 s/d 2 tahun; dan/atau	Umur piutang 3 s/d 5 tahun; dan/atau	Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
2	Wajib Pajak kooperatif; dan/atau	Wajib Pajak kurang kooperatif dalam	Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau	Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3	Wajib Pajak likuid; dan/atau	Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding	Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas	Wajib Pajak bangkrut /meninggal dunia; dan/atau

No	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4	Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding			Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure)*

Piutang Retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 3 bulan/tahun;
2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang >3 sampai dengan 6 bulan/tahun;
3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang >6 sampai dengan 12 bulan/tahun; dan
4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan/tahun.

Piutang selain pajak dan retribusi:

1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 3 bulan/tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 6 bulan/tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 12 bulan/tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 4.3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang Bukan Pajak

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1) Kualitas Lancar sebesar 0%;
2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3) Kualitas Diragukan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1) Kualitas Lancar sebesar 0%;
2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3) Kualitas Diragukan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1) 0,5% dari Piutang dengan kualitas lancar;
2) 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3) 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas Piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa Piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

1) 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
2) 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
3) 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
4) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir;
5) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik;
6) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) atas kendaraan bermotor; dan
7) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan

kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan.

Agunan lainnya dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Bendahara Umum Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Daerah. Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

1) 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
2) 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya;
3) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
4) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan.

Barang sitaan lainnya selain tersebut diatas tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Nilai agunan atau barang sitaan bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal sumber nilai agunan atau barang sitaan tidak diperoleh, agunan atau barang sitaan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih apabila tidak memenuhi ketentuan.

Dalam keadaan tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap Debitor atas Piutang Tidak Tertagih dengan cara melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap Debitor dalam hal:

1) Debitor mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
2) Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.

Kualitas Piutang setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah:

1) Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
2) Tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.

Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitor, Kualitas Piutang yang telah diubah dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat

Restrukturisasi.

Penyajian dan Pengungkapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapusan Piutang oleh Bendahara Umum Daerah dapat dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet. Penghapusan Piutang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan. Dalam hal, terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah Piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan. Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah Piutang dilakukan apabila:

1) Surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
2) Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

e. Beban Dibayar Dimuka

Definisi Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

f. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahlan kepada masyarakat dalam

rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan diakui sebagai Beban untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan dan persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik *(periodic method)* berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaannya sulit diindetifikasi.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis dan persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, perputarannya lambat, jenis persediaan yang sifatnya *continues,* dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa obat-obatan, suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.

Metode pengukuran persediaan yang dipilih adalah Metode Periodik. Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi. Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terkahir kali.

Metode sistematis FIFO *(First In First Out)* adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan. Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dari harga pembeliaan terakhir. Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset non

lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, Dana cadangan , dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain;

1) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
2) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

g. Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

h. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen berupa penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan

yang bukan perseroan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah terdiri atas pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Kriteria lainnya memiliki nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*). Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

1) Deviden Tunai;
2) Deviden Saham; dan
3) Bagian Laba.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi(Lain-lain PAD yang Sah).
2) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicacat sebagai pendapatan hasil investasi(dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah(dalam jurnal berbasis akrual).

Pengakuan untuk hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah. Pengakuan untuk hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang sesuai dengan sifat penanamannya,

pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2) Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk Investasi Permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dinilai sebagai berikut:

1) Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan atau metode biaya.
2) Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan (metode ekuitas).
3) Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
4) Pengelola Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Sekretariat Daerah c.q. Biro Ekonomi dan hasil pengelolaannya berupa laporan disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara, Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk Investasi Nonpermanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut

diserahkan kepada pihak ketiga. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa:

1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepad akelompok masyarakat;
4) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

i. Investasi Permanen Lainnya (Properti Investasi)

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyedtaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti Investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini untuk membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap). Properti Investasi dapat berupa ttanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek.

Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai

Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi, bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Aset yang bukan merupakan Properti Investasi adalah properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pernbangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang

diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali.

Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Properti yang digunakan sendiri (PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di rnasa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual

Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan dan properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;

Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah daerah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan oprasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, maka aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Apabila pemerintah yang memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, maka apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Dalam hal konsolidasi, entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi), maka properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil.

Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar

kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi, biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut. Kriteria kedua pengakuan properti investasi telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Sebagai contoh, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan.

Pengukuran properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui

sebagai beban bunga selama periode kredit.Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan terserbut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat asset yang diserahkan. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

1) Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atau aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
2) Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
3) Selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk asset tersebut tidak signifikan. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Properti Investasi dinilai dengan metode

biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanyajika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi ftsik properti investasi tersebut. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif, entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

1) Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
2) Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
3) Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

1) Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
2) Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
3) Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadiproperti investasi;
4) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi. Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual.

Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung- gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi.

Pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.

Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat

secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Penyajian Properti Investasi sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut dimasa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Properti Investasi diungkapkan sebagai berikut:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
   a) Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelahperolehan yang diakui sebagai aset;
   b) Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
   c) Pelepasan;
   d) Penyusutan;
   e) Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
   f) Perubahan lain.
6) Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
   a) Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
   b) Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;

c) Tanggal efektif penilaian kembali;
d) Nilai tercatat sebelum revaluasi;
e) Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
f) Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

7) Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
8) Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri. dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
9) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari. Property investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
10) Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen. sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari. penilai;
11) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
    a) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
    b) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari. properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama peri.ode tersebut;
    c) Beban operasi langsung (mencaku.p perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
    d) Kewajiban kontraktual untuk membeli, mengembangkan properti investasi atau pemeliharaan atau peningkatan; membangun atau untuk perbaikan,
    e) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

j. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pengakuan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan denganadanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pengukuran aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya

perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran jenis aset tetap dilihat dari Tabel komponen Biaya Perolehan, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jenis Aset Tetap berdasarkan Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, perjalanan dinas, sertifikasi, pajak dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya perjalanan dinas serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, pajak, perjalanan dinas, pengawasan, perencanaan
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi, perjalanan dinas dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibedakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang

tertera pada dokumen bukti pendukung. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*). Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Definisi penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4). Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public dan jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. (PSAP 07 Paragraf 4).

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, mengetahui potensi Barang Milik Daerah (BMD) dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan dan memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Pengakuan Penyusutan Aset Tetap dilakukan melalui diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutansecara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
2) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
3) Berdasarkan perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Sulawesi Utara. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			**ASET TETAP**	
1	3	2		**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	6
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	6
1	3	2	34	Rambu-Rambu	10
1	3	2	35	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1	3	2	36	Peralatan Olah Raga	4
1	3	3		**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	4		**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
1	3	4	01	Jalan	10

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan, aset tetap yang diperoleh pada bulan tersebut, langsung disusutkan pada bulan yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.

Definisi kapitalisasi aset tetap pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan,reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Pengembangan tanah adalah

peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.

Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

Pengakuan Kapitalisasi Aset Tetap dimana suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
   a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
   b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
   c) bertambah volume, dan/atau
   d) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan(capitalization thresholds).

Pengukuran Kapitalisasi Aset Tetap, Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu asset harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut;

1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin; dan alat olah raga, yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2) Nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar;
3) Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
4) Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan jalan dan jembatan sama dengan atau melebihi dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap Pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan

pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya. Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin yang dapat dikapitalisasi berupa;

1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; dan
2) Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa;

1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
2) Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
3) Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai "Konstruksi Dalam Pengerjaan"

Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:

1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
2) Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi. Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan. Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Penyajian dan Pengungkapan Kapitalisasi Aset Tetap dimana pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) tersebut harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi). Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN/D. Penerapan Kebijakan Kapitalisasi berupa pengeluaran belanja modal pada SKPD dan/atau Unit Kerja yang dikapitalisasi adalah belanja untuk pembelian/pengadaan/ pembuatan/ pembangunan tanah, mesin dan peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya, termasuk belanja lainnya yang terkait dengan pembelian/ pengadaan/pembuatan/pembangunan aset sampai dengan asset dimaksud siap digunakan.

Penerapan kebijakan kapitalisasi dilakukan pengeluaran belanja rehabilitasi/ renovasi/ restorasi dapat dikategorikan sebagai belanja modal apabila mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki serta nilainya sama dengan dan/atau melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap. Pengeluaran belanja barang dan jasa pada SKPD dan/atau Unit Kerja yang dikapitalisasi adalah belanja yang berakibat pada:

1) memperoleh aset tetap hingga siap pakai;
2) meningkatkan kapasitas/efisiensi BMD; dan/atau
3) memperpanjang umur teknis BMD.

Penambahan umur masa manfaat aset tetap apabila dilakukan renovasi; restorasi maka disesuaikan dengan presentasi dari nilai buku dan penambahan umur masa manfaat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6 Penambahan Umur Masa Manfaat Bila Melakukan Renovasi

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP			
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 46%	2
		>46% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 46%	2
		>46% s.d 65%	4
Alat Angkutan		>0% s.d. 25%	1
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur		>0% s.d. 25%	1
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian		>0% s.d. 20%	1
Alat Pengolahan	Overhaul	>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>25% s.d 50%	1
Alat Kantor	Overhaul	>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		>25% s.d 50%	1
Alat Studio	Overhaul	>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan		>0% s.d. 25%	0
Alat Kedokteran	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium		>0% s.d. 25%	2
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	6
Alat Persenjatan		>0% s.d. 25%	1
Senjata Api	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Komputer Unit		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Eksplorasi Topografi		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
Alat Pengeboran Mesin		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
Sumur		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Eksplorasi		>0% s.d. 25%	2
Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Deteksi		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Peraga		>0% s.d. 25%	2
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
Unit Peralatan Proses / Produksi		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu		>0% s.d. 25%	1
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga		>0% s.d. 25%	1
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
GEDUNG DAN BANGUNAN		> 15% s/d 30%	5
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 75%	15
		> 75%	25
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65%	25
Bangunan Menara	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65%	20
Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30 % s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 75%	25
Tugu Peringatan	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65%	25
Candi	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65%	25
Monumen/Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65%	20
Tugu Peringatan Lain	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65%	25
Tugu Tilik Kontrol Pasti	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65%	25
Jalan, Jaringan dan Jembatan		> 15% s/d 30%	2
Jalan	Renovasi	> 30% s/d 60%	3
		> 60%	5
Jembatan	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65%	25
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 65%	25
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65%	25
Bangunan Air Pengembang Rawa	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	8
		> 45% s/d 65%	10
		> 65%	15
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	Renovasi	> 15% s/d 30%	1
		> 30% s/d 45%	2
		> 45% s/d 65%	3
		> 65%	5
Bangunan Pengembangan Sumber Air	Renovasi	> 15% s/d 30%	6
		> 30% s/d 45%	8
		> 45% s/d 65%	10
		> 65%	15
Bangunan Air Bersih / Air Baku	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65%	20
Bangunan Air	Renovasi	> 15% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65%	20
Jaringan Gas	Renovasi	> 15% s/d 30%	2
		> 30% s/d 45%	7
		> 45% s/d 65%	10
		> 65%	15

Penentuan penambahan umur ekonomis/masa manfaat kapitalisasi aset tetap menggunakan Nilai Perolehan Terakhir, yaitu penambahan masa manfaat berdasarkan % biaya kapitalisasi dibandingkan dengan nilai perolehan akhir aset (nilai perolehan awal ditambah kapitalisasi sebelumnya). Kapitalisasi aset tetap ditahun yang sama maka hanya satu proses yang menambah umur ekonomis. Jika terdapat kapitalisasi aset tetap di tahun yang sama, penambahan masa manfaatnyanya sebesar nol atau menggunakan masa manfaat kapitalisasi sebelumnya. Batasan Maksimal umur ekonomis kapitalisasi aset tetap tidak dapat melebihi umur ekonomis awal. Masa manfaat kapitalisasi aset tetap tidak bisa melebihi batas maksimal umur ekonomis awal aset.

Jika penambahan masa manfaat menghasilkan masa manfaat yang melebihi umur masa manfaat asset, maka yang digunakan adalah masa manfaat awal. Batas Minimum Kapitalisasi Batas minimum belanja/ biaya kapitalisasi *(Capitalization thresholds)* dari rehabilitasi/ renovasi/ restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.7 Batasan Kapitalisasi dari rehabilitasi/ renovasi/ restorasi

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Peralatan dan Mesin		
- Alat-Alat Besar Darat	>= 50.000.000	Untuk Yang Sifatnya Pemeliharaan Berat dan pemasangan alat/ sparepart baru
- Alat-Alat Besar Apung	>= 25.000.000	Untuk Yang Sifatnya Pemeliharaan Berat dan pemasangan alat/ sparepart baru
- Alat-Alat Bantu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Angkutan Darat	>= 25.000.000	Untuk Yang Sifatnya Pemeliharaan

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Bermotor		Berat dan pemasangan alat/ sparepart baru
- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Bengkel Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Bengkel Tidak Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Ukur	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Pertanian		
- Alat Pengolahan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Kantor dan Rumah Tangga		
- Alat Kantor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Rumah Tangga termasuk meubelair	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Komputer	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Meja dan Kursi/ rapat pejabat	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Studio dan Komunikasi		
- Alat Studio	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Komunikasi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Kedokteran		
- Alat Kedokteran	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Kesehatan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Laboratorium		
- Unit Laboratorium	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Peraga/ Praktek Sekolah	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Laboratorium Hidrodinamika	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Persenjataan dan Keamanan		
- Senjata Api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Persenjataan non Senjata Api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Amunisi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Senjata Sinar	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Bangunan dan Gedung		
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 20.000.000	Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 20.000.000	Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Bangunan Menara	>= 20.000.000	Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
Monumen		
- Bangunan Bersejarah	>= 20.000.000	Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Tugu Peringatan	>= 20.000.000	Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Candi	>= 20.000.000	Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Taman (untuk Umum)	>= 20.000.000	Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Rambu-rambu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	-ada-	
Jalan/ jembatan, Jaringan, Irigasi		
- Jalan	>= 100.000.000	Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Jembatan	>= 100.000.000	Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Bangunan Air dan Irigasi	>= 100.000.000	Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Instalasi Air Minum	>= 50.000.000	Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Instalasi Air Kotor/ Limbah dan sejenisnya	>= 50.000.000	Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
- Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	>= 50.000.000	Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Instalasi Penangkal Petir	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Air minum dan sejenisnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Listrik dan Sejenisnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Telepon dan Sejenisnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Aset Lainnya		
- Alat Olah Raga Lainnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Buku	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Terbitan Berkala	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Barang Perpustakaan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Barang Bercorak Kebudayaan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Hewan (Ternak dan Peliharaan)	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Tanaman	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan atau Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi padau mumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan,dan penggunaan utama. Kontrak konstruksi dapat meliputi;

1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering; dan
4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi memiliki ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi;

1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

1) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
2) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan jika suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika;

1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antaralain:

1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi;

1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan
5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

Biaya-biaya yang dapat distribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi;

1) Asuransi;
2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi;

1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat forcemajeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan jika suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi;

1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
5) Retensi.

Definisi Konsesi Jasa atau Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi. Perjanjian di luar ruang lingkup Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa atau privatisasi).

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana;

1) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
2) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan asset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

1) Disediakan oleh mitra, yang;
   a) Dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
   b) Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra;
2) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang;
   a) Merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
   b) Merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Pengakuan dan Pengukuran dalam pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Kebijakan ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan terpenuhi. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan (untuk selama umur aset) sebesar nilai. wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraph. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud. Pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset. Setelah pengakuan ased atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok asset sebagaimana dinyatakan dalam PSAP yang

mengatur Akuntansi Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa terse but disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban Atas Perjanjian Konsesi Jasa pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 6 (- untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

Pengakuan kewajibanpada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

1) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model);
2) Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model);
3) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
4) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Skemas pemberian kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa adalah sebagai berikut:

1) Skema Kewajiban Keuangan
   a) Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra. sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 17 sebagai kewajiban keuangan.
   b) Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk

membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

2) Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf 17 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrument keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Pernyataan Standar ini.
3) Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
   a) Pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui;
   b) Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
   c) Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
4) Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud huruf d) poin b. dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud huruf d poin c. sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
5) Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diindentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra diafokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik.
6) Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra. untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga ataspenggunaan aset konsesi jasa. atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa. Saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan.

Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi

atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan.

Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesijasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban-pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

Membagi perjanjian apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban berdasarkan masing-masing skema.

Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi. Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan, berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran

Penyajian dan pengungkapan pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan. Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan:

1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
3) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari: hak untuk menggunakan aset yang ditentukan, hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa, nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa, opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa, ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*), ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap

aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan

4) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam PSAP lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai PSAP lain tersebut. Pengungkapan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

k. Dana cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Penggunaan Dana cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun angaran. Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah dan penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah. Pembentukan maupun peruntukan Dana cadangan akan diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan Dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke Dana cadangan

Pengukuran Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana cadangan . Pencairan Dana cadangan mengurangi Dana cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana cadangan menambah Dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana cadangan .

Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

l. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan Dana cadangan . Aset lainnya antara lain aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain. Aset

Lainnya terdiri dari:

1) Tagihan Jangka Panjang;

   Tagihan penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah.

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

   Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. Bangun, Kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.

   Bangun, Serah, Kelola – BSK (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

3) Aset Tidak Berwujud;

   Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

   Jenis Aset Tak Berwujud adalah:

   a) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
   b) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) Software. Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

e) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g) Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

Berdasarkan masa manfaat, Aset Tak Berwujud (ATB) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) yaitu Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yangdidasa.rkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaitu Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan review secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

4) Aset Lain-lain;
Aset Lain-lain seperti Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

5) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF).
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan dana transefer umum berupa DAU dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya yang dilaksanakan secara nontunai melalui fasilitas TDF. Adapun TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah

Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI).

Amortisasi Aset Lainnya akan dilakukan Amortisasi. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun "Beban Amortisasi" terhadap akun "Akumulasi Amortisasi". Amotisasi terhadap Aset Tidak Berwujud adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan mulai tahun berikutnya setelah tahun perolehannya. Rumus amortisasi adalah sebagai berikut;

1) Amotisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun; dan
2) Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Metode amotisasi yang digunakan adalah metode garis lurus, dilakukan setiap akhir periode dan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.8 Amortisasi Aset lainnya

No	Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
1	Software Komputer	4
2	*Franchise*	5
3	Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5
4	Lisensi	10
5	Hak cipta (*copyright*)	25
6	Hak Paten	20

Aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak boleh diamortisasi. Nilai aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tak berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

Pengungkapan amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi".

Pengakuan aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan, aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang. Aset Tak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalan aset lain-lain. Pengakuan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) diakui pada saat pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF.

Pengukuran aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak. Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus

dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan raba. Serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat distribusikan secara langsung adalah biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan dan biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan juga biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.
3) Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan. Pengukuran Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

Penyajian dan pengungkapan secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain masa manfaat dan metode amortisasi, nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud dan penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Amortisasi aset lainnya akan dilakukan Amortisasi. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun "Beban Amortisasi" terhadap akun "Akumulasi Amortisasi". Amotisasi terhadap Aset Tidak Berwujud adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan mulai tahun berikutnya setelah tahun perolehannya.

Rumus amortisasi adalah sebagai berikut:

1) Amotisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun
2) Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya. Pengukuran amortisasi aset lainnya pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Pengungkapan amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi"

m. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya dan kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek; dan Kewajiban Jangka Panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek lainnya.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat Kewajiban timbul. Dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Jaminan Kesehatan, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (KasNegara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, Bapertarum, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Pengakuan UUtang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*) adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*) sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*) adalah nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*) baik utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendekatas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

Definisi kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPD yang dipimpin Kepala SKPD. Akun ini menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

Pengungkapan kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya di SKPD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. (PSAP 09 paragraf 14). Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangkapendek (*payable on demand*). (PSAP 09 paragraf 17).

Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dimana nilai yang dicantumkan dineraca untuk bagian lancar utangjangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai

perjanjian.

Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

Definisi Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka dimana nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Definisi Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*). Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang Beban diakui pada saat beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang Beban ada nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan pengungkapan Utang Beban disajikan di Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampe dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan. Pengungkapan utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

n. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Meliputi Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri dan Utang jangka Panjang lainnya. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

1) Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;
2) Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;
3) Utang Dalam Negeri – obligasi;
4) Utang pemerintah pusat;
5) Utang pemerintah provinsi; dan
6) Utang pemerintah Provinsi/kota.

Pengakuan Utang Dalam Negeri sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut,atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengukuran Utang Dalam Negeri dimana jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang

disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman. Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Nilai tercatat (*carryingamount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Pengakuan Utang Luar Negeri sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Utang Luar Negeri sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk

pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola(BSK). Bangun, Serah, Kelola (BSK) merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan para pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya dimana Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya–kemitraan dengan pihak ketiga. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

o. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan koreksi ekuitas lainnya yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas

yang sebenarnya.

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran Ekuitas Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban. Penyajian dan Pengungkapan ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.8. Kebijakan Akuntansi atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Kebijakan Akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

a. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.
b. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
c. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukkannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
d. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
e. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

4.9. Kebijakan Akuntansi atas Laporan Operasional

Laporan Operasional meyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional menyediakan informasi :

a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan.
b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
c. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
d. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila

surplus operasional).

Kebijakan akuntansi terkait dengan Laporan Operasional (LO) bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

a. Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek, apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
b. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi terkait dengan beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang besangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa.

Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

Pengukuran Pendapatan – LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Definisi Pendapatan Asli Daerah – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan atas

Pendapatan Asli Daerah – LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

a. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
b. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah – LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah – LO dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
c. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah – LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

Pengukuran Pendapatan Pendapatan Asli Daerah – LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Transfer – LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Alokasi Pendapatan Transfer – LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak - LO, Dana Alokasi Umum - LO, Dana Alokasi Khusus – LO, Dana Otonomi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian – LO bagi pemerintah kota (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

Pengakuan Pendapatan Transfer – LO diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul yaitu bersamaan dengan terbitnya peraturan mengenai Alokasi Pendapatan Transfer. Pada saat Alokasi Pendapatan Transfer diterbitkan dan terjadi pengakuan Pendapatan Transfer – LO, jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pendapatan ini diakui dengan kondisi sebelum penerimaan kas. Oleh sebab itu saat pengakuan Pendapatan Transfer – LO akan menimbulkan akun Piutang Pendapatan Transfer – LO pada sisi debit. Pencairan atau penerimaan distribusi Pendapatan Transfer – LO secara periodik mengurangi jumlah Piutang Transfer – LO dan tidak akan menambah Pendapatan Transfer – LO. Pencairan ini diakui berdasarkan Nota Kredit yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah. Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di unit PPKD.

Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah Alokasi

Pendapatan Transfer.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO terdiri dari Pendapatan Hibah – LO, Dana Darurat – LO, dan Pendapatan Lainnya – LO.

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini menjadi hak pemerintah daerah. Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat perjanjian Hibah disetujui. Dana Darurat – LO terkait dengan sifatnya ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Pendapatan Lainnya – LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak pemerintah daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Definisi Pendapatan Non Operasional – LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi. Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari;

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO;
b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO; dan
c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO.

Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar telah diterima.

Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional– LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Definisi Pos Luar Biasa – LO adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pengakuan Pos Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

Pengukuran Pos Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan Pos Luar Biasa – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari ;

a. Beban Operasi
   1) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

   2) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaaan aset tetap.
      Pengakuan Beban Operasi
      Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
      Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat pembuatan Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

   3) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
      Beban Barangdan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat

sebagai pengurang beban.

4) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

5) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

6) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

7) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Beban Bantuan Sosial berupa uang dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban ini.
Beban bantuan sosial berupa barang dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini. Bantuan sosial berupa barang mengacu pada pengadaan barang dan jasa.

8) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
Beban Penyusutan dan amortisasi diakui dan dicatatakhir semesterberdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

9) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

10) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan Beban Transfer bagi hasil pajak dan retribusi diakui berdasarkan surat penetapan. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas). Kalo lebih bayar diakui beban dibayar dimuka pada beban.

Pengukuran Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Beban Non Operasional

Defisit Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Pengakuan Defisit Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Defisit Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Defisit Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Defisit Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Defisit Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Beban Luar Biasa.

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan terjadi berulang-ulang,

dankejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Beban Luar Biasa berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.10. Kebijakan Akuntansi atas Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Pengakuan Ekuitas Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran Ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan koreksi ekuitas lainnya yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan perubahan ekuitas ini mencakup semua transaksi yang mempengaruhi ekuitas, termasuk penyisihan laba, penambahan modal, dan pengurangan modal. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada laporan perubahan ekuitas adalah prinsip-prinsip dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun dan menyajikan laporan tersebut. Kebijakan ini mencakup pengakuan, pengukuran, dan penyajian elemen-elemen ekuitas dalam laporan keuangan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya;
    1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
    2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
    3) koreksi ekuitas lainnya; dan
d. Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-

unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian laporan perubahan ekuitas harus dilakukan dengan jelas dan transparan, mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian ini meliputi: menyusun laporan dengan format yang konsisten agar mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Pengungkapan Informasi Tambahan dengan menyediakan catatan kaki atau penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan serta informasi relevan lainnya.

BAB V
PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimulai dari perencanaan, perumusan arah dan kebijakan umum, perumusan kebijakan dan strategi APBD, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan rencana strategis Provinsi Sulawesi Utara, penatausahaan, akuntansi, serta pertanggungjawaban. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 13 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Bagan Akun Standar serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Kemudian, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya dilakukan Pergeseran terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pergeseran Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pergeseran tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak yang mendasari Pergeseran tersebut serta mengikuti amanat Ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tanggal 16 November 2024.

Tabel 5.1.1 Perubahan APBD TA 2024 Dibandingkan Penjabaran Perubahan APBD TA 2024

NO	URAIAN	NOMOR PERDA/PERGUB	PENDAPATAN	BELANJA	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
1	Perda APBD	Perda Nomor 6 Tahun 2023, tanggal 28 Desember 2023	3.905.319.788.596,00	3.958.600.753.436,65	35.000.000.000,00	324.042.605.248,00
2	Penjabaran APBD	Pergub Nomor 21 Tahun 2023, tanggal 28 Desember 2023	3.905.319.788.596,00	3.958.600.753.436,65	35.000.000.000,00	324.042.605.248,00
3	Perda Perubahan APBD	Perda Nomor 4 Tahun 2024, tanggal 17 September 2024	3.965.639.828.596,00	3.958.669.432.277,00	253.121.347.253,00	260.291.743.572,00
4	Penjabaran Perubahan APBD	Pergub Nomor 10 Tahun 2024, tanggal 17 September 2024	3.965.639.828.596,00	3.958.669.432.277,00	253.121.347.253,00	260.291.743.572,00
5	Penjabaran Pergeseran Setelah Perubahan APBD	Pergub Nomor 14 Tahun 2024, tanggal 17 Desember 2024	3.997.624.113.596,00	3.990.453.717.277,00	253.121.347.253,00	260.291.743.572,00

Tabel 5.1.2 *ON-FACE LRA TAHUN ANGGARAN 2024*

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
4	**PENDAPATAN**	**3.965.639.828.596,00**	**3.663.838.603.399,79**	**92,13**	**3.638.185.274.906,21**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.635.696.697.596,00**	**1.521.049.403.395,79**	**92,97**	**1.460.744.817.777,21**
4.1.1	Pajak Daerah	1.275.498.222.377,00	1.235.030.479.089,00	96,91	1.186.354.255.171,27
4.1.2	Retribusi Daerah	256.959.215.233,00	182.910.540.123,66	71,18	171.202.529.811,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70.817.711.445,00	71.782.282.545,00	101,33	70.918.058.963,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.721.648.541,00	30.346.101.638,13	92,74	32.269.973.841,94
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.328.968.131.000,00**	**2.131.577.594.004,00**	**91,52**	**2.076.188.476.387,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.328.968.131.000,00	2.131.577.594.004,00	91,52	2.076.188.476.387,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.315.067.912.000,00	2.120.937.395.004,00	91,61	2.042.609.180.387,00
4.2.1.6	Insentif Fiskal	13.900.219.000,00	10.640.199.000,00	76,55	33.579.296.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**875.900.000,00**	**1.211.606.000,00**	**138,47**	**1.251.980.802,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	875.900.000,00	1.211.606.000,00	138,47	1.251.980.802,00
5	**BELANJA**	**3.958.669.432.277,00**	**3.707.934.255.582,00**	**93,67**	**3.358.663.216.088,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.924.781.100.349,00**	**2.718.227.555.723,00**	**92,94**	**2.331.624.377.273,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	1.525.063.078.559,00	1.423.903.352.025,00	93,37	1.204.327.885.969,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	929.058.077.066,00	853.103.584.447,00	91,82	906.534.796.730,00
5.1.3	Belanja Bunga	32.309.693.862,00	8.879.864.279,00	27,48	16.194.564.352,00
5.1.4	Belanja Subsidi	7.262.050.000,00	4.324.568.033,00	59,55	13.293.237.126,00
5.1.5	Belanja Hibah	429.871.807.765,00	426.928.841.939,00	99,32	190.226.012.667,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.216.393.087,00	1.067.345.000,00	89,39	1.047.898.400,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**445.810.368.954,00**	**410.830.766.409,00**	**92,15**	**423.879.478.944,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	30.300.000.000,00	19.396.472.650,00	64,01	36.218.106.608,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.528.418.456,00	102.240.316.697,00	92,50	168.792.109.225,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.794.064.397,00	165.606.835.549,00	93,67	110.419.926.917,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.038.002.734,00	107.516.297.364,00	95,96	90.808.712.427,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.944.324.805,00	14.911.165.149,00	99,78	20.640.623.767,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.205.548.562,00	1.157.652.900,00	96,03	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**9.508.656.098,00**	**450.377.558,00**	**4,74**	**371.182.409,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098,00	450.377.558,00	4,74	371.182.409,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**578.569.316.876,00**	**578.425.561.892,00**	**99,98**	**602.768.176.462,00**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	578.569.316.876,00	578.425.561.892,00	99,98	597.768.176.462,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	**7.170.396.319,00**	**(54.095.652.182,21)**	**(754,43)**	**179.422.059.878,21**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**253.121.347.253,00**	**253.119.165.434,89**	**100,00**	**230.389.328.038,68**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	253.121.347.253,00	253.119.165.434,89	100,00	230.389.328.038,68
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**260.291.743.572,00**	**136.790.020.220,00**	**52,55**	**156.790.040.664,00**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	50.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	230.291.743.572,00	106.790.020.220,00	46,37	106.790.040.664,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**(7.170.396.319,00)**	**116.329.145.214,89**	**(1.622,36)**	**73.599.287.374,68**
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	-	**62.233.493.032,68**	-	**253.121.347.252,89**

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp3.653.838.603.399,79 atau mencapai 92,13% dari target APBD TA 2024 sebesar Rp3.965.839.828.596,00. Realisasi Pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.521.049.403.395,79, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.131.577.594.004,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1.211.606.000,00. Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp115.653.328.433,58 atau lebih tinggi 3,27% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp3.538.185.274.966,21.

Realisasi Belanja pada TA 2024 sebesar Rp3.707.934.255.582,00 atau mencapai 93,67% dari target APBD TA 2024 sebesar Rp3.958.669.432.277,00. Realisasi Belanja berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp2.718.227.555.723,00, Belanja Modal sebesar Rp410.830.760.409,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp450.377.558,00, dan Belanja Transfer sebesar Rp578.425.561.892,00. Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp349.271.040.494,00 atau lebih tinggi 10,40% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp3.358.663.215.088,00.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp3.653.838.603.399,79 atau mencapai 92,13% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.965.839.828.596,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp115.653.328.433,58 atau 3,27% jika dibandingkan dengan periode yang sama TA 2023 yang sebesar Rp3.538.185.274.966,21.

Realisasi Pendapatan sampai dengan akhir TA 2024 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.521.049.403.395,79, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.131.577.594.004,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1.211.606.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pendapatan Asli Daerah	1.635.996.697.596,00	1.521.049.403.395,79	92,97	1.460.744.817.777,21
2	Pendapatan Transfer	2.328.968.131.000,00	2.131.677.594.004,00	91,52	2.076.188.476.387,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	875.000.000,00	1.211.606.000,00	138,47	1.251.980.802,00
	JUMLAH	3.965.839.828.596,00	3.653.838.603.399,79	92,13	3.538.185.274.966,21

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pos Pendapatan Daerah:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang pemungutannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.521.049.403.395,79 atau mencapai 92,97% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.635.996.697.596,00. Realisasi TA 2024 lebih besar Rp60.304.585.618,58 atau lebih tinggi 4,13% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yang sebesar Rp1.460.744.817.777,21.

Tabel 5.1.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pajak Daerah	1.275.498.222.377,00	1.236.030.479.089,00	96,91	1.186.354.255.171,27
2	Retribusi Daerah	255.959.215.233,00	182.910.540.123,66	71,18	171.202.529.811,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70.817.711.445,00	71.762.282.545,00	101,33	70.918.058.953,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.721.548.541,00	30.346.101.638,13	92,74	32.269.973.841,94
	JUMLAH	1.635.996.697.596,00	1.521.049.403.395,79	92,97	1.460.744.817.777,21

5.1.1.1.1.Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp1.236.030.479.089,00 atau mencapai 96,91% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.275.498.222.377,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan TA 2023, yaitu sebesar Rp49.676.223.917,73 atau 4,19% lebih tinggi, yang mana Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp1.186.354.255.171,27.

Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2024 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, diantaranya perekonomian Sulawesi Utara yang terjaga, kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat, upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak yang terus dilakukan untuk mendorong kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Rincian Pendapatan Pajak Daerah menurut objek pendapatan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	425.789.213.853,00	412.531.485.237,00	96,89	393.894.362.621,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	296.628.918.016,00	278.168.511.228,00	93,78	267.063.535.975,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	322.780.286.524,00	335.271.376.648,00	103,87	328.668.177.922,21
4	Pajak Air Permukaan	6.600.000.000,00	6.686.979.322,00	101,32	4.299.398.742,06
5	Pajak Rokok	218.699.803.984,00	203.273.225.850,00	92,95	192.428.789.911,00
6	Pajak Alat Berat	5.000.000.000,00	98.900.804,00	1,98	-
	JUMLAH	1.275.498.222.377,00	1.236.030.479.089,00	96,91	1.186.354.255.171,27

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 mencapai 96,91% dari target. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pengetahuan, tingkat kesadaran membayar pajak yang masih rendah dan ketidakpuasan dalam pelayanan publik;
b. Minimnya Wajib Pajak yang memiliki konsep berpikir *online payment* dan belum adanya budaya yang kuat terhadap pembayaran nontunai;
c. Keterlambatan penerbitan faktur oleh *dealer*;
d. Program yang dilakukan untuk menarik pajak seperti penelusuran dan razia kurang efektif, masih terdapat banyak kendala yang ditemui di lapangan yang menyebabkan penyerapan menjadi belum optimal;
e. Sistem penetapan Pajak Air Permukaan yang belum terintegrasi secara *online* dengan Wajib Pajak; dan
f. Penetapan target pajak yang terlampau tinggi (terutama pada Pajak Alat Berat).

Berikut merupakan rincian dari masing-masing objek pajak:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dianggarkan pada 10 UPTD Badan Pendapatan Daerah. Realisasi PKB TA 2024 sebesar Rp412.531.485.237,00 atau 96,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp425.789.213.853,00. Realisasi tersebut tidak mencapai target salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 yang sebesar Rp393.894.352.621,00, realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp18.637.132.616,00 atau sebesar 4,73%. Hal tersebut salah satunya dikarenakan adanya *online payment* yang semakin memudahkan dalam membayar pajak. Rincian Anggaran dan Realisasi PKB TA 2024 yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 5.1.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.034.740.645,00	4.425.015.170,00	109,67	4.498.169.700,00
2	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	31.229.886.500,00	29.053.649.150,00	93,03	28.315.486.670,00
3	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	232.379.851.467,00	229.941.429.289,00	98,95	216.673.093.841,00
4	PKB-Mobil Bus-Microbus	1.029.913.617,00	1.062.814.300,00	103,19	1.104.694.290,00
5	PKB-Mobil Bus-Bus	150.800.900,00	29.517.260,00	19,57	98.495.040,00
6	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	46.978.604.157,00	49.324.033.800,00	104,99	47.009.400.330,00
7	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	28.784.363.040,00	30.287.190.880,00	105,22	30.275.662.260,00
8	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	9.202.264.975,00	8.300.233.980,00	90,20	8.921.492.990,00
9	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	133.338.620,00	0,00	93.184.900,00
10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	71.781.966.362,00	59.882.632.438,00	83,42	56.846.507.450,00
11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	61.701.546,00	89.627.970,00	145,26	57.124.360,00
12	PKB-Kendaraan Bermotor yang Digerakkan di Air	2.117.000,00	0,00	0,00	0,00
13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	162.803.644,00	0,00	0,00	813.800,00
14	PKB-Mobil Roda Tiga	0,00	2.002.400,00	0,00	246.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	JUMLAH	425.769.213.863,00	412.631.485.237,00	96,89	393.894.352.821,00

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dianggarkan pada 10 UPTD Badan Pendapatan Daerah. Capaian Realisasi BBNKB TA 2024 sebesar Rp278.168.511.228,00 atau 93,78% dari yang ditargetkan sebesar Rp296.628.918.016,00. Capaian tersebut kurang dari 100% yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp267.063.535.975,00, realisasi BBNKB mengalami peningkatan sebesar Rp11.104.975.253,00 atau sebesar 4,16%, dikarenakan adanya *online payment* yang semakin memudahkan dalam membayar pajak. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi BBNKB TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.7 Rincian Anggaran dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	559.387.176,00	529.572.500,00	94,69	916.866.000,00
2	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	10.281.938.805,00	9.568.436.350,00	93,06	10.465.048.200,00
3	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	147.918.587.657,00	132.263.363.800,00	89,42	131.391.878.776,00
4	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.638.215.279,00	1.146.275.900,00	69,97	1.769.143.350,00
5	BBNKB-Mobil Bus-Bus	170.759.334,00	0,00	0,00	40.020.000,00
6	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	39.690.666.564,00	29.655.711.600,00	74,72	33.372.299.400,00
7	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	8.033.969.796,00	9.639.811.500,00	119,99	10.620.117.350,00
8	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.393.269.542,00	3.042.473.000,00	89,66	3.333.187.000,00
9	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	50.000.000,00	96.705.500,00	193,41	82.200.000,00
10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	84.631.116.296,00	92.001.791.978,00	108,71	74.887.558.400,00
11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	146.058.401,00	224.269.000,00	153,55	185.217.500,00
12	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	960.530,00	0,00	0,00	0,00
13	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	113.986.676,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	296.628.918.016,00	278.168.511.228,00	93,78	267.063.535.975,00

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah. Realisasi PBBKB TA 2024 sebesar Rp335.271.376.648,00 atau 103,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp322.790.286.524,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp328.668.177.922,21, terdapat kenaikan sebesar Rp6.603.198.725,79 atau sebesar 2,01%. Kedua hal tersebut disebabkan karena kemudahan *online payment* untuk pembayaran pajak. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi PBBKB TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.8 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	189.968.297.204,00	194.279.076.336,00	102,27	192.759.874.631,00
2	PBBKB-Bahan Bakar Solar	132.821.989.320,00	140.992.298.312,00	106,15	135.908.303.291,21
	JUMLAH	322.790.286.524,00	335.271.376.648,00	103,87	328.668.177.922,21

4. Pajak Air Permukaan (PAP) dianggarkan pada 10 UPTD pada Badan Pendapatan

Daerah. Capaian Realisasi Pajak Air Permukaan TA 2024 sebesar Rp6.686.979.322,00 atau 101,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.600.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.299.398.742,06, terdapat peningkatan sebesar Rp2.387.580.579,94 atau sebesar 55,53%. Kedua hal tersebut salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi PAP TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Air Permukaan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pajak Air Permukaan	6.600.000.000,00	6.686.979.322,00	101,32	4.299.398.742,06
	JUMLAH	6.600.000.000,00	6.686.979.322,00	101,32	4.299.398.742,06

5. Pajak Rokok dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah. Realisasi Pajak Rokok TA 2024 sebesar Rp203.273.225.850,00 atau 92,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp218.689.803.984,00. Realisasi tersebut tidak mencapai target karena daya beli masyarakat yang rendah dan perubahan perilaku konsumen rokok ke produk alternatif seperti rokok elektrik. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp192.428.789.911,00, terdapat peningkatan sebesar Rp10.844.435.939,00 atau sebesar 5,64%, yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan tarif cukai rokok yaitu 10% pada tahun 2023 dan 2024. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Rokok TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Rokok TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pajak Rokok	218.689.803.984,00	203.273.225.850,00	92,95	192.428.789.911,00
	JUMLAH	218.689.803.984,00	203.273.225.850,00	92,95	192.428.789.911,00

6. Pajak Alat Berat dianggarkan pada UPTD PPD Minahasa Utara, UPTD PPD Kotamobagu, dan UPTD PPD Bolaang Mongondow. Realisasi Pajak Alat Berat TA 2024 sebesar Rp98.900.804,00 atau 1,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Pajak Alat Berat tidak mencapai target karena kesalahan dalam penganggaran yang menyebabkan tingginya anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Alat Berat TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.11 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Alat Berat TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pajak Alat Berat	5.000.000.000,00	98.900.804,00	1,98	0,00
	JUMLAH	5.000.000.000,00	98.900.804,00	1,98	0,00

5.1.1.1.2.Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber PAD sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha maupun perizinan tertentu.

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp182.910.540.123,66 atau 71,18% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp256.959.215.233,00. Retribusi Daerah menurut objek pendapatan retribusi TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	RETRIBUSI JASA UMUM	**249.996.568.233,00**	**178.460.491.022,66**	**71,39**	**163.663.196.384,00**
1	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**249.976.565.233,00**	**178.460.491.022,66**	**71,39**	**163.636.957.584,00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	17.849.657.033,00	5.861.512.121,66	32,84	5.861.406.476,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	232.126.908.200,00	172.598.978.901,00	74,36	157.655.551.108,00
2	**Retribusi Pelayanan Pendidikan**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.237.800,00**
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	20.000.000,00	0,00	0,00	16.237.800,00
	RETRIBUSI JASA USAHA	**5.828.900.000,00**	**4.198.136.073,00**	**71,99**	**6.246.034.427,00**
1	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**2.129.850.000,00**	**1.625.640.418,00**	**76,33**	**3.107.202.177,00**
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.139.750.000,00	1.001.310.818,00	87,85	2.414.507.284,00
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	814.100.000,00	524.724.600,00	64,46	537.969.850,00
	Retribusi Pemakaian Ruangan	50.000.000,00	9.575.000,00	19,15	115.475.043,00
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	66.000.000,00	74.580.000,00	113,00	39.250.000,00
	Retribusi Pemakaian Alat	60.000.000,00	15.450.000,00	25,75	0,00
2	**Retribusi Terminal**	**350.000.000,00**	**396.839.000,00**	**113,38**	**361.978.000,00**
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	225.000.000,00	303.985.000,00	135,10	361.978.000,00
	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	125.000.000,00	92.854.000,00	74,28	0,00
3	**Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**	**692.400.000,00**	**400.133.650,00**	**57,79**	**360.896.450,00**
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	692.400.000,00	400.133.650,00	57,79	360.896.450,00
4	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**	**1.374.650.000,00**	**287.300.000,00**	**20,90**	**627.590.000,00**
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.374.650.000,00	287.300.000,00	20,90	627.590.000,00
5	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**1.282.000.000,00**	**1.486.223.005,00**	**115,93**	**1.788.367.800,00**
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	15.000.000,00	12.800.000,00	85,33	5.800.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	1.170.000.000,00	1.373.864.005,00	117,42	1.707.682.800,00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	97.000.000,00	99.559.000,00	102,64	74.885.000,00
	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	**1.133.750.000,00**	**253.913.028,00**	**22,40**	**1.303.300.000,00**
1	**Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.500.000,00**
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	66.500.000,00
2	**Retribusi Izin Usaha Perikanan**	**33.750.000,00**	**35.840.000,00**	**106,19**	**1.236.800.000,00**
	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	33.750.000,00	35.840.000,00	106,19	1.236.800.000,00
3	**Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)**	**1.100.000.000,00**	**218.073.028,00**	**19,82**	**0,00**
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.100.000.000,00	218.073.028,00	19,82	0,00
	JUMLAH	**256.959.216.233,00**	**182.910.540.123,66**	**71,18**	**171.202.529.811,00**

Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 hanya mencapai 71,18%. Penyebab Retribusi Daerah tidak mencapai target bisa dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

a. Banyak potensi objek retribusi yang belum dikelola pemanfaatannya oleh perangkat daerah;

b. Perangkat daerah belum terlalu memahami proses bisnis pengelolaan retribusi daerah sesuai dengan bidangnya;
c. Masih seringnya gangguan sistem perbankan sehingga perangkat daerah pengelola retribusi kesulitan dalam menggunakan kode bayar untuk penyetoran ke RKUD;
d. Masih kurangnya pemahaman tentang tata cara pemungutan retribusi dan kepatuhan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi sesuai peraturan yang berlaku;
e. Sarana dan prasarana berbasis teknologi dalam pengelolaan objek retribusi di perangkat daerah kurang memadai; dan
f. Masih banyaknya Barang Milik Daerah (BMD) yang belum terkelola dengan baik sebagai sumber pendapatan retribusi.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yang sebesar Rp171.202.529.811,00, realisasi retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp11.708.010.312,66 atau 6,84%. Peningkatan realisasi tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran masyarakat yang meningkat dalam membayar retribusi, peningkatan kualitas SDM yang mengelola retribusi daerah sehingga penyerapan dari tahun 2023 mengalami kenaikan.

Berikut merupakan rincian dari masing-masing objek retribusi:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan pada 6 UPTD Dinas Kesehatan Daerah. Realisasi retribusi ini pada TA 2024 sebesar Rp178.460.491.022,66 atau 71,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp249.976.565.233,00. Realisasi tersebut tidak mencapai target salah satunya disebabkan karena Barang Milik Daerah (BMD) penunjang pelayanan Kesehatan belum terkelola dengan baik. Jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2023 yang sebesar Rp163.636.957.584,00, retribusi ini mengalami peningkatan sebesar Rp14.823.533.438,66 atau sebesar 9,06% pada TA 2024 yang salah satunya disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang meningkat dalam membayar retribusi.

b. Retribusi Pelayanan Pendidikan
Retribusi Pelayanan Pendidikan dianggarkan pada UPTD Rumah Sakit Mata sebesar Rp20.000.000,00 tetapi tidak terealisasi pada TA 2024. Sementara itu, pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp16.237.800,00. Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana retribusi pelayanan Pendidikan sudah tidak termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka pada TA 2024 retribusi pelayanan pendidikan tidak dilakukan penagihan kembali, sehingga terjadi penurunan realisasi dari tahun sebelumnya.

c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Administrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pendapatan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Realisasi retribusi ini pada TA 2024 sebesar Rp1.625.640.418,00 atau 76,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.129.850.000,00. Realisasi tersebut tidak mencapai target salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya Barang Milik Daerah (BMD) yang belum terkelola

dengan baik sebagai sumber pendapatan retribusi, serta perangkat daerah belum terlalu memahami proses bisnis pengelolaan retribusi daerah sesuai dengan bidangnya. Hal tersebut juga yang menyebabkan realisasi TA 2024 mengalami penurunan dari TA 2023 yang sebesar Rp3.107.202.177,00, dengan penurunan sebesar Rp1.481.561.759,00 atau sebesar 47,68%.

d. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal dianggarkan pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Daerah. Realisasi retribusi ini pada TA 2024 sebesar Rp396.839.000,00 atau 113,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2023 yang sebesar Rp361.978.000,00, retribusi ini mengalami peningkatan sebesar Rp34.861.000,00 atau sebesar 9,63% pada TA 2024. Kedua hal tersebut salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang mengelola Retribusi Terminal dan kesadaran masyarakat yang meningkat dalam membayar retribusi.

e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dianggarkan pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah. Realisasi retribusi ini pada TA 2024 sebesar Rp400.133.650,00 atau 57,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp692.400.000,00. Realisasi tersebut tidak mencapai target salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi. Jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2023 yang sebesar Rp360.896.450,00, retribusi ini mengalami peningkatan sebesar Rp39.237.200,00 atau sebesar 10,87% pada TA 2024, yang didukung oleh meningkatnya pemahaman perangkat daerah dalam proses bisnis pengelolaan retribusi.

f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kehutanan Daerah. Realisasi retribusi ini pada TA 2024 sebesar Rp287.300.000,00 atau 20,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.374.650.000,00. Realisasi tersebut tidak mencapai target salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi. Hal tersebut juga yang menyebabkan realisasi TA 2024 mengalami penurunan dari TA 2023 yang sebesar Rp627.590.000,00, yaitu senilai Rp340.290.000,00 atau sebesar 54,22%.

g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perkebunan Daerah. Realisasi retribusi ini pada TA 2024 sebesar Rp1.486.223.005,00 atau 115,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.282.000.000,00 karena meningkatnya usaha dalam lingkup Provinsi Sulawesi Utara. Realisasi TA 2023 adalah sebesar Rp1.788.367.800,00, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp302.144.795,00 atau sebesar 16,90%. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi.

h. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi Izin Usaha Perikanan dianggarkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah. Realisasi retribusi ini pada TA 2024 sebesar Rp35.840.000,00 atau 106,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.750.000,00 karena meningkatnya jumlah pemohon izin dan peningkatan kegiatan usaha perikanan. Realisasi TA 2023 adalah sebesar Rp1.236.800.000,00, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp1.200.960.000,00 atau sebesar 97,10%. Penurunan tersebut salah satunya

disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi.

i. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dianggarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah. Realisasi retribusi ini pada TA 2024 sebesar Rp218.073.028,00 atau 19,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.100.000.000,00. Realisasi tersebut tidak mencapai target salah satunya disebabkan oleh tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mumpuni yang mengelola retribusi tersebut. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yang sebesar Rp0,00, retribusi ini mengalami peningkatan sebesar Rp218.073.028,00 yang disebabkan oleh peningkatan jumlah TKA.

5.1.1.1.3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah dari penyertaan modal daerah, termasuk bagian laba dari BUMD, BUMN, dan perusahan swasta/kelompok usaha masyarakat, yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Provinsi Sulawesi Utara hanya berasal dari penerimaan dividen atas kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BPD Sulut-Go).

Pencapaian target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam TA 2024 terealisasi sebesar Rp71.762.282.545,00 atau 101,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp70.817.711.445,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, yaitu senilai Rp70.918.058.953,00, realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp844.223.592,00 atau 1,19%. Kedua hal tersebut karena anggaran TA 2024 didasarkan pada penerimaan TA 2023, sedangkan pada TA 2024 hasil dari RUPS menyatakan dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp71.762.282.545,00.

Tabel 5.1.13 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	70.817.711.445,00	71.762.282.545,00	101,33	70.918.058.953,00
	JUMLAH	70.817.711.445,00	71.762.282.545,00	101,33	70.918.058.953,00

5.1.1.1.4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada TA 2024 sebesar Rp30.346.101.638,13 atau 92,74% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp32.721.548.541,00.

Ringkasan capaian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.14 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**0,00**	**76.019.587,00**	**0,00**	**0,00**
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	58.113.077,00	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	11.700.000,00	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	6.206.510,00	0,00	0,00
2	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**118.242.000,00**	**1.852.327.000,00**	**1.566,50**	**1.608.381.956,00**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	Hasil Sewa BMD	118.242.000,00	272.842.000,00	230,75	81.574.850,00
	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	1.579.485.000,00	0,00	1.526.807.100,00
3	**Hasil Kerja Sama Daerah**	**459.000.000,00**	**1.100.918.759,00**	**239,85**	**948.501.419,00**
	Hasil Kerja Sama Daerah	459.000.000,00	1.100.918.759,00	239,85	948.501.419,00
4	**Jasa Giro**	**2.674.639.512,00**	**5.297.934.506,00**	**198,08**	**4.312.734.815,00**
	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.674.639.512,00	5.280.773.667,00	197,44	4.307.327.242,00
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	17.160.126,00	0,00	5.406.568,00
	Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	713,00	0,00	965,00
5	**Pendapatan Bunga**	**15.250.624.980,00**	**5.184.121.254,00**	**33,99**	**3.750.234.151,00**
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	15.250.624.980,00	5.184.121.254,00	33,99	3.750.234.151,00
6	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**0,00**	**4.501.978.422,06**	**0,00**	**9.662.733.213,41**
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	1.588.343.788,32	0,00	283.782.216,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	2.913.634.633,73	0,00	9.378.950.997,41
7	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.241.578,00**
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	90.241.578,00
8	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**14.219.042.048,00**	**9.753.560.747,54**	**68,59**	**10.384.463.315,00**
	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.150.000.000,00	7.812.026.200,00	76,97	7.269.435.115,00
	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.069.042.048,00	1.831.745.300,00	45,02	3.115.028.200,00
	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	95.758.687,54	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	14.020.560,00	0,00	0,00
9	**Pendapatan dari Pengembalian**	**0,00**	**2.579.251.362,54**	**0,00**	**1.512.683.400,53**
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	95.127.930,00	0,00	1.512.683.400,53
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	2.484.123.432,54	0,00	0,00
	JUMLAH	32.721.548.641,00	30.346.101.638,13	92,74	32.269.973.841,94

Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin yang telah realisasi sebesar Rp58.113.077,00, Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan yang terealisasi sebesar Rp11.700.000,00, dan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain yang terealisasi sebesar Rp6.206.510,00 dengan tidak dianggarkan pada perangkat daerah manapun. Barang Milik Daerah yang dijual merupakan barang yang telah habis masa manfaat atau yang diusulkan jual oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan ini terealisasi pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan dan Aset, Badan Pendapatan, dan Badan Kepegawaian Daerah.

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari Hasil Sewa BMD yang terealisasi sebesar Rp272.842.000,00 dan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD yang terealisasi sebesar Rp1.579.485.000,00. Hasil Sewa BMD meliputi penyewaan ruangan apotik pada rumah sakit, *tenant*/kantin, sewa lahan kembang LY, dan sewa lahan parkir

pada RSUD Tipe B Provinsi Sulawesi Utara, RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dan RS Tipe C Noongan. Sedangkan untuk Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD meliputi biaya kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yaitu sebesar Rp1.608.381.950,00, realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp243.945.050,00 atau 15,17%. Sementara itu, realisasi TA 2024 berhasil tercapai melebihi target sebesar 1.566,56% dari Anggaran TA 2024 sebesar Rp118.242.000,00. Realisasi melebihi target dan meningkat dari tahun sebelumnya karena meningkatnya BMD yang dapat disewakan dan dimanfaatkan untuk menambah penerimaan daerah.

c. Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah TA 2024 sebesar Rp1.100.918.759,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp459.000.000,00 atau 239,85%. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp152.417.340,00 atau 16,07%, dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp948.501.419,00. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan untuk sewa aset milik pemerintah daerah oleh mitra. Hasil Kerja Sama Daerah termasuk sewa lahan gedung *mini plant* di kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa, Diving Centre Manado (Dinas Kelautan dan Perikanan) dan setoran klaim pembayaran jaminan pasien KLL Jasa Raharja pada Dinas Kesehatan.

d. Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2024 sebesar Rp5.297.934.506,00 atau 198,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.674.639.512,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yang sebesar Rp4.312.734.815,00, mengalami peningkatan sebesar Rp985.199.691,00 atau 22,84%. Kedua hal tersebut disebabkan oleh terdapat peningkatan pada pagu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Rincian realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Jasa Giro Kas Daerah	2.674.639.512,00	5.280.773.887,00	197,44	4.307.327.242,00
2	Jasa Giro Bendahara	0,00	17.160.126,00	0,00	5.406.588,00
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	713,00	0,00	985,00
	JUMLAH	2.674.639.512,00	5.297.934.506,00	198,08	4.312.734.815,00

e. Realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan uang Pemerintah Daerah TA 2024 terdiri atas penerimaan bunga deposito dari Bank SulutGo sebesar Rp4.835.753.403,00 serta remunerasi TDF sebesar Rp348.367.851,00, sehingga total realisasi pendapatan bunga adalah Rp5.184.121.254,00 atau 33,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.250.624.980,00. Realisasi tersebut tidak mencapai target dikarenakan keterbatasan dana *idle* yang dapat diinvestasikan dalam deposito jangka pendek. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, mengalami peningkatan sebesar Rp1.433.887.103,00 atau 38,23% karena meningkatnya jumlah deposito dari tahun sebelumnya, yang terdiri dari:

Tabel 5.1.16 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bunga TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	15.250.624.980,00	5.184.121.254,00	33,99	3.750.234.151,00
	JUMLAH	15.250.624.980,00	5.184.121.254,00	33,99	3.750.234.151,00

f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2024 ditargetkan Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2024 sebesar Rp4.501.978.422,05. Realisasi tersebut

melebihi target karena penyelesaian kasus TGKD dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak diperhitungkan dalam anggaran tahun berjalan, tetapi berhasil ditagih di tahun tersebut. Realisasi TA 2023 adalah sebesar Rp9.662.733.213,41, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp5.160.754.791,36 atau 53,41% yang disebabkan karena peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tersebut diperoleh dari:

a) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp1.588.343.788,32; dan
b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp2.913.634.633,73.

Tabel 5.1.17 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	1.588.343.788,32	0,00	283.782.216,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	2.913.634.633,73	0,00	9.378.950.997,41
	JUMLAH	0,00	4.501.978.422,05	0,00	9.662.733.213,41

g. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 berasal dari Denda Keterlambaan Pelaksanaan Pekerjaan tidak teranggarkan dan tidak terealisasi pada TA 2024.

Tabel 5.1.18 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapataan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	90.241.578,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	90.241.578,00

h. Pendapatan Denda Pajak TA 2024 dianggarkan sebesar Rp14.219.042.049,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan akhir TA 2024 adalah sebesar Rp9.753.550.747,54 atau 68,59%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yang sebesar Rp10.384.463.315,00, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp630.912.567,00 atau 6,08%, yang keduanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar denda pajak. Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 tersebut terdiri dari:

Tabel 5.1.19 Rincian Realisasi dan Anggaran Pendapatan Denda Pajak TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.150.000.000,00	7.812.026.200,00	76,97	7.269.435.115,00
2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.069.042.049,00	1.831.745.300,00	45,02	3.115.028.200,00
3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	95.758.687,54	0,00	0,00
4	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	14.020.560,00	0,00	0,00
	JUMLAH	14.219.042.049,00	9.753.550.747,54	68,59	10.384.463.315,00

i. Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 tidak dianggarkan dan telah terealisasi sebesar Rp2.579.251.362,54. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar

Rp1.066.567.962,01 atau 70,51% dikarenakan meningkatnya kesadaran pegawai untuk mengembalikan kelebihan pembayaran. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 tersebut terdiri atas perolehan:

Tabel 5.1.20 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	95.127.930,00	0,00	1.512.683.400,53
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	2.484.123.432,54	0,00	0,00
	JUMLAH	**0,00**	**2.579.251.362,54**	**0,00**	**1.512.683.400,53**

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan kesesimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Dana Insentif Daerah (DID), yaitu Dana Transfer dari Pusat ke Daerah yang ditentukan berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Transfer TA 2024 telah terealisasi sebesar Rp2.131.577.594.004,00 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp2.328.968.131.000,00 atau 91,52% yang hanya terdiri dari Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Tabel 5.1.21 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2.328.968.131.000,00**	**2.131.577.594.004,00**	**91,52**	**2.076.188.476.387,00**
	Dana Perimbangan	2.315.067.912.000,00	2.120.937.395.004,00	91,61	2.042.609.180.387,00
	Insentif Fiskal	13.900.219.000,00	10.640.199.000,00	76,55	33.579.296.000,00
	JUMLAH	**2.328.968.131.000,00**	**2.131.577.594.004,00**	**91,52**	**2.076.188.476.387,00**

5.1.1.2.1.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp2.131.577.594.004,00 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp2.328.968.131.000,00 atau 91,52%. Pendapatan Transfer dicatat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD yang dirincikan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.22 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Dana Perimbangan**	**2.315.067.912.000,00**	**2.120.937.395.004,00**	**91,61**	**2.042.609.180.387,00**
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	167.866.309.000,00	150.929.094.000,00	89,91	134.281.137.729,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.430.601.814.000,00	1.271.478.556.387,00	88,88	1.178.860.937.148,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	309.431.592.000,00	302.618.460.829,00	97,80	335.435.196.455,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	407.168.197.000,00	395.911.284.988,00	97,24	394.031.909.055,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
2	**Insentif Fiskal**	**13.900.219.000,00**	**10.640.199.000,00**	**76,55**	**33.579.296.000,00**
	Insentif Fiskal	13.900.219.000,00	10.640.199.000,00	76,55	33.579.296.000,00
	JUMLAH	**2.328.968.131.000,00**	**2.131.577.594.004,00**	**91,52**	**2.076.188.476.387,00**

5.1.1.2.1.1.Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan menurut objek pendapatan TA 2024 terdiri dari:

a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp150.929.094.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp167.866.309.000,00 atau dengan capaian sebesar 89,91%. Realisasi tersebut tidak mencapai target dikarenakan terdapat penyesuaian alokasi dari pemerintah pusat. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp134.281.137.729,00, DBH mengalami peningkatan sebesar Rp16.647.956.271,00 atau 12,40%, yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan negara. Rincian tersebut tertera dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.23 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	13.993.120.000,00	11.451.977.000,00	81,84	13.475.183.931,00
2	DBH PPh Pasal 21	59.337.899.000,00	61.731.846.000,00	104,03	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.622.526.000,00	2.788.096.000,00	106,30	62.696.736.481,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	12.711.309.000,00	19.407.268.000,00	152,68	12.363.881.749,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	11.204.534.000,00	1.675.625.000,00	14,96	19.846.224.689,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	67.940.001.000,00	53.526.560.000,00	78,79	25.572.687.847,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	56.520.000,00	347.702.000,00	615,16	526.443.032,00
	JUMLAH	**167.866.309.000,00**	**150.929.094.000,00**	**89,91**	**134.281.137.729,00**

b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada TA 2024 sebesar Rp1.271.478.555.387,00 atau tercapai sebesar 88,88% dari target anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan TA 2024 sebesar Rp1.430.601.814.000,00. Terdapat selisih sebesar Rp159.123.258.613,00 yang terdiri dari potongan langsung DAU untuk pembayaran dana PEN sebesar Rp146.931.552.935,00 dan sebesar Rp12.191.705.678,00 yang tidak terealisasi yang merupakan DAU untuk Gaji PPPK yang tidak terealisasi seluruhnya. Realisasi TA 2023 adalah sebesar Rp1.178.860.937.148,00, sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp92.617.618.239,00 atau 7,86%, karena terdapat perubahan formula alokasi DAU.

Pada Pendapatan DAU terdapat penyesuaian atas tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi guru ASN di daerah, dimana sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan alokasi tambahan Dana Alokasi Umum sebesar Rp31.784.285.000,00 terdiri atas Tunjangan Hari Raya Rp15.986.357.000,00 dan gaji

ketiga belas Rp15.797.928.000,00. Keputusan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan tanggal 16 November 2024 dan Perubahan APBD sudah ditetapkan tanggal 17 September 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Pergeseran Setelah Perubahan APBD sesuai Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024.

Tabel 5.1.24 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.430.601.814.000,00	1.271.478.555.387,00	88,88	1.178.880.937.148,00
	JUMLAH	1.430.601.814.000,00	1.271.478.555.387,00	88,88	1.178.880.937.148,00

c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada TA 2024 sebesar Rp302.618.460.629,00 atau 97,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp309.431.592.000,00. Realisasi DAK Fisik pada TA 2023 adalah sebesar Rp335.435.196.455,00, yang berarti mengalami penurunan pada TA 2024 sebesar Rp32.816.735.826,00 atau 9,78%. Kedua hal tersebut disebabkan karena terdapat keterlambatan proses administrasi dan kendala pengadaan barang/jasa. Rincian tersebut terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.25 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	41.844.803.000,00	40.901.803.228,00	97,75	39.818.346.448,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	6.803.271.000,00	6.756.693.154,00	99,32	5.793.229.075,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	12.313.229.000,00	12.228.408.314,00	99,31	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-PenugasanPeningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	51.000.002.000,00	49.213.647.884,00	96,50	86.937.458.515,00
5	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	5.653.150.000,00	5.558.987.753,00	98,32	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.500.124.000,00	4.299.619.940,00	95,54	22.160.287.473,00
7	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	23.326.864.000,00	23.205.042.976,00	99,47	26.901.065.647,00
8	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.729.839.000,00	1.717.712.922,00	99,30	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	28.135.874.000,00	27.949.112.357,00	99,34	38.712.957.960,00
10	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	15.298.745.000,00	15.081.377.020,00	98,58	12.591.416.636,00
11	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	118.823.691.000,00	115.706.565.081,00	97,38	102.420.434.671,00
	JUMLAH	309.431.592.000,00	302.618.460.629,00	97,80	335.436.196.455,00

d. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024 sebesar Rp395.911.284.988,00 atau 97,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp407.168.197.000,00. Realisasi tersebut tidak mencapai target dikarenakan terdapat keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan dan perubahan data penerima kegiatan.

Sementara itu, realisasi TA 2023 sebesar Rp394.031.909.055,00, mengalami peningkatan pada TA 2024 sebesar Rp1.879.375.933,00 atau 0,48%, dikarenakan peningkatan efisiensi dalam mengelola anggaran DAK Non Fisik. Rincian realisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.26 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	DAK Non Fisik-BOSP Reguler	205.237.020.000,00	199.963.826.173,00	97,43	201.220.340.481,00
2	DAK Non Fisik-BOSP Kinerja	0,00	4.746.250.000,00	0,00	4.842.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	184.341.471.000,00	174.234.379.711,00	94,52	171.455.285.060,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.046.091.000,00	4.046.091.000,00	100,00	4.731.500.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	136.652.000,00	121.389.000,00	88,83	0,00
6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	0,00	0,00	1.789.960.100,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.666.462.000,00	5.058.954.760,00	89,44	6.070.981.324,00
8	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.526.841.000,00	2.526.394.850,00	99,98	2.250.427.820,00
9	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.853.660.000,00	1.844.364.094,00	99,50	1.083.323.250,00
10	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	519.635.400,00	99,93	587.611.000,00
11	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	407.168.197.000,00	395.911.284.988,00	97,24	394.031.909.055,00

5.1.1.2.1.2.Insentif Fiskal

Insentif fiskal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal TA 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan. Insentif fiskal adalah dana yang diberikan kepada daerah dari APBN untuk menghargai kinerja daerah. Insentif fiskal diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, dan pelayanan dasar. Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada TA 2024 dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang teridir atas:

a. Insentif fiskal kategori pengendalian inflasi daerah; dan
b. Insentif fiskal kelompok kategori kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal TA 2024 telah teralisasi sebesar Rp10.640.199.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp13.900.219.000,00 atau 76,55%. Realisasi tersebut terdiri dari Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan dua tahap dan Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan kelompok Kinerja Kesejahteraan Masyarakat tahap satu dengan nilai masing-masing sebesar Rp7.380.179.000,00 dan Rp3.260.020.000,00. Realisasi tersebut tidak mencapai target dikarenakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi syarat untuk pencairan tahap II untuk Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan kelompok Kinerja Kesejahteraan Masyarakat. Realisasi Insentif Fiskal TA 2023 sebesar Rp33.579.296.000,00, mengalami penurunan pada TA 2024 sebesar Rp22.939.097.000,00 atau 68,31% yang disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah pusat mengenai insentif fiskal.

Tabel 5.1.27 Rincian Anggaran dan Realisasi Insentif Fiskal TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Insentif Fiskal	13.900.219.000,00	10.640.199.000,00	76,55	33.579.296.000,00
	JUMLAH	**13.900.219.000,00**	**10.640.199.000,00**	**76,55**	**33.579.296.000,00**

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.211.606.000,00 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp875.000.000,00 atau 138,47% yang terdiri dari:

Tabel 5.1.28 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pendapatan Hibah	875.000.000,00	1.211.606.000,00	138,47	1.251.980.802,00
	JUMLAH	**875.000.000,00**	**1.211.606.000,00**	**138,47**	**1.251.980.802,00**

5.1.1.3.1.Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp1.211.606.000,00 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp875.000.000,00 atau 138,47%. Pendapatan tersebut melebihi target karena adanya peluang hibah baru. Realisasi TA 2023 sebesar Rp1.251.980.802,00, sehingga mengalami penurunan pada TA 2024 sebesar Rp40.374.802,00 atau 3,22% karena berkurangnya penerimaan hibah dari *Global Fund*. Realisasi tersebut terdiri dari:

Tabel 5.1.29 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Pendapatan Hibah**	**875.000.000,00**	**1.211.606.000,00**	**138,47**	**1.251.980.802,00**
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	118.634.302,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	875.000.000,00	1.211.606.000,00	138,47	1.133.346.500,00
	JUMLAH	**875.000.000,00**	**1.211.606.000,00**	**138,47**	**1.251.980.802,00**

Pendapatan Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berasal dari *Global Fund* dan setoran dari PT Jasa Raharja. *Global Fund* merupakan lembaga keuangan internasional yang berdedikasi mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk program penanggulangan AIDS, Tuberkolosis dan Malaria. *Global Fund* bekerja dengan cara mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk program-program yang bertujuan mengurangi dampak TB. Dana yang dikumpulkan berasal dari kontribusi publik dan swasta. Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah jenis *Global Fund* (GF) TB. Adapun rincian pendapatan hibah yang diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.30 Rincian Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam/Luar Negeri TA 2024

NO	URAIAN	REALISASI 2024
1	**Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri**	**953.604.000,00**
	Setoran PT Jasa Raharja	
	- Badan Pendapatan Daerah	953.604.000,00
2	**Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri**	**258.002.000,00**
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri (GF-TB)	
	- UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah	258.002.000,00
	JUMLAH	**1.211.606.000,00**

5.1.2. Belanja

Anggaran dan realisasi Belanja Provinsi Sulawesi Utara untuk TA 2024, berdasarkan klasifikasi ekonomi dibagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.31 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Operasi	2.924.781.100.349,00	2.718.227.555.723,00	92,94	2.331.624.377.273,00
2	Belanja Modal	445.810.358.954,00	410.830.760.409,00	92,15	423.879.476.944,00
3	Belanja Tidak Terduga	9.608.856.096,00	450.377.558,00	4,74	371.182.409,00
4	Belanja Transfer	578.569.316.876,00	578.425.561.892,00	99,98	602.788.176.462,00
	JUMLAH	3.958.669.432.277,00	3.707.934.255.582,00	93,67	3.358.663.215.088,00

Realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp3.707.934.255.582,00 dari anggaran sebesar Rp3.958.669.432.277,00 atau 93,67%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp3.358.663.215.088,00 terjadi peningkatan realisasi belanja sebesar Rp349.271.040.494,00 atau 10,40%. Kelompok belanja sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp2.718.227.555.723,00 dari anggaran perubahan sebesar Rp2.924.781.100.359,00 atau 92,94% yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

5.1.2.1.1.Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, dan pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan. Kompensasi ini dapat berupa uang atau barang, dan berfungsi sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2024 sebesar Rp1.423.903.352.025,00 atau 93,37% dari anggaran sebesar Rp1.525.063.078.559,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.204.327.865.998,00 terjadi peningkatan sebesar Rp219.575.486.027,00 atau 18,23%.

Belanja Pegawai terdiri dari Objek Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1.32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	945.957.521.084,02	865.999.568.784,00	91,55	734.214.642.673,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	314.388.572.111,98	280.855.737.506,00	89,34	247.090.333.721,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	226.578.833.154,00	241.634.119.110,00	106,64	186.560.450.469,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.931.172.358,00	31.890.262.574,00	93,99	32.389.460.054,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.747.460.106,00	1.293.445.627,00	74,02	1.825.459.331,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.479.519.745,00	2.230.218.424,00	89,95	2.467.519.740,00
	JUMLAH	1.525.063.078.559,00	1.423.903.352.025,00	93,37	1.204.327.865.998,00

5.1.2.1.1.1.Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan dibayarkan kepada *Aparatur Sipil Negara (ASN)*

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara TA 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah mengalami beberapa perubahan melalui beberapa Peraturan Pemerintah lainnya. Perubahan-perubahan tersebut meliputi penyesuaian gaji pokok, tunjangan, dan ketentuan terkait lainnya. Peraturan Pemerintah terbaru yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 adalah PP Nomor 5 Tahun 2024, yang berlaku sejak 1 Januari 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 Tentang Peraturan Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 telah terealisasi sebesar Rp865.999.568.784,00 atau dengan capaian sebesar 91,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp945.957.521.084,02. Realisasi tersebut tidak mencapai target dikarenakan perencanaan yang kurang matang. Rincian realisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.33 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**710.998.544.076,00**	**673.598.237.379,00**	**94,75**	**563.196.075.203,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	543.540.584.032,00	525.952.796.449,00	96,76	510.756.675.003,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	167.367.960.044,00	147.643.440.930,00	88,21	52.439.400.200,00
2	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**61.213.843.543,00**	**56.138.134.054,00**	**91,71**	**49.028.195.200,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	49.270.985.877,00	45.991.661.495,00	93,34	46.249.682.074,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.942.857.666,00	10.146.472.558,00	84,96	3.779.513.126,00
3	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**10.123.167.431,00**	**8.570.144.660,00**	**84,66**	**8.788.442.898,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	10.093.337.364,00	8.570.144.660,00	84,91	8.788.442.898,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	29.830.067,00	0,00	0,00	0,00
4	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**42.972.682.253,00**	**36.443.987.880,00**	**84,81**	**35.443.898.160,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	38.832.491.619,00	36.425.907.880,00	93,80	35.317.548.160,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.140.190.634,00	18.080.000,00	0,44	126.350.000,00
5	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**21.298.645.522,96**	**16.071.480.000,00**	**75,46**	**11.949.715.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.989.168.387,96	7.493.580.000,00	75,02	8.777.650.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.309.377.135,00	8.577.900.000,00	75,85	3.172.065.000,00
6	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**36.939.678.524,00**	**32.678.352.913,00**	**88,46**	**29.152.626.316,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	27.740.137.130,00	24.503.293.333,00	88,33	26.162.621.776,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.199.541.394,00	7.575.059.580,00	82,34	2.990.004.540,00
7	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**4.795.882.047,00**	**2.100.822.839,00**	**43,80**	**1.596.741.938,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.638.526.407,00	2.100.822.839,00	79,62	1.596.741.938,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.157.355.640,00	0,00	0,00	0,00
8	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**1.433.853.368,05**	**9.829.603,00**	**0,69**	**7.766.792,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.359.680,05	6.872.653,00	27,10	7.107.631,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.408.493.688,00	2.956.950,00	0,21	659.161,00
9	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**48.890.561.436,00**	**35.440.481.284,00**	**72,49**	**30.399.695.478,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	41.800.608.111,00	29.567.098.718,00	70,73	28.209.155.737,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.089.953.325,00	5.873.382.566,00	82,84	2.190.539.741,00
10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**2.117.444.316,00**	**1.389.069.260,00**	**65,60**	**1.162.917.597,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.492.766.786,00	1.076.417.873,00	72,11	1.047.114.834,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	624.677.530,00	312.651.387,00	50,05	115.802.763,00
11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**5.263.318.567,00**	**4.161.028.722,00**	**79,06**	**3.488.568.091,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.970.934.946,00	3.222.884.074,00	81,16	3.141.173.192,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.292.383.621,00	938.144.648,00	72,59	347.394.899,00
	JUMLAH	**945.957.521.084,02**	**865.999.568.784,00**	**91,55**	**734.214.842.873,00**

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp131.784.926.111,00 atau 17,95%, dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah 734.214.642.673,00, yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai dan terdapat kenaikan gaji pada periode berjalan. Rincian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN per Perangkat Daerah terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.34 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	526.200.189.054,00	476.934.585.422,00	91,02	404.635.954.468,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	128.681.560.633,00	120.977.320.381,00	93,87	84.286.461.532,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	22.852.123.082,00	21.568.902.666,00	94,38	17.770.259.089,00
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	3.298.194.803,00	2.775.841.420,00	84,13	2.849.681.249,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.854.793.517,00	5.808.517.682,00	73,27	4.410.242.228,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.184.298.251,00	3.862.722.145,00	92,31	3.360.394.831,00
7	Dinas Sosial Daerah	6.695.931.963,00	6.284.819.072,00	93,86	5.990.525.276,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	8.153.543.707,00	7.683.776.902,00	94,24	7.539.727.357,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.139.443.888,00	3.041.957.345,00	96,89	2.775.858.224,00
10	Dinas Pangan	5.376.896.428,02	5.142.859.883,00	95,65	4.555.500.440,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.103.775.000,00	3.879.031.244,00	94,52	3.621.345.899,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	3.025.206.688,00	2.788.159.058,00	92,16	2.761.388.906,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.707.752.000,00	2.630.442.443,00	97,14	2.421.277.838,00
14	Dinas Perhubungan Daerah	7.098.128.675,00	6.638.364.889,00	93,65	6.622.424.495,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah	4.286.433.132,00	4.059.748.725,00	94,71	3.086.382.643,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Daerah	4.349.811.034,00	3.645.681.996,00	83,81	3.786.599.019,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	3.931.318.913,00	3.672.147.680,00	93,41	3.913.934.305,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	4.585.692.624,00	4.328.264.296,00	94,39	4.209.457.494,00
19	Dinas Kebudayaan Daerah	4.078.674.889,00	3.476.371.367,00	85,23	3.511.236.749,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	4.963.760.103,00	4.531.291.216,00	91,29	3.922.683.677,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	9.790.200.393,00	9.277.240.271,00	94,76	7.436.247.312,00
22	Dinas Pariwisata Daerah	4.300.538.679,00	3.894.477.287,00	90,56	3.969.097.389,00
23	Dinas Pertanian Daerah	26.072.168.845,00	22.562.327.758,00	86,54	20.056.102.668,00
24	Dinas Perkebunan Daerah	8.622.885.979,00	6.968.455.241,00	80,79	6.313.465.081,00
25	Dinas Kehutanan	24.955.627.793,00	24.471.429.349,00	97,94	21.559.244.591,00
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	5.732.629.800,00	5.317.621.313,00	92,76	5.498.677.415,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	4.360.459.565,00	4.159.146.782,00	95,38	3.821.036.437,00
28	Sekretariat Daerah	28.993.711.939,00	25.641.744.032,00	88,44	24.773.656.858,00
29	Sekretariat DPRD	5.957.954.381,00	5.016.152.034,00	84,19	4.873.399.927,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.177.135.978,00	6.084.853.557,00	97,83	4.416.076.624,00
31	Badan Pendapatan Daerah	18.419.382.612,00	6.955.687.961,00	37,76	17.340.230.537,00
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.360.000.000,00	17.735.188.386,00	241,30	6.794.007.064,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	7.527.505.538,00	7.145.043.179,00	94,92	6.406.636.556,00
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.926.281.144,00	5.283.095.469,00	89,32	5.041.824.523,00
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.468.339.413,00	2.400.056.137,00	97,23	2.209.178.372,00
36	Badan Penghubung Daerah	2.319.758.076,00	2.655.898.219,00	114,49	1.667.135.839,00
37	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.065.415.744,00	1.962.080.326,00	64,03	2.509.507.478,00
38	Inspektorat Daerah	12.246.655.805,00	11.347.924.842,00	92,66	11.197.190.686,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	3.072.050.977,00	2.602.542.758,00	84,72	2.628.887.527,00
	JUMLAH	946.957.521.084,02	866.999.568.784,00	91,55	734.214.642.673,00

Berikut data jumlah pegawai per golongan dan jabatan:

Tabel 5.1.35 Data Jumlah Pegawai PNS per Golongan dan Jabatan

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	PEJABAT	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Gubernur	1	0	0	0	0	0	0	1
Wakil Gubernur	1	0	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	17	0	17
Golongan IV/d	0	1	19	1	0	30	1	52
Golongan IV/c	0	0	17	5	0	217	1	240
Golongan IV/b	0	0	4	123	2	967	11	1.107
Golongan IV/a	0	0	0	101	64	1.012	88	1.265
JUMLAH GOLONGAN IV	**2**	**1**	**40**	**230**	**66**	**2.243**	**101**	**2.683**
Golongan III/d	0	0	0	20	201	1.500	755	2.476
Golongan III/c	0	0	0	3	26	574	326	929
Golongan III/b	0	0	0	0	1	618	535	1.154
Golongan III/a	0	0	0	0	0	552	493	1.045
JUMLAH GOLONGAN III	**0**	**0**	**0**	**23**	**228**	**3.244**	**2.109**	**5.604**
Golongan II/d	0	0	0	0	0	70	125	195
Golongan II/c	0	0	0	0	0	76	344	420
Golongan II/b	0	0	0	0	0	3	30	33
Golongan II/a	0	0	0	0	0	4	86	90
JUMLAH GOLONGAN II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153**	**585**	**738**
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
TOTAL	**2**	**1**	**40**	**253**	**294**	**5.640**	**2.796**	**9.026**

Tabel 5.1.36 Data Jumlah Pegawai PPPK per Golongan dan Jabatan

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
JUMLAH GOLONGAN IV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Golongan 12	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan 11	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan 10	0	0	0	0	0	310	4	314
Golongan 9	0	0	0	0	0	2.950	191	3.141
JUMLAH GOLONGAN III	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.260**	**195**	**3.455**
Golongan 8	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan 7	0	0	0	0	0	577	7	584
Golongan 6	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan 5	0	0	0	0	0	114	11	125
JUMLAH GOLONGAN II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**691**	**18**	**709**
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	0	0	0	0	0	**3.951**	**213**	**4.164**

5.1.2.1.1.2.Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan yang dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang kemudian dilengkapi dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135 Tahun 2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terealisasi sebesar Rp280.855.737.506,00 atau 89,34% dari anggaran sebesar Rp314.368.572.111,98. Realisasi tersebut kurang dari 100% dikarenakan kurangnya perencanaan yang matang dalam perhitungan proyeksi belanja pegawai. Rincian realisasi tersebut adalah:

Tabel 5.1.37 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.351.317.531,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	79.351.317.531,00
2	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**	**314.368.572.111,98**	**280.356.737.506,00**	**89,34**	**167.739.016.190,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	311.983.095.835,98	279.969.113.975,00	89,74	167.739.016.190,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.385.476.276,00	886.623.531,00	37,17	0,00
	JUMLAH	**314.368.572.111,98**	**280.356.737.506,00**	**89,34**	**247.090.333.721,00**

Belanja Tambahan Penghasilan ASN mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.765.403.785,00 atau 13,67%, dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah Rp247.090.333.721,00, disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai dan terdapat kenaikan gaji dan tunjangan pada periode berjalan. Rincian realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN per Perangkat Daerah terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	20.126.882.113,00	14.564.869.723,00	72,46	13.068.788.326,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	69.825.446.621,00	63.160.679.868,00	90,46	48.913.197.215,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	12.751.819.439,00	10.915.868.615,00	85,60	9.373.473.490,00
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	2.325.021.079,00	2.100.946.255,00	90,36	1.973.631.551,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.700.000.000,00	3.193.845.582,00	86,32	2.850.583.881,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.766.051.915,00	2.606.042.188,00	94,21	2.105.964.590,00
7	Dinas Sosial Daerah	4.488.121.717,00	4.151.547.093,00	92,50	3.759.394.753,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	5.401.257.784,00	5.037.952.861,00	93,27	4.360.555.489,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.993.879.203,00	2.552.327.017,00	85,25	2.133.191.893,00
10	Dinas Pangan	3.773.103.573,98	3.348.885.266,00	88,76	2.851.677.314,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.211.584.371,00	2.697.595.215,00	84,00	2.423.019.217,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	2.266.779.812,00	2.115.020.157,00	93,31	1.682.833.135,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.562.270.000,00	2.125.188.999,00	82,94	1.871.507.773,00
14	Dinas Perhubungan Daerah	4.053.750.161,00	3.946.114.260,00	97,32	3.529.878.079,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah	2.631.360.000,00	2.448.372.430,00	93,05	2.210.188.133,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Daerah	3.093.686.138,00	2.700.261.774,00	87,28	2.556.822.673,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	4.598.262.400,00	4.013.662.694,00	87,28	3.853.816.394,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	3.221.457.706,00	2.848.496.944,00	88,42	2.584.525.375,00
19	Dinas Kebudayaan Daerah	2.717.924.106,00	2.618.585.510,00	96,36	2.133.710.858,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.954.631.259,00	2.762.097.562,00	93,48	2.524.793.873,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	6.211.140.873,00	5.505.666.527,00	88,64	4.773.046.149,00
22	Dinas Pariwisata Daerah	3.291.203.786,00	2.639.411.629,00	80,20	2.315.958.601,00
23	Dinas Pertanian Daerah	12.336.457.965,00	10.701.328.338,00	86,75	9.953.319.198,00
24	Dinas Perkebunan Daerah	4.202.320.000,00	3.997.860.798,00	95,13	3.705.542.451,00
25	Dinas Kehutanan	13.650.769.303,00	13.146.476.087,00	96,31	11.274.520.240,00
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	4.168.483.506,00	3.762.268.686,00	90,26	3.549.107.887,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	3.261.210.598,00	2.834.088.318,00	86,90	2.636.148.318,00
28	Sekretariat Daerah	29.943.112.688,00	27.493.880.935,00	91,82	25.664.340.247,00
29	Sekretariat DPRD	4.547.815.113,00	3.548.832.736,00	78,04	3.299.927.662,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.242.064.796,00	4.910.441.206,00	93,67	4.186.487.118,00
31	Badan Pendapatan Daerah	21.111.239.901,00	19.469.590.319,00	92,22	19.218.628.163,00

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.914.119.480,00	9.765.166.329,00	89,47	9.282.766.759,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	7.162.522.112,00	6.649.610.679,00	92,97	5.624.695.777,00
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.077.000.000,00	4.835.026.498,00	95,23	4.368.096.570,00
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.208.121.275,00	1.861.681.910,00	84,31	1.618.863.453,00
36	Badan Penghubung Daerah	1.852.472.704,00	1.807.095.796,00	97,55	1.536.341.575,00
37	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.200.767.761,00	2.004.972.834,00	91,10	1.574.431.920,00
38	Inspektorat Daerah	16.338.919.121,00	13.928.526.138,00	90,81	13.721.376.027,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	2.193.751.523,00	2.066.511.877,00	94,20	1.983.241.614,00
	JUMLAH	314.366.572.111,98	280.855.737.596,00	89,34	247.090.333.721,00

5.1.2.1.1.3.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan bagian dari belanja yang digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada ASN, yang disalurkan melalui mekanisme pertimbangan objektif selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah.

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 sebesar Rp241.634.119.110,00 atau 106,64% dari anggaran sebesar Rp226.578.833.154,00. Realisasi tersebut diatas 100% disebabkan karena terdapat penyesuaian Pendapatan DAU atas tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi guru ASN di daerah. Rincian realisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.39 Rincian Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	16.697.402.065,00	13.902.805.290,00	83,25	13.371.611.158,00
2	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	203.436.200.489,00	220.565.339.020,00	108,42	168.940.721.411,00
3	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	204.553.600,00	183.757.800,00	89,83	175.274.400,00
4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.388.591.000,00	6.244.250.000,00	115,86	3.365.500.000,00
5	Belanja Honorarium	842.086.000,00	737.986.000,00	87,64	717.343.500,00
	JUMLAH	226.578.833.154,00	241.634.119.110,00	106,64	186.560.450.469,00

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp55.073.668.641,00 atau 29,52%, dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah Rp186.560.450.469,00, yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai. Rincian realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya per Perangkat Daerah terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.40 Rincian Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya per Perangkat Daerah TA 2024

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	209.340.665.089,00	227.232.746.820,00	108,55	172.757.095.811,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	67.200.000,00	67.200.000,00	100,00	72.000.000,00
3	Dinas Sosial Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.600.000,00	16.350.000,00	98,49	15.600.000,00
5	Dinas Pangan	10.800.000,00	9.900.000,00	91,67	9.697.500,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	5.610.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00	0,00

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00	22.200.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	18.600.000,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00	15.600.000,00
11	Dinas Kebudayaan Daerah	15.600.000,00	14.300.000,00	91,67	0,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	15.600.000,00
13	Dinas Pariwisata Daerah	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	8.040.000,00
14	Dinas Pertanian Daerah	37.200.000,00	31.600.000,00	85,48	37.200.000,00
15	Dinas Perkebunan Daerah	22.200.000,00	17.050.000,00	76,80	18.600.000,00
16	Dinas Kehutanan	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	9.900.000,00
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	7.000.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00
19	Sekretariat Daerah	850.458.390,00	62.400.000,00	7,34	61.060.000,00
20	Sekretariat DPRD	57.600.000,00	28.800.000,00	50,00	28.800.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	18.600.000,00
22	Badan Pendapatan Daerah	15.930.369.675,00	13.923.452.280,00	87,40	13.382.257.158,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00	22.200.000,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	6.200.000,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	226.678.833.164,00	241.634.119.110,00	106,64	186.560.450.469,00

a. Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp13.902.806.290,00 atau 83,26% dari anggaran sebesar Rp16.697.402.065,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp13.371.611.158,00 terjadi penurunan sebesar Rp531.195.132,00 atau 3,97%. Kedua hal tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya target pada akhir tahun anggaran yang menyebabkan berkurangnya insentif yang diberikan. Adapun rincian Belanja Insentif sebagai berikut:

Tabel 5.1.41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif bagi ASN Pemungutan Pajak Daerah TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	**16.697.402.065,00**	**13.902.806.290,00**	**83,26**	**13.371.611.158,00**
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	6.036.686.167,00	5.128.676.690,00	84,93	4.639.452.502,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.321.797.117,00	3.539.442.621,00	81,90	3.435.803.228,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.280.670.062,00	3.624.424.788,00	84,67	3.224.900.941,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	75.386.736,00	47.225.916,00	62,64	3.178.388,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	1.980.861.983,00	1.563.036.275,00	78,91	2.168.276.099,00
	JUMLAH	16.697.402.065,00	13.902.806.290,00	83,26	13.371.611.158,00

b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru TA 2024 terealisasi sebesar Rp220.565.339.020,00 atau 108,42% dari anggaran sebesar Rp203.436.200.489,00. Realisasi tersebut melebihi anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD TA 2024. Hal tersebut disebabkan karena terdapat penyesuaian Pendapatan DAU atas tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi guru ASN di daerah, dimana sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang

Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah yang ditetapkan tanggal 16 November 2024 dan Perubahan APBD sudah ditetapkan tanggal 17 September 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Pergeseran Setelah Perubahan APBD sesuai Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 dalam hal terdapat kondisi darurat dan keperluan mendesak yang membutuhkan pergeseran anggaran. Oleh karena itu, Belanja TPG PNSD mendapat tambahan dana sebesar Rp30.737.285.000,00, sehingga total anggaran belanja tersebut menjadi Rp234.173.485.489,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp168.940.721.411,00, terjadi peningkatan sebesar Rp51.624.617.609,00 atau 30,56% yang disebabkan karena bertambahnya jumlah guru dan terdapat penyesuaian pendapatan DAU.

c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
Realisasi Belanja Tunjangan Khusus Guru TA 2024 terealisasi sebesar Rp183.757.800,00 atau 89,83% dari anggaran sebesar Rp204.553.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp175.274.400,00 terjadi peningkatan sebesar Rp8.483.400,00 atau 4,84%. Kedua hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai akan tetapi tidak sesuai dengan perhitungan proyeksi kebutuhan anggaran TA 2024 yang kurang dari perhitungan.

d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
Belanja Tunjangan Profesi Guru TA 2024 terealisasi sebesar Rp6.244.250.000,00 atau 115,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.398.591.000,00. Realisasi tersebut telah melebihi anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD TA 2024. Hal tersebut disebabkan karena terdapat penyesuaian Pendapatan DAU atas tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi guru ASN di daerah, dimana sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah yang ditetapkan tanggal 16 November 2024 dan Perubahan APBD sudah ditetapkan tanggal 17 September 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Pergeseran Setelah Perubahan APBD sesuai Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 dalam hal terdapat kondisi darurat dan keperluan mendesak yang membutuhkan pergeseran anggaran. Oleh karena itu, Belanja Tamsil PNSD mendapat tambahan dana sebesar Rp1.047.000.000,00, sehingga total anggaran belanja tersebut menjadi Rp6.445.591.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.355.500.000,00, terjadi peningkatan senilai Rp2.888.750.000,00 atau 86,09% yang disebabkan karena bertambahnya jumlah guru dan terdapat penyesuaian pendapatan DAU.

e. Belanja Honorarium
Belanja Honorarium TA 2024 terealisasi sebesar Rp737.966.000,00 atau 87,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp842.086.000,00. Realisasi tersebut tidak memenuhi

target disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang matang. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp717.343.500,00 terjadi kenaikan sebesar Rp20.622.500,00 atau 2,87%, yang disebabkan oleh peningkatan belanja pegawai dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

5.1.2.1.1.4.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 sebesar Rp31.890.262.574,00 atau 93,99% dari anggaran sebesar Rp33.931.172.358,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yang senilai Rp32.369.460.064,00, realisasi 2024 mengalami penurunan sebesar Rp479.197.490,00 atau 1,48%. Kedua hal tersebut disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang. Adapun rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00	1.393.350.000,00	97,14	1.404.900.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	227.936.000,00	156.117.000,00	68,49	163.893.000,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	178.456.760,00	115.509.900,00	64,37	133.759.740,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	143.430.000,00	119.070.000,00	83,02	120.675.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.736.000,00	2.020.357.500,00	97,14	2.037.105.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	203.703.000,00	137.112.000,00	67,31	183.483.000,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.025.000.000,00	7.860.000.000,00	97,94	7.950.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	1.275.000.000,00	62,96	1.965.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	632.632.242,00	591.227.460,00	93,43	606.572.361,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.744.564.356,00	8.438.316.714,00	96,50	8.632.571.963,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.633.000.000,00	9.234.000.000,00	95,86	9.158.000.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	599.575.000,00	550.200.000,00	91,77	13.500.000,00
JUMLAH		33.931.172.358,00	31.890.262.574,00	93,99	32.369.460.064,00

5.1.2.1.1.5.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dianggarkan pada Biro Umum Sekretariat Daerah. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 sebesar Rp1.293.445.627,00 atau 74,02% dari anggaran sebesar Rp1.747.460.106,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 2023 yaitu sebesar Rp332.013.704,00 atau 20,43%. Kedua hal tersebut disebabkan oleh karena adanya perencanaan yang kurang matang dan adanya pemilihan KDH/WKDH. Adapun rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	117.046.355,00	75.600.000,00	64,59	75.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.000.000,00	5.040.000,00	50,40	5.040.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	150.000.000,00	136.080.000,00	90,72	136.080.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.000.000,00	3.476.160,00	49,66	4.055.520,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.000.000,00	3.158.128,00	52,64	3.852.816,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00	1.440,00	14,40	1.680,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	24.710.400,00	16.070.400,00	65,03	18.950.400,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	250.000,00	155.520,00	62,21	155.520,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	600.000,00	466.560,00	77,76	466.560,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.431.843.361,00	1.053.397.419,00	73,57	1.381.256.835,00
JUMLAH		1.747.460.106,00	1.293.446.627,00	74,02	1.625.469.331,00

5.1.2.1.1.6.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dianggarkan pada Biro Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah. Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 sebesar Rp2.230.218.424,00 atau 89,95% dari anggaran sebesar Rp2.479.519.745,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.467.519.740,00, terdapat penurunan sebesar Rp237.301.316,00 atau 9,62%. Kedua hal tersebut disebabkan karena perencanaan yang kurang matang. Adapun rincian Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	252.000.000,00	70,00	348.000.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.119.519.745,00	1.978.218.424,00	93,33	2.119.519.740,00
	JUMLAH	2.479.519.745,00	2.230.218.424,00	89,95	2.467.519.740,00

5.1.2.1.2.Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah. Belanja Barang dan Jasa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mencapai target kinerja, dan melayani masyarakat.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp853.103.584.447,00 atau 91,82% dari anggaran sebesar Rp929.058.077.066,00. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hambatan yang ditemukan pada saat proses administrasi. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp906.534.798.730,00 terjadi penurunan sebesar Rp53.431.214.283,00 atau 5,89%. Belanja Barang dan Jasa menurut objek belanja seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Barang	304.118.936.142,51	289.334.293.037,00	95,14	236.235.641.226,00
2	Belanja Jasa	494.290.412.188,49	440.916.771.752,00	89,20	427.167.806.850,00
3	Belanja Pemeliharaan	38.073.142.993,00	35.775.958.981,00	93,97	35.930.662.691,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	90.730.535.339,00	85.304.550.677,00	94,02	80.946.510.731,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.845.060.403,00	1.772.010.000,00	96,04	853.427.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
6	Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00	0,00	115.400.650.032,00
	JUMLAH	929.958.077.066,00	853.103.584.447,00	91,82	908.534.799.730,00

5.1.2.1.2.1.Belanja Barang

Realisasi Barang TA 2024 sebesar Rp289.334.293.037,00 dari anggaran sebesar Rp304.118.936.142,51 atau 95,14%. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hambatan yang ditemukan pada saat proses administrasi. Sementara itu, terdapat peningkatan realisasi dari TA 2023 ke TA 2024 sebesar Rp53.098.651.811,00 atau 22,48% yang salah satunya disebabkan oleh peningkatan alokasi anggaran yang ditetapkan dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.1.46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Barang Pakai Habis**	**304.113.907.842,51**	**289.329.289.537,00**	**95,14**	**236.230.716.726,00**
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	770.423.068,51	623.730.176,00	80,96	1.384.869.289,00
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	7.104.153.116,00	7.020.904.185,00	98,83	5.890.539.117,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.662.811.286,00	1.556.380.564,00	93,60	1.507.097.633,00
	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.732.918.618,00	3.438.790.528,00	92,12	3.651.920.083,00
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	292.685.000,00	287.452.500,00	98,21	339.772.075,00
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	109.410.765,00	109.035.620,00	88,66	75.582.400,00
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.305.734.330,00	1.279.235.789,00	97,97	1.378.341.143,00
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	370.000.000,00	366.447.500,00	99,04	220.683.715,00
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	181.108.000,00	174.022.470,00	96,09	174.461.870,00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.548.773.731,00	5.211.583.610,00	93,92	5.041.339.371,00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	629.902.474,00	554.576.682,00	88,04	473.309.562,00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	278.490.120,00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	30.892.000,00	30.272.000,00	97,99	57.314.800,00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.484.855.300,00	6.140.867.114,00	94,69	6.231.475.643,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.890.167.430,00	6.513.932.008,00	94,54	5.870.992.977,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.298.852.800,00	10.958.477.537,00	97,00	10.137.252.262,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.167.149.910,00	1.137.557.329,00	97,46	1.103.458.963,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8.761.879.136,00	8.551.177.642,00	97,60	7.571.743.800,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.860.765.626,00	5.823.094.532,00	99,36	4.772.998.815,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.654.989.980,00	2.629.811.608,00	99,05	2.371.184.129,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	70.000.000,00	69.897.810,00	99,85	56.767.620,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	714.442.300,00	704.786.888,00	98,65	85.439.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.264.423.000,00	1.181.545.250,00	93,45	546.050.800,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.200.237.640,00	3.050.837.262,00	95,33	2.740.299.490,00
	Belanja Obat-Obatan-Obat	34.607.871.752,00	33.981.065.606,00	98,19	21.237.030.019,00
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	30.469.945.273,00	29.777.686.722,00	97,73	20.640.298.326,00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	53.099.229.122,00	50.398.935.906,00	94,91	73.397.424.705,00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	48.941.718.596,00	45.699.213.361,00	93,37	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	70.129.800,00	70.003.260,00	99,82	71.260.000,00
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.329.355.874,00	1.294.226.998,00	97,36	1.535.127.940,00
	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	387.412.357,00	331.092.000,00	85,46	736.554.026,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.934.722.242,00	28.293.503.130,00	94,52	30.074.230.470,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.772.721.150,00	6.742.640.280,00	99,56	6.423.483.434,00
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	11.319.170.138,00	9.155.401.850,00	80,88	6.983.973.100,00
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.357.424.728,00	5.014.543.581,00	93,60	3.348.988.798,00
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.868.200.000,00	3.864.533.689,00	99,90	3.630.262.825,00
	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	246.420.000,00	246.396.000,00	99,97	193.000.000,00
	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.564.500.000,00	1.188.735.000,00	75,98	729.300.000,00
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	196.480.000,00	192.744.800,00	98,10	220.672.000,00
	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	265.910.000,00	261.066.976,00	98,18	309.724.900,00
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.885.999.300,00	1.845.153.855,00	97,83	1.359.497.000,00
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	612.000.000,00	602.091.500,00	98,38	149.516.650,00
	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	183.655.000,00	175.189.250,00	95,39	167.957.000,00
	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	139.940.000,00	137.419.250,00	98,20	156.961.178,00
	Belanja Pakaian KORPRI	229.200.000,00	224.343.600,00	97,88	360.716.000,00
	Belanja Pakaian Adat Daerah	397.495.000,00	362.870.000,00	91,29	346.400.000,00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.656.552.000,00	1.629.168.000,00	98,35	662.999.600,00
	Belanja Pakaian Olahraga	629.680.000,00	626.888.250,00	99,56	1.531.936.378,00
2	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**5.028.300,00**	**5.023.500,00**	**99,90**	**4.924.500,00**
	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	5.028.300,00	5.023.500,00	99,90	4.924.500,00
	JUMLAH	364.118.936.142,51	289.334.293.037,00	95,14	236.235.541.226,00

5.1.2.1.2.2.Belanja Jasa

Belanja Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk membeli jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan nilai manfaat kurang dari 12 bulan. Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp440.916.771.752,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp494.290.412.188,49 atau 89,20%. Realisasi tersebut tidak memenuhi target salah satunya disebabkan oleh Tenaga Harian Lepas yang telah lulus seleksi menjadi PPPK. Sementara itu, realisasi TA 2024 mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp13.748.964.902,00 atau 3,22%, yang disebabkan oleh peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran jasa. Rincian tersebut terdiri dari:

Tabel 5.1.47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Jasa Kantor	389.526.833.912,49	344.573.842.918,00	88,46	335.482.741.377,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	48.162.697.532,00	42.841.950.156,00	88,95	52.340.225.668,00
3	Belanja Sewa Tanah	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.254.215.842,00	7.061.222.342,00	85,55	10.236.111.464,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.803.553.990,00	8.441.983.879,00	95,89	8.611.105.206,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	95.200.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.469.019.412,00	11.079.941.182,00	96,61	11.977.626.062,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.850.949.500,00	3.081.468.481,00	80,02	1.981.961.800,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.007.000.000,00	3.762.788.436,00	93,91	3.361.150.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan	20.199.342.000,00	20.056.574.576,00	99,29	3.061.485.273,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
	JUMLAH	494.290.412.188,49	440.916.771.752,00	89,20	427.167.806.850,00

a. Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2024 sebesar Rp344.573.842.918,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp389.526.633.912,49 atau 88,46%. Realisasi tersebut tidak mencapai target yang diakibatkan oleh terdapat pegawai yang berstatus Tenaga Harian Lepas lulus dalam seleksi PPPK. Sementara itu, realisasi TA 2024 mengalami peningkatan dari realisasi TA 2023 sebesar Rp9.091.101.541,00 atau 2,71% dikarenakan jumlah Tenaga Harian Lepas yang bertambah dari tahun sebelumnya. Rincian realisasi belanja jasa kantor tersebut terdiri dari:

Tabel 5.1.48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panita	4.137.858.580,00	3.459.961.500,00	83,62	6.441.442.500,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	615.400.272,00	555.400.000,00	90,25	1.403.090.000,00
3	Honorarium Rohaniwan	20.300.000,00	13.900.000,00	68,47	32.800.000,00
4	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	35.500.000,00	25.600.000,00	72,11	15.700.000,00
5	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	351.250.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	37.660.031.856,00	30.635.836.730,00	81,35	48.532.293.068,00
7	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	102.941.816.221,00	90.510.583.346,00	87,92	65.985.328.019,00
8	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.366.546.000,00	915.220.650,00	66,98	1.015.913.836,00
9	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	15.460.314.426,00	14.392.535.960,00	93,09	16.465.629.129,00
10	Belanja Jasa Tenaga Keterteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	16.776.223.996,00	16.334.831.348,00	97,37	16.576.290.840,00
11	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.322.667.250,00	1.266.504.350,00	95,75	784.756.216,00
12	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	3.416.952.000,00	2.153.383.325,00	63,02	3.047.416.850,00
13	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	397.320.000,00	276.134.650,00	69,50	308.835.584,00
14	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	13.000.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.830.647.855,00	48.214.485.414,00	86,36	42.888.073.152,00
16	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.517.914.413,00	24.184.051.202,00	79,25	24.446.133.607,00
17	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.565.586.830,00	2.457.138.580,00	95,77	3.028.714.360,00
18	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.589.058.849,00	8.221.100.000,00	95,72	8.356.713.695,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.180.228.922,00	15.831.002.693,00	92,15	14.927.932.859,00
20	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16.758.742.596,00	14.953.880.300,00	89,23	14.212.125.090,00
21	Belanja Jasa Tenaga Ceraka	357.588.000,00	264.754.250,00	74,04	296.314.368,00
22	Belanja Jasa Tenaga Supir	4.658.077.734,00	4.327.418.300,00	92,90	4.062.169.880,00
23	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	220.210.182,00	212.850.000,00	96,66	190.582.800,00
24	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	699.552.540,00	487.516.500,00	69,69	574.296.620,00
25	Belanja Jasa Audit/Surveilance ISO	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	10.500.000,00
26	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	310.800.000,00	280.150.000,00	90,14	387.539.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.828.392.000,00	1.635.702.000,00	89,46	1.696.975.732,00
28	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.152.050.000,00	4.042.659.456,00	97,37	4.790.102.368,00
29	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.042.092.035,00	859.809.000,00	85,38	783.093.003,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
30	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	446.861.042,00	438.356.784,00	98,10	308.467.800,00
31	Belanja Jasa Kalibrasi	36.200.000,00	35.399.625,00	97,79	35.241.500,00
32	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	668.230.716,00	578.617.508,00	86,59	449.420.728,00
33	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	7.880.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Jasa Jalan/Tol	147.508.796,00	147.500.000,00	100,00	184.575.000,00
35	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	21.789.014.500,00	21.755.744.031,00	99,85	19.264.015.178,00
36	Belanja Jasa Operator Kapal	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
37	Belanja Tagihan Telepon	277.511.000,00	208.751.600,00	75,22	155.268.598,00
38	Belanja Tagihan Air	1.865.337.712,00	1.600.224.424,00	85,79	1.650.381.225,00
39	Belanja Tagihan Listrik	16.494.886.993,00	17.108.468.679,00	92,50	17.094.971.855,00
40	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	404.122.500,00	261.435.000,00	64,69	326.613.300,00
41	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	13.454.486.867,00	13.428.905.799,00	99,81	12.743.370.115,00
42	Belanja Paket/Pengiriman	781.281.360,00	710.807.014,00	90,98	390.332.314,00
43	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.588.993.309,49	1.084.236.328,00	68,26	922.128.637,00
44	Belanja Lembur	468.133.957,00	437.778.000,00	93,52	306.274.000,00
45	Belanja Medical Check Up	51.815.000,00	44.718.000,00	86,30	13.686.560,00
	JUMLAH	389.526.633.912,49	344.573.842.918,00	88,46	335.482.741.377,00

b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 sebesar Rp42.841.950.156,00 dari anggaran sebesar Rp48.162.697.532,00 atau 88,95%. Realisasi tersebut tidak mencapai target yang diakibatkan oleh pegawai yang berstatus Tenaga Harian Lepas lulus dalam seleksi PPPK. Hal tersebut juga yang menyebabkan realisasi TA 2024 mengalami penurunan dari realisasi TA 2023 sebesar Rp9.498.275.512,00 atau 18,15%. Rincian realisasi belanja iuran jaminan/asuransi tersebut terdiri dari:

Tabel 5.1.49 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	24.325.860.400,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.701.641.624,00	7.280.683.737,00	62,22	8.110.509.973,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	852.846.275,00	441.090.147,00	51,72	9.473.580.521,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.008.209.633,00	551.055.465,00	54,66	10.430.274.774,00
5	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	200.000.000,00	198.814.168,00	99,41	0,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	6.400.000.000,00	6.399.976.284,00	100,00	0,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	8.000.000.000,00	7.970.330.355,00	99,63	0,00
	JUMLAH	48.162.697.532,00	42.841.950.156,00	88,95	52.340.225.668,00

c. Belanja Sewa Tanah

Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2024 sebesar Rp17.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp17.000.000,00 atau 100,00% yang dialokasikan pada Dinas Kebudayaan Daerah. Realisasi TA 2024 meningkat dari TA 2023 karena terdapat kegiatan pentas yang dianggarkan dan diadakan pada Tahun 2024.

Tabel 5.1.50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00

d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp7.061.222.342,00 dari anggaran sebesar Rp8.254.215.842,00 atau 85,55%. Realisasi tersebut tidak mencapai target yang salah satunya diakibatkan oleh terdapat kendala pada proses administrasi. Realisasi TA 2024 juga mengalami penurunan dari realisasi TA 2023 sebesar Rp3.174.889.122,00 atau 31,02%. Rincian realisasi belanja jasa kantor tersebut yang terdiri dari:

Tabel 5.1.51 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Sewa Electric Generating Set	238.000.000,00	234.005.030,00	98,32	362.295.000,00
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.742.298.277,00	1.622.828.640,00	93,14	2.483.891.869,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	317.250.000,00	204.650.000,00	64,51	285.662.000,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	137.000.000,00
5	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	222.000.000,00	0,00	0,00	325.600.000,00
6	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	23.411.225,00	22.682.600,00	96,89	56.620.000,00
7	Belanja Sewa Kapal Terbang	444.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
8	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	585.600.000,00	555.278.820,00	94,84	584.650.000,00
9	Belanja Sewa Mebel	2.839.476.200,00	2.650.871.412,00	93,36	3.830.924.404,00
10	Belanja Sewa Alat Pendingin	344.835.140,00	343.985.160,00	99,75	457.500.000,00
11	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	686.445.000,00	621.427.230,00	90,53	760.460.000,00
12	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	811.000.000,00	805.493.450,00	99,32	861.688.200,00
	JUMLAH	8.254.215.842,00	7.061.222.342,00	85,55	10.238.111.464,00

e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp8.441.983.679,00 dari anggaran sebesar Rp8.803.553.990,00 atau 95,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terdapat penurunan sebesar Rp169.121.527,00 atau 1,96%. Rincian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan terdiri dari:

Tabel 5.1.52 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	582.000.000,00	581.900.000,00	99,98	516.500.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	440.700.000,00	382.144.590,00	86,71	576.365.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	288.000.000,00	264.437.589,00	91,82	177.700.000,00
4	Belanja Sewa Hotel	7.471.853.990,00	7.217.101.500,00	96,59	7.272.950.206,00
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	41.000.000,00	16.400.000,00	40,00	67.600.000,00
	JUMLAH	8.803.553.990,00	8.441.983.679,00	95,89	8.611.105.206,00

f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2024 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi pada TA 2024.

Tabel 5.1.53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Sewa Audio Visual	0,00	0,00	0,00	95.200.000,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.200.000,00**

g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2024 sebesar Rp11.079.941.182,00 dari yang anggaran sebesar Rp11.469.019.412,00 atau 96,61%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terdapat penurunan sebesar Rp897.884.880,00 atau 7,50%. Rincian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri dari:

Tabel 5.1.54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	3.272.863.000,00	3.226.431.374,00	98,58	3.306.382.062,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	281.825.802,00	269.996.400,00	95,77	642.188.912,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.025.000.000,00	1.010.458.530,00	98,58	694.645.920,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.825.000.000,00	1.782.930.951,00	97,69	1.273.515.487,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	157.690.000,00	154.956.000,00	98,33	692.140.500,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	278.367.333,00	112.923.075,00	40,57	222.799.200,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.516.107.617,00	2.443.754.543,00	97,05	4.203.309.424,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.280.613.000,00	1.264.314.249,00	98,73	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	778.552.460,00	763.176.060,00	98,03	894.844.537,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00	48.000.000,00
	JUMLAH	**11.469.019.412,00**	**11.079.941.182,00**	**96,61**	**11.977.826.062,00**

h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2024 sebesar Rp3.081.468.461,00 dari anggaran sebesar Rp3.850.949.500,00 atau 80,02%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terdapat peningkatan sebesar Rp1.099.506.661,00 atau 55,48%. Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi terdiri dari:

Tabel 5.1.55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan	864.956.000,00	558.909.635,00	64,62	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	712.993.500,00	294.993.500,00	41,37	386.932.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.000.000.000,00	979.942.826,00	97,99	199.883.250,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.273.000.000,00	1.247.622.500,00	98,01	1.395.146.550,00
	JUMLAH	3.850.949.500,00	3.081.468.461,00	80,02	1.981.961.800,00

i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2024 sebesar Rp3.762.788.436,00 dari anggaran sebesar Rp4.007.000.000,00 atau 93,91%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terdapat peningkatan sebesar Rp381.638.436,00 atau 11,29%. Rincian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS terdiri dari:

Tabel 5.1.56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	507.000.000,00	505.733.436,00	99,75	0,00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	2.100.000.000,00	1.919.950.000,00	91,43	1.981.150.000,00
3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	1.400.000.000,00	1.337.105.000,00	95,51	1.400.000.000,00
	JUMLAH	4.007.000.000,00	3.762.788.436,00	93,91	3.381.150.000,00

j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 sebesar Rp20.056.574.578,00 dari anggaran sebesar Rp20.199.342.000,00 atau 99,29%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terdapat peningkatan sebesar Rp16.995.089.305,00 atau 555,13%. Rincian belanja terdiri dari :

Tabel 5.1.57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.199.342.000,00	20.056.574.578,00	99,29	3.061.485.273,00
	JUMLAH	20.199.342.000,00	20.056.574.578,00	99,29	3.061.485.273,00

5.1.2.1.2.3.Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp35.775.958.981,00 dari anggaran sebesar Rp38.073.142.993,00 atau 93,97%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terdapat penurunan sebesar Rp154.603.910,00 atau 0,43%. Rincian Belanja Pemeliharaan terdiri dari:

Tabel 5.1.58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.462.938.724,00	25.434.412.158,00	92,61	24.590.337.121,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.523.121.000,00	3.296.215.650,00	93,56	5.058.186.487,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.674.123.269,00	6.634.081.173,00	99,40	6.312.039.283,00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	412.960.000,00	411.250.000,00	99,59	0,00
	JUMLAH	38.073.142.993,00	35.775.958.981,00	93,97	35.930.562.891,00

a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp25.434.412.158,00 dari anggaran sebesar Rp27.462.938.724,00 atau 92,61%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terdapat peningkatan sebesar Rp874.075.037,00 atau 3,56%. Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 5.1.59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	226.500.000,00	201.137.047,00	88,80	422.103.362,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	551.350.000,00	488.069.620,00	88,52	494.727.394,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	513.664.250,00	479.787.056,00	93,37	446.483.840,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.604.686.650,00	17.146.776.338,00	97,40	16.339.684.374,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	515.715.621,00	425.097.347,00	82,43	420.169.515,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	383.382.650,00	378.379.324,00	98,69	384.063.593,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1.828.332.950,00	1.206.970.154,00	66,01	625.969.825,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.892.615.603,00	1.742.579.933,00	92,07	2.110.407.243,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	193.900.000,00	137.599.675,00	70,96	144.032.500,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.420.771.000,00	2.155.539.253,00	89,04	1.559.368.689,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.331.800.000,00	1.072.474.410,00	80,53	1.612.326.816,00
	JUMLAH	**27.462.938.724,00**	**25.434.412.158,00**	**92,61**	**24.560.337.121,00**

Rincian realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin per perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Per Perangkat Daerah TA 2024

NO	NAMA SKPD	REALISASI 2024
1	Dinas Pendidikan Daerah	379.657.643,00
2	Cabang Dinas Sangihe	23.170.000,00
3	UPTD SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kalasey Provinsi Sulawesi Utara	59.987.000,00
4	UPTD Balai Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan	35.338.200,00
5	Cabang Dinas Bolaang Mongondow Selatan	26.000.000,00
6	Cabang Dinas Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara	33.930.000,00
7	Cabang Dinas Bolaang Moegondow Timur Dan Kotamobagu	25.200.000,00
8	Cabang Dinas Tomohon Dan Minahasa	37.640.000,00
9	Cabang Dinas Kepulauan Talaud	33.930.000,00
10	Cabang Dinas Minahasa Utara Dan Bitung	33.926.750,00
11	Cabang Dinas Bolaang Mongondow	32.000.000,00
12	Dinas Kesehatan Daerah	856.212.352,00
13	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan	147.172.200,00
14	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Provinsi Sulawesi Utara	1.792.116.192,00
15	UPTD Rumah Sakit Mata	1.144.179.206,00
16	UPTD RSJ Prof. Dr. V.L.Ratumbuysang	224.942.580,00

NO	NAMA SKPD	REALISASI 2024
17	UPTD RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung	184.561.004,00
18	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	145.348.524,00
19	Balai Pelatihan Kesehatan	84.156.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah	339.994.557,00
21	UPTD Wilayah I	30.110.530,00
22	UPT Balai Bina Teknik	15.170.000,00
23	UPT Balai Peralatan Dan Pengujian	285.719.200,00
24	UPTD Air Minum	40.821.000,00
25	UPTD Wilayah IV Talaud	36.165.000,00
26	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah	452.785.666,00
27	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	243.986.732,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	158.094.080,00
29	Dinas Sosial Daerah	107.744.105,00
30	UPTD Balai Penyantunan Sosial Anak Dan Remaja Terlantar Makaaruyen Tomohon	13.000.000,00
31	UPTD Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar - Senja Cerah	20.700.000,00
32	Dinas Lingkungan Hidup	87.759.972,00
33	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Daerah	129.264.000,00
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah	117.940.100,00
35	Dinas Perhubungan Daerah	1.602.989.330,00
36	Dinas Komunikasi, Informatika, PeRSandian Dan Statistik Daerah	112.404.299,00
37	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah	120.650.000,00
38	UPTD Balai Diklat Koperasi Dan Ukm	1.750.000,00
39	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	40.519.000,00
40	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	178.700.539,00
41	Dinas Kebudayaan Daerah	38.476.000,00
42	UPTD Taman Budaya Dan Museum	17.729.800,00
43	Dinas Perpustakaan Dan KeaRSipan Daerah	51.174.191,00
44	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah	238.289.500,00
45	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah	178.914.723,00
46	UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak	26.385.000,00
47	Dinas Pangan Daerah	271.915.702,00
48	UPTD Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	27.690.855,00
49	Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah	365.345.031,00
50	UPT Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah II Minahasa Tenggara	28.394.000,00
51	UPT Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah IV	17.500.000,00
52	UPT Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah III	10.000.000,00
53	UPTD Balai Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	27.500.000,00
54	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa	19.305.000,00
55	UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah I	990.000,00
56	UPTD Balai Perbenihan Dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan	20.493.770,00
57	Dinas Pariwisata Daerah	72.399.500,00
58	Dinas Pertanian Daerah	207.449.060,00
59	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	31.930.000,00
60	UPTD Balai Perlindungan Dan Pengujian Mutu Tanaman Pangan Dan Hortikultura	33.930.000,00
61	UPTD Balai Pengembangan Bibit Ternak Dan Benih Pertanian	28.605.000,00
62	UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian	27.838.070,00
63	UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih TPH	38.280.000,00
64	Dinas Perkebunan Daerah	259.377.070,00
65	UPTD Balai Pengujian, Pengawasan Dan Sertifikasi Benih	50.757.998,00
66	Dinas Kehutanan	250.858.035,00
67	UPTD Model Unit IV Poigar (Poigar Bolaang Mongondow Dan Poigar Minahasa)	23.260.000,00
68	UPTD Kesatuan Pengelola Hutan KPHL Unit VI	31.180.000,00
69	Balai Perbenihan Dan Pemuteraan Alam	45.024.080,00
70	UPTD Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V.Worang	46.770.000,00
71	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit V (Minahasa, Mitra, Minsel, Tomohon)	33.930.000,00
72	UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Unit III Sangihe, Talaud Dan Sitaro	8.800.000,00
73	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	110.407.581,00
74	UPTD Balai Pengujian Dan Peralatan Pertambangan	20.090.000,00
75	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	154.694.480,00
76	Biro Umum	6.115.465.811,00
77	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	88.900.000,00
78	Biro Hukum	53.947.436,00
79	Biro Kesejahteraan Rakyat	12.790.500,00
80	Biro Perekonomian	23.505.000,00
81	Biro Administrasi Pembangunan	158.509.000,00
82	Biro Organisasi	42.087.439,00
83	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	183.222.824,00
84	Biro Administrasi Pimpinan	204.748.000,00
85	Sekretariat DPRD	1.153.280.506,00
86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	351.085.985,00
87	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	714.181.485,00
88	Badan Pendapatan Daerah	736.148.325,00

NO	NAMA SKPD	REALISASI 2024
89	UPTD Manado	33.250.000,00
90	UPTD Minahasa	29.750.000,00
91	UPTD Minahasa Utara	32.642.435,00
92	UPTD Kotamobagu	36.098.200,00
93	UPTD Minahasa Tenggara	64.417.500,00
94	UPTD Tomohon	32.385.000,00
95	UPTD Bolaang Mongondow	34.369.670,00
96	UPTD Bitung	73.403.999,00
97	UPTD Minahasa Selatan	73.734.900,00
98	UPTD Sangihe, Talaud, Siau Tagulandang Biaro	34.284.950,00
99	Badan Kepegawaian Daerah	225.696.996,00
100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	176.856.450,00
101	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	85.039.970,00
102	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	49.960.000,00
103	Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Utara	1.375.970.000,00
104	Inspektorat Daerah	608.883.232,00
105	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	397.914.517,00
	TOTAL	25.434.412.153,00

b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp3.296.215.650,00 dari anggaran sebesar Rp3.523.121.000,00 atau 93,56%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terdapat penurunan sebesar Rp1.761.970.837,00 atau 34,83%. Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terdiri dari:

Tabel 5.1.61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.523.121.000,00	3.296.215.650,00	93,56	5.058.186.487,00
	JUMLAH	3.523.121.000,00	3.296.215.650,00	93,56	5.058.186.487,00

Rincian realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan per perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Per Perangkat TA 2024

NO	NAMA SKPD	REALISASI 2024
1	Dinas Kesehatan Daerah	67.309.000,00
2	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Provinsi Sulawesi Utara	210.166.796,00
3	UPTD Rumah Sakit Mata	227.210.450,00
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah	187.172.206,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	49.125.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.733.700,00
7	Dinas Sosial Daerah	165.307.295,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah	24.990.000,00
9	Dinas Pariwisata Daerah	95.665.000,00
10	Biro Umum	828.295.603,00
11	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	31.838.130,00
12	Sekretariat DPRD	865.144.716,00
13	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	85.485.000,00
14	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	41.215.500,00
15	Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Utara	25.000.000,00
16	Inspektorat Daerah	328.548.252,00
17	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	26.001.000,00
	TOTAL	3.296.215.650,00

c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp6.634.081.173,00 dari anggaran sebesar Rp6.674.123.269,00 atau 99,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terdapat peningkatan sebesar Rp322.041.890,00 atau 5,10%. Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan

Irigasi terdiri dari:

Tabel 5.1.63 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi	2.188.631.984,00	2.184.916.023,00	99,83	2.067.521.420,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	3.934.437.824,00	3.929.352.789,00	99,87	3.338.593.697,00
3	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	50.000.000,00	49.853.975,00	99,73	99.653.913,00
4	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	501.153.461,00	469.948.386,00	93,77	816.270.253,00
	JUMLAH	**6.674.123.269,00**	**6.634.081.173,00**	**99,40**	**6.312.039.283,00**

Rincian realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.64 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per Perangkat TA 2024

NO	NAMA SKPD	REALISASI 2024
1	Dinas Kesehatan Daerah	10.587.000,00
2	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Provinsi Sulawesi Utara	199.373.300,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah	3.595.408.365,00
4	UPTD Wilayah I	1.092.586.146,00
5	UPTD Wilayah II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan	905.639.501,00
6	UPTD Wilayah IV Talaud	281.212.800,00
7	UPTD Wilayah III Sitaro Dan Sangihe	239.423.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	19.282.000,00
9	Biro Umum	241.341.561,00
10	Sekretariat DPRD	49.228.500,00
	TOTAL	**6.634.081.173,00**

d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud TA 2024 sebesar Rp411.250.000,00 dari anggaran sebesar Rp412.960.000,00 atau 99,59% yang terdiri dari:

Tabel 5.1.65 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	412.960.000,00	411.250.000,00	99,59	0,00
	JUMLAH	**412.960.000,00**	**411.250.000,00**	**99,59**	**0,00**

Rincian realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud per perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.66 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud per Perangkat Daerah TA 2024

NO	NAMA SKPD	REALISASI 2024
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	411.250.000,00
	TOTAL	**411.250.000,00**

5.1.2.1.2.4.Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp85.304.550.677,00 dari anggaran sebesar Rp90.730.535.339,00 atau 94,02%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terdapat penurunan sebesar Rp5.641.960.054,00 atau 6,20%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari:

Tabel 5.1.67 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.211.202.497,00	84.275.355.819,00	95,54	87.863.639.682,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.519.332.842,00	1.029.194.858,00	40,86	3.082.871.049,00
	JUMLAH	**90.730.535.339,00**	**85.304.550.677,00**	**94,02**	**90.946.510.731,00**

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2024 sebesar Rp84.275.355.819,00 dari anggaran sebesar Rp88.211.202.497,00 atau 95,54%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terdapat penurunan sebesar Rp3.588.283.863,00 atau 4,08%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari:

Tabel 5.1.68 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	81.637.912.481,00	78.159.065.844,00	95,74	77.301.092.647,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.573.290.016,00	6.116.289.975,00	93,05	10.505.547.035,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00
	JUMLAH	**88.211.202.497,00**	**84.275.355.819,00**	**95,54**	**87.863.639.682,00**

Rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri per perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.69 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Per Perangkat Daerah TA 2024

NO	NAMA SKPD	REALISASI 2024
1	Dinas Pendidikan Daerah	2.749.486.522,00
2	Cabang Dinas Sangihe	124.064.400,00
3	Cabang Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	186.774.000,00
4	UPTD Balai Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan	105.936.397,00
5	Cabang Dinas Siau Tagulandang Biaro	112.934.400,00
6	Cabang Dinas Bolaang Mongondow Selatan	93.390.800,00
7	Cabang Dinas Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara	79.800.000,00
8	Cabang Dinas Bolaang Mongondow Timur Dan Kotamobagu	146.646.000,00
9	Cabang Dinas Tomohon Dan Minahasa	81.400.000,00
10	Cabang Dinas Kepulauan Talaud	139.101.540,00
11	Cabang Dinas Minahasa Utara Dan Bitung	74.540.000,00
12	Cabang Dinas Bolaang Mongondow	111.260.000,00
13	Dinas Kesehatan Daerah	2.015.740.298,00
14	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Ncongan	284.717.269,00
15	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Provinsi Sulawesi Utara	400.293.705,00
16	UPTD Rumah Sakit Mata	948.180.999,00
17	UPTD Rsj Prof. Dr. V.L.Ratumbuysang	142.599.082,00
18	UPTD RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung	135.018.483,00
19	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	310.926.258,00
20	Balai Pelatihan Kesehatan	23.130.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah	2.387.557.101,00
22	UPTD Wilayah I	179.820.000,00
23	UPTD Wilayah II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan	59.609.600,00
24	UPT Balai Bina Teknik	410.698.897,00
25	UPT Balai Peralatan Dan Pengujian	157.620.000,00
26	UPT Persampahan	98.851.417,00
27	UPTD Air Minum	59.050.500,00
28	UPTD Wilayah IV Talaud	141.268.200,00
29	UPTD Wilayah III Sitaro Dan Sangihe	139.747.000,00
30	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah	1.573.933.836,00
31	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	393.734.262,00
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	496.592.583,00
33	Dinas Sosial Daerah	991.328.108,00

NO	NAMA SKPD	REALISASI 2024
34	UPTD Balai Penyantunan Sosial Anak Dan Remaja Terlantar Makaaruyen Tomohon	33.916.000,00
35	Dinas Lingkungan Hidup	849.940.760,00
36	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Daerah	437.917.120,00
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah	2.533.626.888,00
38	Dinas Perhubungan Daerah	402.417.471,00
39	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	179.515.000,00
40	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Daerah	870.269.734,00
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah	1.261.383.201,00
42	UPTD Balai Diklat Koperasi Dan UKM	167.635.520,00
43	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	766.261.436,00
44	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Daerah	441.738.912,00
45	Dinas Kebudayaan Daerah	493.955.906,00
46	UPTD Taman Budaya Dan Museum	33.144.000,00
47	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	302.889.141,00
48	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah	313.268.136,00
49	UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja	142.027.800,00
50	UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	106.670.000,00
51	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah	1.294.054.903,00
52	UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak	177.604.011,00
53	Dinas Pangan Daerah	278.403.969,00
54	UPTD Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	95.465.720,00
55	Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah	711.954.291,00
56	UPT Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah II Minahasa Tenggara	21.320.000,00
57	UPT Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah IV	36.920.000,00
58	UPT Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah III	41.665.000,00
59	UPTD Balai Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	23.810.000,00
60	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa	11.840.000,00
61	UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah I	34.128.000,00
62	UPTD Balai Perbenihan Dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan	16.519.115,00
63	Dinas Pariwisata Daerah	784.686.913,00
64	Dinas Pertanian Daerah	630.869.947,00
65	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	111.859.900,00
66	UPTD Balai Perlindungan Dan Pengujian Mutu Tanaman Pangan Dan Hortikultura	68.361.900,00
67	UPTD Balai Pengembangan Bibit Ternak Dan Benih Pertanian	72.930.000,00
68	UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian	64.698.000,00
69	UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tph	67.254.105,00
70	Dinas Perkebunan Daerah	527.303.498,00
71	UPTD Balai Pengujian, Pengawasan Dan Sertifikasi Benih	237.148.284,00
72	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan	211.962.450,00
73	Dinas Kehutanan	809.817.189,00
74	UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit II Bolaang Mongondow Selatan Dan Bolaang Mongondow Timur	97.094.000,00
75	UPTD Model Unit IV Polgar (Polgar Bolaang Mongondow Dan Polgar Minahasa)	68.620.000,00
76	UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Kphl Unit VI	74.020.000,00
77	Balai Perbenihan Dan Pensuteraan Alam	49.020.000,00
78	UPTD Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V Worang	44.770.000,00
79	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Unit V (Minahasa, Mitra, Minsel, Tomohon)	64.440.000,00
80	UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Unit III Sangihe, Talaud Dan Sitaro	87.913.400,00
81	UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit I Bolaang Mongondow Dan Bolaang Mongondow Utara	93.640.000,00
82	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	432.157.658,00
83	Cabang Dinas Wilayah I	68.280.000,00
84	Cabang Dinas Wilayah III	73.135.000,00
85	Cabang Dinas Wilayah IV	7.160.000,00
86	UPTD Balai Pengujian Dan Peralatan Pertambangan	49.980.000,00
87	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	2.640.816.760,00
88	UPTD Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang	146.336.720,00
89	Biro Umum	1.249.818.240,00
90	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	254.802.473,00
91	Biro Hukum	733.285.246,00
92	Biro Kesejahteraan Rakyat	732.643.035,00
93	Biro Perekonomian	341.286.139,00
94	Biro Administrasi Pembangunan	285.162.146,00
95	Biro Organisasi	594.392.689,00
96	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	562.308.121,00
97	Biro Administrasi Pimpinan	7.251.963.921,00
98	Sekretariat DPRD	20.434.700.028,00
99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.344.987.845,00
100	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	2.271.188.684,00
101	Badan Pendapatan Daerah	1.587.155.265,00
102	UPTD Manado	118.230.000,00
103	UPTD Minahasa	37.100.000,00
104	UPTD Minahasa Utara	132.510.000,00

NO	NAMA SKPD	REALISASI 2024
105	UPTD Kotamobagu	21.302.000,00
106	UPTD Minahasa Tenggara	166.110.000,00
107	UPTD Tomohon	64.640.000,00
108	UPTD Bolaang Mongondow	46.510.000,00
109	UPTD Bitung	120.000.000,00
110	UPTD Minahasa Selatan	122.280.000,00
111	UPTD Sangihe, Talaud, Siau Tagulandang Biaro	109.477.000,00
112	Badan Kepegawaian Daerah	1.414.703.422,00
113	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.402.379.915,00
114	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	329.800.628,00
115	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	435.478.486,00
116	Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Utara	592.548.303,00
117	Inspektorat Daerah	4.759.520.693,00
118	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	1.692.450.962,00
	TOTAL	84.275.355.819,00

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2024 sebesar Rp1.029.194.858,00 dari anggaran sebesar Rp2.519.332.842,00 atau 40,85%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terdapat penurunan sebesar Rp2.053.676.191,00 atau 66,62%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari:

Tabel 5.1.70 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	2.519.332.842,00	1.029.194.858,00	40,85	3.082.871.049,00
	JUMLAH	2.519.332.842,00	1.029.194.858,00	40,85	3.082.871.049,00

Rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri per perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.71 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2024

NO	NAMA SKPD	REALISASI 2024
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	344.725.674,00
2	Biro Umum	496.720.068,00
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	187.749.116,00
	TOTAL	1.029.194.858,00

5.1.2.1.2.5.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat TA 2024 hanya dianggarkan untuk Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Belanja tersebut dianggarkan sebesar Rp1.845.050.403,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.772.010.000,00 atau 96,04%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terdapat peningkatan sebesar Rp918.583.000,00 atau 107,63% yang rinciannya tertera dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.72 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.845.050.403,00**	**1.772.010.000,00**	**96,04**	**853.427.000,00**
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	997.050.403,00	996.870.000,00	99,98	848.495.000,00
	Belanja Beasiswa	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	4.932.000,00
	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	148.000.000,00	76.140.000,00	51,45	0,00
	JUMLAH	1.845.050.403,00	1.772.010.000,00	96,04	853.427.000,00

5.1.2.1.3.Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk membayar bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki Kewajiban atas Bunga Pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 14 Tanggal 17 Oktober 2018 tentang Perjanjian Pinjaman Pembiayaan PT SMI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas Pembangunan RSUD Tipe B Provinsi Sulawesi Utara, Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 3 Tanggal 12 Februari 2019 Perjanjian Pinjaman Pembiayaan PT. SMI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas Pembangunan UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara serta Perubahannya, Akta Perjanjian Nomor 25 Tanggal 25 September 2020 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman Kegiatan untuk Mendukung Program PEN Daerah Tahun 2020, serta Perubahannya, dan Akta Perjanjian Nomor: PERJ-130/SMI/0821 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman Kegiatan untuk Mendukung Program PEN Daerah Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menganggarkan Belanja Bunga pada APBD TA 2024 sebesar Rp32.309.693.862,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.73 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang	32.309.693.862,00	8.879.864.279,00	27,48	16.194.564.352,00
	JUMLAH	**32.309.693.862,00**	**8.879.864.279,00**	**27,48**	**16.194.564.352,00**

Realisasi Belanja Bunga TA 2024 adalah Rp8.879.864.279,00 atau 27,48%. Realisasi tersebut merupakan Pembayaran Bunga Reguler TA 2024. Realisasi TA 2023 sebesar Rp16.194.564.352,00, sehingga mengalami penurunan pada TA 2024 senilai Rp7.314.700.073,00 atau 45,17%. Penurunan tersebut terjadi karena pembayaran bunga berdasarkan skema pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang mana persentase untuk pembayaran bunga semakin menurun setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, realisasi belanja bunga sebesar Rp32.309.693.862,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga Reguler sebesar Rp8.879.864.279,00 dan Pembayaran Bunga melalui Potongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp23.429.829.583,00. Rincian realisasi Belanja Bunga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.74 Rincian Realisasi Belanja Bunga TA 2024

PERIODE PENYALURAN DAU	REALISASI PEMBAYARAN BUNGA MELALUI POTONGAN DAU		REALISASI PEMBAYARAN BUNGA REGULER				
	PEMBAYARAN BUNGA PEN 2021	%	PEMBAYARAN BUNGA PINJAMAN PEMBANGUNAN RSUD	PEMBAYARAN BUNGA PINJAMAN PEMBANGUNAN RS MATA	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN PEN 2020	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN PEN 2021	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Januari	2.134.834.943,00	72,52	-	-	-	-	27,48
Februari	2.104.766.707,00		1.776.597.838,00	644.773.799,00	-	782.882.374,00	
Maret	1.940.846.957,00		-	-	-	-	
April	2.044.630.235,00		-	-	-	-	
Mei	1.949.576.126,00		1.347.031.156,00	469.253.920,00	-	-	
Juni	1.984.493.763,00		-	-	-	-	
Juli	1.891.379.541,00		-	-	-	-	

PERIODE PENYALURAN DAU	REALISASI PEMBAYARAN BUNGA MELALUI POTONGAN DAU		REALISASI PEMBAYARAN BUNGA REGULER				
	PEMBAYARAN BUNGA PEN 2021	%	PEMBAYARAN BUNGA PINJAMAN PEMBANGUNAN RSUD	PEMBAYARAN BUNGA PINJAMAN PEMBANGUNAN RS MATA	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN PEN 2020	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN PEN 2021	%
Agustus	1.924.357.291,00		970.064.466,00	362.777.284,00	-	-	
September	1.894.289.054,00		-	-	-	-	
Oktober	1.833.162.955,00		-	-	-	-	
November	1.894.289.054,00		-	-	942.352.071,00	657.458.184,00	
Desember	1.833.162.955,00		671.997.700,00	244.665.467,00	-	-	
	23.429.829.583,00	**72,62**	**4.785.691.180,00**	**1.731.870.490,00**	**942.352.071,00**	**1.440.160.558,00**	**27,48**
TOTAL	23.429.829.583,00	72,62	8.879.884.279,00				27,48

Pemotongan DAU Periode Penyaluran Bulan Januari s/d Desember TA 2024, Nominal Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman dibayarkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 39/KM.7/2023 Tanggal 20 Desember 2023. Untuk pemotongan DAU Periode Penyaluran bulan September s/d Desember Tahun 2024, nominal pembayaran pokok dan bunga pinjaman berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KM.7/2024 Tanggal 26 Agustus 2024.

5.1.2.1.4.Belanja Subsidi

Pada TA 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menganggarkan Belanja Subsidi sebesar Rp7.262.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.324.568.033,00 atau 59,55%. Subsidi ini terdiri dari Subsidi kepada BUMN (Dinas Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan BUMS (Dinas Pangan dan Biro Kesejahteraan Rakyat). Subsidi kepada BUMD tidak terealisasi dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp375.000.000,00.

Subsidi kepada BUMN terdiri dari *Direct Call Export* kepada PT Garuda Indonesia sebagai BUMN untuk Penerbangan Langsung Manado-Narita (Jepang) sebagai sub kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.568.498.033,00 serta Subsidi kepada Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan (Gerakan Pangan Murah) pada Dinas Pangan sebesar Rp60.000.000,00. Subsidi tersebut hanya terealisasi sebesar 41,61% dikarenakan kurangnya penumpang yang menggunakan akses penerbangan tersebut.

Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp375.000.000.000,00 tidak terealisasi karena tidak memenuhi persyaratan untuk pencairan atas belanja tersebut pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah.

Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta terdiri dari subsidi kepada Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1445 H / 2024 M dalam Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual pada Biro Kesejahteraan sebesar Rp2.196.520.000,00 serta Subsidi untuk kegiatan Gerakan Pangan Murah kepada Pihak Swasta pada Dinas Pangan sebesar Rp499.550.000,00.

Realisasi Belanja Subsidi TA 2023 sebesar Rp13.293.237.126,00, sehingga mengalami penurunan pada TA 2024 sebesar Rp8.968.669.093,00 atau 67,47% disebabkan karena berkurangnya kegiatan yang didukung oleh belanja subsidi pada TA 2024.

Tabel 5.1.75 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	3.914.000.000,00	1.628.498.033,00	41,61	9.362.395.126,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
2	Belanja Subsidi kepada BUMD	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	2.973.050.000,00	2.696.070.000,00	90,68	3.930.642.000,00
	JUMLAH	7.262.050.000,00	4.324.568.033,00	59,56	13.293.237.126,00

5.1.2.1.5.Belanja Hibah

Pada TA 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp429.871.807.765,00 dan realisasi sebesar Rp426.928.841.939,00 atau 99,32%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp190.226.012.667,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp236.702.829.272,00 atau 124,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.76 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	141.203.678.800,00	139.550.000.000,00	98,83	9.065.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
4	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	234.205.611.765,00	233.109.417.148,00	99,53	126.587.423.843,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	52.601.196.000,00	52.608.999.153,00	99,64	52.759.484.424,00
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.661.321.200,00	1.660.425.600,00	99,95	1.614.104.400,00
	JUMLAH	429.871.807.765,00	426.928.841.939,00	99,32	190.226.012.667,00

5.1.2.1.5.1.Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp141.203.678.800,00 dan terealisasi sebesar Rp139.550.000.000,00 atau 98,83%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp9.065.000.000,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp130.485.000.000,00 atau 1439,44%. Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Tabel 5.1.77 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	141.203.678.800,00	139.550.000.000,00	98,83	8.450.000.000,00
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	615.000.000,00
	JUMLAH	141.203.678.800,00	139.550.000.000,00	98,83	9.065.000.000,00

Atas hibah kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, telah diterima Laporan Penggunaan Dana Hibah dari KPU dan Bawaslu pada tanggal 16 Mei 2025. Pada laporan tersebut dicantumkan bahwa terdapat sisa dana hibah pada KPU sebesar Rp4.005.882.386,00 dan sisa dana hibah pada Bawaslu sebesar Rp154.398.203,00. Masing-masing sisa dana tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk sisa Dana Hibah pada KPU dan tanggal 5 Mei 2025 untuk sisa Dana Hibah pada Bawaslu.

Laporan Penggunaan Dana Hibah tersebut menjelaskan rincian anggaran, realisasi belanja dan sisa dana tanpa dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, pada Pasal 24 A ayat (4) yang menyatakan Tata cara pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mengikuti ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), tanpa adanya kewajiban bagi KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2.1.5.2.Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 tidak dianggarkan, sementara TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp200.000.000,00 seperti yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.78 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Biro Perekonomian	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00

5.1.2.1.5.3.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp234.205.611.765,00 dan terealisasi sebesar Rp233.109.417.146,00 atau 99,53%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp126.587.423.843,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp106.521.993.303,00 atau 84,15%.

Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagai berikut:

Tabel 5.1.79 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**215.155.611.765,00**	**218.769.417.146,00**	**101,68**	**101.616.840.643,00**
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.885.118.412,00	34.377.098.412,00	98,54	23.230.000.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	180.270.493.353,00	184.392.318.734,00	102,29	78.386.840.643,00
2	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**18.850.000.000,00**	**14.140.000.000,00**	**75,01**	**24.770.750.000,00**
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.850.000.000,00	14.140.000.000,00	75,01	24.770.750.000,00
3	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**100,00**	**199.833.200,00**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	199.833.200,00
	JUMLAH	**234.205.611.765,00**	**233.109.417.146,00**	**99,53**	**126.567.423.843,00**

a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp215.155.611.765,00 dan terealisasi sebesar Rp108.488.864.523,00 atau 50,42% dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp34.377.098.412,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp34.885.118.412,00 atau 98,54%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.80 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	0,00	0,00	0,00	4.220.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	1.100.000.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah	1.560.118.412,00	1.560.118.412,00	100,00	1.430.000.000,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
7	Dinas kepemudaan dan Olahraga Daerah	28.925.000.000,00	28.691.980.000,00	99,19	16.080.000.000,00
8	Dinas Pariwisata	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	450.000.000,00	300.000.000,00	66,67	200.000.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	400.000.000,00	275.000.000,00	68,75	0,00
	JUMLAH	**34.885.118.412,00**	**34.377.098.412,00**	**98,54**	**23.230.000.000,00**

2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp184.392.318.734,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp180.270.493.353,00 atau 102,29% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.81 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	105.478.404.000,00	110.280.552.623,00	104,55	43.626.230.837,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	74.442.089.353,00	73.790.816.111,00	99,13	34.611.849.806,00
3	Dinas Koperasi dan UKM	350.000.000,00	320.950.000,00	91,70	348.760.000,00
	JUMLAH	**180.270.493.353,00**	**184.392.318.734,00**	**102,29**	**78.386.840.643,00**

Realisasi Belanja Hibah tersebut telah mengakomodir realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP TA 2024 pada Dinas Pendidikan Daerah yang tercatat pada rekening Belanja Hibah Barang kepada Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial

yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Perbedaan pencatatan tersebut disebabkan oleh kesalahan dalam penganggaran. Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP TA 2024 yang tercatat pada Dinas Pendidikan Daerah dapat dilihat dalam Lampiran I.1 pada laporan keuangan ini:

Tabel 5.1.82 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP TA 2024

NO	NAMA SEKOLAH	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	SMA Negeri	62.326.214.357,00	63.344.144.312,00
2	SMK Negeri	46.409.364.266,00	50.354.415.620,00
3	SLB Negeri	1.544.974.000,00	1.702.290.100,00
	TOTAL	110.280.552.623,00	115.400.850.032,00

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp18.850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.140.000.000,00 atau 75,01% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.83 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	16.250.000.000,00	11.590.000.000,00	71,32	22.620.750.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	2.600.000.000,00	2.550.000.000,00	98,08	2.000.000.000,00
	JUMLAH	18.850.000.000,00	14.140.000.000,00	75,01	24.770.750.000,00

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.84 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kebudayaan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	199.833.209,00
	JUMLAH	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	199.833.209,00

5.1.2.1.5.4.Belanja Hibah Dana BOSP

Belanja Hibah Dana BOSP dianggarkan sebesar Rp52.801.196.000,00 dan terealisasi sebesar Rp52.608.999.193,00 atau 99,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp52.759.484.424,00 terjadi penurunan sebesar Rp150.485.231,00 atau 0,29%. Rincian Belanja Hibah Dana BOSP sebagai berikut:

Tabel 5.1.85 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Hibah Uang Dana BOSP yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	45.375.000.000,00	44.803.635.098,00	98,74	44.962.298.424,00
2	Belanja Hibah Uang Dana BOSP yang Diterima oleh Satdikus Swasta	7.426.196.000,00	7.805.364.095,00	105,11	7.797.186.000,00
	JUMLAH	52.801.196.000,00	52.608.999.193,00	99,64	52.759.484.424,00

a. Belanja Hibah Uang Dana BOSP yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
Belanja Hibah Uang Dana BOSP yang Diterima oleh Satdikmen Swasta terealisasi sebesar Rp44.803.635.098,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp45.375.000.000,00 atau 98,74%.

b. Belanja Hibah Uang Dana BOSP yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
Belanja Hibah Uang Dana BOSP yang Diterima oleh Satdiksus Swasta terealisasi sebesar Rp7.805.364.095,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.426.196.000,00 atau 105,11%.

5.1.2.1.5.5.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp1.661.321.200,00 dan terealisasi sebesar Rp1.660.425.600,00 atau 99,95%. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai berikut:

Tabel 5.1.86 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024

NO	Partai Politik	Anggaran	Realisasi	%
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	681.542.800,00	681.542.800,00	100,00
2	Partai Nasional Demokrat	220.410.400,00	220.410.400,00	100,00
3	Partai Golongan Karya	262.081.600,00	262.081.600,00	100,00
4	Partai Demokrat	161.065.200,00	161.065.200,00	100,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	126.072.400,00	126.072.400,00	100,00
6	Partai Amanat Nasional	53.024.000,00	53.024.000,00	100,00
7	Partai Kebangkitan Bangsa	58.439.600,00	58.439.600,00	100,00
8	Partai Keadilan Sejahtera	40.749.600,00	40.749.600,00	100,00
9	Partai Solidaritas Indonesia	41.904.800,00	41.904.800,00	100,00
10	Partai Persatuan Indonesia	15.135.200,00	15.135.200,00	100,00
11	Tanpa Partai	895.600,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**1.661.321.200,00**	**1.660.425.600,00**	**99,95**

5.1.2.1.6.Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan merupakan pengeluaran APBD yang digunakan untuk memberikan bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Bantuan ini sifatnya tidak berkelanjutan dan selektif, dengan tujuan melindungi dari risiko sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 telah terealisasi sebesar Rp1.087.345.000,00 dari yang teranggarkan sebesar Rp1.216.393.097,00 atau 89,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.047.898.400,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp39.446.600,00 atau 3,76%.

Tabel 5.1.87 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**	**588.000.000,00**	**477.450.000,00**	**81,20**	**225.250.000,00**
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	500.000.000,00	390.000.000,00	78,00	140.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	88.000.000,00	87.450.000,00	99,38	85.250.000,00
2	**Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat**	**82.000.000,00**	**81.600.000,00**	**99,51**	**209.648.400,00**
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	82.000.000,00	81.600.000,00	99,51	209.648.400,00
3	**Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**	**546.393.097,00**	**528.295.000,00**	**96,69**	**613.000.000,00**
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan	546.393.097,00	528.295.000,00	96,69	613.000.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	(Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
	Jumlah	**1.216.393.097,00**	**1.087.345.000,00**	**89,39**	**1.047.898.400,00**

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Belanja Bantuan Sosial diklasifikasikan berdasarkan jenis penerima atau kelompok penerima, diantaranya Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, kepada Kelompok Masyarakat dan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya). Belanja ini telah dialokasikan pada beberapa SKPD terkait, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.88 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial di SKPD TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Biro Kesejahteraan Rakyat**	**500.000.000,00**	**390.000.000,00**	**78,00**	**140.000.000,00**
	- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	500.000.000,00	390.000.000,00	78,00	140.000.000,00
2	**Dinas Sosial Daerah**	**716.393.097,00**	**697.345.000,00**	**97,34**	**907.898.400,00**
	- Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	88.000.000,00	87.450.000,00	99,38	85.250.000,00
	- Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	82.000.000,00	81.600.000,00	99,51	209.648.400,00
	- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	546.393.097,00	528.295.000,00	96,69	613.000.000,00
	JUMLAH	**1.216.393.097,00**	**1.087.345.000,00**	**89,39**	**1.047.898.400,00**

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan Jaringan dan Irigasi dan Aset Tetap Lainnya. Secara ringkas Realisasi Belanja Modal TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.89 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Tanah	30.300.000.000,00	19.366.472.650,00	64,01	39.218.106.608,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.628.418.456,00	102.240.316.697,00	92,50	185.792.109.225,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.794.084.397,00	165.608.835.649,00	93,67	110.419.926.917,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.038.002.734,00	107.516.297.364,00	95,96	90.808.712.427,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.944.324.805,00	14.911.185.149,00	99,78	20.640.623.767,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.205.548.562,00	1.157.652.900,00	96,03	0,00
	JUMLAH	**445.810.358.954,00**	**410.830.760.409,00**	**92,15**	**423.879.478.944,00**

Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp410.830.760.409,00 atau 92,15% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp445.810.358.954,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp423.879.478.944,00, terdapat penurunan sebesar Rp13.048.718.535,00 atau sebesar 3,08%. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal TA 2024, sebagai berikut:

5.1.2.2.1.Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp19.396.472.650,00 atau 64,01% dari anggaran sebesar Rp30.300.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp36.218.106.608,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp16.821.633.958,00 atau 46,45%. Realisasi tersebut tidak mencapai target dikarenakan terdapat kendala administratif yang menyebabkan terhambatnya proses pengadaan. Hal tersebut juga menyebabkan penurunan yang terjadi pada realisasi TA 2024 dari TA 2023 beserta kebutuhan pengadaan tanah yang telah terpenuhi. Adapun rincian Belanja Modal Tanah sebagai berikut:

Tabel 5.1.90 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Tanah Persil**	**4.255.000.000,00**	**3.633.805.260,00**	**85,40**	**4.607.659.492,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.255.000.000,00	3.633.805.260,00	85,40	0,00
	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	4.607.659.492,00
2	**Belanja Modal Lapangan**	**26.045.000.000,00**	**15.762.667.390,00**	**60,52**	**31.610.447.116,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	25.045.000.000,00	15.762.667.390,00	62,94	31.610.447.116,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**30.300.000.000,00**	**19.396.472.650,00**	**64,01**	**36.218.106.608,00**

Adapun rincian untuk per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.91 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	0,00	0,00	0,00	4.607.659.492,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.607.659.492,00**

Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja TA 2024 tidak dianggarkan, sedangkan TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp4.607.659.492,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah.

Tabel 5.1.92 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	4.255.000.000,00	3.633.805.260,00	85,40	0,00
	JUMLAH	**4.255.000.000,00**	**3.633.805.260,00**	**85,40**	**0,00**

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal TA 2024 sebesar Rp3.633.805.260,00 atau 85,40% dari anggaran sebesar Rp4.255.000.000,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah.

Tabel 5.1.93 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Jalan TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	25.045.000.000,00	15.762.667.390,00	62,94	31.610.447.116,00
	JUMLAH	**25.045.000.000,00**	**15.762.667.390,00**	**62,94**	**31.610.447.116,00**

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Jalan TA 2024 sebesar Rp15.762.667.390,00 atau 62,94% dari anggaran sebesar Rp25.045.000.000,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah.

Tabel 5.1.94 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air TA 2024 tidak tercaliasi dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah.

5.1.2.2.2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp102.240.316.697,00 atau 92,50% dari anggaran Rp110.528.418.456,00. Belanja tersebut tidak memenuhi target disebabkan oleh penundaan atau keterlambatan dalam proses pengadaan. Tabel rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 menurut objek belanja seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.95 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Alat Besar	2.144.864.305,00	761.579.079,00	35,51	2.161.693.209,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	7.409.764.050,00	7.067.414.500,00	95,38	9.967.600.500,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	542.030.000,00	53.146.653,00	9,81	53.466.760,00
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.503.452.207,00	14.309.268.622,00	106,01	16.827.429.597,00
5	Belanja Modal Alat Studio, omunikasi, dan Pemancar	637.122.700,00	659.319.800,00	105,31	1.446.243.976,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.628.879.000,00	16.343.135.707,00	98,28	57.541.317.615,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium	36.712.189.000,00	35.380.524.200,00	96,37	27.717.242.874,00
8	Belanja Modal Komputer	32.763.617.194,00	27.481.176.136,00	83,88	19.849.479.100,00
9	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	90.176.400,00
10	Belanja Modal Rambu-Rambu	136.500.000,00	136.450.000,00	99,96	0,00
11	Belanja Modal Peralatan Olahraga	60.000.000,00	46.300.000,00	96,60	138.469.200,00
	JUMLAH	**110.528.418.456,00**	**102.240.316.697,00**	**92,50**	**165.792.109.225,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp165.792.109.225,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp63.551.792.528,00 atau 38,33% yang disebabkan oleh penundaan atau keterlambatan dalam proses pengadaan. Belanja Modal tersebut telah mencakup Belanja Modal Dana BOSP. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP TA 2024 terealisasi sebesar Rp26.186.439.914,00 atau 81,94% dari anggaran Rp31.960.000.000,00.

5.1.2.2.2.1.Belanja Modal Alat-Alat Besar

Realisasi Belanja Modal Alat-Alat Besar Rp761.579.079,00 atau 35,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.144.864.305,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.96 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Alat Besar Darat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.836.251.500,00**
	Belanja Modal Tractor	0,00	0,00	0,00	1.632.351.500,00
	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	203.900.000,00
2	**Belanja Modal Alat Bantu**	**2.144.864.305,00**	**761.579.079,00**	**35,51**	**325.431.709,00**
	Belanja Modal Alat Penarik	0,00	0,00	0,00	10.214.200,00
	Belanja Modal Electric Generating Set	1.993.902.000,00	592.248.990,00	29,70	54.800.000,00
	Belanja Modal Pompa	150.962.305,00	169.330.089,00	112,17	192.998.320,00
	Belanja Modal Peralatan Selam	-	-	-	67.419.189,00
	JUMLAH	**2.144.864.305,00**	**761.579.079,00**	**35,51**	**2.161.693.209,00**

a. Belanja Modal Alat Besar Darat

Belanja Modal Alat Besar Darat tidak dianggarkan dan tidak terealisasi pada TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal *Tractor* tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp1.632.351.500,00.

Tabel 5.1.97 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Tractor TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.632.351.500,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	1.632.351.500,00

2) Belanja Modal Mesin Proses tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp203.900.000,00.

Tabel 5.1.98 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin Proses TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah	0,00	0,00	0,00	203.900.000,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	203.900.000,00

b. Belanja Modal Alat Bantu

Belanja Modal Alat Bantu terealisasi sebesar Rp761.579.079,00 atau 35,51% dari anggaran sebesar Rp2.144.864.305,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Alat Penarik tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp10.214.200,00.

Tabel 5.1.99 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Penarik TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kesehatan Daerah UPTD RSJ Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang	0,00	0,00	0,00	10.214.200,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	10.214.200,00

2) Belanja Modal *Electric Generating Set* terealisasi sebesar Rp592.248.990,00 atau 29,70% dari anggaran sebesar Rp1.993.902.000,00 pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.100 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal *Electric Generating Set* TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	112.100.000,00	62.249.000,00	55,53	9.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPTD Wilayah IV Talaud	1.361.802.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Kehutanan Daerah UPTD Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang	500.000.000,00	499.999.990,00	100,00	0,00
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah UPTD Balai Pengujian Peralatan Pertambangan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	45.800.000,00
Jumlah		1.993.902.000,00	592.248.990,00	29,70	54.800.000,00

3) Belanja Modal Pompa terealisasi sebesar Rp169.330.089,00 atau 112,17% dari anggaran sebesar Rp150.962.305,00. Realisasi tersebut termasuk dengan realisasi Belanja BOSP yang tercatat pada Dinas Pendidikan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.101 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pompa TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	35.700.000,00	60.466.000,00	169,37	27.170.000,00
2	Dinas Kesehatan Daerah UPTD RSJ Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang	38.250.000,00	38.250.000,00	100,00	37.499.995,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00	0,00
4	Dinas Perkebunan Daerah	888.056,00	0,00	0,00	5.970.000,00
5	Dinas Kehutanan Daerah	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
6	Biro Umum	58.225.000,00	52.824.900,00	90,73	98.210.325,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	16.648.000,00
8	Inspektorat	12.338.649,00	12.239.189,00	99,19	0,00
	JUMLAH	150.962.305,00	169.330.089,00	112,17	192.998.320,00

4) Belanja Modal Peralatan Senam tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp67.419.180,00.

Tabel 5.1.102 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peralatan Senam TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	0,00	0,00	0,00	67.419.180,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	67.419.180,00

5.1.2.2.2.2.Belanja Modal Alat Angkutan

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp7.067.414.500,00 atau 95,38% dari anggaran sebesar Rp7.409.764.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.103 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**4.384.764.050,00**	**4.043.161.500,00**	**92,21**	**6.985.600.500,00**
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.317.695.500,00	1.203.949.000,00	91,37	5.428.981.500,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.062.441.050,00	1.990.000.000,00	96,49	1.230.300.000,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	897.925.000,00	754.000.000,00	83,97	0,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	71.702.500,00	60.212.500,00	83,98	169.727.000,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	84.220.000,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	72.372.000,00
2	**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor**	**3.025.000.000,00**	**3.024.253.000,00**	**99,98**	**2.982.000.000,00**
	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	3.025.000.000,00	3.024.253.000,00	99,98	2.982.000.000,00
	JUMLAH	7.409.764.050,00	7.067.414.500,00	95,38	9.967.600.500,00

a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor terealisasi sebesar Rp4.043.161.500,00 atau 92,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.384.764.050,00

dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan terealisasi sebesar Rp1.203.949.000,00 atau 91,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.317.695.500,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.104 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah Cabang Dinas Sangihe	21.650.000,00	21.650.000,00	100,00	0,00
2	Dinas Kesehatan Daerah UPTD RSU Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang	648.198.000,00	609.999.000,00	94,11	0,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	122.647.500,00	122.100.000,00	99,55	0,00
4	Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Daerah	0,00	0,00	0,00	230.799.900,00
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	439.315.800,00
6	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	439.315.800,00
7	Biro Umum	526.000.000,00	450.000.000,00	85,71	785.950.000,00
8	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	3.533.600.000,00
	JUMLAH	**1.317.695.500,00**	**1.203.949.000,00**	**91,37**	**5.428.981.500,00**

2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang terealisasi sebesar Rp1.990.000.000,00 atau 96,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.062.441.050,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.105 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Biro Umum	2.062.441.050,00	1.990.000.000,00	96,49	1.230.300.000,00
	JUMLAH	**2.062.441.050,00**	**1.990.000.000,00**	**96,49**	**1.230.300.000,00**

3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang terealisasi sebesar Rp754.000.000,00 atau 83,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp897.925.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.106 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Satuan Polisi Pamong Praja	332.925.000,00	251.500.000,00	75,54	0,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	565.000.000,00	502.500.000,00	88,94	0,00
	JUMLAH	**897.925.000,00**	**754.000.000,00**	**83,97**	**0,00**

4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua terealisasi sebesar Rp60.212.500,00 atau 83,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp71.702.500,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.107 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Daerah	48.990.000,00	37.500.000,00	76,55	66.300.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah UPTD Balai Pengelola	22.712.500,00	22.712.500,00	100,00	0,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	Pelabuhan Perikanan Wilayah I				
3	Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	103.427.000,00
	JUMLAH	71.702.500,00	60.212.500,00	83,98	169.727.000,00

5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga terealisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.108 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah	0,00	0,00	0,00	84.220.000,00
2	Dinas Pariwisata Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	84.220.000,00

6) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp73.372.000,00.

Tabel 5.1.109 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	0,00	0,00	0,00	72.372.000,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	72.372.000,00

b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor

Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor terealisasi sebesar Rp3.024.253.000,00 atau 99,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.025.000.000,00 dengan alokasi untuk Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya yang terdiri dari:

Tabel 5.1.110 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	3.025.000.000,00	3.024.253.000,00	99,98	2.982.000.000,00
	JUMLAH	3.025.000.000,00	3.024.253.000,00	99,98	2.982.000.000,00

5.1.2.2.2.3.Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terealisasi sebesar Rp53.148.653,00 atau 9,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp542.030.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.111 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	492.000.000,00	3.153.153,00	0,64	0,00
	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	492.000.000,00	3.153.153,00	0,64	0,00
2	Belanja Modal Alat Ukur	50.030.000,00	49.995.500,00	99,93	53.466.760,00
	Belanja Modal Alat Ukur Universal	50.030.000,00	49.995.500,00	99,93	0,00
	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	53.466.760,00
	JUMLAH	542.030.000,00	53.148.653,00	9,81	53.466.760,00

a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin

Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin terealisasi sebesar Rp3.153.153,00 atau 0,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp492.000.000,00, yang dialokasikan untuk Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.112 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	492.000.000,00	3.153.153,00	0,64	0,00
	JUMLAH	492.000.000,00	3.153.153,00	0,64	0,00

b. Belanja Modal Alat Ukur

Belanja Modal Alat Ukur terealisasi sebesar Rp49.995.500,00 atau 99,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.030.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Alat Ukur Universal terealisasi sebesar Rp49.995.500,00 atau 99,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.030.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.113 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Ukur Universal TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Daerah	50.030.000,00	49.995.500,00	99,93	0,00
	JUMLAH	50.030.000,00	49.995.500,00	99,93	0,00

2) Belanja Modal Alat Ukur Lainnya tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp53.466.760,00

Tabel 5.1.114 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Ukur Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	0,00	0,00	0,00	53.466.760,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	53.466.760,00

5.1.2.2.2.4.Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp14.309.268.622,00 atau 105,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.503.452.207,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.115 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Alat Kantor**	**4.073.114.590,00**	**4.444.287.264,00**	**109,11**	**3.648.020.895,00**
	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	127.210.000,00	126.200.000,00	99,21	139.977.100,00
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.084.000.000,00	904.527.390,00	83,44	1.223.498.275,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.861.904.590,00	3.413.559.874,00	119,28	2.282.545.520,00
2	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**8.268.811.549,00**	**8.717.627.263,00**	**105,43**	**11.537.002.292,00**
	Belanja Modal Mebel	3.112.515.074,00	4.243.817.240,00	136,35	5.712.729.100,00
	Belanja Modal Alat Pemborsih	228.200.069,00	129.171.600,00	56,60	157.544.000,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	2.415.206.305,00	1.793.312.137,00	74,25	1.701.793.854,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.512.890.101,00	2.551.226.226,00	101,53	3.959.808.338,00
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	5.217.000,00
3	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**1.161.526.068,00**	**1.147.354.155,00**	**98,78**	**1.644.319.410,00**
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	419.768.510,00	419.262.014,00	99,88	962.857.052,00
	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	7.511.993,00	0,00	0,00	12.500.000,00
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	593.920.565,00	591.864.171,00	99,65	337.367.915,00
	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	63.390.000,00	63.077.970,00	99,51	268.579.193,00
	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	76.915.000,00	73.120.000,00	95,07	73.011.650,00
	JUMLAH	13.503.452.207,00	14.309.268.622,00	105,97	16.827.429.597,00

a. Belanja Modal Alat Kantor

Belanja Modal Alat Kantor terealisasi sebesar Rp4.444.287.264,00 atau 109,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.073.114.590,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) terealisasi sebesar Rp126.200.000,00 atau 99,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp127.210.000,00. Rincian realisasi belanja modal tersebut tertera dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.116 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	0,00	0,00	0,00	47.064.000,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Daerah	52.210.000,00	52.000.000,00	99,60	0,00
3	Dinas Sosial Daerah	0,00	0,00	0,00	57.953.100,00
4	Dinas Perkebunan Daerah	0,00	0,00	0,00	34.960.000,00
5	Sekretariat DPRD	75.000.000,00	74.200.000,00	98,93	0,00
	JUMLAH	**127.210.000,00**	**126.200.000,00**	**99,21**	**139.977.100,00**

2) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar Rp904.527.390,00 atau 83,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.084.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.117 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	1.084.000.000,00	904.527.390,00	83,44	1.223.498.275,00
	JUMLAH	**1.084.000.000,00**	**904.527.390,00**	**83,44**	**1.223.498.275,00**

3) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya terealisasi sebesar Rp3.413.559.874,00 atau 119,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.861.904.590,00. Realisasi tersebut termasuk dengan realisasi Belanja BOSP yang tercatat pada Dinas Pendidikan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.118 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor Lainnya TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	1.203.000.000,00	1.816.496.770,00	151,16	1.459.535.190,00
2	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Provinsi Sulawesi Utara	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
3	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Mata	677.205.000,00	677.055.000,00	99,98	0,00
4	Dinas Kesehatan Daerah Balai Pelatihan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	51.596.000,00
5	Dinas Kesehatan Daerah Balai Laboratorium Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	0,00
7	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	0,00	0,00	0,00	24.775.000,00
8	Dinas Sosial Daerah	0,00	0,00	0,00	32.100.000,00
9	Dinas Sosial Daerah UPTD Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar - Senja Cerah	8.105.000,00	7.900.000,00	97,46	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	0,00	0,00	0,00	4.486.830,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	5.361.300,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	20.798.322,00	19.775.000,00	95,08	0,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah UPTD Balai Diklat Koperasi dan UKM	18.000.000,00	17.950.000,00	99,72	24.700.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	10.000.000,00	9.870.000,00	98,70	0,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	47.730.000,00	47.250.000,00	98,99	0,00
17	Dinas Kebudayaan Daerah	24.000.000,00	23.775.000,00	99,06	0,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah UPT Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah III	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00
19	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah	0,00	0,00	0,00	189.195.000,00
20	Dinas Kehutanan Daerah	0,00	0,00	0,00	15.074.000,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	30.000.000,00	24.900.000,00	83,00	0,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	370.000.000,00	338.000.000,00	91,35	0,00
23	Biro Hukum	7.215.000,00	6.000.000,00	83,16	0,00
24	Biro Administrasi Pembangunan	6.440.000,00	6.440.000,00	100,00	0,00
25	Biro Pengadaan barang dan Jasa	21.988.000,00	18.400.000,00	83,68	32.830.000,00
26	Biro Umum	336.983.668,00	336.354.960,00	99,81	245.232.300,00
27	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	99.150.000,00
28	Badan Pendapatan Daerah UPTD PPD Bitung	4.656.400,00	4.649.000,00	99,84	0,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	18.943.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	39.070.400,00
32	Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	7.247.500,00
33	Inspektorat	16.339.200,00	16.244.144,00	99,42	0,00
	JUMLAH	**2.861.904.590,00**	**3.413.559.874,00**	**119,28**	**2.282.545.520,00**

b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp8.717.627.203,00 atau 105,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.268.811.549,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Mebel terealisasi sebesar Rp4.243.917.240,00 atau 136,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.112.515.074,00. Realisasi Belanja Modal Mebel telah melebihi anggaran karena termasuk Realisasi Belanja Modal BOSP sebesar Rp1.775.081.800,00, yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.119 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Mebel TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	934.000.000,00	1.775.081.800,00	279,98	2.115.043.400,00
2	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Daerah Tipe B Prov. Sulawesi Utara	0,00	0,00	0,00	191.200.000,00
3	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Mata	0,00	0,00	0,00	999.981.600,00
4	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	49.500.000,00	48.250.000,00	97,47	0,00
5	Dinas Kesehatan Daerah Balai Pelatihan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	20.580.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	49.800.000,00	49.115.000,00	98,62	33.217.800,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPTD Air Minum	17.509.029,00	17.444.000,00	99,63	0,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	0,00	0,00	0,00	13.320.000,00
9	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	109.694.000,00	108.387.000,00	98,90	40.285.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	26.654.900,00	26.000.000,00	97,54	0,00
11	Dinas Sosial Daerah	22.008.650,00	21.750.000,00	98,82	0,00
12	Dinas Sosial Daerah UPTD Balai Penyantunan Sosial Anak dan Remaja Terlantar Maka'aruyen Tomohon	6.216.000,00	6.160.000,00	99,10	0,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	0,00	0,00	0,00	40.529.000,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	7.882.100,00	7.860.000,00	99,97	0,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah IV	8.392.800,00	8.392.800,00	100,00	0,00
17	Dinas Kehutanan Daerah UPTD KPH Unit I Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	257.160.000,00	256.025.000,00	99,56	0,00
19	Biro Hukum	3.998.000,00	3.750.000,00	93,84	0,00
20	Biro Umum	1.331.383.040,00	1.330.381.640,00	99,92	1.449.424.200,00
21	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	54.200.000,00
22	Badan Pendapatan Daerah	47.757.750,00	47.300.000,00	99,04	0,00
23	Badan Pendapatan Daerah UPTD Minahasa Utara	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah UPTD Bitung	19.541.636,00	19.200.000,00	98,25	0,00
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	159.290.550,00	159.000.000,00	99,82	154.450.000,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	10.350.000,00	10.330.000,00	99,81	0,00
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	308.955.180,00	307.480.000,00	99,52	512.497.200,00
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	37.523.439,00	37.050.000,00	98,74	18.000.000,00
29	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	38.900.000,00
	JUMLAH	3.112.515.074,00	4.243.917.240,00	136,35	5.712.729.100,00

2) Belanja Modal Alat Pembersih terealisasi sebesar Rp129.171.600,00 atau 56,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp228.200.069,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.120 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pembersih TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	137.100.000,00	39.725.000,00	28,98	54.035.000,00
2	Dinas Sosial Daerah	0,00	0,00	0,00	18.655.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	10.545.000,00	10.200.000,00	96,73	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	6.000.000,00	5.950.000,00	99,17	0,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Balai Diklat Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
8	Biro Umum	14.900.000,00	14.900.000,00	100,00	29.900.000,00
9	Badan Pendapatan Daerah	4.440.000,00	3.300.000,00	74,32	0,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.215.069,00	49.096.600,00	99,76	39.954.000,00
11	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	228.200.069,00	129.171.600,00	56,60	157.546.600,00

3) Belanja Modal Alat Pendingin terealisasi sebesar Rp1.793.312.137,00 atau 74,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.415.206.305,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.121 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pendingin TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	1.277.000.000,00	690.523.562,00	54,07	741.975.190,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	15.000.000,00	14.999.985,00	100,00	0,00
3	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	0,00	0,00	0,00	12.321.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPTD Wilayah I	0,00	0,00	0,00	21.143.700,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPT Balai Bina Teknik	0,00	0,00	0,00	3.312.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPT Balai Peralatan dan Pengujian	17.300.000,00	17.300.000,00	100,00	5.227.323,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPTD Air Minum	26.450.664,00	23.900.000,00	90,36	8.999.800,00
8	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah	104.427.040,00	103.607.000,00	99,21	20.749.500,00
9	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	19.120.000,00
10	Dinas Sosial Daerah UPTD Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar – Senja Cerah	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	0,00	0,00	0,00	10.231.203,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	10.454.646,00	10.000.000,00	95,65	0,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Daerah	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	16.849.800,00	15.000.000,00	89,02	0,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah UPT Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah III	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah UPT Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah IV	7.469.300,00	7.469.300,00	100,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
18	Dinas Perkebunan Daerah	0,00	0,00	0,00	14.127.900,00
19	Dinas Kehutanan Daerah	0,00	0,00	0,00	40.457.864,00
20	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Daerah	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	85.000.000,00	81.200.000,00	95,53	0,00
22	Biro Hukum	38.992.746,00	34.500.000,00	88,48	10.389.500,00
23	Biro Perekonomian	7.469.300,00	7.469.300,00	100,00	-
24	Biro Umum	313.347.006,00	313.279.836,00	99,98	464.339.401,00
25	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	0,00	7.750.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	14.097.000,00	14.000.000,00	99,31	11.800.000,00
27	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	77.248.764,00	60.360.000,00	78,12	96.615.000,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	124.885.800,00	121.400.000,00	97,21	19.000.000,00
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	82.909.230,00	82.660.000,00	99,98	153.772.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.901.196,00	13.166.802,00	94,72	18.092.473,00
31	Badan Penghubung Daerah	81.520.429,00	81.512.632,00	99,99	0,00
32	Inspektorat Daerah	42.220.364,00	42.120.720,00	99,76	0,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	13.662.000,00	13.623.000,00	99,71	0,00
	JUMLAH	2.416.206.305,00	1.793.312.137,00	74,26	1.701.793.864,00

4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) terealisasi sebesar Rp2.551.226.226,00 atau 101,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.512.890.101,00. Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) melebihi anggaran karena sudah termasuk Realisasi Belanja Modal BOSP sebesar Rp902.523.950,00 yang masuk dalam realisasi Dinas Pendidikan Daerah seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.1.122 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	808.000.000,00	902.523.950,00	111,70	1.031.472.199,00
2	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Umum Tipe C Noongan	0,00	0,00	0,00	1.198.695.000,00
3	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Mata	129.200.000,00	129.130.000,00	99,95	0,00
4	Dinas Kesehatan Daerah UPTD RS Menembo-Nembo Tipe C Bitung	0,00	0,00	0,00	46.427.500,00
5	Dinas Kesehatan Daerah Balai Pelatihan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	19.850.000,00
6	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	195.271.624,00	166.338.500,00	85,18	3.183.500,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPTD Wilayah I Manado, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bitung Dan Tomohon	0,00	0,00	0,00	7.899.900,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPT Balai Bina Teknik	0,00	0,00	0,00	11.527.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPTD Balai Pecalatan Dan Pengujian	2.995.000,00	2.995.000,00	100,00	26.409.400,00
10	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah	17.123.600,00	16.990.000,00	99,22	37.650.000,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50	0,00
12	Dinas Sosial Daerah	0,00	0,00	0,00	86.129.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	15.667.650,00	13.986.000,00	89,27	14.290.473,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	4.368.600,00	4.368.000,00	99,99	0,00
15	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	0,00	0,00	0,00	6.883.500,00
16	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah	70.200.000,00	69.560.000,00	99,09	71.145.000,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Daerah	3.904.300,00	3.900.000,00	99,89	75.428.600,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah	8.274.300,00	8.210.000,00	99,22	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	7.348.600,00	7.250.000,00	98,66	0,00
20	Dinas Perkebunan Daerah	0,00	0,00	0,00	34.990.000,00
21	Dinas Kehutanan Daerah	0,00	0,00	0,00	79.195.936,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	10.000.000,00	9.500.000,00	95,00	0,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
23	Biro Administrasi Pembangunan	7.124.300,00	7.120.000,00	99,94	0,00
24	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	0,00	0,00	28.888.600,00
25	Biro Umum	559.171.288,00	551.929.398,00	98,70	573.930.830,00
26	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
27	Sekretariat DPRD	32.000.000,00	30.750.305,00	96,09	0,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.333.773,00	4.275.000,00	98,64	29.625.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	77.219.825,00	75.155.000,00	97,33	0,00
30	Badan Pendapatan Daerah UPTD Tomohon	0,00	0,00	0,00	14.870.000,00
31	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	81.390.084,00	71.800.000,00	88,22	105.565.000,00
32	Badan Kepegawaian Daerah	10.580.000,00	9.200.000,00	86,96	5.460.000,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	407.703.000,00	407.598.000,00	99,97	347.941.900,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.229.090,00	13.500.000,00	94,88	0,00
35	Inspektorat Daerah	26.795.087,00	25.659.073,00	95,76	96.000.000,00
	JUMLAH	**2.512.890.101,00**	**2.551.226.226,00**	**101,53**	**3.959.808.338,00**

5) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp5.217.000,00.

Tabel 5.1.123 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Sosial Daerah	0,00	0,00	0,00	5.217.000,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.217.000,00**

e. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat terealisasi sebesar Rp1.147.354.155,00 atau 98,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.161.526.068,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat terealisasi sebesar Rp419.292.014,00 atau 99,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp419.788.510,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.124 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Meja Kerja Pejabat TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	0,00	0,00	0,00	114.245.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPTD Wilayah I Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bitung dan Tomohon	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPTD Air Minum	5.742.974,00	5.400.000,00	94,03	4.349.900,00
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	0,00	0,00	0,00	44.798.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	0,00	0,00	0,00	12.362.458,00
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	19.913.400,00	19.800.000,00	99,43	3.900.000,00
7	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	0,00	0,00	32.982.000,00
8	Biro Umum	365.742.836,00	365.723.500,00	99,99	594.920.294,00
9	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	85.800.000,00
10	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	30.200.000,00
11	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	8.475.900,00	8.475.000,00	99,99	0,00
12	Inspektorat Daerah	19.913.400,00	19.893.514,00	99,90	19.500.000,00
	JUMLAH	**419.788.510,00**	**419.292.014,00**	**99,88**	**962.857.652,00**

2) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dengan

anggaran sebesar Rp7.511.933,00, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp12.500.000,00.

Tabel 5.1.125 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Meja Rapat Pejabat TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Biro Umum	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
2	Sekretariat DPRD	7.511.993,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**7.511.993,00**	0,00	0,00	**12.500.000,00**

3) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat terealisasi sebesar Rp591.864.171,00 atau 99,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp593.920.565,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.126 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	190.967.400,00	190.800.000,00	99,91	73.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPTD Air Minum	0,00	0,00	0,00	4.199.700,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	0,00	0,00	0,00	3.255.075,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	8.136.500,00
5	Dinas Perkebunan Daerah	146.625.000,00	146.600.000,00	99,98	0,00
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	9.651.200,00	9.200.000,00	95,32	26.460.000,00
8	Biro Umum	236.095.000,00	236.709.430,00	99,42	167.796.640,00
9	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00
10	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
11	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.603.615,00	3.603.615,00	100,00	0,00
12	Inspektorat Daerah	4.978.350,00	4.951.126,00	99,45	17.500.000,00
	JUMLAH	**593.920.565,00**	**591.864.171,00**	**99,65**	**337.357.915,00**

4) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat terealisasi sebesar Rp63.077.970,00 atau 99,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.390.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.127 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	9.000.000,00	8.880.000,00	98,67	0,00
2	Biro Umum	54.390.000,00	54.197.970,00	99,65	268.579.193,00
	JUMLAH	**63.390.000,00**	**63.077.970,00**	**99,51**	**268.579.193,00**

5) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat terealisasi sebesar Rp73.120.000,00 atau 95,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.915.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.128 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPTD Air Minum	0,00	0,00	0,00	6.209.800,00
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	0,00	0,00	0,00	29.949.300,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	8.552.550,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	13.800.000,00	12.500.000,00	90,58	0,00
6	Dinas Perkebunan Daerah	23.115.000,00	22.950.000,00	99,29	0,00
7	Biro Pengadaan Barang & Jasa	25.000.000,00	22.670.000,00	90,68	0,00
8	Biro Umum	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
9	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
11	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	76.915.000,00	73.120.000,00	95,07	73.011.650,00

5.1.2.2.2.5.Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar terealisasi sebesar Rp659.319.800,00 atau 103,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp637.122.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.129 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Alat Studio**	**488.730.500,00**	**513.134.800,00**	**104,99**	**1.420.343.979,00**
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	125.600.000,00	156.563.000,00	124,65	276.394.179,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	202.391.500,00	198.900.000,00	98,27	94.924.980,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	160.739.000,00	157.671.800,00	98,09	829.500.000,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	33.300.000,00
	Belanja Modal Alat Studi Lainnya	0,00	0,00	0,00	186.224.820,00
2	**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**148.392.200,00**	**146.185.000,00**	**98,51**	**24.900.000,00**
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	14.985.000,00	14.940.000,00	99,70	0,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	133.407.200,00	131.245.000,00	98,38	24.900.000,00
	JUMLAH	637.122.700,00	659.319.800,00	103,48	1.445.243.979,00

a. Belanja Modal Alat Studio

Belanja Modal Alat Studio terealisasi sebesar Rp513.134.800,00 atau 104,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp488.730.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Peralatan Studio Audio terealisasi sebesar Rp156.563.000,00 atau 124,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp125.600.000,00. Realisasi Belanja Modal tersebut melebihi anggaran karena merupakan Belanja Modal BOSP yang termasuk dalam realisasi Dinas Pendidikan Daerah seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.1.130 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Studio Audio TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	125.600.000,00	156.563.000,00	124,65	74.723.660,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Daerah	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	199.170.519,00
	JUMLAH	125.600.000,00	156.563.000,00	124,65	276.394.179,00

2) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film terealisasi sebesar Rp198.900.000,00 atau 98,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp202.391.500,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.131 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	53.010.000,00	51.450.000,00	97,06	0,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
2	Dinas Kebudayaan Daerah UPTD Taman Budaya dan Musaum	25.300.000,00	24.800.000,00	98,02	0,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	41.500.000,00	40.300.000,00	97,11	0,00
4	Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah	0,00	0,00	0,00	94.024.980,00
5	Biro Administrasi Pimpinan	17.457.000,00	17.350.000,00	99,38	0,00
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	42.124.500,00	42.000.000,00	99,70	0,00
7	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	202.391.500,00	198.900.000,00	98,27	94.924.980,00

3) Belanja Modal Peralatan Studio Gambar terealisasi sebesar Rp157.671.800,00 atau 98,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.739.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.132 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Studio Gambar TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.106.000,00	5.106.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah	80.000.000,00	78.000.000,00	97,50	286.400.000,00
4	Dinas Perkebunan Daerah	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00
5	Biro Perekonomian	33.000.000,00	32.000.000,00	96,97	0,00
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
7	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.003.000,00	5.975.800,00	99,55	0,00
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	36.630.000,00	36.590.000,00	99,89	462.950.000,00
10	Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	22.700.000,00
	JUMLAH	160.739.000,00	157.671.800,00	98,09	829.500.000,00

4) Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp33.300.000,00.

Tabel 5.1.133 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	0,00	0,00	0,00	33.300.000,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	33.300.000,00

5) Belanja Modal Alat Studio Lainnya tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp186.224.820,00

Tabel 5.1.134 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio Lainnya TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidkan Daerah	0,00	0,00	0,00	186.224.820,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	186.224.820,00

b. Belanja Modal Alat Komunikasi

Belanja Modal Alat Komunikasi terealisasi sebesar Rp146.185.000,00 atau 98,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.392.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Alat Komunikasi *Telephone* terealisasi sebesar Rp14.940.000,00

atau 99,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.985.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.135 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal alat Komunikasi *Telephone* TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Biro Administrasi Pimpinan	14.985.000,00	14.940.000,00	99,70	0,00
	JUMLAH	14.985.000,00	14.940.000,00	99,70	0,00

2) Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial terealisasi sebesar Rp131.245.000,00 atau 98,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp133.407.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.136 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal alat Komunikasi Sosial TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	11.040.000,00	6.970.000,00	61,25	0,00
2	Biro Umum	50.000.000,00	49.925.000,00	99,85	24.900.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	72.367.200,00	72.350.000,00	99,98	0,00
	JUMLAH	133.407.200,00	131.245.000,00	98,38	24.900.000,00

5.1.2.2.2.6.Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan terealisasi sebesar Rp16.343.135.707,00 atau 98,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.628.879.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.137 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**16.628.879.000,00**	**16.343.135.707,00**	**98,28**	**82.481.540.425,00**
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	15.864.424.996,00	15.651.001.704,00	98,65	2.261.155.250,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	783.414.004,00	692.134.003,00	90,66	121.299.660,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	17.449.009.363,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.040.000,00	0,00	0,00	62.650.176.152,00
2	**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.059.677.190,00**
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.059.677.190,00
	JUMLAH	16.628.879.000,00	16.343.135.707,00	98,28	87.541.317.615,00

a. Belanja Modal Alat Kedokteran

Belanja Modal Alat Kedokteran terealisasi sebesar Rp16.343.135.707,00 atau 98,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.628.879.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum terealisasi sebesar Rp15.651.001.704,00 atau 98,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.864.424.996,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.138 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedoteran Umum TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kesehatan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.198.078.148,00
2	Dinas Kesehatan Daerah UPTD RSUD Tipe C Noongan	3.676.157.935,00	3.531.725.500,00	96,07	0,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
3	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Mata Masyarakat	402.320.996,00	393.899.429,00	97,91	26.038.602,00
4	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B	8.250.961.065,00	8.250.960.294,00	100,00	20.000.000,00
5	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Biaung	3.511.110.000,00	3.450.752.461,00	98,28	0,00
6	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	13.875.000,00	13.764.000,00	99,20	17.038.500,00
7	Dinas Sosial Daerah UPTD Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar - Sonia Corah	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	0,00
	JUMLAH	15.064.424.996,00	15.661.001.704,00	98,65	2.261.155.250,00

2) Belanja Modal Alat Kedokteran Mata terealisasi sebesar Rp692.134.003,00 atau 90,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp763.414.004,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.139 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran Mata TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Mata	763.414.004,00	692.134.003,00	90,66	121.299.660,00
	JUMLAH	763.414.004,00	692.134.003,00	90,66	121.299.660,00

3) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp17.449.009.363,00.

Tabel 5.1.140 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Nocngan	0,00	0,00	0,00	17.449.009.363,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	17.449.009.363,00

4) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dari anggaran sebesar Rp1.040.000,00.

Tabel 5.1.141 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B	1.040.000,00	0,00	0,00	62.650.176.152,00
	JUMLAH	1.040.000,00	0,00	0,00	62.650.176.152,00

b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp5.059.677.190,00. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum dialokasikan untuk Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.142 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	0,00	0,00	0,00	139.677.190,00
2	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Provinsi Sulawesi Utara	0,00	0,00	0,00	4.920.000.000,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	5.059.677.190,00

5.1.2.2.2.7.Belanja Modal Alat Laboratorium

Belanja Modal Alat Laboratorium terealisasi sebesar Rp35.380.524.200,00 atau 96,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.712.189.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.143 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**	**2.160.559.000,00**	**2.145.480.800,00**	**99,30**	**5.437.874.450,00**
	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	25.530.000,00	25.530.000,00	100,00	128.963.250,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	51.822.150,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	255.000.000,00	244.026.800,00	95,70	3.907.289.050,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	1.804.100.000,00	1.800.000.000,00	99,77	1.349.800.000,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	75.929.000,00	75.924.000,00	99,99	0,00
2	**Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah**	**34.551.630.000,00**	**33.235.043.400,00**	**96,19**	**22.279.366.424,00**
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	624.000.000,00	37.675.000,00	6,04	128.175.760,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	624.000.000,00	4.250.000,00	0,68	187.045.340,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	0,00	0,00	0,00	11.656.224,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	5.000.000,00	0,00	16.000.000,00
	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	33.303.630.000,00	33.188.118.400,00	99,66	21.937.491.100,00
	JUMLAH	**36.712.189.000,00**	**35.380.524.200,00**	**96,37**	**27.717.242.874,00**

a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

Belanja Modal Unit Alat Laboratorium terealisasi sebesar Rp2.145.480.800,00 atau 99,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.160.559.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi terealisasi sebesar Rp25.530.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.144 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah UPT Balai Peralatan Dan Pengujian	25.530.000,00	25.530.000,00	100,00	128.963.250,00
	JUMLAH	**25.530.000,00**	**25.530.000,00**	**100,00**	**128.963.250,00**

2) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp51.822.150,00.

Tabel 5.1.145 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Umum TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	0,00	0,00	0,00	51.822.150,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.822.150,00**

3) Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian terealisasi sebesar Rp244.026.800,00 atau 95,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp255.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.146 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pertanian Daerah	255.000.000,00	244.026.800,00	95,70	1.954.670.250,00
2	Dinas Perkebunan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.952.618.800,00
	JUMLAH	255.000.000,00	244.026.800,00	95,70	3.907.289.050,00

4) Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan terealisasi sebesar Rp1.800.000.000,00 atau 99,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.804.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.147 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	1.804.100.000,00	1.800.000.000,00	99,77	1.349.800.000,00
	JUMLAH	1.804.100.000,00	1.800.000.000,00	99,77	1.349.800.000,00

5) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya terealisasi sebesar Rp75.924.000,00 atau 99,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.929.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.148 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	75.929.000,00	75.924.000,00	99,99	0,00
	JUMLAH	75.929.000,00	75.924.000,00	99,99	0,00

b. Belanja Modal Alat Praktek Sekolah

Belanja Modal Alat Praktek Sekolah terealisasi sebesar Rp33.235.043.400,00 atau 96,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.551.630.000.00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika terealisasi sebesar Rp37.675.000,00 atau 6,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp624.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.149 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	624.000.000,00	37.675.000,00	6,04	128.175.760,00
	JUMLAH	624.000.000,00	37.675.000,00	6,04	128.175.760,00

2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah terealisasi sebesar Rp4.250.000,00 atau 0,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp624.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.150 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	624.000.000,00	4.250.000,00	0,68	187.045.340,00
	JUMLAH	624.000.000,00	4.250.000,00	0,68	187.045.340,00

3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp11.656.224,00.

Tabel 5.1.151 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	0,00	0,00	0,00	11.656.224,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	11.656.224,00

4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.152 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	0,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	JUMLAH	0,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00

5) Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan terealisasi sebesar Rp33.188.118.400,00 atau 99,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.303.630.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.153 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	33.303.630.000,00	33.188.118.400,00	99,65	21.937.491.100,00
	JUMLAH	33.303.630.000,00	33.188.118.400,00	99,65	21.937.491.100,00

5.1.2.2.2.8.Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Komputer terealisasi sebesar Rp27.481.176.136,00 atau 83,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.763.617.194,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.154 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Komputer Unit	27.287.315.390,00	23.248.611.888,00	85,20	16.331.398.833,00
	Belanja Modal Personal Computer	27.287.315.390,00	23.248.611.888,00	85,20	16.331.398.833,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.476.301.804,00	4.232.564.348,00	77,29	3.518.080.267,00
	Belanja Modal Peralatan *Mainframe*	0,00	0,00	0,00	61.460.500,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.216.153.408,00	3.716.096.742,00	71,24	2.354.350.417,00
	Belanja Modal Peralatan Jaringan	260.148.396,00	516.467.606,00	198,53	1.102.269.350,00
	JUMLAH	32.763.617.194,00	27.481.176.136,00	83,88	19.849.479.100,00

a. Belanja Modal Komputer Unit

Belanja Modal Komputer Unit terealisasi sebesar Rp23.248.611.888,00 atau 85,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.287.315.390,00. Belanja tersebut hanya terdiri dari Belanja Modal Personal Komputer dapat dilihat dalam Lampiran I.2 laporan keuangan ini.

Tabel 5.1.155 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Personal Computer TA 2024

SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Belanja Modal Personal Computer	27.287.315.390,00	23.248.611.888,00	85,20	16.331.398.833,00

b. Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanja Modal Peralatan Komputer terealisasi sebesar Rp4.232.564.248,00 atau 77,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.476.301.804,00 dengan rincian sebagai

berikut:

1) Belanja Modal Peralatan *Mainframe* tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp61.460.500,00.

Tabel 5.1.156 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan *Mainframe* TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	0,00	0,00	0,00	9.880.000,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	5.080.500,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	61.460.500,00

2) Belanja Modal Peralatan Personal Computer terealisasi sebesar Rp3.716.096.742,00 atau 71,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.216.153.408,00 dapat dilihat dalam Lampiran I.3 laporan keuangan ini:

Tabel 5.1.157 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Personal Computer TA 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.216.153.408,00	3.716.096.742,00	71,24	2.364.360.417,00

3) Belanja Modal Peralatan Jaringan tercalisasi sebesar Rp516.467.506,00 atau 198,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp260.148.396,00. Realisasi tersebut melebihi anggaran karena telah mencakup Belanja Modal BOSP sebesar Rp470.965.506,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.158 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Jaringan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	210.600.000,00	470.965.506,00	223,63	179.187.350,00
2	Dinas Kesehatan Daerah UPTD RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung	0,00	0,00	0,00	113.999.000,00
3	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Daerah	0,00	0,00	0,00	160.278.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	44.448.396,00	40.552.000,00	91,23	400.195.000,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	236.890.000,00
6	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	11.720.000,00
7	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.100.000,00	4.950.000,00	97,06	0,00
	JUMLAH	260.148.396,00	516.467.506,00	198,53	1.102.269.350,00

5.1.2.2.2.9.Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp90.176.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.159 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	90.176.400,00
	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	90.176.400,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	90.176.400,00

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dialokasikan untuk Belanja Modal Alat Pelindung dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.160 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	0,00	0,00	0,00	90.176.400,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	90.176.400,00

5.1.2.2.2.10.Belanja Modal Rambu-Rambu

Belanja Modal Rambu-Rambu terealisasi sebesar Rp136.450.000,00 atau 99,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp136.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.161 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**	**136.500.000,00**	**136.450.000,00**	**99,96**	**0,00**
	Belanja Modal Rambu Bersuar	136.500.000,00	136.450.000,00	99,96	0,00
	JUMLAH	136.500.000,00	136.450.000,00	99,96	0,00

Belanja Modal Rambu-Rambu terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.162 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu Bersuar TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	136.500.000,00	136.450.000,00	99,96	0,00
	JUMLAH	136.500.000,00	136.450.000,00	99,96	0,00

5.1.2.2.2.11.Belanja Modal Peralatan Olahraga

Belanja Modal Peralatan Olahraga terealisasi sebesar Rp48.300.000,00 atau 96,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.163 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**50.000.000,00**	**48.300.000,00**	**96,60**	**138.469.200,00**
	Belanja Modal Peralatan Permainan	50.000.000,00	48.300.000,00	96,60	0,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	138.469.200,00
	JUMLAH	50.000.000,00	48.300.000,00	96,60	138.469.200,00

Belanja Modal Peralatan Olahraga terdiri dari Belanja Modal Peralatan Senam dan Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Peralatan Senam

Belanja Modal Peralatan Senam terealisasi sebesar Rp48.300.000,00 atau 96,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.164 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Permainan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	50.000.000,00	48.300.000,00	96,60	0,00
	JUMLAH	50.000.000,00	48.300.000,00	96,60	0,00

b. Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya

Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.165 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	0,00	0,00	0,00	138.469.200,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	138.469.200,00

5.1.2.2.3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp165.608.835.649,00 atau 93,67% dari anggaran sebesar Rp176.794.064.397,00. Belanja tersebut tidak memenuhi target disebabkan oleh penundaan atau keterlambatan dalam proses pengadaan. Tabel rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 menurut objek belanja seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.166 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	176.794.064.397,00	165.608.835.649,00	93,67	107.937.869.820,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	2.482.057.097,00
	JUMLAH	176.794.064.397,00	165.608.835.649,00	93,67	110.419.926.917,00

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp110.419.926.917,00, maka terjadi peningkatan sebesar sebesar Rp55.188.908.732,00 atau 49,98% yang disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang meningkat dari tahun sebelumnya. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah:

5.1.2.2.3.1.Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp165.608.835.649,00 atau 93,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp176.794.064.397,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.167 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**175.019.064.397,00**	**163.889.967.610,00**	**93,64**	**106.543.732.722,00**
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	87.351.523.783,00	79.904.374.682,00	91,47	29.672.386.454,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.694.839.000,00	1.682.712.922,00	99,28	0,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	80.917.214.614,00	77.569.555.994,00	95,85	76.723.439.286,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.055.487.000,00	4.743.324.012,00	93,83	147.906.982,00
2	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal**	**1.775.000.000,00**	**1.718.868.039,00**	**96,84**	**1.394.137.098,00**
	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	525.000.000,00	523.760.746,00	99,76	597.424.676,00
	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.250.000.000,00	1.195.107.293,00	95,61	597.912.422,00
	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	198.800.000,00
	JUMLAH	176.794.064.397,00	165.608.835.649,00	93,67	107.937.869.820,00

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja terealisasi sebesar Rp163.889.967.610,00 atau 93,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp175.019.064.397,00 yang terdiri dari:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor terealisasi sebesar Rp79.904.374.682,00 atau 91,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp87.351.523.783,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.168 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidkan Daerah	300.000.000,00	299.939.200,00	99,98	1.277.051.758,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	235.465.025,00	235.411.337,00	99,98	99.998.156,00
3	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Mata	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.562.777.000,00
4	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang	9.555.311.415,00	7.819.861.997,00	81,84	0,00
5	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan	1.500.895.614,00	1.494.376.000,00	99,57	569.678.000,00
6	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B	22.500.002.000,00	21.284.528.180,00	94,60	0,00
7	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	11.279.728.376,00	10.414.499.494,00	92,33	0,00
8	Dinas Kesehatan Daerah UPTD Balai Pelatihan Kesehatan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah	26.200.000.000,00	24.327.862.942,00	92,85	1.448.039.513,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah UPTD Wilayah I Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bitung Dan Tomohon	79.660.993,00	79.660.993,00	100,00	98.883.504,00
11	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah	375.000.000,00	374.877.280,00	99,97	7.061.186.960,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	180.180.180,00	179.372.000,00	99,55	0,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	0,00	0,00	0,00	198.445.500,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	0,00	0,00	39.690.000,00
15	Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah	3.410.000.000,00	3.397.443.021,00	99,63	1.513.223.406,00
16	Dinas Pariwisata Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian Daerah	4.200.000.000,00	4.010.336.459,00	95,48	11.362.911.033,00
18	Dinas Perkebunan Daerah	250.000.000,00	249.556.467,00	99,82	2.018.990.118,00
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	0,00	0,00	0,00	197.946.000,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	3.500.000.000,00	3.461.962.753,00	98,91	0,00
21	Biro Umum	1.085.100.000,00	1.081.849.848,00	99,70	1.674.798.515,00
22	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	199.041.426,00	99,52	199.684.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	800.000.000,00	793.655.285,00	99,21	0,00
26	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Utara	0,00	0,00	0,00	348.812.991,00
28	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	180.180.180,00	180.000.000,00	99,90	0,00
	JUMLAH	**97.351.523.783,00**	**79.904.374.682,00**	**91,47**	**29.872.388.454,00**

2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan terealisasi sebesar Rp1.682.712.922,00 atau 99,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.694.839.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.169 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung Tempat Pertemuan TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pariwisata Daerah	1.694.839.000,00	1.682.712.922,00	99,28	0,00
	JUMLAH	1.694.839.000,00	1.682.712.922,00	99,28	0,00

3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan terealisasi sebesar Rp77.559.555.994,00 atau 95,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.917.214.614,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.170 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	80.917.214.614,00	77.559.555.994,00	95,85	76.723.439.286,00
	JUMLAH	80.917.214.614,00	77.559.555.994,00	95,85	76.723.439.286,00

4) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara terealisasi sebesar Rp4.743.324.012,00 atau 93,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.055.487.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.171 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Perhubungan Daerah	0,00	0,00	0,00	147.906.982,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	5.055.487.000,00	4.743.324.012,00	93,83	0,00
	JUMLAH	5.055.487.000,00	4.743.324.012,00	93,83	147.906.982,00

b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal terealisasi sebesar Rp1.718.868.039,00 atau 96,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.775.000.000,00 yang terdiri dari:

1) Belanja Modal Rumah Negara Golongan I.

Belanja Modal Rumah Negara Golongan I terealisasi sebesar Rp523.760.746,00 atau 99,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp525.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.172 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rumah Negara Golongan I TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Biro Umum	525.000.000,00	523.760.746,00	99,76	597.424.676,00
	JUMLAH	525.000.000,00	523.760.746,00	99,76	597.424.676,00

2) Belanja Modal Rumah Negara Golongan II

Belanja Modal Rumah Negara Golongan II terealisasi sebesar Rp1.195.107.293,00 atau 95,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.250.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.173 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rumah Negara Golongan II TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Biro Umum	1.050.000.000,00	995.907.293,00	94,85	597.912.422,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	200.000.000,00	199.200.000,00	99,60	0,00
	JUMLAH	1.250.000.000,00	1.195.107.293,00	95,61	597.912.422,00

3) Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.174 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Perhubungan Daerah	0,00	0,00	0,00	198.800.000,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	198.800.000,00

5.1.2.2.3.2.Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp2.482.057.097,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.175 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	2.482.057.097,00
	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	2.482.057.097,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	2.482.057.097,00

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut dialokasikan untuk Belanja Modal Pagar.

Tabel 5.1.176 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pagar TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah	0,00	0,00	0,00	2.482.057.097,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	2.482.057.097,00

5.1.2.2.4.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp107.516.297.364,00 atau 95,96% dari anggaran sebesar Rp112.038.002.734,00. Realisasi tersebut kurang dari 100% salah satunya disebabkan oleh penundaan atau keterlambatan dalam proses pengadaan. Tabel rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 menurut objek belanja seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.177 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	80.771.694.216,00	77.697.035.224,00	96,19	56.602.241.280,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	30.728.808.518,00	29.282.262.140,00	95,29	33.134.631.147,00
3	Belanja Modal Instalasi	537.500.000,00	537.000.000,00	99,91	1.071.840.000,00
	JUMLAH	112.038.002.734,00	107.516.297.364,00	95,96	90.808.712.427,00

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp90.808.712.427,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp16.707.584.937,00 atau 18,40% yang disebabkan oleh peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya. Rincian belanja modal tersebut terdiri dari:

5.1.2.2.4.1.Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Jalan dan Jembatan terealisasi sebesar Rp77.697.035.224,00

atau 96,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.771.694.216,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.1.178 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Jalan**	**80.771.694.216,00**	**77.697.035.224,00**	**96,19**	**60.860.078.280,00**
	Belanja Modal Jalan Provinsi	79.721.694.216,00	76.647.904.482,00	96,14	50.343.555.087,00
	Belanja Modal Jalan Khusus	1.050.000.000,00	1.049.130.742,00	99,92	516.523.193,00
2	**Belanja Modal Jembatan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.742.163.000,00**
	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	0,00	0,00	0,00	2.694.950.000,00
	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	0,00	0,00	0,00	3.047.213.000,00
	JUMLAH	**80.771.694.216,00**	**77.697.035.224,00**	**96,19**	**66.602.241.280,00**

a. Belanja Modal Jalan

Belanja Modal Jalan terealisasi sebesar Rp77.697.035.224,00 atau 96,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.771.694.216,00 yang terdiri dari:

1) Belanja Modal Jalan Provinsi terealisasi sebesar Rp76.647.904.482,00 atau 96,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.721.694.216,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.179 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Provinsi TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	79.721.694.216,00	76.647.904.482,00	96,14	50.343.555.087,00
	JUMLAH	**79.721.694.216,00**	**76.647.904.482,00**	**96,14**	**50.343.555.087,00**

2) Belanja Modal Jalan Khusus terealisasi sebesar Rp1.049.130.742,00 atau 99,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.180 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Khusus TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pertanian Daerah	0,00	0,00	0,00	516.523.193,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	1.050.000.000,00	1.049.130.742,00	99,92	0,00
	JUMLAH	**1.050.000.000,00**	**1.049.130.742,00**	**99,92**	**516.523.193,00**

b. Belanja Modal Jembatan.

Belanja Modal Jembatan tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan yang terdiri dari:

1) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi

Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp2.694.950.000,00.

Tabel 5.1.181 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	0,00	0,00	0,00	2.694.950.000,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.694.950.000,00**

2) Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal

Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp3.047.213.000,00.

Tabel 5.1.182 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	0,00	0,00	0,00	3.047.213.000,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	3.047.213.000,00

5.1.2.2.4.2.Belanja Modal Bangunan Air

Belanja Modal Bangunan Air terealisasi sebesar Rp29.282.262.140,00 atau 95,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.728.808.518,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.183 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**8.833.807.750,00**	**7.545.753.755,00**	**85,42**	**14.427.259.648,00**
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	8.833.807.750,00	7.545.753.755,00	85,42	14.427.259.648,00
2	**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**16.090.000.768,00**	**15.969.989.203,00**	**99,25**	**16.428.286.882,00**
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	1.459.364.112,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	8.953.000.768,00	8.916.519.329,00	99,59	13.407.291.527,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	7.137.000.000,00	7.053.469.874,00	98,83	1.561.631.243,00
3	**Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku**	**3.125.000.000,00**	**3.091.274.259,00**	**98,92**	0,00
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.125.000.000,00	3.091.274.259,00	98,92	0,00
4	**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**	**2.680.000.000,00**	**2.675.244.923,00**	**99,82**	**2.279.084.617,00**
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	2.680.000.000,00	2.675.244.923,00	99,82	2.279.084.617,00
	JUMLAH	30.728.808.518,00	29.282.262.140,00	95,29	33.134.631.147,00

a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi.

Belanja Modal Bangunan Air Irigasi dialokasikan untuk Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi dengan realisasi sebesar Rp7.545.753.755,00 atau 85,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.833.807.750,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.184 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi TA 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	8.833.807.750,00	7.545.753.755,00	85,42	14.427.259.648,00
	JUMLAH	8.833.807.750,00	7.545.753.755,00	85,42	14.427.259.648,00

b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.

Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam terealisasi sebesar Rp15.969.989.203,00 atau 99,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.090.000.768,00 yang terdiri dari:

1) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp1.459.364.112,00.

Tabel 5.1.185 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	1.459.364.112,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	1.459.364.112,00

2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai terealisasi sebesar Rp8.916.519.329,00 atau 99,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.953.000.768,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.186 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah	8.953.000.768,00	8.916.519.329,00	99,59	13.407.291.527,00
	JUMLAH	8.953.000.768,00	8.916.519.329,00	99,59	13.407.291.527,00

3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya terealisasi sebesar Rp7.053.469.874,00 atau 98,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.137.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.187 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	7.137.000.000,00	7.053.469.874,00	98,83	775.523.421,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	0,00	0,00	0,00	786.107.822,00
	JUMLAH	7.137.000.000,00	7.053.469.874,00	98,83	1.561.631.243,00

c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku

Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya terealisasi sebesar Rp3.091.274.259,00 atau 98,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.125.000.000,00 seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.188 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	3.125.000.000,00	3.091.274.259,00	98,92	0,00
	JUMLAH	3.125.000.000,00	3.091.274.259,00	98,92	0,00

d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor

Belanja Modal Bangunan Air Kotor yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor terealisasi sebesar Rp2.675.244.923,00 atau 99,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.680.000.000,00 seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.1.189 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	2.200.000.000,00	2.195.553.854,00	99,80	1.680.116.966,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	480.000.000,00	479.691.069,00	99,94	598.967.651,00
	JUMLAH	2.680.000.000,00	2.675.244.923,00	99,82	2.279.084.617,00

5.1.2.2.4.3.Belanja Modal Instalasi

Belanja Modal Instalasi terealisasi sebesar Rp537.000.000,00 atau 99,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp537.500.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.190 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	537.500.000,00	537.000.000,00	99,91	1.071.840.000,00
	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.071.840.000,00
	Belanja Modal Pembangkit Listrik Lainnya	537.500.000,00	537.000.000,00	99,91	0,00
	JUMLAH	537.500.000,00	537.000.000,00	99,91	1.071.840.000,00

Belanja Modal Instalasi terdiri atas Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya dan Belanja Modal Pembangkit Listrik Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya

Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp1.071.840.000,00.

Tabel 5.1.191 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.071.840.000,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	1.071.840.000,00

b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya

Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya terealisasi sebesar Rp537.000.000,00 atau 99,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp537.500.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.192 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	537.500.000,00	537.000.000,00	99,91	0,00
	JUMLAH	537.500.000,00	537.000.000,00	99,91	0,00

5.1.2.2.5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.911.185.149,00 atau 99.78% dari anggaran sebesar Rp14.944.324.805,00. Tabel rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 menurut objek belanja seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.193 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	14.944.324.805,00	14.911.185.149,00	99,78	19.569.331.970,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	1.075.291.797,00
	JUMLAH	14.944.324.805,00	14.911.185.149,00	99,78	20.640.623.767,00

5.1.2.2.5.1.Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja Modal Bahan Perpustakaan terealisasi sebesar Rp14.911.185.149,00 atau 99,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.944.324.805,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.194 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**14.944.324.805,00**	**14.911.185.149,00**	**99,78**	**19.565.331.970,00**
	Belanja Modal Buku Umum	14.944.324.805,00	14.911.185.149,00	99,78	98.500.012,00
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.466.831.958,00
	JUMLAH	**14.944.324.805,00**	**14.911.185.149,00**	**99,78**	**19.565.331.970,00**

Belanja Modal Bahan Perpustakaan terdiri dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Buku Umum tercalisasi sebesar Rp14.911.185.149,00 atau 99,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.944.324.805,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi Belanja Dana BOSP pada Dinas Pendidikan Daerah seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.195 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Buku Umum TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	14.944.324.805,00	14.911.185.149,00	99,78	98.500.012,00
	JUMLAH	**14.944.324.805,00**	**14.911.185.149,00**	**99,78**	**98.500.012,00**

b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya tidak terdapat realisasi pada TA 2024 dan tidak dianggarkan, sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp19.466.831.958,00.

Tabel 5.1.196 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Lainnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah	0,00	0,00	0,00	19.466.831.958,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.466.831.958,00**

5.1.2.2.5.2.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud terdapat perbedaan klasifikasi pada TA 2023 yang diperbaiki pada TA 2024. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada TA 2023 terklasifikasi pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang terealisasi sebesar Rp1.075.291.797,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.197 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah	0,00	0,00	0,00	583.842.516,00
2	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	39.740.664,00
3	Biro Umum	0,00	0,00	0,00	98.145.897,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	155.899.500,00
5	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	197.663.250,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.075.291.797,00**

5.1.2.2.6.Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.205.548.562,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.157.652.900,00 atau 96,03% yang dialokasikan untuk Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

5.1.2.2.6.1.Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud tercalisasi sebesar Rp1.157.652.900,00 atau 96,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.205.548.562,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.198 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**1.205.548.562,00**	**1.157.652.900,00**	**96,03**	**0,00**
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.205.548.562,00	1.157.652.900,00	96,03	0,00
	JUMLAH	**1.205.548.562,00**	**1.157.652.900,00**	**96,03**	**0,00**

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang terdiri dari Belanja Modal Software tercalisasi sebesar Rp1.157.652.900,00 atau 96,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.205.548.562,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.199 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Software TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dinas Pendidikan Daerah UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	175.000.000,00	174.900.000,00	99,94	0,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	289.716.181,00	244.311.000,00	84,33	0,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah	596.330.381,00	595.670.400,00	99,89	0,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	27.000.000,00	25.500.000,00	94,44	0,00
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Biro Umum	100.000.000,00	99.844.500,00	99,84	0,00
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sekretariat DPRD	17.500.000,00	17.427.000,00	99,58	0,00
	JUMLAH	**1.205.548.562,00**	**1.157.652.900,00**	**96,03**	**0,00**

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, penanggulangan bencana sosial, pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, pengembalian kelebihan belanja daerah tahun-tahun sebelumnya, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga pada TA 2024 tercalisasi sebesar Rp450.377.558,00 atau 4,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.508.656.098,00. Belanja tersebut terealisasi untuk Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) TA 2022 dan 2023.

Tabel 5.1.200 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024

NO	URAIAN	Nomor SK	Tanggal	JUMLAH
1	**Pengembalian Dana BOS**			**450.377.558,00**
	- Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) TA 2022 dan 2023	Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 212 Tahun 2024	30 April 2024	450.377.558,00
	TOTAL			**450.377.558,00**

5.1.2.4. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp578.425.561.892,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp578.569.316.876,00 atau dengan capaian sebesar 99,98% yang terdiri dari:

Tabel 5.1.201 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Bagi Hasil	578.569.316.876,00	578.425.561.892,00	99,98	597.788.176.462,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
	JUMLAH	578.569.316.876,00	578.425.561.892,00	99,98	602.788.176.462,00

5.1.2.4.1.Belanja Bagi Hasil

Anggaran Belanja Bagi Hasil pada APBD TA 2024 yang ditetapkan adalah sebesar Rp578.569.316.876,00 terealisasi sebesar Rp578.425.561.892,00 atau 99,98%. Belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.362.614.570,00 atau 3,24% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp597.788.176.462,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.202 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa**	**578.569.316.876,00**	**578.425.561.892,00**	**99,98**	**597.788.176.462,00**
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	277.909.658.452,00	331.870.896.653,00	119,42	359.899.603.389,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	300.659.658.424,00	246.554.665.239,00	82,00	237.888.573.073,00
	JUMLAH	578.569.316.876,00	578.425.561.892,00	99,98	597.788.176.462,00

5.1.2.4.1.1.Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa TA 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten terealisasi sebesar Rp331.870.896.653,00 atau 119,42% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.203 Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten TA 2024

No	Nama Kabupaten	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Pajak Rokok	Jumlah
1	Kab.Minahasa	43.770.176.175,00	18.968.119.372,00	62.738.295.547,00
2	Kab. Kepl. Sangihe	16.397.401.539,00	7.551.372.658,00	23.948.774.197,00
3	Kab. Kepl. Talaud	13.248.992.480,00	5.539.674.219,00	18.788.666.699,00
4	Kab. Bolaang Mongondow	28.790.373.828,00	13.284.242.054,00	42.074.615.882,00
5	Kab. Minahasa Selatan	26.389.597.671,00	13.252.285.212,00	41.641.880.883,00
6	Kab. Minahasa Utara	36.584.187.459,00	12.371.939.892,00	48.956.127.351,00
7	Kab. Kepl. Sitaro	11.184.890.892,00	3.904.113.321,00	15.089.004.213,00
8	Kab. Minahasa Tenggara	17.597.725.230,00	6.590.080.033,00	24.187.805.263,00
9	Kab. Bolaang Mongondow Utara	13.530.259.466,00	4.776.087.846,00	18.306.347.334,00
10	Kab. Bolaang Mongondow Timur	14.604.833.202,00	4.968.009.460,00	19.572.842.662,00

No	Nama Kabupaten	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Pajak Rokok	Jumlah
11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	12.508.596.437,00	4.057.940.185,00	16.566.536.622,00
	Total	236.607.034.411,00	95.263.862.242,00	331.870.896.653,00

b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota terealisasi sebesar Rp246.554.665.239,00 atau 82,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.204 Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota TA 2024

No	Nama Kota	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Pajak Rokok	Total
1	Kota Manado	97.217.072.506,00	25.547.933.044,00	122.765.005.550,00
2	Kota Bitung	52.937.027.278,00	12.087.570.913,00	65.024.598.191,00
3	Kota Tomohon	22.741.827.868,00	5.623.010.424,00	28.364.838.292,00
4	Kota Kotamobagu	23.614.470.245,00	6.785.752.961,00	30.400.223.206,00
	JUMLAH	196.510.397.897,00	50.044.267.342,00	246.554.665.239,00

5.1.2.4.2.Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 tidak dianggarkan dan realisasi sebesar Rp0,00, sedangkan TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.205 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00

5.1.3. Surplus/Defisit

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Defisit Anggaran TA 2024 sebesar Rp(54.095.652.182,21) dari jumlah anggaran surplus yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp7.170.396.319,00. Jika dibandingkan dengan TA 2023, realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp233.617.712.060,42 yang disebabkan oleh target pendapatan yang tidak tercapai sehingga defisit anggaran dibiayai dari SiLPA.

5.1.4. Pembiayaan Daerah

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari realisasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp253.119.165.434,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.206 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	253.121.347.253,00	253.119.165.434,89	100,00	230.389.326.038,68
	JUMLAH	253.121.347.253,00	253.119.165.434,89	100,00	230.389.326.038,68

5.1.4.1.1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan dapat digunakan untuk beberapa hal penting dalam pengelolaan keuangan daerah. SiLPA ini merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa

anggaran tahun lalu yang belum digunakan. SiLPA TA 2024 digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang senilai (Rp54.095.652.182,21). SiLPA juga digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang/pinjaman yang telah jatuh tempo pada TA 2024. Selain itu, SiLPA dapat dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan sebelumnya, juga bisa digunakan untuk membayar kewajiban yang masih ada pada pihak ketiga, namun belum bisa dibayarkan pada akhir tahun anggaran sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya TA 2024 sebesar Rp253.119.165.434,89 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp253.121.347.253,00. SiLPA TA 2024 mengalami peningkatan dari TA 2023 yaitu sebesar Rp22.729.837.396,21 atau 9,87%, dengan SiLPA TA 2023 adalah sebesar Rp230.389.328.038,68. Peningkatan tersebut disebabkan oleh karena realisasi pendapatan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.1.207 Rincian Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Penghematan Belanja	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	41.649.536,68
2	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	233.121.347.253,00	233.121.347.252,89	100,00	230.347.678.502,00
4	Koreksi SILPA	0,00	(2.181.818,00)	0,00	0,00
	JUMLAH	253.121.347.253,00	253.119.165.434,89	100,00	230.389.328.038,68

5.1.4.1.1.1.Penghematan Belanja

Penghematan belanja terealisasi sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.208 Rincian Anggaran dan Realisasi Penghematan Belanja TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**Penghematan Belanja-Belanja Operasi**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**100,00**	**41.649.536,68**
	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	41.649.536,68
	JUMLAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	41.649.536,68

5.1.4.1.1.2.Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan

Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja terealisasi sebesar Rp 233.121.347.252,89 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp233.121.347.253,00.

Tabel 5.1.209 Rincian Anggaran dan Realisasi Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	233.121.347.253,00	233.121.347.252,89	100,00	230.347.678.502,00
	JUMLAH	233.121.347.253,00	233.121.347.252,89	100,00	230.347.678.502,00

5.1.4.1.1.3.Koreksi SiLPA

Koreksi SiLPA merupakan koreksi untuk kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya. Pada TA 2024, terdapat koreksi yang mengurangi nilai SiLPA sebesar Rp2.181.818,00. Koreksi tersebut merupakan kesalahan penyetoran Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) pada TA 2022 yang seharusnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, tetapi tersetor ke Kas Daerah pada TA 2022. Sehingga, pada TA 2024 dilakukan penyesuaian atas kesalahan tersebut dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara dari Kas Daerah pada tanggal 17 Juli 2024 dengan nomor SP2D Non Anggaran 00018/5-02.0-00.0-00.2.0.1 senilai Rp2.181.818,00.

Tabel 5.1.210 Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya TA 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pembayaran Penerusan Penyetoran Pajak PPH Pasal 4 Ayat (2) Ke RKUN oleh Dinas Pariwisata Daerah PROV. SULUT tetapi disetor ke kas daerah TA.2022 pada BKAD	(2.181.818,00)
	JUMLAH	(2.181.818,00)

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan telah dianggarkan sebesar Rp260.291.743.572,00 dan terealisasi sebesar Rp136.790.020.220,00 atau 52,55% yang terdiri dari:

Tabel 5.1.211 Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	50.000.000.000,00
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	230.291.743.572,00	106.790.020.220,00	46,37	106.790.040.664,00
	JUMLAH	260.291.743.572,00	136.790.020.220,00	52,55	156.790.040.664,00

5.1.4.2.1.Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan modal daerah didasarkan pada SK Gubernur Nomor 73 Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT Bank SulutGo. Penyertaan modal tersebut dilakukan untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pemegang saham pengendali dan mengantisipasi pemberlakuan Peraturan OJK Nomor 12/PJOK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum bahwa bank wajib memiliki modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000.000,00. Realisasi penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terealisasi sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000,00. Realisasi penyertaan modal daerah TA 2023 sebesar Rp50.000.000.000,00, mengalami penurunan pada TA 2024 sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 40%. Pembayaran penyertaan modal daerah setiap tahunnya didasarkan nilai yang ditetapkan pada Surat Keputusan Gubernur yang berlaku.

5.1.4.2.2.Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki Kewajiban atas Pokok Pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 14 Tanggal 17 Oktober 2018 tentang Perjanjian Pinjaman Pembiayaan PT SMI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas Pembangunan RSUD Tipe B Provinsi Sulawesi Utara, Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 3 Tanggal 12 Februari 2019 Perjanjian Pinjaman Pembiayaan PT. SMI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas Pembangunan UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara serta Perubahannya, Akta Perjanjian Nomor 25 Tanggal 25 September 2020 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman Kegiatan untuk Mendukung Program PEN Daerah Tahun 2020 serta Perubahannya, dan Akta Perjanjian Nomor: PERJ-130/SMI/0821 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Perjanjian

Pemberian Pinjaman Kegiatan untuk Mendukung Program PEN Daerah Tahun 2021.

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang jatuh Tempo TA 2024 sebesar Rp230.291.743.572,00 telah tercalisasi 46,37%, yaitu sebesar Rp106.790.020.220,00. Realisasi pada TA 2023 adalah sebesar Rp106.790.040.664,00, nilai tersebut relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang jatuh Tempo merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.212 Rincian Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo TA 2024

NO	URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RSUD, Periode Februari 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 14 tgl 17 Oktober 2018 Pada PT SMI sesuai Srt No: : S-24/SMI/DPPPP/DPPU-3/0224 Tgl 13/2/24	20.000.001.000,00	0,00
2	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RS MATA, Periode Februari 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 03 Tgl 12 Februari 2019 Pada PT SMI sesuai Srt No: : S-24/SMI/DPPPP/DPPU-3/0224 Tgl 13/2/24	6.697.509.166,00	0,00
3	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RSUD, Periode Mei 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 14 Tanggal 17 Oktober 2018 Pada PT SMI sesuai Srt No: S-73/SMI/DPPPP/DPPU-3/0524 Tgl 6 Mei 2024	20.000.001.000,00	0,00
4	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RS MATA, Periode Mei 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 03 Tanggal 12 Februari 2019 Pada PT SMI sesuai Srt No: S-73/SMI/DPPPP/DPPU-3/0524 Tgl 6 Mei 2024	6.697.509.166,00	0,00
5	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RSUD, Periode Agustus 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 14 Tanggal 17 Oktober 2018 Pada PT SMI sesuai Srt No: S-128/SMI/DPPPP/DPPU-3/0824 Tgl 6 Agustus 2024	20.000.001.000,00	0,00
6	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RS MATA Periode Agustus 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 03 Tgl 12 Februari 2019 Pada PT SMI sesuai Srt No: S-128/SMI/DPPPP/DPPU-3/0824 Tgl 6 Agustus 2024	6.697.509.166,00	0,00
7	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RS MATA, Periode Desember 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 03 Tgl 12 Februari 2019 pd PT. SMI sesuai srt No: S-222/SMI/DPPPP/DPPU-3/1124 Tgl 29 Nov 2024	6.697.503.722,00	0,00
8	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RSUD, Periode Desember 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 14 Tgl 17 Oktober 2018 Pada PT. SMI sesuai srt No: S-222/SMI/DPPPP/DPPU-3/1124 Tgl 29 November 2024	19.999.986.000,00	0,00
9	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RS MATA, Periode Februari 2023 Berdasarkan Perjanjian Nomor 03 Tgl 12 Februari 2019 Pada PT SMI sesuai Srt No: S-17/SMI-DPPPP/DPPU-3/0223 Tgl 9/2/23	0,00	6.697.509.166,00
10	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RSUD, Periode Februari 2023 Berdasarkan Perjanjian Nomor 14 tgl 17 Oktober 2018 Pada PT SMI sesuai Srt No: S-17/SMI-DPPPP/DPPU-3/0223 Tgl 9/2/23	0,00	20.000.001.000,00
11	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RSUD, Periode Mei 2023 Berdasarkan Perjanjian Nomor 14 tgl 17 Oktober 2018 Pada PT SMI sesuai Srt No: S-40/SMI/DPPPP/DPPU-3/0523 Tgl 11 Mei 2023	0,00	20.000.001.000,00
12	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RS MATA, Periode Mei 2023 Berdasarkan Perjanjian Nomor 03 Tgl 12 Februari 2019 Pada PT SMI sesuai No: S-40/SMI/DPPPP/DPPU-3/0523 Tgl 11 Mei 2023	0,00	6.697.509.166,00
13	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RSUD, Periode Agustus 2023 Berdasarkan Perjanjian Nomor 14 tgl	0,00	20.000.001.000,00

NO	URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023
	17 Oktober 2018 Pada PT SMI sesuai Srt No: S-88/SMI/DPPPP/DPPU-3/0823 Tgl 7 Agustus 2023		
14	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RS MATA, Periode Agustus 2023 Berdasarkan Perjanjian Nomor 3 tgl 12 Februari 2019 Pada PT SMI sesuai Srt No: S-88/SMI/DPPPP/DPPU-3/0823 Tgl 7 Agustus 2023	0,00	6.697.509.166,00
15	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RSUD, Periode November 2023 Berdasarkan Perjanjian Nomor 14 tgl 17 Oktober 2018 pd PT SMI sesuai Srt No: S-137/SMI/DPPPP/DPPU-3/1123 Tgl 9 November 2023	0,00	20.000.001.000,00
16	Pembayaran Belanja Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang - RS MATA, Periode November 2023 Berdasarkan Perjanjian Nomor 3 tgl 12 Februari 2019 pd PT SMI sesuai Srt No: S-137/SMI/DPPPP/DPPU-3/1123 Tgl 9 November 2023	0,00	6.697.509.166,00
	JUMLAH	106.790.020.220,00	106.790.040.884,00

Pembayaran cicilan pokok utang yang sudah jatuh tempo terbagi menjadi 2 (dua) tipe pembayaran, yaitu pembayaran reguler dan pembayaran melalui potongan Dana Alokasi Umum Daerah (DAU). Anggaran sebesar Rp230.291.743.572,00 terdiri dari Rp106.790.020.220,00 yang merupakan pembayaran pokok reguler dibayarkan melalui pengeluaran pembiayaan. Sedangkan Rp123.501.723.352,00 dibayarkan melalui potongan langsung dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pemotongan DAU periode penyaluran bulan Januari s/d Desember Tahun 2024, nominal pembayaran pokok dan bunga pinjaman didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KM.7/2023 Tanggal 20 Desember 2023. Untuk pemotongan DAU periode penyaluran bulan September s/d Desember Tahun 2024, nominal pembayaran pokok dan bunga pinjaman berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KM.7/2024 Tanggal 26 Agustus 2024.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan restrukturisasi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 yang tertuang dalam Perubahan III Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 25 Tanggal 25 September 2020, Nomor PERJ-108/SMI/0824. Dalam perubahan perjanjian III, diatur tentang penundaan pembayaran angsuran pokok ke-21 sampai dengan angsuran pokok ke-26, angsuran pokok ke-27 senilai Rp5.117.375.080,95, dan masing-masing 1/45 x jumlah saldo pinjaman untuk angsuran pokok ke-28 sampai dengan ke-72. Penundaan pembayaran angsuran pokok Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 pada tahun 2024 senilai Rp39.186.757.180,00 dan untuk tahun 2025 senilai Rp24.272.692.804,00.

Untuk restrukturisasi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021, berdasarkan Perubahan II Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-130/SMI/0821 Tanggal 27 Agustus 2021, Nomor PERJ-109/SMI/0824 tanggal 7 Agustus 2024. Dalam perubahan perjanjian II, diatur tentang penundaan pembayaran angsuran pokok ke-34 sampai dengan angsuran pokok ke-39, angsuran pokok ke-40 senilai Rp.2.946.632.852,00 dan masing-masing 1/56 x jumlah saldo pinjaman untuk angsuran pokok ke-41 sampai dengan ke-96. Penundaan pembayaran angsuran pokok Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 pada tahun 2024 senilai Rp22.564.104.496,00 dan untuk tahun 2025 senilai Rp13.976.445.520,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembayaran cicilan pokok utang Tahun 2024 rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.213 Rincian Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang TA 2024

PERIODE PENYALURAN DAU	REALISASI POTONGAN DAU			REALISASI PEMBAYARAN POKOK REGULER			TOTAL
	PEMBAYARAN POKOK PEN 2020	PEMBAYARAN POKOK PEN 2021	%	PINJAMAN PEMBANGUNAN RSUD	PINJAMAN PEMBANGUNAN RS MATA	%	
(1)	(2)	(3)	(4=2+3/8)	(5)	(6)	(7)	(8=2+3+5+6)
Januari 2024	5.641.026.124,00	9.796.689.295,00	53,63	0,00	0,00	46,37	15.437.715.419,00
Februari 2024	5.641.026.124,00	9.796.689.295,00		20.000.001.000,00	6.697.509.186,00		42.135.225.585,00
Maret 2024	5.641.026.124,00	9.796.689.295,00		0,00	0,00		15.437.715.419,00
April 2024	5.641.026.124,00	9.796.689.295,00		0,00	0,00		15.437.715.419,00
Mei 2024	5.641.026.124,00	9.796.689.295,00		20.000.001.000,00	6.697.509.186,00		42.135.225.585,00
Juni 2024	5.641.026.124,00	9.796.689.295,00		0,00	0,00		15.437.715.419,00
Juli 2024	5.641.026.124,00	9.796.689.295,00		0,00	0,00		15.437.715.419,00
Agustus 2024	5.641.026.124,00	9.796.689.295,00		20.000.001.000,00	6.697.509.186,00		42.135.225.585,00
September 2024	0,00 (Karena Restrukturisasi)	0,00 (Karena Restrukturisasi)		0,00	0,00		0,00
Oktober 2024	0,00 (Karena Restrukturisasi)	0,00 (Karena Restrukturisasi)		0,00	0,00		0,00
November 2024	0,00 (Karena Restrukturisasi)	0,00 (Karena Restrukturisasi)		0,00	0,00		0,00
Desember 2024	0,00 (Karena Restrukturisasi)	0,00 (Karena Restrukturisasi)		19.999.986.000,00	6.697.503.722,00		26.697.489.722,00
TOTAL	45.128.209.992,00	78.373.514.360,00	53,63	79.999.989.000,00	26.790.031.220,00	46,37	230.291.743.572,00

Kewajiban pembayaran cicilan pokok dan bunga hingga akhir TA 2024 khususnya pinjaman pembangunan RSUD dan pinjaman pembangunan RSM telah lunas, sehingga tersisa kewajiban pengembalian pinjaman PEN 2020 dan 2021 yang masih harus dibayarkan periode 2025-2029 sebesar Rp925.758.295.383,00.

5.1.4.3. Pembiayaan Netto

Berdasarkan perhitungan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, maka didapatkan nilai Pembiayaan Netto TA 2024 sebesar Rp116.329.145.214,89.

Tabel 5.1.214 Pembiayaan Netto TA 2024

NO	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	(7.170.398.319,00)	116.329.145.214,89	-1.622,35	73.599.287.374,68

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 sebesar Rp62.233.493.032,68 Jumlah SiLPA ini berasal dari defisit sebesar Rp(54.095.652.182,21) ditambah dengan pembiayaan netto Rp116.329.145.214,89.

Tabel 5.1.215 Rincian SiLPA TA 2024 dan 2023

NO.	URAIAN	SILPA TAHUN ANGGARAN 2024	SILPA TAHUN ANGGARAN 2023
1	Sisa DAK Fisik	0,00	11.939.192.522,00
2	Sisa DAK Non Fisik	0,00	6.994.348.858,00
3	Sisa DAK Fisik 2021	1.401.812.071,35	0,00
4	Sisa DAK Fisik 2022	8.768.347.245,00	0,00
5	Sisa DAK Fisik 2023	4.331.327.305,00	0,00
6	Sisa DAK Fisik 2024	7.569.224.854,00	0,00
7	Sisa DAK Non Fisik 2024	4.060.314.696,00	0,00
8	DAU TPG	0,00	14.680.220.000,00
9	Sisa SAU Tambahan TPG dan Tamsil 2023	343.193.660,00	0,00
10	Sisa SAU Tambahan TPG dan Tamsil 2024	1.028.783.000,00	0,00
11	DID Tambahan	0,00	516.399.650,00
13	DID Reguler	0,00	680.000.000,00
14	DAU PPPK	0,00	120.270.021.570,00
22	Hutang Beban Barang Jasa	11.660.663.178,35	69.441.795.793,69
23	Hutang Beban Pegawai	21.824.857.754,00	19.393.931.880,00
24	Pengembalian Dana BOSP ke RKUN	69.636.000,00	115.000.000,00
25	Kas Bendahara Penerimaan	103.349.217,00	173.549.685,00
26	Kas BOSP	750.781.827,00	27.882.805,00
27	Kas Bendahara Pengeluaran	47.314.296,00	105.248.431,00
28	Kas Lainnya	273.877.929,00	183.756.078,00
	JUMLAH	**62.233.493.032,68**	**283.121.347.252,89**

5.2. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Rincian Perhitungan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Uraian	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	253.121.347.252,89	230.389.328.038,68
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	253.119.165.434,89	230.389.328.038,68
Sub Total (3 = 1 – 2)	**2.181.818,00**	**0,00**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	62.233.493.032,68	253.121.347.252,89
Sub Total (5 = 3 + 4)	**62.235.674.850,68**	**253.121.347.252,89**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(2.181.818,00)	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (8 = 5 + 6)	**62.233.493.032,68**	**253.121.347.252,89**

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2024 sebesar Rp253.121.347.252,89 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 sebesar Rp253.121.347.252,89. Jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2023 yang sebesar Rp230.389.328.038,68, nilai tersebut mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp22.732.019.214,21 atau 9,87%. Peningkatan tersebut disebabkan karena realisasi pendapatan yang lebih besar dari periode sebelumnya. Pemanfaatan saldo awal tersebut dilaksanakan melalui media perubahan APBD Tahun 2024 dan ditetapkan sebagai pagu anggaran penerimaan pembiayaan penggunaan SILPA tahun lalu.

Tabel 5.2.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal TA 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	**253.121.347.252,89**	**230.389.328.038,68**

5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp253.119.165.434,89. Jika dibandingkan dengan Penggunaan SAL untuk Penerimaan Pembiayaan pada TA 2023 yang sebesar Rp230.389.328.038,68, nilai tersebut mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp22.729.837.396,21 atau 9,87%. Peningkatan tersebut dikarenakan nilai SAL yang meningkat pada TA 2024 dikarenakan peningkatan realisasi pendapatan daerah. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp253.119.165.434,89.

Tabel 5.2.3 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	253.119.165.434,89	230.389.328.038,68

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp62.233.493.032,68 berasal dari surplus defisit ditambah pembiayaan neto TA 2024 atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan Penerimaan Pembiayaan dengan Belanja dan Transfer serta Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Tabel 5.2.4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) TA 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	62.233.493.032,68	253.121.347.252,89

SILPA TA 2024 sebesar Rp62.233.493.032,68. Apabila dibandingkan dengan realisasi SILPA TA 2023 sebesar Rp253.121.347.252,89, maka terjadi penurunan sebesar Rp190.887.854.220,21 atau 75,41%. Penurunan tersebut dikarenakan SAL pada TA 2024 digunakan untuk menutupi defisit yang terjadi pada TA 2024.

Tabel 5.2.5 Perhitungan SILPA TA 2024

Uraian	Nilai
Surplus(Defisit)	(54.095.652.182,21)
Pembiayaan Netto	116.329.145.214,89
SILPA	62.233.493.032,68

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Pada TA 2024, terdapat koreksi kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya yang mengurangi nilai Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp2.181.818,00. Koreksi tersebut merupakan kesalahan penyetoran Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) pada TA 2022 yang seharusnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, tetapi tersetor ke Kas Daerah pada TA 2022. Sehingga, pada TA 2024 dilakukan penyesuaian atas kesalahan tersebut dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara dari Kas Daerah pada tanggal 17 Juli 2024 dengan nomor SP2D Non Anggaran 00018/5-02.0-00.0-00.2.0.1/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 senilai Rp2.181.818,00.

Tabel 5.2.6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya TA 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(2.181.818,00)	0,00

5.2.5. Lain-lain

Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL sebesar Rp0,00.

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan akumulasi SILPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berkenaan. Nilai akumulasi SAL akhir untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp62.233.493.032,68.

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp62.233.493.032,68 pada TA 2024 jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp253.121.347.252,89 turun sebesar Rp190.887.854.220,21 atau 75,41%.

Tabel 5.2.7 Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	62.233.493.032,68	253.121.347.252,89

5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.3.1. ASET

Dalam penjelasan akun-akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1. ASET LANCAR

Aset Lancar terdiri dari:

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a.	**Kas di Kas Daerah**	**61.343.622.268,68**	**252.651.779.752,89**

Penyimpanan uang milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 287 Tahun 2020 tentang Penetapan Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 347 Tahun 2022 tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Posisi saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 yang telah direkonsiliasi antara saldo buku dengan saldo rekening koran bank pada PT Bank SulutGo adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.1 Rincian Kas di Kas Daerah TA 2024

No	Uraian	Saldo Buku	Saldo Bank
	PT BANK SULUT		
1	001.01.11.000001-7	96.764,00	96.764,00
2	001.01.11.000002-2	61.343.525.504,68	61.343.382.824,68
	JUMLAH	**61.343.622.268,68**	**61.343.479.588,68**

Posisi saldo Kas Daerah per 31 Desember 2024 sesuai Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran sebesar Rp61.343.622.268,68. Jika dibandingkan dengan saldo Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.343.479.588,68 sesuai RC Bank maka terjadi perbedaan atau selisih lebih sebesar Rp142.680,00, yaitu:

1. Rp180,00 yang merupakan SP2D No.032651/1-02.0-00.0-00.1.0.0/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022 pada Dinas Kesehatan untuk pembayaran belanja perjalanan dinas biasa pada kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp27.206.020,00 tetapi dipindahbukukan oleh bank sebesar Rp27.206.200,00 pada tanggal 24 Maret 2022. Atas selisih ini, telah disetorkan kembali oleh pihak Bank ke Kas Daerah sebesar Rp180,00 pada tanggal 6 Februari 2025.
2. Rp142.500 yang merupakan SP2D No.71.00/04.0/001959/LS / 4.01.0.00.0.00.01.0000 /PR/ 9/2024 tanggal 30 September 2024 pada Biro Umum untuk pembayaran belanja jasa tenaga administrasi, iuran jaminan kesehatan, iuran JKK dan JKM susulan a.n. Rendy Engkol bulan Agustus 2024, bagian rumah tangga pada sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah merupakan *double* potongan BPJS Kesehatan yang sudah dipotong oleh pihak bank pada tanggal 11 Oktober 2024 dan dipotong kembali pada tanggal 4 November 2024. Atas selisih ini, telah disetorkan kembali oleh pihak Bank ke Kas Daerah sebesar Rp142.500 pada tanggal 4 Februari 2025.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b.	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**103.349.217,00**	**173.549.665,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan daerah yang telah dipungut oleh Bendahara Penerimaan sebesar Rp103.349.217,00, namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor ke rekening Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 sebesar Rp103.349.217,00 dan sampai 31 Desember 2024 belum disetorkan ke kas daerah dan berada pada perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 5.3.2 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024

No	SKPD	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1	UPTD RSUD Tipe C Noongan	6 Januari dan 3 Februari 2025	1.593.773,00
2	UPTD Laboratorium Kesehatan	25 April 2025	5.697.244,00
3	Dinas Pariwisata Daerah	6 Januari 2025	1.855.000,00
4	UPTD Bitung	2 Januari 2025	13.130.700,00
5	UPTD Bolaang Mongondow	2 Januari 2025	7.269.800,00
6	UPTD Kotamobagu-Bolsel	2 Januari 2025	325.500,00
7	UPTD Manado	2 Januari 2025	38.642.800,00
8	UPTD Minahasa	2 Januari 2025	4.188.400,00
9	UPTD Minahasa Selatan	2 Januari 2025	13.427.600,00
10	UPTD Minahasa Utara	2 Januari 2025	8.815.600,00
11	UPTD Minahasa Tenggara	2 Januari 2025	2.210.800,00
12	UPTD Tomohon	2 Januari 2025	5.992.000,00
TOTAL SISA KAS BENDAHARA PENERIMAAN			**103.349.217,00**

Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 sebesar Rp173.549.665,00 sudah disetorkan ke kas daerah pada tahun anggaran 2023.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
c.	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**47.314.296,00**	**105.248.431,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.314.296,00 merupakan akumulasi saldo potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Iuran BPJS dan Sisa UP/GU pada beberapa perangkat daerah yang masih ada pada Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah/negara pada bulan Januari dan Februari 2025.

Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 sebesar Rp47.314.296,00 berada pada perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 5.3.3 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024

No	SKPD	Jenis	Tanggal Setor	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum	Pajak	Januari, Februari, dan Maret 2025	11.574.576,00
2	Dinas Tenaga Kerja	Iuran BPJS	14 Januari 2025	90.720,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	UP/GU	24 Februari 2025	35.649.000,00
TOTAL SISA KAS BENDAHARA PENGELUARAN				**47.314.296,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 sebesar Rp105.248.431,00 sudah disetorkan ke kas daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
d.	**Kas Lainnya**	**273.877.929,00**	**183.756.078,00**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp273.877.929,00, namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor ke rekening Kas Daerah.

Kas lainnya TA 2024 sebesar Rp273.877.929,00 terdiri dari pajak sekolah yang belum disetorkan ke RKUN sampai dengan 31 Desember 2024, yaitu:

Tabel 5.3.4 Rincian Kas Lainnya TA 2024

No	Sekolah	Tanggal Setor	Nilai
1	SMA Negeri 2 Manado	09/01/2025	13.636.877,00
2	SMA Negeri 3 Manado	31/01/2025	18.324.888,00
3	SMA Negeri 4 Manado	07/01/2025	950.999,00
4	SMA Negeri 6 Manado	24/01/2025	1.520.177,00
5	SMA Negeri 8 Manado	09/01/2025	11.571.597,00
6	SMA Negeri 1 Tomohon	19/02/2025	51.000,00
7	SMA Negeri 1 Kotamobagu	11/02/2025	25.631.284,00
		14/03/2025	19.498.904,00
8	SMA Negeri 3 Kotamobagu	24/01/2025	576.000,00
9	SMA Negeri 1 Langowan	31/01/2025	18.706.357,00
10	SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Sulawesi Utara	06/01/2025	42.000,00
11	SMA Negeri 1 Pineleng	17/01/2025	1.522.160,00
12	SMA Negeri 1 Remboken	06/01/2025	18,00
13	SMA Negeri 1 Tombulu	14/01/2025	40.000,00
14	SMA Negeri 3 Tondano	07/02/2025	16.019.123,00
15	SMK Negeri 1 Tomberiri	24/01/2025	2.563.896,00
16	SMK Negeri 1 Lembean Timur	14/02/2025	57.000,00
17	SMK Negeri 1 Langowan	20/01/2025	455.000,00
18	SMK Negeri 1 Tombulu	08/01/2025	35.200,00
19	SMK Negeri 1 Tondano	15/01/2025	8.103.653,00
20	SMA Negeri 1 Modoinding	30/01/2025	2.063.683,00
21	SMA Negeri 1 Maesaan	04/02/2025	2.065.436,00
22	SMA Negeri 1 Amurang Timur	11/02/2025	1.668.924,00
23	SMA Negeri 1 Motoling Timur	06/01/2025	1.083.351,00
24	SMK Negeri 1 Modoinding	07/01/2025	6.104.813,00
25	SMK Negeri 1 Tompaso Baru	15/02/2025	4.531.298,00
26	SMK Negeri 1 Tareran	19/02/2025	436.000,00
27	SMK Negeri 1 Motoling Timur	31/01/2025	661.156,00
28	SMK Negeri 1 Tumpaan	12/02/2025	6.450.166,00
29	SLB Negeri Amurang	03/02/2025	2.419.879,00
30	SMA Negeri 2 Ratahan	04/02/2025	1.016.215,00
31	SMA Negeri 1 Touluaan Selatan	13/02/2025	18.000,00
32	SMA Negeri 1 Wori	31/01/2025	530.600,00
33	SMA Negeri 1 Likupang	19/02/2025	708.897,00
34	SMA Negeri 1 Kalawat	16/01/2025	533.000,00
35	SMK Negeri 1 Wori	06/01/2025	360.000,00
36	SMK Negeri 1 Likupang Timur	30/01/2025	2.338.477,00
37	SMK Negeri 1 Likupang Barat	03/02/2025	427.364,00
38	SMA Negeri 1 Dumoga	15/01/2025	12.000,00
39	SMA Negeri 1 Modayag	17/03/2025	13.939.633,00
40	SMK Negeri 1 Tutuyan	17/03/2025	8.800,00
41	SMK Negeri 1 Modayag Barat	11/03/2025	79.000,00
42	SMA Negeri 1 Manganitu Selatan	16/01/2025	808.965,00
43	SMA Negeri 1 Tabut	17/01/2025	43.446.026,00
44	SMK Negeri 1 Tabukan Tengah	30/01/2025	28.000,00

No	Sekolah	Tanggal Setor	Nilai
45	SMA Negeri 2 Melonguane Di Kiama	16/01/2025	363.468,00
46	SMA Negeri 1 Beo	07/01/2025	6.832.632,00
47	SMA Negeri 1 Sambuara	11/02/2025	769.693,00
48	SMK Negeri 1 Talaud	13/01/2025	5.757.012,00
49	SMA Negeri 2 Siau Timur	05/02/2035	2.930.420,00
50	SMA Negeri 1 Siau Timur	02/03/2025	4.152.414,00
51	SMA Negeri 1 Tagulandang	31/01/2025	19.925.989,00
52	SMK Negeri 1 Tagulandang Utara	20/02/2025	2.088.485,00
	Total		273.877.929,00

Kas lainnya TA 2023 sebesar Rp183.756.078,00 saldo kas ini merupakan kas lainnya di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dan sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 27 Februari 2024.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
e.	**Setara Kas**	**0,00**	**0,00**

Tidak ada saldo setara kas per 31 Desember 2024.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
f.	**Kas Dana BOSP**	**750.781.827,00**	**27.882.805,00**

Kas Dana BOSP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp750.781.827,00 merupakan dana bantuan operasional yang diberikan kepada SMA/SMK/SLB Negeri sebagai penunjang pendidikan. Kas Dana BOSP tunai sudah disetor seluruhnya ke kas masing-masing sekolah pada bulan Maret 2025. Kas Dana BOSP berada pada SMA/SMK/SLB Negeri sebagai berikut.

Tabel 5.3.5 Rincian Kas Dana BOSP Tahun 2024

No	Nama Sekolah	Total Sisa Kas Dana BOSP		
		Tunai	RC	Total
1	SMA Negeri 10 Manado	14.500.000,00	-	14.500.000,00
2	SMK Negeri 2 Manado	6.167.244,00	-	6.167.244,00
3	SMK Negeri 4 Manado	35.536.655,00	-	35.536.655,00
4	SMK Negeri 6 Manado	8.027.700,00	-	8.027.700,00
5	SMA Negeri 1 Kotamobagu	19.760.115,00	37.566.675,00	57.326.790,00
6	SMA Negeri 3 Kotamobagu	114.929.750,00	18.000,00	114.947.750,00
7	SMA Negeri 1 Langowan	10.000.000,00	-	10.000.000,00
8	SMA Negeri 3 Tondano	66.374.550,00	54.175.450,00	120.550.000,00
9	SMK Negeri 1 Tondano	120.000,00	-	120.000,00
10	SMK Negeri PP Kalasey	-	30.000,00	30.000,00
11	SMA Negeri 1 Modoinding	417.600,00	-	417.600,00
12	SMA Negeri 1 Amurang Barat	200.000,00	-	200.000,00
13	SMK Negeri 1 Tenga	83.628.000,00	-	83.628.000,00
14	SMK Negeri 1 Motoling Barat	-	1.600.000,00	1.600.000,00
15	SMK Negeri 1 Motoling Timur	8.430.400,00	600.010,00	9.030.410,00
16	SMK Negeri 1 Sinonsayang	1.050.000,00	-	1.050.000,00
17	SMA Negeri 2 Ratahan	3.000.000,00	-	3.000.000,00
18	SMA Negeri 1 Kauditan	46.928.950,00	-	46.928.950,00
19	SMK Negeri 1 Likupang Barat	1.900.000,00	-	1.900.000,00
20	SMA Negeri 1 Bintauna	150.000,00	-	150.000,00
21	SMA Negeri 1 Bolaang Uki	125.000,00	-	125.000,00
22	SMA Negeri 1 Kotabunan	6.095.215,00	-	6.095.215,00
23	SMA Negeri 1 Modayag	-	6.110.000,00	6.110.000,00
24	SMK Negeri 1 Kotabunan	1.293.000,00	-	1.293.000,00

No	Nama Sekolah	Total Sisa Kas Dana BOSP		
		Tunai	RC	Total
25	SMK Negeri Nuangan	4.126.000,00	-	4.126.000,00
26	SMK Negeri 1 Tutuyan	40.000.000,00	-	40.000.000,00
27	SMK Negeri 1 Modayag Barat	-	859.500,00	859.500,00
28	SMA Negeri 1 Tabteng	-	18.367.800,00	18.367.800,00
29	SMA Negeri 1 Tabut	-	3.580.000,00	3.580.000,00
30	SMA Negeri Pintareng	-	11.904.000,00	11.904.000,00
31	SMA Negeri 1 Nanusa	150.000,00	-	150.000,00
32	SMA Negeri 1 Piningkatan Tule	4.679.000,00	713,00	4.679.713,00
33	SMA Negeri 1 Siau Timur	117.400.000,00	20.000.000,00	137.400.000,00
34	SMK Negeri 1 Tagulandang Selatan	20.500,00	-	20.500,00
35	SMK Negeri 1 Tagulandang Utara	760.000,00	200.000,00	960.000,00
Total		595.769.679,00	155.012.146,00	750.781.827,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
g. Piutang Pajak Daerah	**64.662.342.525,00**	**64.279.375.857,00**

Piutang Pajak Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp64.662.342.525,00 atau naik sebesar Rp382.966.668,00 dari saldo tahun 2023 sebesar Rp64.279.375.857,00. Perubahan (mutasi) saldo Piutang Pajak Daerah terjadi karena adanya pengurangan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp697.300.348.537,00 dan penambahan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp697.683.315.205,00. Rincian Piutang Pajak Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.6 Tabel Piutang Pajak

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
I. PIUTANG PENDAPATAN					
A. PIUTANG PAJAK DAERAH					
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	63.339.040.387,00	412.438.196.437,00	412.444.857.987,00	63.332.378.837,00
2	Piutang BBNKB	-	278.168.511.228,00	278.168.511.228,00	-
3	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
4	Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)	940.335.470,00	7.076.607.540,00	6.686.979.322,00	1.329.963.688,00
5	Piutang Pajak Rokok	-	-	-	-
Jumlah Piutang Pajak Daerah		64.279.375.857,00	697.683.315.205,00	697.300.348.537,00	64.662.342.525,00

Adapun penjelasan dari Piutang Pajak Daerah sebagai berikut :

1) Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang PKB sebesar Rp63.332.378.837,00, yang merupakan tunggakan pajak dari tahun 2019 seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.7 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang PKB

SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
UPTD Manado	16.376.790.027,00	173.604.721.069,00	173.607.236.819,00	16.374.275.277,00
UPTD Minahasa	6.357.204.231,00	41.958.047.240,00	41.958.047.240,00	6.357.204.231,00
UPTD Bitung	8.569.719.645,00	39.315.561.570,00	39.315.614.070,00	8.569.667.145,00
UPTD Sangihe, Talaud dan Sitaro (Tahuna)	2.861.775.775,00	8.892.719.060,00	8.892.719.060,00	2.861.775.775,00
UPTD Kotamobagu dan Bolsel	4.426.721.057,00	24.321.249.358,00	24.321.249.358,00	4.426.721.057,00
UPTD Minsel	3.830.267.412,00	19.693.604.560,00	19.693.604.560,00	3.830.267.412,00
UPTD Tomohon	3.207.734.277,00	20.882.331.290,00	20.882.514.290,00	3.207.551.277,00
UPTD Minut	9.287.128.604,00	44.966.110.420,00	44.966.654.920,00	9.286.584.104,00
UPTD Mitra	2.199.816.267,00	11.005.077.790,00	11.008.180.590,00	2.196.715.467,00
UPTD Bolmong, Bolmut dan Boltim	6.221.881.092,00	27.629.774.080,00	27.630.038.080,00	6.221.617.092,00
Total	63.339.040.387,00	412.438.196.437,00	412.444.857.987,00	63.332.378.837,00

Piutang PKB pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.661.550,00 dari total piutang tahun 2023 sebesar Rp63.339.040.387,00 yang terdiri dari penambahan nilai piutang pada tahun 2024 sebesar Rp412.438.196.437,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp412.444.857.987,00. Rincian terkait Piutang PKB terdapat di Lampiran II.1 laporan keuangan ini.

2) Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Piutang BBNKB adalah pajak yang dikenakan atas perubahan kepemilikan kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas, yang dilakukan melalui jual beli, hibah, warisan, atau sebab lainnya. Pada tahun 2024 piutang BBNKB mengalami penambahan sebesar Rp278.168.511.228,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp278.168.511.228,00 sehingga tidak ada saldo piutang. Rincian terkait Piutang BBNKB terdapat di Lampiran II.2 laporan keuangan ini

3) Piutang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor

Tidak ada saldo piutang pajak bahan kendaraan bermotor.

4) Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)

Piutang PAP sebesar Rp1.329.963.688,00, yang merupakan tunggakan pajak dari tahun 2019, seperti dalam tabel berikut.

Tabel 6.3.8 Piutang PAP

SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
UPTD Manado	-	197.759.100	197.759.100	-
UPTD Minahasa	223.221.000,00	5.464.047.000	5.406.882.200	281.385.800
UPTD Bitung	-	22.590.500,00	22.590.500,00	-
UPTD Sangihe, Talaud dan Sitaro (Tahuna)	34.534.720,00	273.094.200,00	199.859.200,00	107.769.720
UPTD Kotamobagu dan Bolsel	-	8.484.000,00	8.484.000,00	-
UPTD Minsel	-	28.489.000,00	23.905.000,00	4.584.000
UPTD Tomohon	9.000.000,00	63.666.000,00	63.666.000,00	9.000.000
UPTD Minut	65.302.000,00	117.563.900,00	103.492.900,00	79.373.000
UPTD Mitra	-	16.144.000,00	16.144.000,00	-
UPTD Bolmong, Bolmut dan Boltim	608.277.750,00	884.769.840,00	645.196.422,00	847.851.168
Total	940.335.470,00	7.076.607.540,00	6.686.979.322,00	1.329.963.688,00

Piutang PAP pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp389.628.218,00 dari total piutang tahun 2023 sebesar Rp940.335.470,00 yang terdiri dari penambahan nilai piutang pada tahun 2024 sebesar Rp7.076.607.540,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp6.686.979.322,00.

5) Piutang Pajak Rokok

Tidak ada saldo piutang pajak rokok.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
h.	**Piutang Retribusi Daerah**	**24.436.805.911,00**	**18.003.147.454,00**

Piutang Retribusi Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp24.436.805.911,00 atau naik sebesar Rp6.433.658.457,00 dari saldo tahun 2023 yang sebesar Rp18.003.147.454,00. Perubahan (mutasi) saldo Piutang Retribusi Daerah terjadi karena adanya penambahan piutang sebesar

Rp20.965.204.157,00 dan pengurangan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp14.531.545.700,00. Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.9 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang Retribusi

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Piutang Retribusi Daerah					
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.748.988.696,00	20.965.204.157,00	14.524.420.700,00	22.189.770.153,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.087.600,00	-	7.125.000,00	42.962.600,00
4	Piutang Retribusi Penjualan	2.202.073.158,00	-	-	2.202.073.158,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah		18.003.147.454,00	20.965.204.157,00	14.531.545.700,00	24.436.805.911,00

Adapun penjelasan dari Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut :

1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jumlah kewajiban pembayaran retribusi yang belum dibayarkan oleh wajib retribusi kepada pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan yang diberikan. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp22.189.770.153,00, seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.10 Tabel Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per SKPD

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	RS Mata	2.561.926.200,00	5.865.135.600,00	2.561.926.200,00	5.865.135.600,00
2	RS Noongan	4.179.381.100,00	-	3.819.157.100,00	360.224.000,00
3	RSJ Ratumbuysang	1.302.055.720,00	1.876.224.832,00	977.714.100,00	2.200.566.452,00
4	RS Manembo-Nembo Bitung	4.790.906.089,00	3.639.106.500,00	4.502.021.500,00	3.928.051.089,00
5	RS Tipe B	2.873.100.587,00	9.555.157.225,00	2.643.071.800,00	9.785.186.012,00
6	Laboratorium Kesehatan	41.557.000,00	29.590.000,00	20.530.000,00	50.607.000,00
Total		16.748.986.696,00	20.965.204.157,00	14.524.420.700,00	22.189.770.153,00

Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada Lampiran II.3 laporan keuangan ini.

Pada RS Mata memiliki Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp5.865.135.600,00, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.11 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang Retribusi RS Mata

Uraian	Jenis			Total
	BPJS	Telkom	In-Health	
Saldo Awal	2.494.067.800,00	51.370.400,00	16.488.000,00	2.561.926.200,00
Penambahan	5.841.395.000,00	12.295.600,00	11.445.000,00	5.865.135.600,00
Desember Reguler 2024	2.460.615.600,00	-	-	2.460.615.600,00
Pending Agustus 2024	219.184.400,00	-	-	219.184.400,00
Pending September 2024	397.436.700,00	-	-	397.436.700,00
Pending Oktober2024	1.926.607.000,00	-	-	1.926.607.000,00
Pending Nevember 2024	447.960.600,00	-	-	447.960.600,00
BPJS *Pending* Oktober 2024 Klinik Mata	44.373.900,00	-	-	44.373.900,00
BPJS Regulsr November Klinik Mata	208.547.500,00	-	-	208.547.500,00
BPJS *Pending* November 2024 Klinik Mata	33.408.900,00	-	-	33.408.900,00
BPJS Reguler Desember Klinik Mata	88.556.200,00	-	-	88.556.200,00
BPJS *Pending* Desember 2024 Klinik Utama Mata	13.704.200,00	-	-	13.704.200,00
Yakes Telkom Desember 2024	-	12.295.600,00	-	12.295.600,00
Mandiri Inhealth Nov 2024	-	-	1.487.400,00	1.487.400,00
Mandiri Inhealth Des 2024	-	-	9.957.600,00	9.957.600,00
Pengurangan	2.494.067.800,00	51.370.400,00	16.488.000,00	2.561.926.200,00
Desember 2023	2.314.947.000,00	-	-	2.314.947.000,00
Pending Oktober 2023	12.147.100,00	-	-	12.147.100,00
Pending Novomber 2023	33.733.000,00	-	-	33.733.000,00
Pending Desember 2023	40.211.900,00	-	-	40.211.900,00
Desember 2023 Klinik Mata	93.028.800,00	-	-	93.028.800,00
Desember 2022	-	-	1.512.000,00	1.512.000,00
Desember susulan	-	-	13.464.000,00	13.464.000,00
Desember	-	-	1.512.000,00	1.512.000,00

Uraian	Jenis			Total
	BPJS	Telkom	In-Health	
Oktober 2023	-	51.370.400,00	-	51.370.400,00
Saldo Akhir	5.841.386.000,00	12.295.600,00	11.445.000,00	6.365.136.600,00

Pada RSUD Noongan memiliki Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp360.224.000,00, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.12 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang Retribusi RS Noongan

Uraian	Jenis		Total
	JKN	Covid	
Saldo Awal	3.819.157.100,00	360.224.000,00	4.179.381.100,00
Penambahan	-	-	-
Pengurangan	3.819.157.100,00	-	3.819.157.100,00
Klaim November 2023	2.050.047.300,00	-	2.050.047.300,00
Klaim Desember 2023	1.769.109.800,00	-	1.769.109.800,00
Saldo Akhir	-	360.224.000,00	360.224.000,00

Pada RSJ Ratumbuysang memiliki Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.200.566.452,00, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.13 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang Retribusi RS Ratumbuysang

Uraian	Jenis			Total
	BPJS	JAMKESTA/UC	Obat	
Saldo Awal	977.719.900,00	4.186.700,00	320.150.120,00	1.302.056.720,00
Penambahan	1.742.157.500,00	-	134.067.332,00	1.876.224.832,00
BPJS 2024	1.742.157.500,00	-	-	1.742.157.500,00
Obat 2024	-	-	134.067.332,00	134.067.332,00
Pengurangan	977.714.100,00	-	-	977.714.100,00
BPJS dan Obat 2018	977.714.100,00	-	-	977.714.100,00
Saldo Akhir	1.742.163.300,00	4.186.700,00	454.217.452,00	2.200.566.452,00

Pada RS Manembo-Nembo Bitung memiliki Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp3.928.051.089,00, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.14 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang Retribusi RS Manembo-Nembo Bitung

Uraian	Jenis			Total
	BPJS		Pasien Umum	
	Pending	Reguler		
Saldo Awal	30.000,00	4.502.021.500,00	288.914.589,00	4.790.966.089,00
Penambahan	383.812.200,00	3.255.294.300,00	-	3.639.106.500,00
BPJS Reguler Nov 2024	-	3.255.294.300,00	-	3.255.294.300,00
BPJS Pending Juli 2024	383.812.200,00	-	-	383.812.200,00
Pengurangan	-	4.502.021.500,00	-	4.502.021.500,00
November 2023	-	4.502.021.500,00	-	4.502.021.500,00
Saldo Akhir	383.842.200,00	3.255.294.300,00	288.914.589,00	3.928.051.089,00

Pada RS Tipe B memiliki Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp9.785.186.012,00, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.15 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang Retribusi Rs.Tipe B

Uraian	Jenis		Total
	BPJS	PT Wenang Wahana	
Saldo Awal	2.643.071.800,00	230.028.787,00	2.873.100.587,00
Penambahan	9.555.157.225,00	-	9.555.157.225,00
BPJS Pending Juli 2024	242.356.900,00	-	242.356.900,00
BPJS Reguler Desember 2024	3.777.211.000,00	-	3.777.211.000,00
BPJS Pending Agustus 2024	352.830.700,00	-	352.830.700,00
BPJS Pending September 2024	1.380.272.100,00	-	1.380.272.100,00
BPJS Pending Oktober 2024	1.577.750.625,00	-	1.577.750.625,00
BPJS Pending November 2024	1.303.260.100,00	-	1.303.260.100,00
BPJS Pending Desember 2024	941.475.800,00	-	941.475.800,00
Pengurangan	2.643.071.800,00	-	2.643.071.800,00
BPJS Pending November 2023	83.806.400,00	-	83.806.400,00
BPJS Desember 2023	2.297.192.900,00	-	2.297.192.900,00
BPJS Pending Desember 2023	262.072.500,00	-	262.072.500,00
Saldo Akhir	9.555.157.225,00	230.028.787,00	9.785.186.012,00

Pada Laboratorium Kesehatan memiliki Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp50.607.000,00, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.16 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang Retribusi Laboratorium Kesehatan

Uraian	Jenis		Total
	Pasien Umum	Air	
Saldo Awal	29.487.000,00	12.070.000,00	41.557.000,00
Penambahan	29.580.000,00	-	29.580.000,00
RS Mata	29.580.000,00	-	29.580.000,00
Pengurangan	8.460.000,00	12.070.000,00	20.530.000,00
RS Mata	3.860.000,00	-	3.860.000,00
RS ODSK Okt-Des	4.600.000,00	-	4.600.000,00
RS ODSK Des	-	1.020.000,00	
RSUD Tobelo Nov	-	11.050.000,00	
Saldo Akhir	50.607.000,00	-	50.607.000,00

2) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas jasa atau fasilitas yang diberikan atau digunakan atas kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp2.000.000,00 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang sudah ada sejak tahun 2015 dan tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan nilai selama tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.17 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dinas ESDM	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Total		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00

3) Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Daerah adalah hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas jasa fasilitas rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh pemerintah daerah. Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp42.962.600,00 pada Dinas Pariwisata. Perubahan (mutasi) Saldo Piutang Retribusi terjadi karena adanya pengurangan Piutang Retribusi sebesar Rp7.125.000,00, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.18 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Uraian	Saldo Awal Piutang	Penambahan 2024	Pengurangan 2024		Sisa
			Nilai Setoran	Tanggal	
DPTNB, Juli, Agustus, dan Desember 2014	42.035.000,00	-	-	-	42.035.000,00
Taman Nasional Bunaken Desember 2014	927.600,00	-	-	-	927.600,00
Retribusi Sumaruendo Desember 2023	2.530.000,00	-	2.530.000,00	3 Januari 2024	-
Retribusi Bukit Kasih-Kanonang Desember 2023	4.595.000,00	-	4.595.000,00	3 Januari 2024	-
Total	50.087.600,00	-	7.125.000,00		42.962.600,00

4) Piutang Retribusi Penjualan

Piutang Retribusi Penjualan sebesar Rp2.202.073.158,00 pada UPTD Air Minum tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan. Piutang retribusi penjualan tersebut

berasal dari penjualan atau penyediaaan layanan terkait air bersih atau air minum kepada masyarakat pada tahun 2015.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
i.	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	**0,00**	**0,00**

Saldo per 31 Desember 2024 atas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebesar Rp0,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
j.	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**10.937.632.160,33**	**10.856.864.670,33**

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp10.937.632.160,33 atau naik sebesar Rp80.767.490,00 dari saldo tahun 2023 yang sebesar Rp10.856.864.670,33. Perubahan (mutasi) saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah terjadi karena adanya penambahan piutang sebesar Rp9.731.836.830,00 dan pengurangan Piutang sebesar Rp9.651.069.340,00. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.19 Piutang Lain – lain PAD yang Sah

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah					
1	Piutang Denda Pajak PKB	9.756.250.650,00	7.806.049.900,00	7.805.303.480,00	9.755.997.070,00
2	Piutang Denda Pajak BBNKB	-	1.831.745.300,00	1.831.745.300,00	-
3	Piutang Denda Pajak PAP	-	14.020.560,00	14.020.560,00	-
4	Piutang dari Pengembalian	700.614.020,33	-	-	700.614.020,33
5	Piutang Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	400.000.000,00	78.380.000,00	-	478.380.000,00
6	Piutang Pendapatan Jasa Giro	-	2.641.070,00	-	2.641.070,00
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		10.856.864.670,33	9.731.836.830,00	9.651.069.340,00	10.937.632.160,33

Adapun penjelasan dari Piutang Lain – lain PAD yang Sah sebagai berikut :

1) Piutang Denda PKB

Piutang Denda PKB adalah utang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas denda keterlambatan pembayaran pajak daerah. Piutang Denda PKB sebesar Rp9.755.997.070,00, seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.20 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang Denda PKB

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	UPTD Manado	2.907.849.070,00	3.147.717.060,00	3.147.896.580,00	2.907.679.190,00
2	UPTD Minahasa	505.907.233,00	789.710.900,00	789.710.900,00	505.907.233,00
3	UPTD Bitung	2.345.628.400,00	848.246.000,00	848.247.100,00	2.345.627.300,00
4	UPTD Sangihe, Talaud dan Sitaro (Tahuna)	177.804.800,00	199.228.800,00	199.228.800,00	177.804.800,00
5	UPTD Kotamobagu dan Bolsel	413.184.850,00	470.826.500,00	470.826.500,00	413.184.850,00
6	UPTD Minsel	680.598.900,00	370.244.200,00	370.244.200,00	680.598.900,00
7	UPTD Tomohon	243.235.102,00	391.503.140,00	391.506.800,00	243.231.442,00
8	UPTD Minut	1.371.813.349,00	848.118.000,00	848.129.500,00	1.371.801.849,00
9	UPTD Mitra	135.349.800,00	209.178.700,00	209.240.600,00	135.287.700,00

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
10	UPTD Bolmong, Bolmut dan Boltim	975.079.146,00	660.276.600,00	660.281.900,00	975.073.846,00
Total		9.756.250.650,00	7.805.049.900,00	7.805.303.480,00	9.755.997.070,00

Piutang Denda PKB pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp253.580,00 dari total piutang tahun 2023 sebesar Rp9.756.250.650,00 yang terdiri dari penambahan nilai piutang pada tahun 2024 sebesar Rp7.805.049.900,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp7.805.303.480,00. Rincian terkait Piutang Denda PKB terdapat di Lampiran II.4 laporan keuangan ini.

2) Piutang Denda Pajak BBNKB

Piutang Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah sanksi berupa denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar BBNKB. Piutang denda pajak BBNKB mengalami penambahan sebesar Rp1.831.745.300,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp1.831.745.300,00 sehingga tidak ada saldo Piutang Denda Pajak BBNKB.

3) Piutang Denda PAP

Piutang Denda PAP adalah jumlah tagihan atau kewajiban pembayaran denda yang belum dibayar oleh wajib pajak atas keterlambatan atau pelanggaran pembayaran pajak atas pemanfaatan air permukaan. Piutang denda pajak air permukaan mengalami penambahan sebesar Rp14.020.560,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp14.020.560,00 sehingga tidak ada saldo Piutang Denda PAP.

4) Piutang dari Pengembalian

Piutang dari Pengembalian adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak lain kepada pemerintah daerah sebagai akibat dari temuan tuntutan ganti rugi. Piutang dari Pengembalian sebesar Rp700.614.020,33, terdapat pada beberapa perangkat daerah, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.21 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang dari Pengembalian

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	168.948.000,00	-	-	168.948.000,00
2	Dinas Pariwisata	501.568.520,33	-	-	501.568.520,33
3	Dinas ESDM	30.097.500,00	-	-	30.097.500,00
Total		700.614.020,33	-	-	700.614.020,33

Pada Dinas Pendidikan memiliki Piutang dari Pengembalian sebesar Rp168.948.000,00 dan tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2024. Pada Dinas Pariwisata memiliki Piutang dari Pengembalian sebesar Rp501.568.520,33 dan terdapat mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2024. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki Piutang dari Pengembalian sebesar Rp30.097.500,00 tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan dan terdapat mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2024.

5) Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah adalah hak pemerintah daerah atas pembayaran yang timbul akibat pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp478.380.000,00, seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.22 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	Badan Pengambangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	78.380.000,00	-	78.380.000,00
Total		400.000.000,00	78.380.000,00	-	478.380.000,00

Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp400.000.000,00 berasal dari Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan PT Aerowisata sesuai no. 030/386/Sekr-Ro.Ekonomi dan 2080/DIR-HTL/PERJ/III/2010 tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Kantor Penghubung Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta selama 30 tahun dan tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan.

Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah pada Badan Pengmbangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar Rp78.380.000,00 adalah kontribusi kegiatan PKN Tingkat II dari Pemerintah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Tenggara, seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.23 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BPSDM

Uraian	Jumlah
Saldo Awal	-
Penambahan	**78.380.000,00**
Diklat PKN Tingkat II Angkatan VII 2024 Mitra	9.545.000,00
Diklat PKN Tingkat II Angkatan VII 2024 Bitung	68.835.000,00
Pengurangan	-
Saldo Akhir	**78.380.000,00**

Rincian terkait Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah terdapat di Lampiran II.5 laporan keuangan ini.

6) Piutang Pendapatan Jasa Giro

Piutang Pendapatan Jasa Giro adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas jasa giro yang telah diberikan. Jasa giro ini biasanya berupa imbalan yang dibayarkan oleh bank kepada pemerintah daerah atas simpanan giro yang dimiliki. Piutang atas jasa giro sebesar Rp2.641.070,00 merupakan Pajak Giro yang dipotong pihak bank yang seharusnya tidak dipotong di beberapa sekolah pada Dinas Pendidikan, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.24 Rincian Mutasi Tambah Kurang Piutang Pendapatan Jasa Giro

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	-	2.641.070,00	-	2.641.070,00
	Total	-	2.641.070,00	-	2.641.070,00

Atas piutang tersebut telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 5 s.d. 10 Maret 2025. Rincian terkait Piutang Pendapatan Jasa Giro dapat dilihat pada Lampiran II.6 laporan keuangan ini.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
k. Piutang Lainnya	**196.502.149,00**	**196.502.149,00**

Piutang Lainnya merupakan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2024, yaitu senilai Rp196.502.149,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan Piutang Lainnya selama tahun 2024. Bagian lancar tuntutan ganti rugi ini

merupakan kelebihan belanja untuk pembayaran ganda atas pekerjaan jembatan sulu ruas Tanawangko-Kumu-Popontolen dengan pelaksana pekerjaannya dari CV Prima Sakti pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Temuan ini merupakan hasil reviu Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2014.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
I.	**Penyisihan Piutang**	**(79.986.304.567,33)**	**(56.531.175.834,33)**

Sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berbasis Akrual, dilakukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.

Saldo per 31 Desember 2024 atas Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp(79.986.304.567,33) Perubahan (mutasi) saldo Penyisihan Piutang terjadi karena adanya penambahan sebesar Rp24.628.041.677,50 dan pengurangan penyisihan Piutang sebesar Rp1.172.912.944,50 yaitu:

Adapun jenis-jenis penyisihan piutang sebesar Rp(79.986.304.567,33) dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.25 Rincian Mutasi Tambah Kurang Penyisihan Piutang

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
I. PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN					
A. PENYISIHAN PIUTANG PAJAK					
1	Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	(41.216.474.831,00)	22.115.904.006,00	-	(63.332.378.837,00)
2	penyisihan Piutang BBNKB	-	-	-	-
3	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
4	penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)	(913.910.470,00)	2.823.100,00	-	(916.733.570,00)
5	Penyisihan Piutang Pajak Rokok	-	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		(42.130.385.301,00)	22.118.727.106,00	-	(64.249.112.407,00)
B. PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI					
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(1.172.877.319,50)	2.397.589.056,00	1.172.877.319,50	(2.397.589.056,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(2.000.000,00)	-	-	(2.000.000,00)
3	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	(42.998.225,00)	-	35.625,00	(42.962.600,00)
4	Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan	(2.202.073.158,00)	-	-	(2.202.073.158,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi		(3.419.948.702,50)	2.397.589.056,00	1.172.912.944,50	(4.644.624.814,00)
C. PENYISIHAN PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN					
1	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	-	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		-	-	-	-
D. PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH					
1	Penyisihan Piutang Denda Pajak	(9.683.725.661,50)	72.271.408,50	-	(9.756.997.070,00)
2	Penyisihan Piutang dari Pengembalian	(700.614.020,33)	-	-	(700.614.020,33)
3	Penyisihan Piutang Jasa Giro	-	264.107,00	-	(264.107,00)
4	Penyisihan Piutang Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(400.000.000,00)	39.190.000,00	-	(439.190.000,00)
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah		(10.784.339.681,83)	111.725.515,50	-	(10.896.065.197,33)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Total Penyisihan Piutang Pendapatan		(58.334.673.695,33)	24.628.041.677,50	1.172.912.944,50	(79.789.802.418,33)
II. PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA					
A. PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA					
1	Penyisihan Piutang Lainnya	(196.502.149,00)	-	-	(196.502.149,00)
Total Penyisihan Piutang Lainnya		(196.502.149,00)	-	-	(196.502.149,00)
TOTAL PENYISIHAN PIUTANG		(58.531.175.834,33)	24.628.041.677,50	1.172.912.944,50	(79.986.304.567,33)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.1. Penyisihan Piutang Pajak	**(64.249.112.407,00)**	**(42.130.385.301,00)**

Saldo per 31 Desember 2024 atas Penyisihan Piutang Pajak adalah sebesar Rp(64.249.112.407,00). Perubahan (mutasi) saldo Penyisihan Piutang Pajak terjadi karena adanya penambahan Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp22.118.727.106,00 dan tidak ada pengurangan penyisihan Piutang Pajak, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.26 Rincian Mutasi Tambah Kurang Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Penyisihan Piutang Pajak					
1	Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	(41.216.474.831,00)	22.115.904.006,00	-	(63.332.378.837,00)
2	Penyisihan Piutang BBNKB	-	-	-	-
3	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
4	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)	(913.610.470,00)	2.823.100,00	-	(916.733.570,00)
5	Penyisihan Piutang Pajak Rokok	-	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		(42.130.385.301,00)	22.118.727.106,00	-	(64.249.112.407,00)

1) Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp(63.332.378.837,00) terdapat pada beberapa perangkat daerah, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.27 Rincian Mutasi Tambah Kurang Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	UPTD Manado	(9.698.054.657,50)	6.676.220.619,50	-	(16.374.275.277,00)
2	UPTD Minahasa	(4.250.202.436,00)	2.107.001.795,00	-	(6.357.204.231,00)
3	UPTD Bitung	(5.091.027.630,00)	3.478.639.515,00	-	(8.569.667.145,00)
4	UPTD Sangihe, Talaud dan Sitaro (Tahuna)	(1.876.707.270,00)	985.068.505,00	-	(2.861.775.775,00)
5	UPTD Kotamobagu dan Bolsel	(4.398.951.207,00)	27.769.860,00	-	(4.426.721.057,00)
6	UPTD Minsel	(2.497.505.981,00)	1.332.761.431,00	-	(3.830.267.412,00)
7	UPTD Tomohon	(2.091.103.038,50)	1.116.448.238,50	-	(3.207.551.277,00)
8	UPTD Minut	(5.916.943.242,00)	3.369.640.862,00	-	(9.286.584.104,00)
9	UPTD Mitra	(1.348.449.841,00)	848.265.626,00	-	(2.196.715.467,00)
10	UPTD Bolmong, Bolmut dan Boltim	(4.047.529.528,00)	2.174.087.664,00	-	(6.221.617.092,00)
TOTAL		(41.216.474.831,00)	22.115.904.006,00	-	(63.332.378.837,00)

Rincian terkait penyisihan piutang PKB dapat dilihat pada Lampiran II.7 laporan keuangan ini.

2) Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp(916.733.570), terdapat pada beberapa perangkat daerah, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.28 Rincian Mutasi Tambah Kurang Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	UPTD Manado	-	-	-	-
2	UPTD Minahasa	(198.590.000,00)	1.029.100,00	-	(199.619.100,00)
3	UPTD Bitung	-	-	-	-
4	UPTD Sangihe, Talaud dan Sitaro (Tahuna)	(34.534.720,00)	-	-	(34.534.720,00)

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
5	UPTD Kotamobagu dan Bolsel	-	-	-	-
6	UPTD Minsel	-	-	-	-
7	UPTD Tomohon	(7.206.000,00)	1.794.000,00	-	(9.000.000,00)
8	UPTD Minut	(65.302.000,00)	-	-	(65.302.000,00)
9	UPTD Mitra	-	-	-	-
10	UPTD Bolmong, Bolmut dan Boltim	(808.277.750,00)	-	-	(808.277.750,00)
Total		(913.910.470,00)	2.823.100,00	-	(916.733.570,00)

Rincian terkait penyisihan piutang PAP dapat dilihat pada Lampiran II.8 laporan keuangan ini.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
I.2.	**Penyisihan Piutang Retribusi**	**(4.644.624.814,00)**	**(3.419.948.702,50)**

Saldo per 31 Desember 2024 atas Penyisihan Piutang Retribusi adalah sebesar Rp(4.644.624.814,00). Perubahan (mutasi) saldo Penyisihan Piutang Retribusi terjadi karena adanya penambahan Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp2.397.589.056,00 dan pengurangan penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp1.172.912.944,50, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.29 Rincian Mutasi Tambah Kurang Penyisihan Piutang Retribusi

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Penyisihan Piutang Retribusi					
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(1.172.877.319,50)	2.397.589.056,00	1.172.877.319,50	(2.397.589.056,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(2.000.000,00)	-	-	(2.000.000,00)
3	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	(42.998.225,00)	-	35.825,00	(42.962.600,00)
4	Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan	(2.202.073.158,00)	-	-	(2.202.073.158,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi		(3.419.948.702,50)	2.397.589.056,00	1.172.912.944,50	(4.644.624.814,00)

1) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp(2.397.589.056,00), terdapat pada beberapa perangkat daerah, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.30 Rincian Mutasi Tambah Kurang Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	RS Mata	(12.809.831,00)	1.173.027.120,00	12.809.831,00	(1.173.027.120,00)
2	RS Noongan	(20.896.905,50)	360.224.000,00	20.896.905,50	(360.224.000,00)
3	RSJ Ratumbuysang	(329.224.419,50)	324.337.560,00	329.224.419,50	(324.337.560,00)
4	RS Manembo-Nembo Bitung	(311.454.696,50)	288.944.589,00	311.454.696,50	(288.944.589,00)
5	RS Tipe B	(494.336.967,00)	230.026.787,00	494.336.967,00	(230.026.787,00)
6	Laboratorium Kesehatan Daerah	(4.155.700,00)	21.027.000,00	4.155.700,00	(21.027.000,00)
Total		(1.172.877.319,50)	2.397.589.056,00	1.172.877.319,50	(2.397.589.056,00)

Rincian terkait penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada Lampiran II.9 laporan keuangan ini.

2) Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan yang Dipisahkan sebesar Rp(2.000.000,00) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan. Rincian terkait Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan yang Dipisahkan dapat dilihat pada Lampiran II.10 laporan keuangan ini; dan

3) Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata sebesar Rp(42.962.600,00), yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.31 Rincian Mutasi Tambah Kurang Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Uraian	Total
Saldo Awal	(42.998.225,00)
Penambahan	-
Pengurangan	35.625,00
Dinas Pariwisata	35.625,00
Saldo Akhir	(42.962.600,00)

Rincian terkait penyisihan piutang Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat dilihat pada Lampiran II.11 laporan keuangan ini.

4) Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan sebesar Rp(2.202.073.158,00) pada UPTD Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan. Rincian terkait penyisihan piutang Retribusi Penjualan dapat dilihat pada Lampiran II.12 laporan keuangan ini.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
I.3.	**Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan**	**(0,00)**	**(0,00)**

Saldo per 31 Desember 2024 atas Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan adalah sebesar Rp0,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
I.4.	**Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**(10.896.065.197,33)**	**(10.784.339.681,83)**

Saldo per 31 Desember 2024 atas Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah adalah sebesar Rp(10.896.065.197,33). Perubahan (mutasi) saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah terjadi karena adanya penambahan sebesar Rp111.725.515,50 dan tidak ada pengurangan penyisihan piutang, seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.32 Rincian Mutasi Tambah Kurang Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah					
1	Penyisihan Piutang Denda Pajak	(9.683.725.661,50)	72.271.408,50	-	(9.755.997.070,00)
2	Penyisihan Piutang dari Pengembalian	(700.614.020,33)	-	-	(700.614.020,33)
3	Penyisihan Piutang Pendapatan Jasa Giro	-	264.107,00	-	(264.107,00)
4	Penyisihan Piutang Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(400.000.000,00)	39.190.000,00	-	(439.190.000,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah		(10.784.339.681,83)	111.725.515,50	-	(10.896.065.197,33)

1) Penyisihan Piutang Denda PKB sebesar Rp(9.755.997.070,00), terdapat pada beberapa perangkat daerah, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.33 Rincian Mutasi Tambah Kurang Penyisihan Denda PKB

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	UPTD Manado	(2.874.757.835,00)	32.921.315,00	-	(2.907.679.150,00)
2	UPTD Minahasa	(497.371.216,50)	8.539.016,50	-	(505.907.233,00)
3	UPTD Bitung	(2.330.870.660,00)	14.756.660,00	-	(2.345.627.300,00)
4	UPTD Sangihe, Talaud dan Sitaro (Tahuna)	(176.391.100,00)	1.413.700,00	-	(177.804.800,00)
5	UPTD Kotamobagu dan Bolsel	(411.657.350,00)	1.527.500,00	-	(413.184.850,00)
6	UPTD Minsel	(578.539.850,00)	2.059.050,00	-	(580.598.900,00)
7	UPTD Tomohon	(242.808.115,00)	423.327,00	-	(243.231.442,00)
8	UPTD Minut	(1.368.496.199,00)	3.105.650,00	-	(1.371.601.849,00)
9	UPTD Mitra	(132.275.100,00)	3.012.600,00	-	(135.287.700,00)
10	UPTD Bolmong, Bolmut dan Boltim	(970.568.246,00)	4.615.600,00	-	(975.073.846,00)
Total		(9.663.725.661,50)	72.271.408,50	-	(9.755.997.070,00)

Rincian terkait Penyisihan Piutang Denda PKB dapat dilihat pada Lampiran II.13 laporan keuangan ini.

2) Penyisihan Piutang dari Pengembalian sebesar Rp(700.614.020,33), terdapat pada beberapa perangkat daerah, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.34 Rincian Mutasi Tambah Kurang Penyisihan Piutang dari pengembalian

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	(168.948.000,00)	-	-	(168.948.000,00)
2	Dinas Pariwisata	(501.668.520,33)	-	-	(501.668.520,33)
3	Dinas ESDM	(30.097.500,00)	-	-	(30.097.500,00)
Total		(700.614.020,33)	-	-	(700.614.020,33)

Rincian terkait Penyisihan Piutang dari Pengembalian dapat dilihat pada Lampiran II.14 laporan keuangan ini.

3) Penyisihan Piutang Jasa Giro sebesar Rp(264.107,00), yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.35 Rincian Mutasi Tambah Kurang Penyisihan Piutang dari Jasa Giro

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	-	264.107,00	-	(264.107,00)
Total		-	264.107,00	-	(264.107,00)

Rincian terkait Penyisihan Piutang Pendapatan Jasa Giro dapat dilihat pada Lampiran II.15 laporan keuangan ini.

4) Penyisihan Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp(439.190.000,00), yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.36 Rincian Mutasi Tambah Kurang Penyisihan Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(400.000.000,00)	-	-	(400.000.000,00)
2	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	-	39.190.000,00	-	(39.190.000,00)
Total		(400.000.000,00)	39.190.000,00	-	(439.190.000,00)

Rincian terkait Penyisihan Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dapat dilihat pada Lampiran II.16 laporan keuangan ini

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
I.5.	**Penyisihan Piutang Lainnya**	**(196.502.149,00)**	**(196.502.149,00)**

Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp(196.502.149,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan kelebihan belanja untuk pembayaran ganda atas pekerjaan jembatan sulu ruas Tanawangko-Kumu-Popontolen dengan pelaksana pekerjanya dari dari CV Prima Sakti tahun anggaran 2014. Rincian dari Penyisihan Piutang Lainnya dapat dilihat di Lampiran II.17 laporan keuangan ini.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
m.	**Beban Dibayar Dimuka**	**0,00**	**0,00**

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi pemanfaatannya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Saldo per 31 Desember 2024 atas Beban Dibayar Dimuka adalah sebesar Rp0,00.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
n.	**Persediaan**	**202.283.970.552,93**	**139.213.812.673,58**

Posisi persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp202.283.970.552,93, yang terklasifikasi pada tabel berikut.

Tabel 5.3.37 Klasifikasi Persediaan

No	Uraian	Jumlah
1	Bahan	1.254.518.892,00
2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.107.964.529,00
3	Obat-obatan	28.521.650.584,41
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	170.301.501.897,52
5	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	31.864.770,00
6	Natura dan Pakan	66.469.880,00
	Jumlah	202.283.970.552,93

Rincian Persediaan dapat dilihat pada Lampiran II.18 laporan keuangan ini.

Sehubungan dengan Persediaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, perlu diungkapkan hal-hal berikut.

1) Terdapat Persediaan rusak atau kadaluarsa di beberapa perangkat daerah, antara lain:
   a. Pada UPTD RSJ Ratumbuysang memiliki persediaan berupa obat-obatan kadaluarsa yang belum dimusnahkan per 31 Desember 2024 senilai Rp172.543.075,66;
   b. Pada UPTD RS Noongan memiliki persediaan berupa obat-obatan kadaluarsa yang belum dimusnahkan per 31 Desember 2024 senilai Rp103.009.208,00;
2) Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat namun belum diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp73.790.816.111,00, seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.38 Persediaan yang Belum Diserahkan pada Dinas PUPR

No	Nama Barang	Saldo Stock Opname per 31 Desember 2024
1	Pekerjaan Arsitektur Christian Center (HIBAH)	38.529.949.091,00

No	Nama Barang	Saldo Stock Opname per 31 Desember 2024
2	Pekerjaan LED Videotron Indoor 4x8 m Christian Center (HIBAH)	1.890.500.000,00
3	Pekerjaan Mekanikan Elektrikal dan Plumbing (MEP) Christian Center (HIBAH)	23.278.185.771,00
4	Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Gedung Christian Center (HIBAH)	709.423.200,00
5	Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Desa Motoling (HIBAH)	389.199.842,00
6	Pek. Pembangunan Christian Center Tahap II (HIBAH) (KEWAJIBAN)	2.295.728.751,00
7	Pek. Pembangunan Drainase Desa Lowian (HIBAH)	199.586.581,00
8	Pek. Rehabilitasi Bendung Lindangan (HIBAH)	389.236.200,00
9	Pek. Pembangunan SPAM Desa Ranotongkor Timur Tahap II (HIBAH)	244.500.008,00
10	Pekerjaan Fasilitasi Penunjang Pariwisata Rurukan Tomohon (HIBAH)	1.228.689.000,00
11	Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Bulawan II (HIBAH)	99.881.434,00
12	Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Iyok (HIBAH)	99.923.005,00
13	Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Tombolikat Selatan (HIBAH)	99.692.063,00
14	Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individual Molobog Barat (HIBAH)	124.866.564,00
15	Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Linawa (HIBAH)	124.805.409,00
16	Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Kolongan (HIBAH) APBD-P	1.998.052.160,00
17	Pekerjaan Peningkatan SPAM Desa Wanga Kabupaten Minahasa Selatan (HIBAH) (KEWAJIBAN)	1.096.360.602,00
18	Pekerjaan Pembangunan Jalan Soekarno-Matungkas (HIBAH)	992.226.430,00
Total		73.790.816.111,00

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp874.247.120.484,75 terdiri dari:

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a.	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	**0,00**	**0,00**

Tidak ada saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen selama Tahun Anggaran 2024.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b.	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**874.247.120.484,75**	**784.647.998.183,16**

Saldo per 31 Desember 2024 atas Investasi Permanen adalah sebesar Rp874.247.120.484,75 Perubahan (mutasi) saldo Investasi Permanen terjadi karena adanya penambahan sebesar Rp89.599.122.301,59 dan tidak ada pengurangan.

Adapun jenis-jenis Investasi Permanen sebesar Rp874.247.120.484,75 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.39 Rincian Mutasi Tambah Kurang Investasi Jangka Panjang Permanen

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	709.631.518.458,49	32.683.719.386,26	-	742.315.237.844,75
2	Properti Investasi	78.833.527.000,00	87.095.553.000,00	-	163.929.080.000,00
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.817.047.275,33)	(30.180.150.084,67)	-	(31.997.197.360,00)
	Jumlah	**784.647.998.183,16**	**89.599.122.301,59**	**-**	**874.247.120.484,75**

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b.1.	**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**	**742.315.237.844,75**	**709.631.518.458,49**

Posisi Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.40 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Penyertaan Modal pada BUMD					
1	PT Bank SulutGO	709.061.518.458,49	32.683.719.386,26	-	741.745.237.844,75
2	PT Membangun Sulut Hebat (MSH)	-	-	-	-
3	PD. Pembangunan Sulut	-	-	-	-
	Jumlah	**709.061.518.458,49**	**32.683.719.386,26**	**-**	**741.745.237.844,75**
Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga Non BUMD					
4	PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU)	-	-	-	-
5	PT Asuransi Bangun Askrida	570.000.000,00	-	-	570.000.000,00
	Jumlah	**570.000.000,00**	**-**	**-**	**570.000.000,00**
	Jumlah Keseluruhan	**709.631.518.458,49**	**32.683.719.386,26**	**-**	**742.315.237.844,75**

Sehubungan dengan Penyertaan Modal pemerintah Daerah, perlu diungkapkan hal-hal berikut.

1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penyertaan modal kepada badan usaha berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha;

2) Metode penilaian investasi didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, Bagan Akun Standar serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada perusahaan negara/daerah dinilai sebagai berikut.

a) Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan; dan

b) Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentasi kepemilikan.

Rincian lebih lanjut terkait penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2024, sebagai berikut.

1) PT Bank SulutGo

Investasi Permanen-Penyertaan Modal kepada PT Bank SulutGo, berdasarkan data modal disetor dan persentase kepemilikan modal Provinsi Sulawesi Utara pada PT Bank SulutGo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024, persentase kepemilikan saham Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 bertambah dibandingkan kepemilikan saham tahun 2023 yaitu dari 35,88% menjadi 36,35%. Laporan Keuangan *Audited* PT. Bank SulutGo terlampir dalam laporan ini.

Tabel berikut menggambarkan perkembangan kepemilikan saham PT Bank SulutGo oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebelum dan sesudah masuknya PT Mega Corporate sebagai pemegang saham PT Bank SulutGo.

Tabel 5.3.41 Perkembangan Kepemilikan Saham PT Bank SulutGo oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2024

No.	Tahun	Modal Disetor (Rp)	Lembar Saham	Kepemilikan (%)
A.	Sebelum			
1	Tahun 2010	79.998.500.000,00	799.985	47,94
B.	Sesudah			
1	Tahun 2011	89.574.600.000,00	895.746	33,88
2	Tahun 2012	89.574.600.000,00	895.746	33,88
3	Tahun 2013	137.633.300.000,00	1.376.333	33,73
4	Tahun 2014	203.011.400.000,00	2.030.114	35,52
5	Tahun 2015	233.331.000.000,00	2.333.310	34,88
6	Tahun 2016	272.471.100.000,00	2.724.711	35,33
7	Tahun 2017	297.471.100.000,00	2.974.711	36,46
8	Tahun 2018	297.471.100.000,00	2.974.711	36,46
9	Tahun 2019	352,471,100,000.00	3.524.711	37,27
10	Tahun 2020	372,471,100,000.00	3,724,711	37,48
11	Tahun 2021	372,471,100,000.00	3,724,711	36,36
12	Tahun 2022	402.471.100.000,00	4.024.711	36,67
13	Tahun 2023	452.471.100.000,00	4.524.711	35,88
14	Tahun 2024	482.471.100.000,00	4.824.711	36,35

Saldo penyertaan modal pada PT Bank SulutGo per 31 Desember 2024 yang dicatat berdasarkan persentase kepemilikan dikali ekuitas PT Bank SulutGo pada tanggal 31 Desember 2024 yang dicatat sebesar Rp741.745.237.844,75 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.3.42 Perhitungan Persentase Kepemilikan Dikali Ekuitas PT Bank SulutGo Tahun 2024

No.	Komposisi Ekuitas	Nilai (Rp)	Persentase Kepemilikan Berdasarkan LK Bank SulutGo *Audited*	
			Persentase Kepemilikan	Jumlah Investasi Permanen (Rp)
1	Modal saham ditempatkan	1.327.117.600.000,00	36,35	482.407.247.600,00
2	Tambahan Modal disetor	11.955.836.253,00	36,35	4.346.591.477,97
3	Modal Disetor Lainnya	14.951.321.007,00	36,35	5.434.805.166,04

No.	Komposisi Ekuitas	Nilai (Rp)	Persentase Kepemilikan Berdasarkan LK Bank SulutGo Audited	
			Persentase Kepemilikan	Jumlah Investasi Permanen (Rp)
4	Keuntungan/kerugian aktuarial program manfaat pasti	(111.259.758.582,00)	36,35	(40.442.921.154,06)
5	Keuntungan (kerugian) Revaluasi Aset Tetap	189.192.362.563,00	36,35	68.771.423.791,65
6	Saldo Laba Yang Telah Ditentukan	384.477.161.663,00	36,35	139.757.444.749,46
7	Bagian Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	224.120.099.570,00	36,35	81.467.656.193,70
Jumlah		2.040.564.815.004,00	36,35	741.748.237.844,75

Penurunan persentase kepemilikan (*dilusi*) saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT Bank SulutGo karena adanya penjualan saham baru PT Bank SulutGo kepada PT Mega Corporate pada Tahun 2011. PT Mega Corporate disahkan dan disetujui sebagai pemegang saham baru PT Bank SulutGo melalui RUPS Luar Biasa tanggal 23 November 2011 yang diperkuat dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 138 tanggal 30 November 2011 oleh Notaris M.S.E. Pangemanan, SH. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut, PT Mega Corporate menjadi pemegang saham baru PT Bank SulutGo dengan mengambil 658.328 lembar saham dengan nilai keseluruhan Rp65.832.800.000,00 atau 24,90% dari keseluruhan saham PT Bank SulutGo yang beredar. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 69 tanggal 14 Desember 2011 oleh Notaris M.S.E. Pangemanan, SH, PT Mega Corporate disetujui untuk menyetor *agio* saham atas 658.238 lembar saham yang dihitung Rp59.000,00 per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp38.841.352.000,00. Disamping itu PT Mega Corporate disetujui untuk menyetor dana sebesar 5,10% dari modal disetor sebanyak 192.626 lembar saham termasuk *agio* saham sebesar Rp30.627.534.000,00. Namun karena penyertaan tersebut akan menjadikan PT Mega Corporate menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP), yang berarti berbenturan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia maka uang muka pembelian saham tersebut dimasukkan dalam rekening Titipan Uang Muka Pembelian Saham pada tanggal 21 Desember 2011. Titipan Uang Muka Pembelian Saham tersebut pada tanggal 19 November 2012 dipindahkan sebagai Dana Pihak Ketiga dalam bentuk deposito.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 137 tanggal 24 Juni 2013 oleh Notaris M.S.E. Pangemanan, SH, Rapat Umum Pemegang Saham antara lain menyetujui penambahan modal disetor PT Mega Corporate dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sehingga kepemilikan saham PT Mega Corporate menjadi 30% dan kepemilikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi 35% dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Berdasarkan Akta yang sama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT Bank SulutGo menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan penambahan penyertaan modal pada PT Bank SulutGo sebesar Rp500.000.000.000,00 yang akan dilakukan secara bertahap.

Sebagai tindak lanjut atas Perda tersebut, pada tanggal 24 Desember 2013 dikeluarkan SK Gubernur Nomor 320 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT Bank SulutGo sebesar Rp40.000.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 36549/SP2D/1.20.13.06/2013. Atas penyertaan modal sebesar Rp40.000.000.000,00 tersebut, PT Bank SulutGo mencatat tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp25.157.200.000,00 (251.572 lembar saham), sebesar Rp14.842.748.000,00 dicatat sebagai *agio* saham sedangkan sisanya sebesar Rp52.000,00 dikembalikan ke Kas Daerah pada Nomor Rekening 001.01.11.000001.7. Disamping itu, terdapat penambahan lembar saham sebanyak 229.015 lembar senilai Rp28.649.432.616,00 yang berasal dari:

a) Konversi dana setoran modal dari deviden saham TA 2012 sebesar Rp6.058.429.084,00 atau 38.103 lembar saham;

b) Deviden saham TA 2013 yang dikonversi menjadi setoran modal seJumlah Rp9.431.603.532,00 atau 59.318 lembar saham; dan

c) Saham bonus dari konversi agio saham sebesar Rp13.159.400.000,00 atau 131.594 lembar saham.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal tersebut, persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas saham beredar PT Bank SulutGo per 31 Desember 2013 adalah sebesar 33,73% (1.376.333 lembar saham dari 4.080.710 lembar saham yang beredar).

Sementara itu, pada tanggal 30 Desember 2013 sebagai tindak lanjut dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 137 tanggal 23 Juni 2013, PT Mega Corporate telah melakukan penyetoran sebesar Rp81.601.821.000,00 masing-masing sebesar Rp50.501.957.576,00 melalui RTGS dan sebesar Rp31.099.863.424,00 melalui pemindahbukuan dari rekening yang bersangkutan di Kantor PT Bank SulutGo Cabang Pembantu Mangga Dua. Dengan adanya penyetoran tersebut kepemilikan PT Mega Corporate pada PT Bank Sulut mencapai 30% dari keseluruhan saham PT Bank SulutGo yang beredar.

Sehubungan dengan adanya tambahan penyertaan modal PT Mega Corporate tersebut, PT Bank SulutGo telah mengirimkan surat kepada Bank Indonesia dengan Surat Nomor 169/A/DIR/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Tambahan Penyertaan Modal Saham PT MC. Atas surat PT Bank SulutGo tersebut, Bank Indonesia telah memberikan jawaban melalui Surat Nomor 15/23/DPKP/GPKB/Mo tanggal 30 Desember 2013 dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PB/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum serta perubahannya pada PBI 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 menjelaskan bahwa:

a) Penambahan modal disetor oleh PT Mega Corporate akan menyebabkan yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehingga harus dilakukan proses *fit and proper test*;

b) Penambahan Modal Disetor PT Mega Corporate perlu ditegaskan kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mendatang mengingat komposisi kepemilikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai PSP *eksisting* hanya mencapai 31% tidak sesuai dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2013 yaitu sebesar 35%;

c) Meminta Direksi PT Bank SulutGo agar meminta kajian yuridis kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur atau ketentuan terhadap masuknya PSP selain Pemerintah Daerah dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

d) Sebelum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka setoran modal PT Mega Corporate tersebut agar dicatat dalam Pos Dana Setoran Modal.

Berdasarkan Surat BI tersebut pada tanggal 31 Desember 2013, PT Bank SulutGo mengoreksi tambahan setoran modal PT Mega Corporate sebesar Rp81.601.821.000,00 dengan pertambahan kepemilikan saham sebanyak 221.069 lembar saham sebesar Rp22.106.900.000,00 dan *agio* saham sebesar Rp13.043.071.000,00 sedangkan selisihnya sebesar Rp46.451.850.000,00 dicatat sebagai Dana Setoran Modal sambil menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan tambahan modal tersebut, persentase kepemilikan PT Mega Corporate atas keseluruhan sahaam PT Bank SulutGo pada 31 Desember 2013 adalah sebanyak 24,99%.

Terkait dengan proses *fit and proper test*, berdasarkan konfirmasi kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Juni 2016 diperoleh informasi bahwa proses tersebut belum dilaksanakan karena PT Bank SulutGo belum melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 Juni 2016 berkaitan dengan permintaan BI agar PT Bank SulutGo meminta kajian yuridis kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur atau ketentuan terhadap masuknya PSP selain Pemerintah Daerah dalam BUMD diketahui bahwa sampai dengan saat konfirmasi dilakukan, belum ada permintaan dari PT Bank SulutGo kepada Biro Hukum untuk melakukan kajian yuridis tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 pada Pasal 4 huruf a diketahui bahwa dengan perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi PT Bank SulutGo maka masyarakat, swasta dan koperasi dapat menanamkan modalnya pada PT Bank SulutGo. Dengan demikian, PT Mega Corporate dapat menjadi pemegang saham PT Bank SulutGo. Namun demikian, berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 dan Pasal 19 ayat (1), perubahan penyertaan saham pemerintah daerah baik berupa penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dengan persetujuan DPRD. Begitu juga dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT Bank SulutGo ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD. Terjadinya penurunan persentase kepemilikan saham Pemerintah

Provinsi Sulawesi Utara pada PT Bank SulutGo yang semula 47,94% pada Tahun 2010 menjadi 33,73% pada Tahun 2013 merupakan suatu bentuk penurunan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang mengharuskan adanya persetujuan DPRD. Demikian juga pada saat persetujuan perubahan persentase kepemilikan PT Mega Corporate menjadi 30% pada RUPS LB tanggal 19 Juni 2013, pada prinsipnya merupakan suatu bentuk pengambilalihan yang seharusnya mendapat persetujuan DPRD sebelum diputuskan karena dengan kepemilikan 30% tersebut, PT Mega Corporate menjadi salah satu Pemegang Saham Pengendali pada PT Bank SulutGo yang berpotensi mereduksi kewenangan pengendalian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai PSP *eksisting* pada PT Bank SulutGo.

2) PT Membangun Sulut Hebat

Penyertaan Modal kepada PT Membangun Sulut Hebat pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendirian PT Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah tanggal 29 September 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada PT Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah tanggal 25 Mei 2017 serta Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 357 Tahun 2017 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan PT Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah tanggal 18 September 2017.

Terkait dengan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2024, PT MSH sudah menyampaikan Laporan Keuangan *Unaudited* kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Saldo Penyertaan Modal pada PT Membangun Sulut Hebat per 31 Desember 2024 yang dicatat berdasarkan persentase kepemilikan sebesar 83,19% dikali ekuitas PT Membangun Sulut Hebat pada tanggal 31 Desember 2024 yang dicatat sebesar Rp(1.203.416.425,76) dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.3.43 Persentase Kepemilikan pada PT Membangun Sulut Hebat Oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2024

No	Komposisi Ekuitas	Jumlah	Persentase Kepemilikan Berdasarkan LK PT MSH	
			Persentase Kepemilikan	Jumlah Investasi Permanen
1	Modal saham ditempatkan	6.010.000.000,00	83,19	4.999.719.000,00
2	Hibah	10.000.000,00	83,19	8.319.000,00
3	Tambahan Modal Setor	1.000.000.000,00	83,19	831.900.000,00
4	Saldo Laba ditahan	(8.466.587.842,00)	83,19	(7.043.354.425,76)
Jumlah		(1.446.587.842,00)	83,19	(1.203.416.425,76)

3) PD Pembangunan Sulut

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Pm/DPR-Sul/1970 dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1981, antara lain mengatur tentang peleburan empat perusahaan termasuk PD Pelayaran Sulawesi Utara (PELSUTRA) digabung menjadi satu perusahaan dengan nama PD Pembangunan Sulut, sehingga penyertaan modal pada PT Pelsutra sebesar Rp300.000.000,00 masuk ke dalam penyertaan modal pada PD Pembangunan Sulawesi Utara. Jumlah

penyertaan modal pada PD Pembangunan Sulut yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp4.568.042.997,29. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki 100% kepemilikan PD Pembangunan Sulawesi Utara. Namun penilaian berdasarkan metode ekuitas belum dapat dilakukan, karena PD Pembangunan Sulawesi Utara belum menyusun Laporan Keuangan yang mengacu kepada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. PD Pembangunan menghadapi masalah keberlangsungan *(Going Concern)* sebagaimana telah diungkap BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT BUMD Pembangunan Sulawesi Utara Nomor 88/HP/XIX/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang antara lain menyatakan bahwa rasio keuangan perusahaan semakin memburuk selama tiga tahun terakhir (2011-2013) dan selama tahun 2010-2013. PD Pembangunan Sulawesi Utara mengalami kerugian secara terus menerus sehingga tidak dapat memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi kerugian ini seharusnya menyebabkan pengurangan nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PD Pembangunan Sulut jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode ekuitas dalam pencatatan penyertaan modalnya pada PD Pembangunan Sulut.

Pada Tahun 2015 diterbitkan SK Gubernur Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PD. Pembangunan Sulut, selanjutnya pada Tahun 2017 diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Penetapan Personalia Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sulawesi Utara. Pada Tahun 2018 diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 274 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Sulawesi Utara. Tahun 2020 diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 232 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Sulawesi Utara dan Keputusan Gubernur Nomor 248 Tahun 2020 tentang Penunjukan Direktur Perencanaan dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Sulawesi Utara.

Tahun 2022 diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 374 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Perencanaan dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Sulawesi Utara.

PD Pembangunan Sulut menyampaikan Laporan Keuangan Perusahaan Per 31 Desember 2024 *Unaudited* dengan Total Ekuitas Rp(3.858.268.721,00), dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.3.44 Saldo Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sulut oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2024

No.	Komposisi Ekuitas	Nilai *Unaudited* (Rp)	Persentase Kepemilikan Berdasarkan LKPD Pembangunan *Unaudited*	
			Persentase Kepemilikan	Jumlah Investasi Permanen (Rp)
1	Modal	(7.711.934.845,00)	100,00	(7.711.934.845,00)
2	Dana Penyertaan Modal Pemda	3.500.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00
3	Laba (Rugi)	353.666.124,00	100,00	353.666.124,00
Jumlah		(3.858.268.721,00)	100,00	(3.858.268.721,00)

4) PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU)

Terkait penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Piutang kepada PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT PPSU), perlu diungkapkan hal-hal sebagai berikut.

a) Pada tahun 1990, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penyertaan kepada PT PPSU dalam bentuk saham senilai Rp4.012.500.000,00 yang mewakili kepemilikan sebesar 19,19%. Saat itu, PT PPSU masih bernama PT Manado Tourism Development Coooration (PT MTDC).

b) Selanjutnya, pada tahun 2003, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penambahan investasi sebesar Rp5.000.000.000,00 dan penyelesaian utang PT PPSU sebesar Rp48.538.941.197,00 yang diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dari Bank Exim tempat PT PPSU memperoleh pinjaman. Untuk melakukan penyelesaian utang PT PPSU tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan dana sebesar Rp18.000.000.000,00. Penambahan investasi tersebut dilakukan sesuai persetujuan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Nomor 59a Tahun 2003 dan surat dari PT PPSU No.028/Dir/PPSU/III/03 yang menyatakan bahwa pinjaman dana sebesar Rp5.000.000.000,00 tersebut akan dikonversi menjadi saham pemda pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mencatat pada Neraca sebesar Rp27.012.500.000,00 sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT PPSU yang terdiri dari:

Pembelian Saham	4.012.500.000,00
Penambahan Investasi	5.000.000.000,00
Pembayaran Utang PT PPSU	18.000.000.000,00
J u m l a h	27.012.500.000,00

c) RUPS LB yang dihadiri wakil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 25 April 2003 menyetujui dan memutuskan perubahan dan pengalihan saham kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sehingga menjadi 80% dan pengalihan tersebut dilaksanakan dari masing-masing pemegang saham kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang prosesnya secara *administrasi* akan dilaksanakan oleh direksi. Namun, pada RUPS Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2004 di Jakarta yang juga dihadiri wakil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, disetujui belum dapat dilaksanakannya hasil RUPS LB tanggal 25 April 2003 di Bali tersebut karena belum adanya investor untuk jual beli saham dimana pengalihan dan penjualan saham harus dilaksanakan secara simultan.

d) Dalam Laporan Keuangan PT PPSU Tahun 2008 yang telah diaudit oleh KAP Drs. Haryo Tienmar disebutkan bahwa penyertaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 18,47% berupa 10.225 lembar saham senilai Rp5.112.500.000,00 dan PT PPSU memiliki utang kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp23.237.640.000,00. Nilai tersebut terdiri dari setoran Pemerintah Daerah Sulawesi Utara sebesar

Rp5.000.000.000,00, biaya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih utang PT PPSU sebesar Rp18.000.000.000,00 dan tambahan pinjaman PT PPSU kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp237.640.000,00.

e) Pada RUPS tanggal 5 Maret 2009 dihadiri oleh wakil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selaku salah satu pemegang saham menyetujui untuk mengoreksi dengan membatalkan keputusan RUPS tanggal 23 April 2003 khususnya mengenai pengalihan saham kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari pemegang saham non pemerintah daerah. Persetujuan dalam RUPS tanggal 5 Maret 2009 tersebut menyebabkan penyertaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang semula ditujukan sebagai peningkatan nilai investasi sampai dengan 80% hanya dapat diakui sebesar 18,47% dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2009. Dengan demikian, nilai penyertaan modal pada PT PPSU dilakukan pengurangan sebesar Rp21.900.000.000,00 dan hanya mengakui sebesar Rp5.112.500.000,00 dengan jumlah piutang sebesar Rp54.038.941.197,00.

f) Berdasarkan Hasil RUPS tanggal 7 Juli 2011 sesuai Akta Notaris Eddy F. Sarapung, S.H., M.H. Nomor 11 tanggal 7 Juli 2011, PT PPSU berutang kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejumlah 54.038.941.197,00, yang terdiri dari Rp48.5238.941.197,00 dalam bentuk *cessie*, Rp5.000.000.000,00 dalam bentuk tranfer ke PT PPSU dan Rp500.000.000,00 dalam bentuk transfer kepada PT MBH (unit usaha PT PPSU).

g) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2013 sebesar Rp54.038.941.197,00. Karena telah sepuluh tahun disajikan dalam piutang lancar dan ternyata sampai akhir tahun 2013 belum dapat diterima pelunasannya, Piutang Penjualan Angsuran disajikan sebagai Aset Lainnya.

h) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara Nomor 2 Tanggal 11 November 2020 oleh Notaris Eddy F. Sarapung, S.H., M.H. mengesahkan kompensasi saham atas piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PPSU sebesar Rp54.038.941.197,00 yang berisi penetapan saham maksimal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 80% dan pemegang saham diluar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 20%, dan ditetapkan susunan kepemilikan saham per Tahun 2020 sebesar Rp59.151.500.000,00 (118.303 lembar saham dengan nilai Jumlah Rp500.000), sehingga saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saat ini menjadi 72,39%.

i) Berdasarkan akta terakhir Nomor 5 Tanggal 8 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara, Keputusan Rapat menyetujui untuk mengalihkan saham Kabupaten dan Kota Gorontalo yang masing-masing sebanyak 200 lembar menjadi saham portepel

Perusahaan sehingga modal dasar perseroan berjumlah Rp81.717.500.000,00. Dari modal dasar tersebut yang ditempatkan/disetor sebesar 99,76% atau Rp81.517.500.000,00 sehingga persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi 72,56% atau Rp59.151.500.000,00.

PT PPSU telah menyampaikan laporan keuangan *unaudited* tahun 2024 dengan total kepemilikan (Rp6.974.359.236,52), dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.3.45 Porsentase Kepemilikan pada PT PPSU oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2024

No.	Komposisi Ekuitas	Jumlah	Persentase Kepemilikan Berdasarkan LK PT PPSU	
			Persentase Kepemilikan	Jumlah Investasi Permanen
1	Modal saham ditempatkan	81.517.500.000,00	72,56	59.149.098.000,00
2	Laba / Rugi	(91.129.351.208,00)	72,56	(66.123.457.236,52)
	Jumlah	(9.611.851.208,00)	72,56	**(6.974.359.236,52)**

5) PT Asuransi Bangun Askrida

Penyertaan modal kepada PT Askrida sejumlah Rp570.000.000,00 berdasarkan Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 570/3014/PUOD tanggal 19 September 1994 tentang Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah kepada PT Askrida. Berdasarkan surat PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 616/DIR/IX-2020 tentang Penawaran Sisa Saham Rp2.490.000.000,00 dan Penambahan Modal Disetor senilai Rp100,000,000,000.00, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperoleh porsi penambahan saham sebesar Rp160.000.000,00 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan penambahan modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp160,000,000,00 sesuai dengan bukti SP2D Nomor 13150/SP2D/4.04.02.01/2021 tanggal 2 Agustus 2021. Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak melaksanakan penambahan Penyertaan Modal, sehingga Investasi Permanen Penyertaan Modal Provinsi Sulawesi Utara kepada PT Asuransi Bangun Askrida dapat dilihat pada Lampiran II.19.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b.2. Properti Investasi	**163.929.080.000,00**	**76.833.527.000,00**

Posisi Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp163.929.080.000,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.46 Rekapitulasi Properti Investasi

No	Akun	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Properti Investasi	76.833.527.000,00	87.095.553.000,00	-	163.929.080.000,00

Perubahan (mutasi) saldo Properti Investasi terjadi karena adanya koreksi dari kemitraan pihak ketiga dipindahkan ke Properti Investasi senilai Rp87.095.553.000,00 yaitu, berupa tanah dan bangunan Badan Penghubung di Jakarta.

Rincian Properti Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut.

Tabel 5.3.47 Properti Investasi

No	SKPD	Uraian	Surat Perjanjian	Jangka Waktu	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Daerah	Tanah di Tanjungbatu (Cabin Stop Café)	030/1386/Sekr tanggal 6 Juni 2008	Lima tahun, 2018 s.d. 2023	800.000,00
		Gedung di Tanjungbatu (Cabin Stop Café)			959.392.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tanah (Big Fish Manado)	SP NOMOR : 030/23.2830/Sekr-BKAD BAST: 030/23.2925/Sekr-BKAD tanggal 9 Mei 2023	Lima tahun, 2023 s.d.2027	5.260.710.000,00
		Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen (Big Fish Manado)			124.900.000,00
3	Biro Umum	PKS Pemprov dengan PT Wenang Permai	030/1386/Sekr tanggal 6 Juni 2007	30 tahun, 2007 s.d. 2037	45.813.550.000,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Gedung Joeang 45)	011/035/Sekr-Ro.Perl tanggal 7 April 2009	25 Tahun, 2009 s.d. 2034	20.037.000.000,00
		Bangunan Gedung Pameran (Gedung Joeang 45)			4.837.175.000,00
5	Badan Penghubung	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Hotel Lume'os)	237/Penghub-Jkt/VIII/2021	30 tahun, 2021 s.d. 2051	9.063.000.000,00
		Bangunan Gedung Kantor Permanen (Hotel Lume'os Jakarta)			78.032.553.000,00
		Jumlah			163.929.080.000,00

Sehubungan dengan Properti Investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, perlu diungkapkan hal-hal berikut.

a. Sesuai dengan Akta Perjanjian Kerja Sama No.237/Penghub-Jkt/VIII/2021 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Kantor Penghubung Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta tanggal 26 Agustus 2021 maka tanah dan bangunan yang saat ini berdiri sebuah hotel bernama Hotel Kawanua akan dikelola dalam hal ini oleh PT Sari Murni Putra untuk kegiatan hotel dan hiburan umum dengan maksud dan tujuan agar meningkatkan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
b. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat properti investasi adalah berdasarkan biaya perolehan dan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b.3.	**Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**	**(31.997.197.360,00)**	**(1.817.047.275,33)**

Tabel 5.3.48 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

No	Akun	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.817.047.275,33)	(30.180.150.084,67)	-	(31.997.197.360,00)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp(31.997.197.360,00), yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.49 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

SKPD	Aset Properti Investasi	Jumlah
Dinas Pendidikan	Cabin Stop Café	(156.942.830,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	Big Fish Manado	(16.028.833,00)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Gedung Joeang 45	(1.781.692.792,00)
Badan Penghubung	Hotel Lume'os	(30.042.532.905,00)
Total		(31.997.197.360,00)

Rincian akumulasi penyusutan properti investasi dapat dilihat pada Lampiran II.20

5.3.1.3. ASET TETAP

Posisi Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.3.50 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023

Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	3.202.135.095.132,75	3.161.345.702.482,75
Peralatan dan Mesin	2.137.014.038.026,73	2.037.402.758.266,23
Gedung dan Bangunan	3.170.803.352.148,65	3.042.148.621.061,87
Jalan, Jaringa, dan Irigasi	4.239.355.585.962,19	4.138.167.733.474,10
Aset Tetap Lainnya	218.380.461.173,23	194.997.281.224,23
Konstruksi dalam Pengerjaan	166.767.416.301,27	120.740.798.657,90
Akumulasi Penyusutan	(4.982.291.156.188,82)	(4.519.828.218.443,85)
Jumlah	8.152.164.792.556,00	8.175.176.676.713,23

Saldo aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.152.164.792.556,00. Nilai tersebut menurun sebesar Rp23.011.884.157,23 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp8.175.176.676.713,23

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan dan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Masing-masing Aset Tetap dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a.	**Tanah**	**3.202.135.095.132,75**	**3.161.345.702.482,75**

Nilai Aset Tetap Tanah mengalami kenaikan nilai sebesar Rp40.789.392.650,00 yang berasal dari penambahan nilai sebesar Rp58.018.472.650,00 dan pengurangan nilai sebesar Rp17.229.080.000,00.

Tabel 5.3.51 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024

Uraian		Jumlah
Saldo Awal		**3.161.345.702.482,75**
Penambahan :		**58.018.472.650,00**
1	Realisasi Belanja Modal 2024	19.396.472.650,00
2	Penilaian berdasarkan hasil Inventarisasi	38.622.000.000,00
Pengurangan :		**17.229.080.000,00**
1	Hibah Pemerintah ke Instansi Pemerintah Lainnya	17.220.080.000,00
2	*Reklasifikasi Modal Ke Barang dan Jasa*	9.000.000,00
Saldo Akhir		**3.202.135.095.132,75**

1) Penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp58.018.472.650,00 berasal dari:

   a) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 pada Perangkat Daerah sebesar Rp19.396.472.650,00;

   b) Penilaian berdasarkan hasil inventarisasi Tanah dalam surat No.900.05/BKAD/0672/2024 tanggal 17 Mei 2024 dengan sertifikat Nomor 2/Wori atas tahun perolehan 2006 sebesar Rp38.622.000.000,00, pada perangkat daerah dan sekolah sebagai berikut.

      (1) Berdasarkan hasil NJOP luas 20.000 m^2 dengan nilai NJOP sebesar Rp82.000 pada SMKN 1 Wori sebesar Rp1.640.000.000,00;

      (2) Berdasarkan hasil NJOP luas 19.900 m^2 dengan nilai NJOP sebesar Rp82.000 pada SMAN 1 Wori sebesar Rp1.631.800.000,00; dan

      (3) Berdasarkan hasil NJOP luas 431.100 m^2 dengan nilai NJOP sebesar Rp82.000 pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp35.350.200.000,00.

2) Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah Sebesar Rp17.229.080.000,00 berasal dari:

   a) Hibah Pemerintah kepada Instansi Pemerintah Lainnya sebesar Rp17.220.080.000,00, yaitu:

      (1) Hibah Aset Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke BPK RI sesuai SK Nomor 699 Tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.040.000.000,00;

      (2) Hibah Aset Tetap Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sesuai SK Nomor 700 Tahun 2024 tanggal 19 Desember pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp3.180.080.000,00; dan

   b) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain (KIB A) yang seharusnya menambah barang dan jasa pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp9.000.000,00.

Rekapitulasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.52 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	76.674.104.000,00	3.633.805.260,00	9.000.000,00	80.298.909.260,00
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	35.107.542.766,56	-	-	35.107.542.766,56
Tanah untuk Bangunan Industri	-	-	-	-
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.042.843.799.394,28	3.271.800.000,00	17.220.080.000,00	1.028.895.519.394,28
Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	421.379.500,00	-	-	421.379.500,00
Tanah Fasil Lainnya	9.084.240.000,00	-	-	9.084.240.000,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah Basah	6.906.267.500,00	-	-	6.906.267.500,00
Tanah Kering	9.643.822.412,43	-	-	9.643.822.412,43
Tanah Perkebunan	392.420.938.000,00	-	-	392.420.938.000,00
Tanah Hutan	1.109.900.000,00	-	-	1.109.900.000,00
Tanah Pertanian	5.339.918.000,00	-	-	5.339.918.000,00
Tanah Lapangan Olahraga	254.444.550.000,00	-	-	254.444.550.000,00
Tanah Lapangan Parkir	775.000.000,00	-	-	775.000.000,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	39.500.000,00	35.350.200.000,00	-	35.389.700.000,00
Tanah untuk Jalan	1.241.006.120.452,00	16.762.667.390,00	-	1.268.767.787.852,00
Tanah untuk Bangunan Air	18.169.590.957,50	-	-	18.169.590.957,50
Tanah untuk Makam	12.219.759.000,00	-	-	12.219.759.000,00
Tanah Kampung	55.240.270.490,00	-	-	55.240.270.490,00
Total	3.101.346.702.462,75	58.018.472.590,00	17.229.080.000,00	3.202.135.095.132,75

3) Informasi Terkait Aset Tetap Tanah, yaitu:
   a) Berdasarkan Daftar Inventaris Tanah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai Aset Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 501 bidang tanah, sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 57 bidang tanah;
   b) Aset Tetap Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipinjam-pakaikan sebanyak sembilan objek, dapat dilihat pada Lampiran II.21;
   c) Beberapa Aset Tetap Tanah yang tercantum di Neraca per 31 Desember 2024 masih dalam sengketa dengan pihak lain dan masih dalam proses penyelesaian di pengadilan. Adapun Aset Tetap Tanah yang menjadi objek sengketa sebanyak tujuh bidang tanah yaitu:
      (1) Tahun Gugatan 2004, Nomor Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2004/PN. Btg, Penggugatnya adalah Imam Sulisman dengan Tergugat, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan (Tergugat I), DKP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat II), BPPP Bitung (Tergugat III), Gubernur Sulut (Tergugat IV), Bupati Minahasa (Tergugat V), Walikota Bitung (Tergugat VI). Objek yang digugat adalah Tanah Aertembaga Bitung (a.n Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulut) seluas ±27.570 m^2 dengan Tuntutan Hak atas Tanah. Status Tanah adalah Aset Pemprov (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulut). Dalam Perkara tersebut PN/PTUN menolak gugatan dan dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dkk. Mahkamah Agung pada Kasasi menguatkan putusan PN. Alasan gugatan adalah bahwa Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat lainnya menguasai tanah objek sengketa tanpa ijin dan persetujuan Penggugat.
      (2) Tahun Gugatan 2012, Nomor Perkara Perdata Nomor 280/Pdt.G/2012/PN. Mdo. Penggugatnya adalah J. Matindas, dkk. Tergugat, yaitu Gubernur Sulut (Tergugat I), W.F. Mamesah, dkk (Tergugat II). Objek gugatan Tanah rumah dinas Bumi Beringin seluas ± 29.800 m^2. Tuntutan ganti rugi senilai Rp112 Milyar. Status Tanah yaitu Aset Pemprov. Badan Peradilan PN/PTUN Gugatan ditolak pada tanggal 17 April 2013 dan Pemprov dkk dimenangkan. Alasan gugatan adalah bahwa Tergugat telah menguasai dan menduduki tanah objek sengketa tanpa dasar oknum yang jelas oleh karena tanah adalah milik dari Penggugat.
      (3) Tahun Gugatan 2021, Nomor Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2021/PN. Mnd. Penggugatnya adalah Olha Sampel dkk. Tergugat, yaitu Gubernur Sulut. Objek gugatan Tanah yang terletak di Kel. Kairagi 2, Kec. Mapanget, Tanah yang saat ini berlokasi pada Pameran Pembangunan

Kayuwatu dengan luas ±5.000 m^2. Tuntutan Ganti rugi pengrusakan sejumlah Rp3,5 Milyar. Status penguasaan Pemprov Sulut dan Pemprov dimenangkan. Alasan gugatan bahwa bahwa Tergugat telah melakukan penggusuran secara paksa dan tanpa hak yang jelas.

(4) Tahun Gugatan 2021, Nomor Perkara Perdata Nomor 196/Pdt.G/2021/PN. Penggugatnya adalah Maxi Rumagit cs, dan John Wantah cs, Denny Palilingan, SH. Tergugat, yaitu Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia (Tergugat I), Gubernur Sulawesi Utara (Tergugat II), Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung (Tergugat III), Walikota Bitung (Turut Tergugat). Objek gugatan ialah lokasi tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung yang saat ini lokasi adalah Kawasan Ekonomi Kuhus (KEK) Bitung. Luas ±92,96 Ha. Status Aset Pemprov dan Pemprov dimenangkan. Alasan gugatan bahwa lahan objek sengketa telah menjadi milik dari Tergugat II dan akan dipergunakan oleh Tergugat II untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan telah dalam penguasaan Tergugat II sampai dengan saat ini.

(5) Tahun Gugatan 2022. Perkara Perdata Nomor 243/Pdt.G/2022/PN. Mnd. Penggugatnya adalah Lucky A. Pangemanan, Yafet Y. W. Rissy, SH, M.Si, LLM, P.Hd (AFHEA), dkk. Tergugat, yaitu Gubernur Sulawesi Utara (Tergugat I), Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat II), Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Manado (Tergugat III), Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Manado (Tergugat IV), Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Manado (Tergugat V), Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado (Turut Tergugat). Objek gugatan Tanah yang terletak di Jalan Tololiu Supit, Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara yang saat ini terdapat SMA Negeri 7 Manado, SMA Negeri 2 Manado dan SMP Negeri 7 Manado. Luasnya sebesar ±46.684 m^2. Status Aset Pemprov Sulut dan Pemprov dimenangkan. Alasan gugatan bahwa Tergugat I Gubernur Sulawesi Utara yang tanpa hak dan melawan oknum mengklaim tanah objek sengketa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/HP/29 tertanggal 21 Juli 1982, sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Teling seluas ±46.684 m^2 yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

(6) Tahun Gugatan 2022. Perkara Perdata Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Penggugatnya adalah Yayasan Pendidikan Lokon, Mary Mewengkang. Tergugat, yaitu Gubernur Sulawesi Utara (Tergugat I), Bupati Minahasa (Tergugat II), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa (Tergugat III), Kepala Kantor Pertanahan Kota Tomohon (Turut Tergugat). Objek gugatan Tanah yang terletak di Jalan Perlombaan, Kelurahan Kakaskasen II, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01/Kakaskasen II atas nama Mary Wewengkang yang saat ini sedang berdiri SMA Lokon. Luas ±75.843 m^2. Status Tanah aset Pemprov Sulut. Alasan Gugatan Bahwa Tergugat I mengklaim tanah objek sengketa sebagai Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta telah bersertifikat Hak Pakai No. 01/Kakaskasen II dengan luas 68.200 M^2 atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

(7) Tahun Gugatan 2023. Nomor Perkara Perdata No. 229/Pdt.G/2023/PN. Mnd. Penggugat F. Laurens, DKK. Tergugat Gubernur Sulut (Tergugat) PT WPS, dkk (Turut Tergugat) Objek gugatan Tanah di areal kawasan lapangan golf Kayuwatu Luas ±45. 500 m^2. Tuntutan ganti rugi Rp. 227,5 Milyar. Status Aset Pemprov. PN/PTUN Gugatan ditolak (1/12-2023) Pemprov dimenangkan. PT/PTUN Gugatan dikabulkan sebagian (14/3-2024) Relaas 18/3-2024 Pemprov dikalahkan. Kasasi Mahkamah Agung berproses. Alasan Gugatan Bahwa Tergugat telah menguasai dan menduduki tanah objek sengketa tanpa dasar yang jelas oleh karena tanah adalah milik dari Penggugat.

(8) Penambahan Aset Tetap Tanah pada ruas jalan Manado Outer Ring Road (MORR) III dan ruas jalan Bandara Likupang dengan mekanisme konsinyasi sebanyak 69 objek yang terdiri dari 18 objek pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan sebanyak 51 objek pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tersaji pada Lampiran II.22. Pembayaran tanah melalui mekanisme konsinyasi ini dilakukan karena hal-hal sebagai berikut.

(1) Adanya sengketa kepemilikan lahan;
(2) Tidak disetujuinya nilai pembayaran;
(3) Sertifikat tanah menjadi jaminan di Bank; dan
(4) Diletakkan sita jaminan oleh pejabat yang berwenang.

d) Tanah Kalasey digunakan untuk kegiatan usaha perorangan tanpa perikatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah melakukan penertiban Aset Tetap Tanah melalui Surat Pemberitahuan kepada Bupati Minahasa Nomor 900.05/23.1474/Sekr-BKAD, tanggal 13 Maret 2023 tentang Pemberitahuan untuk menginformasikan kepada para penggarap/penghuni tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Kompleks Desa Kalasey I dan Desa Kalasey II kecamatan Mandolang agar mengosongkan objek Tanah tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun diketahui bahwa Tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Kalasey yang dicatat dalam KIB A pada Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor Induk Barang (NIBAR) 1101712400000000000019811310101040010000001, dimana bidang tanah seluas 63.600 m^2 per 31 Desember 2024 masih dikuasai oleh oknum perorangan untuk kegiatan usaha sebagaimana dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3.53 Aset Tetap Tanah Kalasey yang Dikuasai Orang

No.	Jenis usaha	Nama perorangan	Luas dikuasai (m^2)
1.	Kolam renang	Nixson Mamesah	600
2.	Rumah dan kolam ikan	Romy Lambey	9.000
3.	Kolam renang dan rumah untuk penalaran	Jan Poloruwo	2.000
4.	Rumah dan kolam ikan	Opo Sinaen	2.000
5.	Rumah dan kolam renang	Beny Raintana	10.000
6.	Kolam renang dan *cottage*	Jemmy Wangko	20.000
7.	Rumah dan Kolam renang	Manoy, SH	5.000
8.	Gedung sarang wallet	Rolly Minesang	5.000
9.	Kolam renang	Jelrry Rompas	10.000

	31 Desember 2024 (Rp)	31 esember 2023 (Rp)
b. Peralatan dan Mesin	**2.137.014.038.026,73**	**2.037.402.758.256,23**

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan nilai sebesar Rp99.611.279.770,50 yang berasal dari penambahan nilai sebesar Rp176.250.158.373,45 dan pengurangan nilai sebesar Rp76.638.878.602,95

Tabel 5.3.54 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Uraian		Jumlah
Saldo Awal		2.037.402.758.256,23
Penambahan:		176.250.158.373,45
1	Realisasi Belanja Modal 2024	102.240.316.597,00
2	Mutasi Masuk antar Perangkat Daerah	55.845.840.114,00
3	Hibah Pemerintah Pusat dan BUMN ke Pemprov	6.059.344.370,00
4	Reklasifikasi Antar KIB	10.029.492.749,20
5	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	42.264.443,25
6	Reklasifikasi Barang dan Jasa Ke Modal	32.900.000,00
Pengurangan:		76.638.878.602,95
1	Mutasi Keluar antar Perangkat Daerah	55.845.840.114,00
2	Hibah Pemprov ke Pemerintah Lainnya	360.000.000,00
3	Penghapusan	5.285.965.079,50
4	Reklasifikasi Antar KIB	6.462.138.200,00
5	Reklasifikasi Modal ke Barang dan Jasa	348.838.215,00
6	Ekstrakomptabel	8.356.106.994,45
	Total	2.137.014.038.026,73

1) Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp176.250.158.373,45 berasal dari:
   a) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 pada Perangkat Daerah sebesar Rp102.240.316.697,00;
   b) Mutasi Masuk antar perangkat daerah sebesar Rp55.845.840.114,00, yaitu:
      (1) Mutasi Aset Tetap Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada beberapa perangkat daerah sebesar Rp1.017.000.000,00, yaitu:

Tabel 5.3.55 Mutasi Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

No.	Tujuan	Asal	Jumlah
1	Biro Umum	Biro Administrasi Pembangunan	471.000.000,00
2	Badan Penghubung	Biro Umum	546.000.000,00
Jumlah			1.017.000.000,00

      (2) Mutasi dari Dinas Pendidikan ke beberapa sekolah sebesar Rp54.828.840.114,00, yaitu:
         i. Mutasi Aset Tetap Alat Laboratorium Pendidikan (DAK) sebesar Rp1.800.000.000,00, rincian terkait Mutasi Aset Tetap alat laboratorium pendidikan (DAK) terdapat di Lampiran II.23 laporan keuangan ini;
         ii. Mutasi Aset Tetap Alat Peraga Kejuruan (DAK) sebesar Rp33.188.118.400,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.24 laporan keuangan ini;
         iii. Mutasi Aset Tetap *Electric Generating Set* (BOSP) sebesar Rp62.249.000,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.25 laporan keuangan ini;
         iv. Mutasi Aset Tetap Pompa (BOSP) sebesar Rp60.466.000,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.26 laporan keuangan ini;
         v. Mutasi Aset Tetap Alat Bengkel Bermesin Lainnya (BOSP) pada SMK Negeri 2 Manado sebesar Rp3.153.153,00;
         vi. Mutasi Aset Tetap Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (BOSP) sebesar Rp904.527.390,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.27 laporan keuangan ini;

vii. Mutasi Aset Tetap Alat Kantor Lainnya (BOSP) sebesar Rp1.818.496.770,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.28 laporan keuangan ini;

viii. Mutasi Aset Tetap Mebel (BOSP) sebesar Rp1.775.081.800,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.29 laporan keuangan ini;

ix. Mutasi Aset Tetap Alat Pembersih (BOSP) sebesar Rp39.725.000,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.30 laporan keuangan ini;

x. Mutasi Aset Tetap Alat Pendingin (BOSP) sebesar Rp690.523.562,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.31 laporan keuangan ini;

xi. Mutasi Aset Tetap Alat Rumah Tangga (*Home Use*) (BOSP) sebesar Rp902.523.950,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.32 laporan keuangan ini;

xii. Mutasi Aset Tetap Peralatan Studio (BOSP) sebesar Rp156.563.000,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.33 laporan keuangan ini;

xiii. Mutasi Aset Tetap Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Matematika (BOSP) Rp37.675.000,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.34 laporan keuangan ini;

xiv. Mutasi Aset Tetap Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA Menengah (BOSP) pada SMA Negeri 1 Tomohon sebesar Rp4.250.000,00;

xv. Mutasi Aset Tetap Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Kesenian (BOSP) pada SMA Negeri 1 Langowan sebesar Rp5.000.000,00;

xvi. Mutasi Aset Tetap Personal Komputer (BOSP) sebesar Rp11.746.805.111,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.35 laporan keuangan ini;

xvii. Mutasi Aset Tetap Peralatan Personal Komputer (BOSP) sebesar Rp1.162.716.472,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.36 laporan keuangan ini;

xviii. Mutasi Aset Tetap Peralatan Jaringan (BOSP) sebesar Rp470.965.506,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.37 laporan keuangan ini

c) Hibah Pemerintah Pusat dan BUMN ke Pemerintah Provinsi sebesar Rp8.059.344.370,00 pada beberapa perangkat daerah dan sekolah, yaitu:

(1) Hibah atas Aset Tetap Kendaraan Bermotor Khusus (mobil Ambulance) dari Bank Mandiri sesuai BAST Nomor JBR.R10.Ar.MDO/ /2023 tanggal 20 Maret 2023 ke RSUD Tipe B senilai Rp237.500.000,00;

(2) Hibah atas Aset Tetap Kendaraan Bermotor Penumpang Dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sesuai BAST Nomor 678.22/Pl.02.03/A/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 ke Dinas Pangan Daerah senilai Rp135.750.000,00;

(3) Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke beberapa sekolah sebesar Rp 7.686.094.370,00, yaitu:

i. BAST Nomor 007/XII/SMKN1-TOMBARIRI/BAST/2024 Tanggal 27 Desember 2024 dan 1866A/116/17.1/SMK-1/KP/2024

tanggal 10 Desember 2024 ke SMK Negeri 1 Tombariri senilai Rp597.578.420,00;

ii. BAST Nomor 527c/II6.20/SMK.6/BASTHPP/2024 Tanggal 13 Desember 2024 dan 112/II6.20/SMK.6/LL/2024 tanggal 26 November 2024 ke SMK Negeri 6 Manado senilai Rp562.770.000,00;

iii. BAST Nomor 021/GRA/BAST/XII/2024 Tanggal 17 Desember 2024 dan 006/XII/SMKN1-RATAHAN/BAST/2024 tanggal 27 Desember 2024 ke SMK Negeri 1 Ratahan senilai Rp557.730.000,00;

iv. BAST Nomor 796a/I.16.20/SMK-2/KP/2024 Tanggal 23 Desember 2024, 927a/I.16.20/SMK-2/KP/2024, 928a/I.16.20/SMK-2/KP/2024 tanggal 24 Desember 2024, 962b/116.20/SMK-2/BAST/2024 tanggal 27 Desember 2024, 962d/I.16.20/SMK-2/KP/2024, 962e/I.16.20/SMK-2/KP/2024 tanggal 30 Desember 2024 ke SMK Negeri 2 Manado Rp702.440.000,00;

v. BAST Nomor 039/SMKN.1/Wr/BAST/XI/2024, 039.C/SMKN.1/Wr/BAST/XI/2024,039.d/SMKN.1/Wr/BAST/XI/2024 tanggal 30 November 2024 dan 416/SMKN.1/Wr/BAST/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 ke SMK Negeri 1 Wori senilai Rp726.730.000,00;

vi. BAST Nomor 185/421.5/SMKN6-BTG/BAST/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024 dan 17/421.5/SMKN6-BTG/BA/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 ke SMK Negeri 6 Bitung senilai Rp580.870.000,00;

vii. BAST Nomor S10005408519, S10005408372, S10005408355, S10005408494, S10005408444, S10005408378 tanggal 15 Desember 2023 dan 570a/001.8/SMKN1/MPY/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, S10005408548, S10005408474, S10005408534 tanggal 30 Desember 2023, S10005607839, S10005607887 tanggal 8 Januari 2024 dan S10005408334 tanggal 15 Januari 2024 ke SMK Negeri 1 Mopuya sebesar Rp260.000.000,00,

viii. BAST Nomor 422/SMK-1/Mod/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023 dan 425/SMK-1/Mod/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 ke SMK Negeri 1 Modoinding sebesar Rp370.096.000,00,

ix. BAST Nomor 056/DIKDA/SMKN 1 Ktg/XI/2023 Tanggal 14 November 2023, S10005330955, S10005332868, S10005333360, S10005333436, S10005333710, S10005333569, S10005330816, S10005330887, S10005332991, S10005333029, S10005333407 tanggal 15 Desember 2023 ke SMK Negeri 1 Kotamobagu sebesar Rp457.000.000,00,

x. BAST Nomor BT-2023-10-26-0829128, BT-2023-10-26-0829110 Tanggal 26 Oktober 2023, S10005374851 tanggal S10005374851 tanggal 27 Oktober 2023, S10005416313, BT-2023-11-07-0842259, BT-2023-11-07-0842201 tanggal 7 November 2023, S10005416370, BT-2023-11-17-0854381, BT-2023-11-17-0854392 tanggal 17 November 2023, BT-2023-11-18-0855368

tanggal 18 November 2023, S10005502355, BT-2023-11-28-0865862, BT-2023-11-28-0865868 tanggal 28 November 2023, S10005502359, S10005502365, BT-2023-12-13-0890945, BT-2023-12-13-0890890, BT-2023-12-13-0890899, BT-2023-12-13-0890962 tanggal 13 Desember 2023, BT-2023-12-19-0898162 tanggal 19 Desember 2023, BT-2023-12-21-0899191 tanggal 21 Desember 2023, S10005633313 tanggal 23 Desember 2023 dan BT-2023-12-28-0901530 tanggal 28 Desember 2023 ke SMK Negeri 1 Tondano sebesar Rp399.625.950,00;

xi. BAST Nomor S10005354716 Tanggal 3 November 2023, S10005354820 Tanggal 30 November 2023, S10005355009 tanggal 8 Desember 2023, S10005354789, S10005354807 tanggal 12 Desember 2024, S10005354859, S10005354883, S10005354896, S10005355002, S10005355031 tanggal 28 Desember 2023 ke SMKN 1 Touluaan sebesar Rp1.000.000.000,00

xii. BAST Nomor 215b/I16.17/SMKN1/LL/IX/2024 Tanggal 3 September 2024 ke SMK Negeri 1 Tomohon sebesar Rp200.764.000,00;

xiii. BAST Nomor 420/DIKDA/SMKN1KTG/2296a/XII/2024 dan Nomor 420/DIKDA/SMKN1KTG/0680/XII/2024 Tanggal 18 dan 19 Desember 2024 ke SMK Negeri 1 Kotamobagu sebesar Rp30.000.000,00;

xiv. BAST Nomor 428/421/SMKN1/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 ke SMK Negeri 1 Airmadidi sebesar Rp222.600.000;

xv. BAST Nomor 00080/BAST-LLY/XI/2024, Nomor 00084/BAST-LLY/XI/2024 dan Nomor 00077/BAST-LLY/XI/2024 Tanggal 18, 20 dan 29 November 2024 ke SMK Negeri 1 Lolayan sebesar Rp217.890.000,00;

xvi. BAST Nomor 570.b/II.16.20/SMKN.8/BAST/2024 Tanggal 27 Desember 2024 ke SMK Negeri 8 Manado sebesar Rp200.000.000,00;

xvii. BAST Nomor 9249/D2/KU.07.00/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 ke SMK Negeri 1 Langowan sebesar Rp200.000.000,00;

xviii. BAST Nomor 526/I16.20/SMK-3/BAST/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 ke SMK Negeri 3 Manado sebesar Rp200.000.000,00;

xix. BAST Nomor 815/422/SMKNPP/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 ke SMKN-PP Kalasey Manado sebesar Rp200.000.000,00;

d) Reklasifikasi atas kesalahan pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C) yang seharusnya menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B) pada beberapa perangkat daerah dan sekolah sebesar Rp10.029.492.749,20, yaitu:

(1) Reklasifikasi Bangunan Gedung Kantor yang menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B) sebesar Rp3.319.385.000,00, pada beberapa perangkat daerah, yaitu:

i. Mesin Proses Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebesar Rp2.839.000.000,00;

ii. Alat Pendingin pada Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp6.485.000,00;

iii. Alat Laboratorium Lain pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp473.900.000,00;

(2) Reklasifikasi Bangunan Gedung Tempat Pendidikan yang menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B) sebesar Rp6.710.107.749,20 pada beberapa sekolah, yaitu:

i. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor pada beberapa sekolah sebesar Rp889.749.177,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.38 laporan keuangan ini;

ii. Alat Kantor Lainnya pada beberapa sekolah sebesar Rp448.597.940,00, dapat dilihat dalam Lampiran II.39 laporan keuangan ini;

iii. Mebel pada beberapa sekolah sebesar Rp5.100.590.532,20, dapat dilihat dalam Lampiran II.40 laporan keuangan ini;

iv. Alat Pendingin pada beberapa sekolah sebesar Rp124.320.000,00, yaitu:

(1) SMA Negeri 1 Bintauna sebesar Rp46.620.000,00;

(2) SMA Negeri 1 Lolak sebesar Rp68.775.000,00;

(3) SMK Negeri 1 Touluaan sebesar Rp8.925.000,00;

v. Kursi Kerja Pejabat pada SMA Negeri 1 Sinonsayang sebesar Rp2.700.000,00;

vi. Peralatan Studio Video dan Film pada SMA Negeri 1 Tenga sebesar Rp11.250.000,00;

vii. Alat Laboratorium Lain pada beberapa sekolah sebesar Rp119.900.100,00, yaitu:

Tabel 5.3.56 Alat Laboratorium Lain

No.	Uraian	Jumlah
1	SMA Negeri 1 Kawangkoan	29.100.000,00
2	SMA Negeri 1 Modoinding	11.000.100,00
3	SMA Negeri 1 Pinolosian	12.000.000,00
4	SMA Negeri 2 Tompaso	29.400.000,00
5	SMK Negeri 1 Amurang Barat	38.400.000,00
	Total	119.900.100,00

viii. Personal Komputer pada SMA Negeri 1 Tenga sebesar Rp10.000.000,00;

ix. Peralatan Personal Komputer pada SMA Negeri 1 Tenga sebesar Rp3.000.000,00;

e) Koreksi pencatatan tahun sebelumnya atas Aset Tetap Peralatan Dan Mesin yang menambah nilai aset sebelumnya Pada RSUD Tipe C Bitung sebesar Rp42.264.443,25, yaitu:

(1) Alat Ukur Universal sebesar Rp18.000.000,00;

(2) Alat Kedokteran Umum sebesar Rp314.443,25;

(3) Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan sebesar Rp8.500.000,00;

(4) Alat Laboratorium Mikrobiologi sebesar Rp10.450.000,00;

(5) Alat Laboratorium Pertanian sebesar Rp5.000.000,00;

f) Reklasifikasi Barang dan Jasa yang menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.900.000,00 pada beberapa perangkat daerah, yaitu:
   (1) Aset Tetap Personal Komputer pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp14.900.000,00;
   (2) Mebel pada Dinas Perpustakaan sebesar Rp12.000.000,00;
   (3) Aset Tetap Alat Kantor Lainnya pada RSUD Tipe B sebesar Rp6.000.000,00;

2) Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp76.638.878.602,95 berasal dari:
   a) Mutasi keluar antar perangkat daerah sebesar Rp55.845.840.114,00, rincian per masing-masing perangkat daerah dan sekolah telah dijelaskan pada bagian penambahan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar perangkat daerah;
   b) Hibah Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Biro Umum ke Kanwil BPN Sulut sesuai SK Nomor 702 Tahun 2024 tanggal 20 Desember sebesar Rp360.000.000,00;
   c) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.265.955.079,50 pada beberapa perangkat daerah, yaitu:
      (1) SK Nomor 728 Tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.299.040.131,00;
      (2) SK Nomor 687 Tahun 2024 pada Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan sebesar Rp164.222.000,00;
      (3) SK Nomor 550 Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.525.912.500,00;
      (4) SK Nomor 728 Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp105.126.500,00;
      (5) SK Nomor 703 Tahun 2024 pada UPTD RSUD Tipe C Noongan sebesar Rp1.142.565.200,00;
      (6) SK Nomor 585 Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp704.105.415,50;
      (7) SK 708 Tahun 2024 pada UPTD Rumah Sakit Mata sebesar Rp324.983.333,00;

   d) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa personal komputer (BOSP) yang seharusnya menambah Aset Tetap Lainnya yang tercatat dalam KIB E pada beberapa sekolah sebesar Rp6.462.138.200,00. Rincian reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin personal komputer BOSP dapat dilihat pada Lampiran II.41;

   e) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang scharusnya menambah belanja barang dan jasa pada perangkat daerah dan beberapa sekolah sebesar Rp348.838.215,00, yaitu:
      (1) Mebel (DAK) pada beberapa sekolah sebesar Rp3.851.950,00, yaitu:

Tabel 5.3.57 Mebel (DAK)

No.	Uraian	Jumlah
1	SMA Negeri 1 Manganitu	500.000,00
2	SMA Negeri 1 Siau Timur	271.950,00
3	SMA Negeri 1 Tampa Amma	350.000,00
4	SMA Negeri 3 Tahuna Barat	230.000,00

No.	Uraian	Jumlah
5	SMK Negeri 1 Manganitu Selatan	2.500.000,00
	Total	3.851.950,00

(2) Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) pada Biro Umum sebesar Rp272.290.500,00;

(3) Alat Laboratorium Pendidikan (DAK) pada beberapa sekolah sebesar Rp35.227.200,00, yaitu:

Tabel 5.3.58 Alat Laboratorium Pendidikan (DAK)

No.	Uraian	Jumlah
1	SMA Negeri 1 Belang	4.403.400,00
2	SMA Negeri 1 Dimembe	4.403.400,00
3	SMA Negeri 1 Kalawat	4.403.400,00
4	SMA Negeri 1 Maesaan	4.403.400,00
5	SMA Negeri 1 Manado	4.403.400,00
6	SMA Negeri 1 Moronge	4.403.400,00
7	SMA Negeri 1 Motoling Barat	4.403.400,00
8	SMA Negeri 4 Kotamobagu	4.403.400,00
	Total	35.227.200,00

(4) Alat Peraga Kejuruan pada SLB Negeri 1 Talaud sebesar Rp2.075.000,00;

(5) Personal Komputer (DAK) pada beberapa sekolah sebesar Rp15.191.565,00, yaitu:

Tabel 5.3.59 Personal Komputer (DAK)

No.	Uraian	Jumlah
1	SMA Negeri 1 Modayag	300.000,00
2	SMA Negeri 1 Pinogaluman	965.765,00
3	SMA Negeri 1 Tabukan Utara	750.000,00
4	SMA Negeri 1 Tahuna	13.075.800,00
5	SMA Negeri 3 Bitung	100.000,00
	Total	15.191.565,00

(6) Peralatan Jaringan Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp20.202.000,00;

f) Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari *Ekstrakompatible* yang tidak dapat dikapitalisasi dibawah Rp.1.000.000 TA. 2024 sebesar Rp 8.356.106.994,45, yaitu:

(1) Perangkat Daerah sebesar Rp241.190.260,25, rincian dapat dilihat pada Lampiran II.42 laporan keuangan ini;

(2) Sekolah-sekolah untuk pengelolaan dana BOSP sebesar Rp5.051.809.547,00, rincian dapat dilihat pada Lampiran II.43 laporan keuangan ini;

(3) Sekolah-sekolah untuk pengelolaan dana DAK sebesar Rp2.869.150.647,20, rincian dapat dilihat pada Lampiran II.44 laporan keuangan ini;

(4) Aset yang diperoleh dari hibah pemerintah pusat sebesar Rp160.930.000,00, yaitu:

Tabel 5.3.60 Aset Ekstrakomptabel Hibah

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	SMK Negeri 1 Tombariri	40.950.000,00
2	SMK Negeri 1 Wori	37.710.000,00
3	SMK Negeri 1 Ratahan	13.330.000,00
4	SMK Negeri 2 Manado	35.190.000,00
5	SMK Negeri 6 Manado	33.750.000,00
	Total	160.930.000,00

(5) Aset yang diperoleh dari hibah pemerintah pusat sebesar Rp33.026.540,00, yaitu:

Tabel 5.3.61 Aset Ekstrakomptabel Hibah

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	SMK Negeri 1 Airmadidi	3.105.000,00
2	SMK Negeri 1 Lolayan	15.842.000,00
3	SMK Negeri 8 Manado	5.270.000,00
4	SMK Negeri 3 Manado	8.278.440,00
5	SMK Negeri PP Kalasey	531.100,00
Total		33.026.540,00

Rekapitulasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran II.45 Laporan Keuangan ini.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
e. Gedung dan Bangunan	**3.170.803.352.148,65**	**3.042.148.621.061,87**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan nilai sebesar Rp128.654.731.086,78 yang berasal dari penambahan nilai sebesar Rp303.708.941.317,00 dan pengurangan nilai sebesar Rp175.054.210.230,22, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.62 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024

Uraian		Jumlah
Saldo Awal		3.042.148.621.061,87
Penambahan :		303.708.941.317,00
1	Realisasi Belanja Modal 2024	165.608.835.649,00
2	Hibah Pemerintah Pusat/Sumbangan Pihak Ketiga ke Pemprov	12.718.832.001,00
3	Reklasifikasi Antar KIB	2.892.468.141,00
4	Aset dari Utang	1.214.807.770,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dikerjakan dan menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	35.631.626.676,00
6	Mutasi Masuk Antar Perangkat Daerah	85.642.351.080,00
Pengurangan :		175.054.210.230,22
1	Reklasifikasi Antar KIB	16.922.701.599,20
2	Gedung dan Bangunan yang belum selesai dikerjakan dan menambah KDP	66.647.216.039,00
3	Reklasifikasi Aset yang menambah Barang dan Jasa	269.482.110,00
4	Penghapusan	1.605.975.610,00
5	Mutasi keluar Antar Perangkat Daerah	85.642.351.080,00
6	Hibah Pemprov ke Instansi Lainnya	2.775.958.700,00
7	Reklasifikasi Aset Karena Kekurangan Volume Pekerjaan	1.190.545.092,02
Saldo Akhir		3.170.803.352.148,65

1) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp303.708.941.317,00 berasal dari:

a) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 pada Perangkat Daerah sebesar Rp165.608.835.649,00;

b) Hibah pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi pada beberapa sekolah dan perangkat daerah sebesar Rp12.718.832.001,00, yaitu:

(1) Aset Tetap Gedung *Redesign* Ruang Praktik Siswa (RPS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah-sekolah sebesar Rp9.104.840.000,00, yaitu:

i. BAST Nomor 5126/D2/KU.07.00/2024 tanggal 15 Mei 2024 pada SMK Negeri 1 Wori sebesar Rp1.003.222.000,00;

ii. BAST Nomor 5118/D2/KU.07.00/2024 tanggal 15 Mei 2024 pada SMK Negeri 2 Manado sebesar Rp1.021.560.000,00;

iii. BAST Nomor 5099/D2/KU.07.00/2024 tanggal 15 mei 2024 pada SMK Negeri 1 Tombariri sebesar Rp1.096.050.000,00;

iv. BAST Nomor 5106/D2/KU.07.00/2024 tanggal 15 Mei 2024 pada SMK Negeri 6 Manado sebesar Rp1.143.130.000,00;

v. BAST Nomor 5555/D2/KU.07.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 pada SMK Negeri 6 Manado sebesar Rp1.161.230.000,00;

vi. BAST Nomor 511/D2/KU.07.00/2024 tanggal 15 Mei 2024 pada SMK Negeri 1 Ratahan sebesar Rp1.166.270.000,00;

vii. BAST Nomor 8649/D2/KU.07.00/2023 tanggal 5 September 2023 pada SMK Negeri 1 Modoinding sebesar Rp629.904.000,00;

viii. BAST Nomor 8667/D2/KU.07.00/2023 tanggal 5 September 2023 pada SMK Negeri 1 Kotamobagu sebesar Rp543.000.000,00;

ix. BAST Nomor 8316/D2/KU.07.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 pada SMK Negeri 1 Mopuya sebesar Rp740.000.000,00;

x. BAST Nomor 8802/D2/KU.07.00/2023 tanggal 8 September 2023 pada SMK Negeri 1 Tondano sebesar Rp600.474.000,00;

(2) Hibah atas Aset Tetap Bangunan Gedung untuk Pos Jaga dari Kementerian Perindustrian sesuai BAST Nomor 16/BAST-Bitung/PPI.1/12/2018 tanggal 17 Oktober 2024 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp159.983.000,00;

(3) Hibah atas Aset Tetap Bangunan Terbuka (Gapura) dari Kementerian Perindustrian sesuai BAST Nomor 16/BAST-Bitung/PPI.1/12/2018 tanggal 17 Oktober 2024 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp2.436.989.000,00;

(4) Sumbangan pihak ketiga atas pembangunan Rumah Sakit Ratumbuysang yang sudah tidak akan ditagih kembali sesuai BAST No.52/BST/RSJ/APBD/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 sehingga menambah nilai aset bangunan gedung kesehatan sebesar Rp1,00;

(5) Hibah atas Aset Tetap Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dari Tim Kerja Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penilaian Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp1.017.020.000,00, yaitu:

i. BAST Nomor 430/421/SMKN1/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 pada SMK Negeri 1 Airmadidi sebesar Rp97.400.000,00;

ii. BAST Nomor 900/361/BAST/SMKN1-LLN/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 pada SMK Negeri 1 Lolayan sebesar Rp 95.620.000,00;

iii. BAST Nomor 570.b/II.16.20/SMKN.8/BAST/2024 tanggal 27 Desember 2024 pada SMK Negeri 8 Manado sebesar Rp120.000.000,00;

iv. BAST Nomor 332/I16.17.17/SMK.I./TU/XII-2024 tanggal 20 Desember 2024 pada SMK Negeri 1 Langowan sebesar Rp120.000.000,00;

v. BAST Nomor 116.20/SMKN-3.Mdo/SP/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 pada SMK Negeri 3 Manado sebesar Rp120.000.000,00;

vi. BAST Nomor 867/425/SMKNPP/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 pada SMK Negeri PP Kalasey sebesar Rp120.000.000,00;

vii. BAST Nomor 352/I16.17/SMKN1/LL/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 pada SMK Negeri 1 Tomohon sebesar Rp344.000.000,00

c) Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan air bersih/air beku lainnya (KIB D) atas pekerjaan Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan BP2HPI Tateli yang seharusnya menambah Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor (KIB C) pada Dinas perikanan dan Kelautan sebesar Rp2.892.488.141,00;

d) Aset Tetap yang sudah selesai dikerjakan oleh pihak ketiga tetapi sampai dengan akhir tahun belum dibayarkan sebesar Rp1.214.807.770,00 pada beberapa perangkat daerah, yaitu:

(1) Pembangunan Tribun Sario Manado sesuai BAST No.09.2/BAST/tribun Sario/APBD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp927.460.320,00;

(2) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit RSJ Ratumbuysang sesuai BAST No.52/BST/RSJ/APBD/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 sebesar Rp287.347.450,00;

e) Konstruksi dalam pengerjaan atas aset yang sudah selesai dikerjakan dan menambah nilai Aset Tetap Gedung Dan Bangunan pada beberapa perangkat daerah sebesar Rp35.631.626.676,00, yaitu:

(1) Dinas Pendidikan sebesar Rp4.225.715.078,00, yaitu:

i. Pekerjaan pembangunan gedung tempat pendidikan pada SMKN 1 Suluun Tareran sebesar Rp2.133.469.809,00;

ii. Pekerjaan pembangunan gedung tempat pendidikan pada SMAN Keberbakatan Olahraga sebesar Rp2.092.245.269,00;

(2) Pekerjaan pembangunan infrastruktur penunjang RSUD ODSK pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.208.598.475,00;

(3) Pekerjaan pembangunan RSJ Ratumbuysang sebesar Rp19.260.355.443,00;

(4) Pekerjaan pembangunan tribun sario manado pada Dinas Perumahan kawasan permukiman sebesar Rp2.936.957.680,00;

f) Mutasi masuk antar perangkat daerah dan beberapa sekolah sebesar Rp85.642.351.080,00, yaitu:

(1) Penambahan atas Mutasi Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp9.568.996.831,00, yaitu:

Tabel 5.3.63 Mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor

No	Tujuan	Asal	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	199.933.331,00
2	UPTD RSUD Tipe B	Dinas Kesehatan	9.369.063.500,00
	Total		9.568.996.831,00

(2) Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dari Dinas Pendidikan ke beberapa sekolah sebesar Rp76.073.354.249,00. Daftar mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dapat dilihat pada Lampiran II.46 dalam Laporan Keuangan ini.

2) Pengurangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp175.054.210.230,22, berasal dari:

a) Reklasifikasi Antar KIB sebesar Rp16.922.701.599,20, yaitu:

(1) Reklasifikasi Aset Tetap Gedung Kantor yang seharusnya menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B) nilai sebesar Rp3.319.385.000,00, yaitu:

i. Alat Pendingin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.485.000,00;

ii. Alat Besar Darat Mesin Proses pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.839.000,000,00;

iii. Alat Laboratorium Lain pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp473.900.000,00;

(2) Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor yang seharusnya menambah nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi (KIB D) pada beberapa perangkat daerah sebesar Rp2.112.673.250,00, yaitu:

i. Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp323.700.000,00;

ii. Instalasi Air Tanah Dalam pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp294.597.250,00;

iii. Jaringan Listrik Lainnya pada UPTD RSUD Tipe C Noongan sebesar Rp1.494.376.000,00;

(3) Reklasifikasi Aset Tetap Gedung Kantor yang seharusnya menambah nilai Aset Tetap Lainnya (KIB E) pada beberapa perangkat daerah sebesar Rp578.122.000,00, yaitu:

i. Buku Umum pada UPTD RSUD Tipe B sebesar Rp398.750.000,00;

ii. Aset Tetap Dalam Renovasi pada SATPOL PP sebesar Rp179.372.000,00;

(4) Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tempat Pertemuan yang seharunsya menambah nilai Bangunan Penampung Sampah (KIB D) pada Dinas Pariwisata sebesar Rp173.750.000,00;

(5) Reklasifikasi Aset Tetap Gedung Tempat Pendidikan yang seharusnya menambah nilai Aset Peralatan dan Mesin (KIB B) pada beberapa sekolah sebesar Rp6.665.853.149,20, rincian dapat dilihat pada Lampiran II.47 laporan keuangan ini;

(6) Reklasifikasi Aset Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara yang seharusnya menambah nilai Aset Aset Tetap Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal (KIB D) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebesar Rp4.072.918.200,00;

b) Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum selesai dikerjakan (KDP) sebesar Rp66.647.216.039,00 pada beberapa perangkat daerah, yaitu
   (1) Pembangunan Gedung Kantor RSUD Tipe B sebesar Rp20.885.778.180,00;
   (2) Pembangunan Gedung Kantor RSJ Ratumbuysang sebesar Rp7.819.861.997,00;
   (3) Pembangunan Rehab Kantor Balai Laboratorium Kesehatan sebesar Rp9.616.899.494,00;
   (4) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Tahap 3 pada Dinas Pekerjaan dan Umum sebesar Rp21.234.440.581,00;
   (5) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Legiun Veteran RI Lanjutan (DAU) pada Dinas Pekerjaan dan Umum sebesar Rp707.913.152,00;
   (6) Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta Perabotnya SMKN 1 Tondano sebesar Rp3.659.971.056,00;
   (7) Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Kimia dan Fisika beserta Perabotnya SMKN 2 Tahuna sebesar Rp2.051.945.767,00;
   (8) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kolam Pelabuhan PPP Tumumpa pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp670.405.812,00;

c) Reklasifikasi aset bangunan gedung kantor yang seharusnya menambah Barang dan Jasa sebesar Rp269.462.110,00 pada beberapa perangkat daerah, yaitu:
   (1) Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp20.000.000,00;
   (2) Biro Umum sebesar Rp149.962.110,00;
   (3) Dinas Pariwisata sebesar Rp99.500.000,00;

d) Penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.605.975.610,00, pada beberapa perangkat daerah, yaitu:
   (1) Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai SK Nomor 670 Tahun 2024 sebesar Rp857.319.000,00;
   (2) Rumah Negara Golongan II pada Biro Umum sesuai SK Nomor 324 Tahun 2024 sebesar Rp644.588.110,00;
   (3) Rumah Negara Golongan II pada Dinas Kehutanan sesuai SK Nomor 324 Tahun 2024 sebesar Rp104.068.500,00;

e) Mutasi keluar antar perangkat daerah aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp85.642.351.080,00, rincian per masing-masing perangkat daerah dan sekolah telah dijelaskan pada bagian penambahan mutasi Aset Gedung dan Bangunan antar perangkat daerah;

f) Hibah Gedung Kantor dari Satuan Polisi Pamong Praja Ke Kejaksaan Tinggi Sulut sesuai SK Nomor 700 Tahun 2024 tanggal 19 Desember sebesar Rp2.775.958.700,00;

g) Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan karena kekurangan volume pekerjaan ke Aset Lainnya sebesar Rp1.190.545.092,02, yaitu:
   (1) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.070.227.892,05; dan

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp120.317.199,97.

Rekapitulasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran II.48 dalam Laporan Keuangan ini.

3) Informasi terkait Aset Tetap Gedung dan Bangunan, yaitu terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipakai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Manado di Jalan Pumorow sebesar Rp492.480.000,00 dan juga tercatat sebagai aset pada Pemerintah Kota Manado, meliputi nilai dan jenisnya. Atas aset dimaksud sudah dilakukan penyerahan kepada Pemerintah Kota Manado sesuai BAST Nomor 900/B.02.05/BKAD/229a/2021 tanggal 16 Juni 2021 namun masih dalam proses pengusulan SK Penghapusan.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**4.239.355.585.962,19**	**4.138.167.733.474,10**

Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami kenaikan nilai sebesar Rp101.187.852.488,09 yang berasal dari penambahan nilai sebesar Rp124.764.378.935,00 dan pengurangan nilai sebesar Rp23.576.526.446,91.

Tabel 5.3.64 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024

Uraian		Jumlah
Saldo Awal		4.138.167.733.474,10
Penambahan :		124.764.378.936,00
1	Realisasi Belanja Modal 2024	107.516.297.364,00
2	Penilaian Berdasarkan Hasil Inventarisasi	2.238.600.000,00
3	Reklasifikasi Antar KIB	6.359.341.450,00
4	Aset dari Hutang	269.598.798,00
5	Konstruksi dalam Pengerjaan yang Sudah Selesai Dikerjakan dan Menambah Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.380.541.323,00
Pengurangan :		23.576.526.446,91
1	Reklasifikasi Antar KIB	2.892.486.141,00
2	Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang Belum Selesai Dikerjakan dan Menambah KDP	19.408.717.943,00
3	Reklasifikasi Modal ke Barang dan Jasa	398.879.080,00
4	Reklasifikasi Aset Karena Kekurangan Volume Pekerjaan	876.441.282,91
Saldo Akhir		4.239.355.585.962,19

1) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp124.764.378.935,00 berasal dari:
   a) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 pada perangkat daerah sebesar Rp107.516.297.364,00;
   b) Penilaian berdasarkan hasil inventarisasi Jalan Khusus sesuai surat No.900.05/BKAD/0672/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang merubah nilai aset dengan sertifikat Nomor 2/Wori Atas dengan luas 27.300 m^2 degan nilai NJOP sebesar Rp82.000,00 di Desa Wori, Kec.Wori, Kab.Minahasa Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp2.238.600.000,00;

c) Reklasfikasi antar KIB pada beberapa perangkat daerah sebesar Rp6.359.341.450,00, yaitu:
   (1) Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara (KIB C) yang seharusnya menambah aset tetap Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal (KIB D) pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.480.557.000,00;
   (2) Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara (KIB C) yang seharusnya menambah aset tetap Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai (KIB D) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebesar Rp2.592.361.200,00;
   (3) Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor (KIB C) yang seharusnya menambah aset tetap Instalasi Air Tanah Dalam (KIB D) pada Dinas Pertanian Daerah sebesar Rp294.597.250,00;
   (4) Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor (KIB C) yang seharusnya menambah aset tetap Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (KIB D) pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp323.700.000,00;
   (5) Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor (KIB C) yang seharusnya menambah aset tetap Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (KIB D) pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp173.750.000,00;
   (6) Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor (KIB C) yang seharusnya menambah Aset Tetap Jaringan Listrik Lainnya (KIB D) pada UPTD RSUD Tipe C Noongan Rp1.494.376.000,00;
d) Aset dari Utang sebesar Rp269.598.798,00, yaitu:
   (1) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ahmad Yani yang sudah selesai dikerjakan tetapi belum dibayarkan pada akhir tahun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp199.668.798,00;
   (2) Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Atep Oki (DAK) yang sudah selesai dikerjakan tetapi belum dibayarkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebesar Rp69.930.000,00;
e) Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dikerjakan dan menambah nilai aset tetap pada beberapa SKPD sebesar Rp8.380.541.323,00, yaitu:
   (1) Peningkatan/Rekonstruksi Ruas Jalan Pontak-Kalait-Lobu (DAK Penugasan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp4.747.470.852,00;
   (2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.633.070.471,00, yaitu:
      i. Terminal-Dermaga PP Dudepo sebesar Rp2.034.500.000,00;
      ii. Jembatan Labuh/Standar-Dermaga PP Atep Oki sebesar Rp1.012.713.000,00;
      iii. Bangunan Air Pengaman Sungai/Pantai-Penahan Gelombang Breakwater PP Dudepo sebesar Rp585.857.471,00;

2) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp23.576.526.446,91,00 dari:

a) Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya (KIB D) yang seharusnya menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.892.488.141,00, yaitu:
   (1) Bangunan Peternakan/Perikanan (KIB C) sebesar Rp2.692.893.898,00;
   (2) Bangunan Gedung Kantor (KIB C) sebesar Rp199.594.243,00;

b) Konstruksi dalam Pengerjaan untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum selesai dikerjakan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp19.408.717.943,00, yaitu:
   (1) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi Ruas Jalan Bandara-Likupang (Alternatif) (DAK) sebesar Rp5.581.166.510,00;
   (2) Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Papakelan-Tanggari-Tonsealama Seksi 1 (DAU) sebesar Rp10.458.594.773,00;
   (3) Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Modayag-Molobog (DAU) sebesar Rp2.508.140.610,00;
   (4) Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Modayag-Molobog (DAU) sebesar Rp860.816.050,00;

c) Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya (KIB D) yang seharusnya menambah Barjas Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp398.879.080,00;

d) Reklasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi karena kekurangan volume pekerjaan ke Aset Lainnya sebesar Rp876.441.282,91, yaitu:
   (1) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp148.784.329,57; dan
   (2) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp727.656.953,34.

Rekapitulasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada Lampiran II.49 dalam Laporan Keuangan ini.

3) Informasi terkait Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi, yakni pekerjaan tahun 2008 s.d. 2015 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilaksanakan di atas aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan belum dicatat sebesar Rp26.884.019.274,00, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.65 Pekerjaan yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Kepemilikan Aset Induk	Nomor Register	Tanggal Perolehan	Uraian Aset	Harga (Rp)
1	Provinsi	1322	12/10/2010	Perencanaan Pembangunan Dan Pelebaran Jalan Tombatu-Ratahan	99.632.500
2	Provinsi	1324	14/12/2010	Peningkatan Jalan Camp-Bunag-Lowatag Dan Peningkatan Jalan Rancako-Kalait-Suhuyon	5.010.663.212
3	Provinsi	1328	23/12/2010	Perencanaan Peningkatan Jalan Camp-Bunag-Lowatag Dan Peningkatan Jalan Rancako-Kalait-Suhuyon	43.082.874
4	Provinsi	1325	15/12/2010	Perencanaan Peningkatan Dan Rehabilitasi Jalan Dana Dak Dan Pembangunan Jalan Dana Bau	1.296.991
5	Provinsi	1326	15/12/2010	Peningkatan Jalan Kalait-Suhuyon, SPT Camp Lowatag-Tambelang (Seksi II)	2.326.398.066
6	Provinsi	1346	16/12/2015	Peningkatan Dan Pelebaran Jalan Liwutung-Talaibo (Seksi 2)	9.573.747.506
7	Provinsi	1349	23/12/2015	Peningkatan Dan Pelebaran Jalan Liwutung-Talaibo (Seksi 1)	9.830.709.613
Jumlah					26.884.019.274

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
e. Aset Tetap Lainnya	**218.380.461.173,23**	**194.997.281.224,23**

Nilai Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan nilai sebesar Rp23.383.179.949,00 yang berasal dari penambahan nilai sebesar Rp44.743.288.698,00 dan pengurangan nilai sebesar Rp21.360.108.749,00

Tabel 5.3.66 Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

Uraian		Jumlah
Saldo Awal		**194.997.281.224,23**
Penambahan :		**44.743.288.698,00**
1	Realisasi Belanja Modal 2024	14.911.185.149,00
2	Hibah Pemerintah Pusat ke Pemprov	1.534.940.000,00
3	Mutasi Masuk antar Perangkat Daerah	21.256.903.349,00
4	Reklasifikasi Antar KIB	7.040.260.200,00
Pengurangan :		**21.360.108.749,00**
1	Mutasi Keluar antar Perangkat Daerah	21.256.903.349,00
2	Reklasifikasi Antar KIB	44.254.600,00
3	Reklasifikasi Modal ke Barang dan Jasa	400.000,00
4	Ekstrakomptabel	58.550.800,00
Saldo Akhir		**218.380.461.173,23**

1) Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp44.743.288.698,00 berasal dari:
   a) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 pada perangkat daerah sebesar Rp14.911.185.149,00;
   b) Hibah Aset Tetap Lainnya Buku Arsitektur, Kesenian Olahraga (KIB E) dari Kementerian Perindustrian sesuai BAST Nomor 201.1/BAST-Bitung/PPI.2/8/2018 tanggal 11 Mei 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebesar Rp1.534.940.000,00;
   c) Mutasi Aset Tetap Lainnya Buku dari Dinas Pendidikan Daerah ke Sekolah Se-Provinsi Sulut sebesar Rp21.256.903.349,00, rincian dapat dilihat pada Lampiran II.50 laporan keuangan ini;
   d) Reklasifikasi antar KIB atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin Personal Komputer (KIB B) yang seharusnya menambah Aset Tetap Aset Tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp7.040.260.200,00 pada beberapa sekolah dan perangkat daerah, yaitu:
      (1) Buku Umum sebesar Rp6.746.538.200,00, yang dirincikan pada Lampiran II.51 Laporan Keuangan ini.
      (2) Audio Visual pada SMA Negeri 1 Tomohon sebesar Rp7.845.000,00;
      (3) Bahan Kartografi pada SMA Negeri 1 Kawangkoan sebesar Rp7.000.000,00;
      (4) Alat Musik pada beberapa sekolah sebesar Rp98.205.000,00, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.67 Reklasifikasi antar KIB atas Alat Musik

No	Sekolah	Jumlah
1	SMA Negeri 2 Ratahan	1.000.000,00
2	SMA Negeri 1 Motoling	74.625.000,00
3	SMA Negeri 2 Beo	17.320.000,00
4	SMK Negeri 1 Pusomaen	2.000.000,00
5	SMK Negeri 1 Ratahan	2.000.000,00
6	SMK Negeri 4 Manado	1.260.000,00
	Total	98.205.000,00

      (5) Alat peraga kesenian pada SMA Negeri 1 Motoling sebesar Rp1.300.000,00;
      (6) Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp179.372.000,00;
2) Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp21.360.108.749,00 berasal dari:
   a) Mutasi keluar antar perangkat daerah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp21.256.903.349,00, rincian per masing-masing perangkat daerah dan

sekolah telah dijelaskan pada bagian penambahan mutasi Aset Tetap Lainnya antar perangkat daerah;

b) Reklasifikasi antar KIB kesalahan pencatatan Aset Tetap Lainnya Buku Umum (KIB E) yang seharusnya menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B) pada beberapa sekolah sebesar Rp44.254.600,00, yang dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.68 Reklasifikasi antar KIB atas Peralatan dan Mesin

No	Sekolah	Jumlah
1	SMA Negeri 1 Bintauna	8.104.600,00
2	SMA Negeri 1 Tenga	11.250.000,00
3	SMA Negeri 1 Tenga	10.000.000,00
4	SMA Negeri 1 Tenga	3.000.000,00
5	SMA Negeri 1 Tuluyan	11.900.000,00
Total		44.254.600,00

c) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya Buku Umum yang seharusnya menambah Barang dan Jasa pada SMK Negeri 5 Talaud sebesar Rp400.000,00;

d) Aset Tetap Lainnya yang berasal dari *Ekstrakompatible* yang tidak dapat dikapitalisasi dibawah Rp1.000.000,00 TA 2024 sebesar Rp58.550.800,00, yang dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.69 *Ekstrakompatible* Buku Umum (BOSP)

No	Sekolah	Jumlah
1	SMA Negeri 1 Tabukan Tengah	300.000,00
2	SMA Negeri 1 Tenga	49.000.000,00
3	SMK Negeri 1 Silian Raya	800,00
5	SMA Negeri 1 Tuluyan	9.250.000,00
Total		58.550.800,00

Rekapitulasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Lampiran II.52 dalam Laporan Keuangan ini.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
f.	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	**166.767.416.301,27**	**120.740.798.657,90**

Posisi Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp166.767.416.301,27, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.70 Penambahan dan Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Konstruksi dalam Pengerjaan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan:				
	Rehabilitasi Gedung/Eks SMAN 1 Airmadidi	199.815.000,00	-	-	199.815.000,00
	Pembangunan Pagar Unit Sekolah Baru SMA di Kota Manado	181.585.000,00	-	-	181.585.000,00
	Pembangunan Sarana Olahraga SMA N 1 Marosepe Talaud	10.234.827.830,00	-	-	10.234.827.830,00
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	15.130.178.197,00	-	-	15.130.178.197,00
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	2.137.809.350,00	-	-	2.137.809.350,00
	DAK Bangunan Tempat Pendidikan	9.017.450.031,00	-	-	9.017.450.031,00
	Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.225.715.079,00	6.145.099.449,44	4.225.715.079,00	6.145.099.450,44
	Total	41.927.387.337,00	6.145.099.449,44	4.225.715.079,00	43.845.769.708,44
2	Dinas Kesehatan				
	Pembangunan RS ODSK	9.206.598.475,00	-	9.206.598.475,00	-
	Total	9.206.598.475,00	-	9.206.598.475,00	-
3	RS Type B				
	Pembangunan RS Type B	-	29.950.636.715,00	-	29.950.636.715,00
	Total	-	29.950.636.715,00	-	29.950.636.715,00
4	Rumah Sakit Mata Masyarakat :				

No	Konstruksi dalam Pengerjaan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Perencanaan Untuk Gedung B Dan Landscape	869.865.000,00	-	-	869.865.000,00
	Total	869.865.000,00	-	-	869.865.000,00
5	RSU Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang :				
	Gedung Rumah Sakit/Bangunan Kesehatan	19.309.856.443,00	9.041.966.881,00	19.260.335.443,00	9.091.066.881,00
	Total	19.309.856.443,00	9.041.966.881,00	19.260.335.443,00	9.091.066.881,00
6	UPTD Laboratorium Kesehatan				
	Rehab Gedung Kantor	-	9.930.686.675,50	-	9.930.686.675,50
	Total	-	9.930.686.675,50	-	9.930.686.675,50
7	Dinas Pekerjaan Umum :				
	Jalan Propinsi	-	-	-	-
	Pengerjaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.091.464.354,90	-	-	1.091.464.354,90
	Pembangunan Jalan	236.352.544,00	-	-	236.352.544,00
	Pembangunan Jalan Propinsi	4.747.470.352,00	-	4.747.470.352,00	-
	Jalan Provinsi	-	5.874.995.667,50	-	5.874.995.667,50
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	-	961.694.947,90	-	961.694.947,90
	Tempat Kesehatan	-	22.235.698.193,74	-	22.235.698.193,74
	Jalan Provinsi	-	10.811.218.757,23	-	10.811.218.757,23
	Rehab Gedung	-	777.225.808,22	-	777.225.808,22
	Jalan Provinsi	-	2.548.614.762,15	-	2.548.614.762,15
	Total	6.127.287.750,00	43.207.696.136,64	4.747.470.352,00	44.587.403.035,55
8	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah :				
	Pembangunan Tribun Sario	2.936.957.680,00	-	2.936.957.680,00	-
	Total	2.936.957.680,00	-	2.936.957.680,00	-
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah :				
	Pengerjaan Jembatan Desa	86.500.000,00	-	-	86.500.000,00
	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	99.010.000,00	-	-	99.010.000,00
	Total	185.510.000,00	-	-	185.510.000,00
10	Dinas Pemuda dan Olahraga :				
	Gedung Gedung Tempat Olah Raga	514.323.894,00		-	514.323.894,00
	Total	514.323.894,00	-	-	514.323.894,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	Penahan Gelombang Breakwater PP Dadage	3.633.079.471,00		3.633.079.471,00	-
	Kolam Pelabuhan PPP Tamumpa	-	723.212.784,70	-	723.212.784,70
	Total	3.633.079.471,00	723.212.784,70	3.633.079.471,00	723.212.784,70
12	Dinas Pariwisata :				
	Gedung Kantor	19.924.070.549,00	-	-	19.924.070.549,00
	Total	19.924.070.549,00	-	-	19.924.070.549,00
13	Dinas Perkebunan :				
	Gedung Laboratorium	28.800.000,00	-	-	28.800.000,00
	Total	28.800.000,00	-	-	28.800.000,00
14	Dinas Kehutanan :				
	Gedung Kantor	324.455.001,00		-	324.455.001,00
	Total	324.455.001,00	-	-	324.455.001,00
15	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Manado				
	Bangunan Gedung Kantor	417.506.257,00	-	-	417.506.257,00
	Total	417.506.257,00	-	-	417.506.257,00
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Convention Hall/Auditorium)	9.277.955.000,00	-	-	9.277.955.000,00
	Total	9.277.955.000,00	-	-	9.277.955.000,00
17	Sekretariat DPRD				-
	Pembangunan Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Sulawesi Utara	170.027.000,00	-		170.027.000,00
	Bangunan Gedung Kantor/Pembangunan Pagar Talud	5.876.130.000,00	-	-	5.876.130.000,00
	Total	6.046.157.000,00	-	-	6.046.157.000,00
	Total	120.740.798.657,50	90.038.785.642,37	44.012.167.999,00	166.767.416.301,27

Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan. Perubahan (mutasi) saldo Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp46.026.617.643,37 terjadi karena saldo awal tahun 2023 untuk nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp120.740.798.657,90 pada tahun anggaran 2024 mengalami penambahan sebesar Rp90.038.785.642,37 dan pengurangan sebesar Rp44.012.167.999,00 menjadi Rp166.767.416.301,27 dengan rincian sebagai berikut.

1) Penambahan nilai aset Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp90.038.785.642,37, rincian dapat dilihat pada rincian dapat dilihat pada Lampiran II.53 laporan keuangan ini; dan
2) Pengurangan nilai aset Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp44.012.167.999,00, rincian dapat dilihat pada rincian dapat dilihat pada Lampiran II.54 laporan keuangan ini.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
g.	**Akumulasi Penyusutan**	**(4.982.291.156.188,82)**	**(4.519.626.218.443,85)**

Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Nilai dari akumulasi penyusutan diperoleh dari Aplikasi e-BMD.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Aset Tetap disusutkan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.3.71 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	Saldo 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2024
		Koreksi Kurang	Koreksi Tambah			
Peralatan dan Mesin	(1.468.444.196.224,23)	88.940.040,00	13.550.047,92	196.391.287.691,48	6.025.798.834,75	(1.859.124.310.668,85)
Gedung dan Bangunan	(476.055.308.248,24)	-	-	59.549.377.383,51	1.029.583.714,69	(536.025.099.807,05)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.569.162.470.452,21)	-	-	213.209.322.245,07	-	(2.782.371.792.737,28)
Aset Tetap Lainnya	(3.934.345.479,17)	210.680.264,37	-	448.379.260,80	-	(4.156.944.495,60)
Total	(4.519.626.218.443,85)	309.625.324,37	13.550.047,92	469.596.366.560,86	6.025.382.549,44	(4.982.291.156.188,82)

Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp(4.982.291.156.188,82) yang berasal dari:

1) Penambahan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 terdiri dari:
   a) Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada beberapa perangkat daerah sebesar Rp13.550.047,92 yang disebabkan oleh lebih catat Akumulasi Penyusutan pada tahun sebelumnya, yaitu:
      i. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B sebesar Rp8.750.047,92;
      ii. UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah I sebesar Rp4.800.000,00;
   b) Beban Penyusutan pada Perangkat Daerah dan Sekolah sebesar Rp469.596.366.560,86;
2) Pengurangan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 terdiri dari:
   a. Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya pada beberapa perangkat daerah dan sekolah sebesar Rp309.625.324,37 yang disebabkan oleh kurang catat Akumulasi Penyusutan pada tahun sebelumnya, yaitu:
      i. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Kalasey sebesar Rp6.280.940,93;
      ii. SMA Negeri 1 Lagowan sebesar Rp177.992.625,06;
      iii. SMA Negeri 2 Tompaso sebesar Rp138.888,89;
      iv. SMA Negeri 1 Tompaso sebesar Rp2.906.916,67;

v. SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Sulawesi Utara sebesar Rp518.600,00;
vi. SMA Negeri 1 Kawangkoan sebesar Rp6.941.111,10;
vii. SMA Negeri 1 Sonder sebesar Rp78.555,56;
viii. SMA Negeri 1 Tombariri sebesar Rp5.594.290,59;
ix. SMA Negeri 1 Pineleng sebesar Rp757.244,45;
x. SMA Negeri 2 Pineleng sebesar Rp5.193.333,33;
xi. SMA Negeri 1 Remboken sebesar Rp1.111.111,11;
xii. SMA Negeri 1 Kakas sebesar Rp1.666.666,68;
xiii. SMA Negeri 1 Eris sebesar Rp1.500.000,00;
xiv. SMK Negeri 1 Tombatu sebesar Rp98.945.040,00;

b. Penghapusan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada beberapa perangkat daerah dan sekolah sebesar Rp5.625.769.824,75, yaitu:
   i. Peralatan dan Mesin sesuai dengan SK Nomor 550 Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Daerah sebesar Rp1.525.912.500,00;
   ii. Peralatan dan mesin sesuai dengan SK 708 Tahun 2024 pada UPTD Rumah Sakit Mata sebesar Rp324.983.333,00;
   iii. Peralatan dan mesin sesuai dengan SK Nomor 703 Tahun 2024 pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan sebesar Rp1.142.565.200,00;
   iv. Peralatan dan Mesin sesuai dengan SK Nomor 728 Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah sebesar Rp105.126.500,00;
   v. Peralatan dan Mesin sesuai dengan SK Nomor 687 Tahun 2024 pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan sebesar Rp164.222.000,00;
   vi. Peralatan dan Mesin sesuai dengan SK Nomor 702 Tahun 2024 pada Biro Umum sebesar Rp360.000.000,00;
   vii. Peralatan dan Mesin sesuai dengan SK Nomor 728 Tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.299.040.131,00;
   viii. Peralatan dan Mesin sesuai dengan SK Nomor 585 Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp703.920.160,75;

c. Penghapusan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada beberapa perangkat daerah sebesar Rp1.009.583.714,69, yaitu:
   i. Gedung dan Bangunan sesuai dengan SK Nomor 700 Tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp539.832.052,17;
   ii. Gedung dan Bangunan sesuai dengan SK Nomor 324 Tahun 2024 pada Dinas Kehutanan Daerah sebesar Rp21.689.462,00;
   iii. Gedung dan Bangunan sesuai dengan SK Nomor 324 Tahun 2024 pada Biro Umum senilai Rp301.235.475,52; dan
   iv. Gedung dan Bangunan sesuai dengan SK Nomor 670 Tahun 2024 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebesar Rp146.826.725,00;

Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran II.55.

5.3.1.4. DANA CADANGAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak mempunyai Dana Cadangan per 31 Desember 2024 dan 2023.

5.3.1.5. ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.473.513.796.510,05 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.72 Rincian Mutasi Tambah Kurang Aset Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Tagihan Jangka Panjang	17.791.086.470,91	3.492.618.268,41	49.481.711,53	21.234.223.027,79
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.040.501.668.000,00	-	87.095.553.000,00	953.406.115.000,00
3	Aset Tidak Berwujud	30.138.405.281,00	1.057.808.400,00	1.361.576.305,00	29.834.637.376,00
4	Aset Lain-Lain	495.243.621.584,91	46.084.600,00	998.266.800,00	494.291.439.384,91
5	Amortisasi ATB	(25.406.851.788,66)	3.292.433.601,33	322.829.411,34	(28.376.456.178,65)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(28.481.881.845,00)	-	28.481.881.845,00	-
7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	30.792.335.000,00	3.125.838.000,00	30.792.335.000,00	3.125.838.000,00
	Total	1.560.576.382.703,16	11.014.782.869,74	149.101.924.072,87	1.473.513.796.510,05

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a.	**Tagihan Jangka Panjang**	**21.234.223.027,79**	**17.791.086.470,91**

Posisi penambahan dan pengurangan tahun 2024 atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp17.741.604.759,38, yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.73 Rincian Tagihan Jangka Panjang

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	TGR Anggota DPRD Provinsi	5.300.171.949,00	-	-	5.300.171.949,00
2	TGR PNS dan Non PNS pada KPU dan Bawaslu Prov Sulut	224.916.773,00	-	-	224.916.773,00
3	Piutang Kelebihan Belanja SKTJM	6.927.324.336,56	-	49.481.711,53	6.877.842.625,03
4	TGR dari Inspektorat dan BPK	5.338.673.412,35	-	-	5.338.673.412,35
5	Kekurangan Volume Pekerjaan	-	3.492.618.268,41	-	3.492.618.268,41
	Total	17.791.086.470,91	3.492.618.268,41	49.481.711,53	21.234.223.027,79

1) Tuntutan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah sebesar Rp5.300.171.949,00 sesuai Surat Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 093/MP-TPTGR/III/2016 tanggal 25 Maret 2016 tentang temuan kerugian daerah/negara hasil pemeriksaan BPK RI selang tahun 2004 s.d. 2012 kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Lampiran II.56 dalam laporan keuangan ini.

2) TGR pada Perusahaan, PNS dan Non PNS sebesar Rp224.916.773,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.74 Daftar Setoran PNS dan Non PNS pada KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan TGR Perusahaan

No	Nama	Jumlah Piutang (Rp)	Setor s.d. 2023	Setor 2024	Sisa
1	CV Degits	89.977.851,00	-	-	89.977.851,00
2	CV Jaya Muda Cipta	72.250.000,00	-	-	72.250.000,00
3	Daud Rumondor	9.863.522,00	-	-	9.863.522,00
4	A. R. Sinaulan	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
5	Netty Pagalin	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
6	D.V. Mantiri	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
7	Sherly Kasenda	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
8	Sutje Kumangkil	645.000,00	-	-	645.000,00
9	Olvis Mamengko	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00

No	Nama	Jumlah Piutang (Rp)	Setor s.d. 2023	Setor 2024	Sisa
10	Vonny Warangkiran	440.000,00	-	-	440.000,00
11	Abdullah Ponamon	2.130.000,00	-	-	2.130.000,00
12	Dicky Paseki	201.000,00	-	-	201.000,00
13	Fentje Bawengan	198.000,00	-	-	198.000,00
14	Frangky Turang	1.358.300,00	-	-	1.358.300,00
15	Iksanudin Sikata	123.800,00	-	-	123.800,00
16	Jefry Mamengko	198.000,00	-	-	198.000,00
17	Marwah Johanis	2.870.000,00	-	-	2.870.000,00
18	Marthin Keparang	9.536.200,00	-	-	9.536.200,00
19	Melinda Tungka	10.575.100,00	-	-	10.575.100,00
	Jumlah	224.916.773,00	-	-	224.916.773,00

3) Piutang atas kelebihan belanja sebesar Rp6.877.842.625,03 merupakan piutang yang belum disetor oleh perangkat daerah ke rekening kas daerah sampai dengan tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.75 Daftar Piutang atas Kelebihan Belanja

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dinas Pekerjaan Umum	5.077.555.176,56	-	-	5.077.555.176,56
2	Sekretariat Daerah	1.304.169.060,00	-	43.481.711,53	1.260.687.348,47
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	392.836.500,00	-	-	392.836.500,00
4	Badan Pengelola Perbatasan	100.463.600,00	-	6.000.000	94.463.600,00
5	BAPPEDA	52.300.000,00	-	-	52.300.000,00
JUMLAH		6.927.324.336,56	-	49.481.711,53	6.877.842.625,03

Rincian Piutang atas kelebihan belanja dapat dilihat pada Lampiran II.57 laporan keuangan ini.

4) TGR dari Inspektorat dan BPK yang belum dicatat sebesar Rp5.338.673.412,35 pada beberapa Perangkat Daerah. Rincian dapat dilihat pada Lampiran II.58 laporan keuangan ini.

5) Mereklasifikasi Aset Tetap KIB B, C dan Persediaan Barang untuk diserahkan kepada masyarakat ke Aset Lainnya atas temuan kurang volume pekerjaan sebesar Rp3.492.618.268,41, yaitu:
   a. Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.190.545.092,02, pada beberapa perangkat daerah, yaitu:
      (1) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.070.227.892,05;
      (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp120.317.199,97;
   b. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp876.441.282,91, pada beberapa perangkat daerah, yaitu:
      (1) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp148.784.329,57;
      (2) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp727.656.953,34; dan
   c. Persediaan Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk pekerjaan Christian Center pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.425.631.893,48.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**953.406.115.000,00**	**1.040.501.668.000,00**

Posisi saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp953.406.115.000,00. Saldo mutasi berasal saldo awal sebesar Rp1.040.501.668.000,00 dan pengurangan sebesar Rp87.095.553.000,00 dari tanah dan bangunan Hotel Lume'os

pada Badan Penghubung yang dipindahkan ke properti investasi. Rincian mutasi tambah kurang Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan daftar kerja sama pemanfaatan BMD dapat dilihat pada masing-masing tabel berikut.

Tabel 5.3.76 Rincian Mutasi Tambah Kurang Kemitraan Pihak Ketiga

Uraian		Jumlah
Saldo Awal		1.040.501.668.000,00
Penambahan :		0,00
Pengurangan :		87.095.553.000,00
Badan Penghubung untuk Hotel Luma'os		87.095.553.000,00
1	Tanah	9.063.000.000,00
2	Bangunan Hotel	78.032.553.000,00
Saldo Akhir		953.406.115.000,00

Tabel 5.3.77 Daftar Kerja Sama Pemanfaatan BMD

No	SKPD	Uraian	Surat Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Aset Isian	Nilai Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tanah Kawasan Ekonomi Khusus KEK	SP NOMOR : 032/Indag-Sulut/366/VII/2021 dan 069/MSH-PKS/VII/2021	30 (tiga puluh) tahun, 2021 s/d 2051	953.406.115.000,00	
	Jumlah				953.406.115.000,00	

Sehubungan dengan Kemitraan Pihak Ketiga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, perlu diungkapkan yaitu, sesuai dengan Akta Perjanjian Kerja Sama No. 032/Indag-Sulut/industri/366/VII/2021 dan No. 069/MSH-PKS/VII/2021 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 77,79 Ha di lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Bitung tanggal 26 Juli 2021 dengan PT Membangun Sulut Hebat (MSH), yang akan digunakan untuk kegiatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dengan maksud dan tujuan agar meningkatkan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta menghidupkan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung sebagai kawasan industri di Sulawesi Utara.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
c.	**Aset Tidak Berwujud**	**29.834.637.376,00**	**30.138.405.281,00**

Posisi saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.834.637.376,00. Rincian mutasi tambah/kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.78 Rincian Mutasi Tambah Kurang Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	*Software*	16.815.027.981,00	1.057.808.400,00	1.361.576.305,00	16.511.260.076,00
2	Kajian	13.323.377.300,00	-	-	13.323.377.300,00
	Total	30.138.405.281,00	1.057.808.400,00	1.361.576.305,00	29.834.637.376,00

Posisi saldo Aset Tidak Berwujud berasal dari saldo awal sebesar Rp30.138.405.281,00, penambahan sebesar Rp1.057.808.400,00, dan pengurangan sebesar Rp1.361.576.305,00.

1. Rincian penambahan Aset Tidak Berwujud berasal dari:
   a. Balai Teknologi Informasi Komunikasi dan Media Pembelajaran sebesar Rp174.900.000,00;
   b. Dinas Kesehatan sebesar Rp244.311.000,00;

c. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah sebesar Rp595.670.400,00;

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp25.500.000,00;

e. Sekretariat DPRD sebesar Rp17.427.000,00;

2. Rincian pengurangan aset tidak berwujud berasal dari:

a. Reklasifikasi penganggaran Belanja Aset Tidak Berwujud yang seharusnya menambah Beban Sewa Aset Tidak Berwujud pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah sebesar Rp595.670.400,00; dan

b. Koreksi pencatatan atas Aset Tidak Berwujud tahun 2020 s.d. 2023 yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aset Tidak Berwujud tersebut merupakan sewa dan bukan aset milik Pemprov pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah sebesar Rp765.905.905,00.

Rincian Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran II.59 laporan keuangan ini.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
d.	**Aset Lain-lain**	**494.291.439.284,91**	**495.243.621.584,91**

Posisi saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp494.291.439.284,91 yang terdiri dari Aset lain-Lain sebesar Rp512.916.004.380,91 dan Akumulasi Penyusutan barang rusak berat sebesar Rp(18.624.565.096,00). Posisi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.3.79 Mutasi Masuk Keluar Aset Lain-Lain

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Aset bukan kewenangan Provinsi	348.435.626.960,00	-	-	348.435.626.960,00
2	Aset belum jelas sumber dokumen	33.199.980.777,00	-	-	33.199.980.777,00
3	Piutang Pajak tidak ada STPD	53.094.103.687,00	46.084.500,00	262.167.800,00	52.878.020.387,00
4	Gedung dan Bangunan tidak ada nilai kapitalisasi	1.250.936.700,00	-	117.129.000,00	1.133.807.700,00
5	Aset Tetap hilang	283.902.500,00	-	-	283.902.500,00
6	Aset Tetap yang dihapuskan tapi masih dicatatat pada neraca	68.500.000,00	-	-	68.500.000,00
7	Aset rusak berat	70.396.108.212,91	-	695.924.000,00	69.699.184.212,91
8	Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya	6.110.232.844,00	-	-	6.110.232.844,00
9	Sapi	944.147.700,00	-	-	944.147.700,00
10	Tanah SKPD	162.601.300,00	-	-	162.601.300,00
	Jumlah Aset Lain-Lain	**513.945.140.680,91**	**46.084.500,00**	**1.075.220.800,00**	**512.916.004.380,91**
Akumulasi Penyusutan Rusak Berat		(18.701.519.096,00)	-	(76.954.000,00)	(18.624.565.096,00)
	Total Aset Lain-Lain	**495.243.621.584,91**	**46.084.500,00**	**998.266.800,00**	**494.291.439.284,91**

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
d.1 Aset Lain-lain	**512.916.004.380,91**	**513.945.140.680,91**

Saldo awal Aset Lain-Lain Tahun 2023 sebesar Rp513.945.140.680,91 terdiri dari:

1) Aset Lain-Lain sebesar Rp348.435.626.960,00 yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang seharusnya merupakan kewenangan Kabupaten/kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian dapat dilihat pada Lampiran II.60 laporan keuangan ini;
2) Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang belum diketahui dokumen sumber dan kejelasan kapitalisasinya ke Aset Lainnya sambil menunggu kejelasan dokumen pendukungnya sebesar Rp33.199.980.777,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3) Piutang Pajak Kendaraan bermotor yang tidak didukung STPD sebesar Rp52.878.020.387,00, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.80 Piutang Aset Lainnya (Piutang PKB tidak Didukung STPD)

No.	UPTD	Jumlah Piutang	Penambahan	Pengurangan	Sisa
1	Manado	30.683.716.400,00	36.891.900,00	140.507.500,00	30.580.100.800,00
2	Tomohon	2.104.348.100,00	403.500,00	19.342.600,00	2.085.409.100,00
3	Tondano	3.874.806.450,00	1.814.100,00	18.582.900,00	3.858.037.650,00
4	Minahasa Utara	2.611.851.600,00	296.400,00	4.516.400,00	2.607.631.600,00
5	Bitung	3.646.577.000,00	-	-	3.646.577.000,00
6	Minahasa Selatan	-	-	-	-
7	Minahasa Tenggara	66.564.400,00	15.500,00	229.000,00	66.350.900,00
8	Bolaang Mongondow	2.220.324.200,00	133.000,00	16.923.800,00	2.203.533.400,00
9	Kotamobagu	7.788.836.437,00	6.530.100,00	62.065.700,00	7.733.299.837,00
10	Tahuna	117.080.100,00	-	-	117.080.100,00
Jumlah		53.094.103.687,00	46.094.500,00	282.167.800,00	52.878.020.387,00

Piutang Aset Lainnya ini merupakan Piutang Pajak yang tidak memiliki surat ketetapan pajak daerah;

4) Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak dapat dikapitalisasi sebesar Rp1.133.807.700,00, rincian dapat dilihat pada Lampiran II.61 laporan keuangan ini;
5) Aset Tetap yang hilang sebesar Rp283.902.500,00 dan belum ditetapkan ganti kerugian daerah, dimana terdapat perbedaan dengan nilai perolehan pada KIB Aset Lain-Lain sebesar Rp4.617.500,00 yang disebabkan oleh adanya setoran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp3.687.500,00 pada tanggal 10 September 2015, Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp630.000,00 pada tanggal 4 Februari, 17 Juni dan 1 September 2016, dan Dinas Pariwisata sebesar Rp300.000,00 tanggal 9 Oktober 2015. Rincian dapat dilihat pada Lampiran II.62;
6) Aset Tetap yang dihapuskan namun masih dicatat pada neraca perangkat daerah sebesar Rp68.500.000,00, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.81 Aset Tetap yang Dihapuskan tapi Masih Dicatatat pada Neraca

No	SKPD	Jenis / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor Plat	Jumlah	Keterangan
1	Sekretariat DPRD	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Kijang	1994	DB 36 AM	45.000.000,00	

No	SKPD	Jenis / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor Plat	Jumlah	Keterangan
2	Sekretariat DPRD	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Suzuki / Mazda	2002	DB 1390 ZZ	23.500.000,00	Penghapusan / Penghargaan
Jumlah						68.500.000,00	

7) Aset Lain-lain yang rusak berat sebesar Rp 70.395.108.212,91 pada beberapa perangkat daerah, rincian dapat dilihat pada Lampiran II.63 laporan keuangan ini.

8) Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaanya ke Aset Lainnya sebesar Rp6.110.232.844,00, rincian dapat dilihat pada Lampiran II.64 laporan keuangan ini.

9) Investasi Non Permanen yaitu sapi sebesar Rp944.147.700,00 merupakan sisa ternak sapi pada Dinas Pertanian dan Peternakan pada tahun anggaran 2011 yang disalurkan kepada peternak dengan ketentuan akan dipelihara oleh peternak selama dua tahun dan selanjutnya pihak Dinas Pertanian dan Peternakan akan mengevalusi dan meneruskan bibit ternak tersebut kepada peternak lainnya dan kemudian dipindahkan ke aset lainnya karena bukan dana bergulir, sapi yang diserahkan kepada kelompok petani tidak diharapkan untuk kembali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, karena sapi tersebut hanya dipindahkan dari kelompok tani yang satu kepada kelompok tani yang lain, dan menurut data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Perkembangan sapi sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp60.000.000,00. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan memproses penghapusan atas ternak sapi yang tercatat pada Aset Lainnya dengan mekanisme penghapusan aset sesuai surat dari Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut Nomor 000.2.4/392.25/SEKR-BID.PETERNAKAN tanggal 27 Maret 2025. Data jumlah ternak sapi APBD TA 2011 dapat dilihat pada Lampiran II.65 dalam laporan keuangan ini.

10) Aset tetap Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja yang seharusnya menambah Aset Lain-lain sebesar Rp162.601.300,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah.

Penambahan dan pengurangan aset lain-lain di jelaskan sebagai berikut.

1) Penambahan aset lain-lain Piutang atas aset lainnya sebesar Rp46.084.500,00, yaitu:

Tabel 5.3.82 Rincian Penambahan Piutang Aset Lainnya

No	SKPD	Jumlah Piutang
1	Manado	36.691.900,00
2	Tomohon	403.500,00
3	Minahasa	1.814.100,00
4	Minahasa Utara	296.400,00
5	Minahasa Tenggara	15.500,00
6	Bolaang Mongondow	133.000,00
7	Kotamobagu	6.530.100,00
Total		46.084.500,00

2) Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp1.075.220.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

a) Piutang Pajak tidak ada STPD sebesar Rp262.167.800,00, yaitu:

Tabel 5.3.83 Rincian Pengurangan Piutang Aset Lainnya

No	SKPD	Jumlah Piutang
1	Manado	140.507.500,00

No	SKPD	Jumlah Piutang
2	Tomohon	19.342.500,00
3	Minahasa	18.562.900,00
4	Minahasa Utara	4.516.400,00
5	Minahasa Tenggara	229.000,00
6	Bolaang Mongondow	16.923.800,00
7	Kotamobagu	62.065.700,00
Total		262.167.300,00

b) Koreksi atas double pencatatan Aset Lain-Lain (aset tahun 2011 dan 2014) yang juga sudah dicatat di KIB C (bangunan gedung olahraga) pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp117.129.000,00

c) Aset rusak berat yang dihapuskan sebesar Rp695.924.000,00, yaitu:

Tabel 5.3.84 Aset Rusak Berat yang Dihapuskan

No	Nomor SK Penghapusan	Tanggal SK Penghapusan	SKPD	Jumlah
1	585	16 Oktober 2024	Badan Kepegawaian Daerah	37.504.000,00
2	687	11 Desember 2024	Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan	39.450.000,00
3	703	20 Desember 2024	RSUD Noongan	3.125.000,00
4	728	31 Desember 2024	Rumah Sakit Mata	11.420.000,00
5	728	31 Desember 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	154.425.000,00
6	550	2 Oktober 2024	Dinas Pendidikan	450.000.000,00
Total				695.924.000,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
d.2	**Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat**	**(18.624.565.096,00)**	**(18.701.519.096,00)**

Posisi Akumulasi Penyusutan Rusak Berat sebesar Rp(18.624.565.096,00), berasal dari saldo awal sebesar Rp(18.701.519.096,00) dan pengurangan sebesar Rp(76.954.000,00), yaitu pada Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan sebesar Rp39.450.000,00 dan Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp37.504.000,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.85 Rincian Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	(529.448.158,00)
2	Balai Pelatihan Kesehatan	(484.093.354,00)
3	UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang	(131.493.520,00)
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	(88.636.748,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(60.925.000,00)
6	Dinas Sosial	(422.952.591,00)
7	UPTD Balai Penyantunan Sosial Anak dan Remaja Terlantar "MAKA'ARUYEN"	(638.000,00)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(39.489.051,00)
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah	(1.267.916,00)
10	UPTD Balai Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(36.854.761,00)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(35.649.168,00)
12	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan	(788.974,00)
13	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	(393.348.340,00)
14	Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	(113.748.000,00)
15	Biro Organisasi	(30.401.563,00)
16	Biro Perlengkapan	(60.438.359,00)
17	Biro Umum dan Protokol	(14.263.755.280,00)
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(280.590.442,00)

No	SKPD	Jumlah
19	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	(10.163.333,00)
20	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Minahasa	(38.758.175,00)
21	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bitung	(47.036.275,00)
22	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sangihe, Talaud dan Sitaro	(40.915.132,00)
23	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Minahasa Utara	(36.310.935,00)
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(374.784.340,00)
25	Badan Kepegawaian Daerah	(220.263.012,00)
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan	(45.837.604,00)
27	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(35.502.085,00)
28	Dinas Pariwisata	(800.175.000,00)
	Total	(18.624.565.096,00)

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
e.	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**	**(28.378.456.178,65)**	**(25.408.851.788,66)**

Posisi Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp(28.378.456.178,65), yaitu :

Tabel 5.3.86 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	SKPD	Jumlah
1	SMAN 3 Manado	(11.871.667,80)
2	SMKN 1 Manado	(15.328.332,20)
3	Balai Teknologi Informasi Komunikasi dan Media Pembelajaran	(113.583.333,33)
4	Dinas Kesehatan	(901.772.583,33)
5	Rumah Sakit Mata	(473.560.000,00)
6	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	(222.628.000,00)
7	UPTD RS Tipe B	(6.843.793.000,00)
8	UPTD RSJ Prof. DR.V.L.Ratumbuysang	(315.062.000,00)
9	UPTD RS Tipe C noongan	(1.999.800.000,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(12.600.446.300,00)
11	UPTD Balai Teknik	(50.050.000,00)
12	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat	(46.000.000,00)
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(29.975.000,00)
14	Dinas Sosial	(54.960.000,00)
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(79.554.200,00)
16	UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Daerah	(45.576.666,67)
17	Dinas Lingkungan Hidup	(58.232.546,00)
18	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah	(98.300.000,00)
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah	(1.925.383.831,00)
20	Dinas Pertanian dan Peternakan	(118.800.000,00)
21	Dinas Kehutanan Daerah	(49.654.000,00)
22	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	(32.000.000,00)
23	UPTD Balai Pengujian dan Peralatan Pertambangan	(35.000.000,00)
24	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(57.580.974,99)
25	Biro Hukum	(41.365.855,00)
26	Inspektorat	(79.260.000,00)
27	Sekretariat DPRD	(597.762.342,34)
28	Badan Pendapatan Daerah	(478.970.406,00)
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(566.428.917,99)
30	Badan Kepegawaian Daerah	(408.696.500,00)
31	Badan Kesatuan Bangsa Politik	(25.069.722,00)
	TOTAL	(28.378.456.178,65)

Penambahan dan pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dijelaskan sebagai berikut.

1) Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.657.108.675,33;

2) Pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp687.504.285,34 yang disebabkan oleh:

a) Reklasifikasi penganggaran Belanja Aset Tidak Berwujud yang seharusnya menambah Beban Sewa Aset Tidak Berwujud pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah sebesar Rp364.674.874,00; dan

b) Koreksi pencatatan atas Aset Tidak Berwujud tahun 2020 s.d. 2023 yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aset Tidak Berwujud tersebut merupakan sewa dan bukan aset milik Pemprov pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah sebesar Rp322.821.411,34.

Rincian akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran II.66

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
f.	**Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**	**0,00**	**(28.481.881.845,00)**

Saldo akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp0,00 pada Badan Penghubung Daerah yang berpindah ke Properti Investasi sebesar Rp(28.481.881.845,00).

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
g.	**Dana *Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)***	**3.125.838.000,00**	**30.792.335.000,00**

Per 31 Desember 2024 saldo Dana *Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)* sebesar Rp3.125.838.000,00 merupakan pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil melalui rekening TDF-TKD sesuai dengan surat edaran Nomor S-250/KPN.3001/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Penyampaian Informasi Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah mendapatkan Rekomendasi Kurang Bayar DBH (ND-1097/PK.2/2024 Tgl 30 Desember 2024) sebesar Rp.3.125.838.000.

5.3.2. KEWAJIBAN

5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 sebesar Rp565.056.644.153,61 terdiri dari:

Tabel 5.3.87 Rekap Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	20.869.479,00	245.505.208.676,05	244.740.623.850,05	285.452.605,00
2	Utang Belanja	31.754.430.282,39	22.365.085.016,00	31.754.430.282,39	22.365.085.016,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	292.042.605.248,00	198.031.509.599,95	292.042.605.248,00	198.031.509.599,95
4	Pendapatan Diterima di Muka	177.833.332,00	457.672.733,33	108.499.999,00	527.006.066,33

5	Utang Belanja	356.109.242.899,69	348.238.378.538,02	347.702.560.692,01	354.645.060.245,83
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	15.687.696.185,08	9.511.537.628,37	-	21.199.233.813,45
	TOTAL	696.792.677.205,36	786.612.687.288,79	916.349.720.351,45	565.055.644.153,81

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a.	**Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	**285.452.505,00**	**20.869.479,00**

Adapun potongan PFK yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp285.452.505,00 atau naik sebesar Rp264.583.026,00 dari saldo tahun 2023 sebesar Rp20.869.479,00. Perubahan (mutasi) saldo Utang PFK terjadi karena adanya penerimaan PFK tahun 2024 sebesar Rp6.085.887.884,05, pembayaran utang PFK 2023 sebesar Rp20.869.479,00 dan Pembayaran PFK tahun berjalan senilai Rp5.800.435.379,05, seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.88 Rekap Utang PFK

No	Uraian	Saldo Awal	BUD		SKPD		Pengeluaran saldo awal	Saldo Akhir	
			Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran		BUD	SKPD
1	PPh(1%) luran Wajib Pegawai	-	6.745.519.813,00	6.745.519.813,00	-	-	-	-	-
2	PPh (5%) luran Wajib Pegawai	-	39.369.973.488,00	39.369.973.488,00	-	-	-	-	-
3	BPJS Kesehatan PNS	-	10.736.760.156,00	10.736.760.156,00	-	-	-	-	-
4	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	-	1.387.106.093,00	1.387.106.093,00	-	-	-	-	-
5	Jaminan Kematian (JKM)	-	4.160.216.568,00	4.160.216.568,00	-	-	-	-	-
6	PPh Pasal 21 Pembayaran Gaji&Gup. JHT/Pensiun/Pesangon	-	349.053.791,00	349.053.791,00	5.523.914,00	5.523.914,00	-	-	-
7	PPh Pasal 21 Honorium Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	1.050.000,00	45.927.389.042,00	45.927.389.042,00	248.980.964,00	249.481.214,00	1.050.000,00	-	3.104.250,00
8	PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.418.449,00	3.207.995.697,00	3.207.995.697,00	672.881.097,85	521.099.930,05	1.418.449,00	-	1.820.217,00
9	PPh Pasal 23 Jasa	2.160.746,00	1.601.578.663,00	1.601.578.663,00	461.359.384,00	429.643.842,00	2.160.746,00	-	31.515.842,00
10	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	-	20.901.000,00	20.901.000,00	-	-	-	-	-
11	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	-	41.348.004,00	41.348.004,00	67.629.028,00	67.629.028,00	-	-	-
12	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	-	7.534.799.622,00	7.534.799.622,00	1.697.170,00	1.697.170,00	-	-	-
13	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	18.226.284,00	67.815.280.230,00	67.815.280.230,00	4.727.301.726,00	4.478.439.230,00	18.226.284,00	-	248.912.496,00
14	Tapsuran	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Retur (BUD)	-	358.000,00	358.000,00	-	-	-	-	-
16	BPJS Kesehatan PPPK	-	5.472.405.356,00	5.472.405.356,00	-	-	-	-	-
17	IWP(3,25%) luran Wajib Pegawai	-	4.143.888.074,00	4.143.888.074,00	-	-	-	-	-
18	BPJS KESEHATAN NON PNS 4%	-	7.832.360.236,00	7.832.360.236,00	-	-	-	-	-
19	BPJS KESEHATAN NON PNS 1%	-	1.958.070.793,00	1.958.070.793,00	-	-	-	-	-
20	BPJS KESEHATAN PNS 4%	-	27.312.000.004,00	27.312.000.004,00	-	-	-	-	-
21	BPJS KESEHATAN PNS 1%	-	3.269.087.468,00	3.269.087.468,00	-	-	-	-	-
TOTAL		20.869.479,00	230.910.316.093,69	230.910.316.093,69	6.085.887.884,05	5.800.435.379,05	20.869.479,00	0,00	285.452.505,00

Sehubungan dengan Utang PFK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, perlu diungkapkan adanya saldo akhir Utang PFK di beberapa SKPD senilai Rp285.452.505,00 seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.89 Rincian Utang PFK

No	SKPD	Jenis PFK	Nilai Utang
1	Dinas Pendidikan Daerah	Utang PPh 21	Rp3.104.250,00
		Utang PPh 23	Rp31.426.543,00
		Utang PPN Pusat	Rp239.347.136,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah	Utang PPh 22	Rp1.820.217,00
		Utang PPh 23	Rp188.999,00

No	SKPD	Jenis PFK	Nilai Utang
		Utang PPN Pusat	Rp9.565.360,00
Total			Rp265.462.595,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b.	**Utang Bunga**	**22.368.085.016,00**	**31.754.430.262,39**

Utang bunga pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang akan dibayarkan pada tahun 2025 berdasarkan perjanjian pinjaman dengan PT SMI sebesar Rp22.368.085.016,00. Perubahan (mutasi) saldo Utang Bunga terjadi karena adanya dua pinjaman Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah lunas dan tersisa dua pinjaman yang masih akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Pinjaman Kegiatan untuk mendukung PEN daerah tahun 2020 sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 25 tanggal 25 September 2020 dengan jangka waktu delapan tahun dan Pinjaman Kegiatan untuk mendukung PEN daerah tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian No. 130/SMI/0821 dengan jangka waktu delapan tahun. Kemudian untuk utang bunga yang akan dibayarkan pada tahun 2025 sesuai dengan perjanjian pinjaman dengan PT SMI seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.90 Penambahan utang Bunga

No	Uraian Kewajiban	Tingkat Bunga	Realisasi Tahun 2019 s/d 2024	Tahun 2025
PEN 2020				
1	Provisi	1%	7.053.615.728,00	
2	Biaya Pengelolaan Pinjaman	0.185%	5.936.174.647,00	808.500.283,00
PEN 2021				
1	Biaya Provisi Pinjaman	1%	5.420.833.773,00	-
2	Biaya Pengelolaan Pinjaman	0.185%	3.369.273.713,00	593.305.299,00
3	Bunga Pinjaman	6.19%	78.007.430.932,00	20.966.279.434,00
PINJAMAN PEMBANGUNAN RSUD				
1	Provisi Pinjaman	1%	3.000.000.000,00	-
2	Bunga Pinjaman	9.4%	58.776.103.989,00	
PINJAMAN PEMBANGUNAN RSM				
1	Provisi Pinjaman	1%	1.000.000.000,00	-
2	Bunga Pinjaman	8.63%	20.432.568.373,00	-
Total Kewajiban Pengembalian Non Pokok			**182.996.001.165,00**	**22.368.085.016,00**

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
c.	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**	**166.031.506.506,95**	**292.042.605.248,00**

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 merupakan saldo pembayaran pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk pembayaran pokok utang tahun 2024 yang akan dibayarakan pada tahun 2025 berdasarkan perjanjian pinjaman dengan PT SMI sebesar Rp166.031.506.506,95. Jika dibandingkan dengan saldo pada tahun 2023 sebesar Rp292.042.605.248,00 terdapat penurunan sebesar Rp126.011.098.741,05. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat restrukturisasi pinjaman dan adanya pelunasan pinjaman yang sebelumnya tercatat sebagai bagian lancar utang jangka panjang pada tahun 2023. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.91 Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

No	Uraian	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
1	Pokok Pinjaman PEN 2020	105.969.789.550,95
2	Pokok Pinjaman PEN 2021	60.061.716.956,00
	Total Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	166.031.506.506,95

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan restrukturisasi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 yang tertuang dalam Perubahan III Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 25 Tanggal 25 September 2020, Nomor PERJ-108/SMI/0824. Dalam perubahan perjanjian III diatur tentang penundaan pembayaran angsuran pokok ke-21 sampai dengan angsuran pokok ke-26, angsuran pokok ke-27 senilai Rp5.117.375.080,95, dan masing-masing 1/45 x jumlah saldo pinjaman untuk angsuran pokok ke-28 sampai dengan ke-36. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan restrukturisasi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 yang tertuang dalam Perubahan II Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-130/SMI/0821 Tanggal 27 Agustus 2021, Nomor PERJ-109/SMI/0824 tanggal 7 Agustus 2024. Dalam perubahan perjanjian II, diatur tentang penundaan pembayaran angsuran pokok ke-34 sampai dengan angsuran pokok ke-39, angsuran pokok ke-40 senilai Rp.2.946.632.852,00 dan masing-masing 1/56 x jumlah saldo pinjaman untuk angsuran pokok ke-41 sampai dengan ke-49. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per bulan dapat dilihat pada Lampiran II.67 laporan keuangan ini.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
d. Pendapatan Diterima Dimuka	**527.306.066,33**	**177.833.332,00**

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan 31 Desember 2024 seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka yang terutang untuk perjanjian tidak di awal bulan maka perhitungan pendapatan tersebut dihitung mulai dari awal bulan berikutnya. Pendapatan diterim dimuka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3.92 Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka

No	SKPD	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	RSUD Manembo-Nembo Bitung	PT Bank SulutGo Cabang Pembantu Manembo-Nembo	44.083.333,00	-	23.000.000,00	21.083.333,00
		PT BNI Cabang Pembantu Manembo-Nembo	35.555.667,00	-	20.000.000,00	15.555.667,00
		PT BRI Cabang Pembantu Manembo-Nembo	55.583.333,00	-	23.000.000,00	32.583.333,00
		JUMLAH	135.333.333,00	-	66.000.000,00	69.333.333,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Gereja Tiberias Indonesia	17.499.999,00	350.000.000,00	17.499.999,00	350.000.000,00
		JUMLAH	17.499.999,00	350.000.000,00	17.499.999,00	350.000.000,00
3	Biro Umum	Base Transceiver Station (BTS)-GSM di Sulawesi Utara di Kantor Gubernur	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
		JUMLAH	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jalus Lokasi Sewa Kompleks Pelabuhan Pantai Tumumpa	-	55.639.400,00	-	55.639.400,00
		UD Tuna Tosing Sewa Kompleks Pelabuhan Pantai Tumumpa	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00
		JUMLAH	-	67.639.400,00	-	67.639.400,00
5	Rumah Sakit Mata	PT Bank SulutGo Manado	-	40.333.333,33	-	40.333.333,33
		JUMLAH	-	40.333.333,33	-	40.333.333,33

No	SKPD	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	TOTAL		177.633.332,00	457.972.733,33	108.499.999,00	527.306.066,33

1) Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp457.972.733,33, yaitu:
   a. Pembayaran Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Gedung Joeang 45 antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Gereja Tiberias Indonesia pada 2024 s.d. 2029, pembayaran dilakukan per tahun sebesar Rp70.000.000,00 selama 5 tahun sehingga totalnya senilai Rp350.000.000,00;
   b. Perjanjian sewa-menyewa lahan antara Dinas Kelautan dengan Julius Lolaen selama lima tahun dari 29 Oktober 2024 s.d 29 September 2029. Penyetoran dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2024 sebesar Rp58.000,00, 25 September 2024 sebesar Rp11.500.000,00, 26 September 2024 sebesar Rp46.000.000,00, sehingga totalnya senilai Rp57.558.000,00. Dari nilai penyetoran sebesar Rp57.558.000,00, Rp1.918.600,00 telah diakui sebagai Pendapatan, sehingga Pendapatan Diterima Dimuka pada perjanjian sewa-menyewa tersebut senilai Rp55.639.400,00;
   c. Perjanjian sewa menyewa lahan antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Oscar Tahe / UD Tuna Racing selama satu tahun dari 29 Agustus 2024 s.d. 29 Agustus 2025. Penyetoran sebesar Rp18.000.000,00 dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024. Dari nilai penyetoran sebesar Rp18.000.000,00, Rp6.000.000,00 telah diakui sebagai Pendapatan, sehingga Pendapatan Diterima Dimuka pada perjanjian sewa-menyewa tersebut senilai Rp12.000.000,00;
   d. Perjanjian sewa menyewa lahan antara UPTD Rumah Sakit Mata dengan PT Bank SulutGo selama dua tahun dari 15 Oktober 2024 s.d. 15 September 2026. Penyetoran sebesar Rp44.000.000,00 dilakukan pada tanggal 24 September 2024. Dari nilai penyetoran sebesar Rp44.000.000,00, Rp3.666.666,67 telah diakui sebagai Pendapatan, sehingga Pendapatan Diterima Dimuka pada perjanjian sewa-menyewa tersebut senilai Rp 40.333.333,33;
2) Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp108.499.999,00, yaitu:
   a. Sewa lahan PT Bank SulutGo dengan RSUD Manembo-nembo Bitung untuk periode Januari s.d. Desember 2024 sebesar Rp23.000.000,00;
   b. Sewa lahan PT BNI dengan RSUD Manembo-nembo Bitung untuk periode Januari s.d. Desember 2024 sebesar Rp20.000.000,00;
   c. Sewa lahan PT BRI Cabang Pembantu Manembo-Nembo untuk periode Januari s.d. Desember 2024 sebesar Rp23.000.000,00;
   d. Sewa Gedung Joeang 45 pemprov dengan Gereja Tiberias untuk periode Januari s.d. Maret 2024 sebesar Rp17.499.999,00; dan
   e. Sewa *Base Transceiver Station* (BTS)-GSM di Sulawesi Utara di Kantor Gubernur untuk periode Januari s.d. Desember 2024 sebesar Rp25.000.000,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
e.	**Utang Belanja**	**354.645.060.245,88**	**356.109.242.699,89**

Utang Belanja merupakan kewajiban yang diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Utang belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp354.645.060.245,88 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.93 Penambahan dan pengurangan Utang Belanja

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Pegawai	19.993.931.880,00	21.824.857.754,00	19.993.931.880,00	21.824.857.754,00

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	77.553.565.997,89	55.247.555.284,00	69.146.884.290,01	63.654.236.991,88
3	Utang Belanja Subsidi	1.568.498.033,00	-	1.568.498.033,00	-
4	Utang Belanja Bagi Hasil	256.993.246.789,00	269.165.965.500,00	256.993.246.789,00	269.165.965.500,00
	TOTAL	356.109.242.699,89	346.238.378.538,00	347.702.660.992,01	354.645.060.245,88

Penambahan dan pengurangan Utang Belanja sebesar Rp354.645.060.245,88, yaitu:

1) Utang Belanja Pegawai (Tambahan Penghasilan PNS) kepada perangkat daerah yang belum dibayarkan bulan Desember 2024 yang menjadi beban Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.824.857.754,00. Rincian Utang Belanja Pegawai (tambahan penghasilan PNS) dapat dilihat dalam lampiran II.68 laporan keuangan ini;

2) Utang Barang dan Jasa Kepada Perangkat Daerah yang belum dibayarkan sebesar Rp63.654.236.991,88. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada Lampiran II.69 laporan keuangan ini;

3) Utang Belanja Subsidi sebesar Rp1.568.498.033,00 sudah dibayarkan lunas pada TA 2024 kepada PT Garuda Airlines sehingga sudah tidak lagi ada Utang Belanja Subsidi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Rincian pembayaran Utang Belanja Subsidi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.94 Rincian Pembayaran Utang Belanja Subsidi

No	Keterangan	*Invoice*	Nilai
1	Utang *Invoice pax* dan kargo	GA/MDC-024/12/2023	137.130.000,00
		GA/MDC-024/12/2023	596.130.000,00
		GA/MDC-024/12/2023	295.178.700,00
		GA/MDC-025/12/2023	453.840.000,00
		GA/MDC-025/12/2023	53.344.700,00
		GA/MDC-027/12/2023	527.280.000,00
		GA/MDC-027/12/2023	128.716.200,00
		GA/MDC-028/12/2023	357.450.000,00
		GA/MDC-028/12/2023	123.535.000,00
2	Utang *Crew* Imigrasi	GA/MDC-008/06/2023	51.225.600,00
		GA/MDC-008/06/2023	96.637.094,00
		GA/MDC-008/06/2023	96.562.323,00
		GA/MDC-011/07/2023	119.062.549,00
		GA/MDC-013/09/2023	133.706.717,00
		GA/MDC-013/09/2023	107.351.434,00
		GA/MDC-018/10/2023	121.565.868,00
		GA/MDC-021/11/2023	128.363.003,00
		GA/MDC-026/12/2023	116.956.487,00
		GA/MDC-001/01/2024	132.842.941,00
Jumlah			**3.780.878.616,00**
3	Kelebihan Pembayaran dan Potensi Kelebihan Pembayaran		(2.212.380.583,00)
Jumlah Pengurang Utang Belanja Subsidi			**1.568.498.033,00**

4) Utang Belanja Bagi Hasil yang belum disalurkan kepada Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp269.165.965.500,00, yaitu Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Bulan Mei s.d. Desember 2024. Mutasi Tambah Kurang Utang Bagi Hasil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.95 Mutasi Tambah Kurang Utang Bagi Hasil

No	Kab/Kota	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Manado	57.982.424.137,00	58.478.379.386,00	57.982.424.137,00	58.478.379.386,00
2	Minahasa	28.120.189.117,00	33.274.981.176,00	28.120.189.117,00	33.274.981.176,00
3	Bitung	21.937.049.800,00	6.889.070.841,00	21.937.049.800,00	6.889.070.841,00
4	Sangihe	10.553.108.115,00	12.672.853.121,00	10.553.108.115,00	12.672.853.121,00
5	Talaud	8.526.779.745,00	9.908.737.648,00	8.526.779.745,00	9.908.737.648,00
6	Bolmong	18.334.527.102,00	22.498.045.326,00	18.334.527.102,00	22.498.045.326,00
7	Minahasa Selatan	18.220.647.026,00	21.514.783.522,00	18.220.647.026,00	21.514.783.522,00
8	Minahasa Utara	23.253.239.951,00	27.615.209.996,00	23.253.239.951,00	27.615.209.996,00
9	Tomohon	12.411.579.130,00	11.469.021.531,00	12.411.579.130,00	11.469.021.531,00
10	Sitaro	7.176.989.480,00	8.504.005.131,00	7.176.989.480,00	8.504.005.131,00

No	Kab/Kota	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
11	Minahasa Tenggara	11.320.603.472,00	13.703.254.834,00	11.320.603.472,00	13.703.254.834,00
12	Bolmong Utara	8.757.332.547,00	10.189.884.679,00	8.757.332.547,00	10.189.884.679,00
13	Kotamobagu	12.956.257.480,00	11.945.585.593,00	12.956.257.480,00	11.945.585.593,00
14	Bolmong Timur	9.485.301.387,00	10.958.881.918,00	9.485.301.387,00	10.958.881.918,00
15	Bolmong Selatan	7.957.018.300,00	9.543.260.996,00	7.957.018.300,00	9.543.260.996,00
	TOTAL	256.993.246.789,00	269.165.965.500,00	256.993.246.789,00	269.165.965.500,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
f.	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	**21.199.233.813,45**	**15.687.696.185,08**

Utang Jangka Pendek Lainnya yang sampai dengan akhir tahun Tahun Anggaran 2024 belum dibayarkan sebesar Rp21.199.233.813,45, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.96 Penambahan dan Pengurangan Utang Jangka Pendek Lainnya

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan Daerah	269.793.444,00	477.459.026,44	-	747.252.470,44
2	RS Tipe B	-	104.858.535,00	-	104.858.535,00
3	RSJ Ratumbuysang	-	1.509.052.334,00	-	1.509.052.334,00
4	UPTD Laboratorium Kesehatan	-	313.787.181,58	-	313.787.181,58
5	Dinas Pekerjaan Umum	15.070.324.266,63	2.056.183.258,65	-	17.126.507.525,28
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	927.460.320,00	-	927.460.320,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	122.736.972,70	-	122.736.972,70
8	Biro Perlengkapan	53.574.000,00	-	-	53.574.000,00
9	Sekretariat Daerah	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana	159.695.524,00	-	-	159.695.524,00
11	UPTD Manado	24.308.950,45	-	-	24.308.950,45
	Jumlah	15.687.696.185,08	5.511.537.628,37	-	21.199.233.813,45

Total keseluruhan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp21.199.233.813,45, rincian dapat dilihat pada Lampiran II.70 laporan keuangan ini.

5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayarkan kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp698.730.793.748,05 berasal dari Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a.	**Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank**	**698.730.793.748,05**	**803.061.570.988,00**

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp698.730.793.748,05 atau turun

sebesar Rp104.330.777.239,95 dari saldo tahun 2023 sebesar Rp803.061.570.988,00. Perubahan (mutasi) kewajiban jangka panjang terjadi karena adanya pengurangan saldo kewajiban jangka panjang sebesar Rp166.081.638.915,74 dan penambahan kewajiban jangka panjang sebesar Rp61.750.861.676,00. Rincian kewajiban jangka panjang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.97 Kewajiban Jangka Panjang

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo akhir
1	Pinjaman Pen Daerah Tahun 2020	470.241.029.690,00	39.186.757.180,00	106.018.078.550,95	403.409.708.319,05
2	Pinjaman Pen Daerah Tahun 2021	332.820.541.298,00	22.564.104.496,00	60.063.560.385,00	295.321.085.429,00
Total		**803.061.570.988,00**	**61.750.861.676,00**	**166.081.638.915,74**	**698.730.793.748,06**

1) Pinjaman Reguler Pembangunan RSUD Tipe B

Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Pinjaman Daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan RSUD Tipe B Pemerintah Provinsi Sulut sebesar Rp300.000.000.000,00. Pelaksanaan pinjaman dilaksanakan berdasarkan Akte Perjanjian Pembiayaan Nomor 14 Tanggal 17 Oktober 2018, sebagai berikut :

a) Pasal 9 tentang Penarikan Fasilitas Pembiayaan, dimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan pihak kedua dapat melakukan penarikan fasilitas pembiayaan selama *Availability Period* Fasilitas Pembiayaan, dan dilaksanakan sesuai dengan permohonan pihak kedua, setelah pelaksana kegiatan mengajukan pembayaran kegiatan kepada pihak kedua;

b) Pelaksanaan Pembayaran Bunga Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan "bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulanan (triwulanan) yang pemberlakuannya dimulai sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan, Pembayaran bunga dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada akhir triwulan selanjutnya disebut sebagai "tanggal pembayaran bunga";

c) Bunga yang ditetapkan sebagai kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah 7,89% atas Pembangunan RSUD Tipe B Pemerintah Provinsi Sulut.

Rincian penarikan sebagai berikut

Tabel 5.3.98 Penarikan Pinjaman

Fasilitas Pinjaman	Nilai Pinjaman (Rp)	Penarikan	Nilai (Rp)	Tahun penarikan
RSUD Tipe B	300.000.000.000,00	**Jumlah**	**300,000,000,000,00**	
		Uang Muka	43.577.612.414,00	2019
		Termin 1	7.037.493.887,00	2020
		Termin 2	6.228.693.400,00	2020
		Termin 3	10.591.102.920,00	2020
		Termin 4	4.353.112.962,00	2020
		Termin 5	25.263.394.504,00	2020
		Termin 6	24.649.821.720,00	2020
		Termin 7	19.908.577.490,00	2020
		Termin 8	41.467.293.905,00	2020
		Termin 9	33.476.902.892,00	2020
		Termin 10	44.364.000.000,00	2020
		Termin 11	39.081.993.906,00	2021

Pembayaran pokok dan bunga pinjaman untuk Pembangunan RSUD Tipe B periode terakhir telah dibayarkan pada bulan Desember Tahun 2024 yang diikuti dengan diterbitkannya Surat Direktur Utama PT SMI Nomor S-4/SMI/DU/0125 tanggal 6 Januari 2025 perihal Keterangan Lunas atas Fasilitas Pembiayaan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan fasilitas pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 14 tanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp300.000.000.000,00 telah lunas. Rincian pembayaran pokok dan bunga pinjaman untuk pembangunan RSUD Tipe B adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.99 Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Pembangunan RSUD Tipe B

Periode Pembayaran	Tanggal Jatuh Tempo	Pembayaran Pokok Pinjaman	Pembayaran Bunga Pinjaman	Sisa Pokok Pinjaman
1	2/25/2020	-		67.434.902.621
2	5/20/2020	-		97.051.410.087
3	8/25/2020	-		183.077.103.202
4	11/25/2020	-		260.818.006.094
5	2/25/2021	-		300.000.000.000
6	5/25/2021	20.000.001.000		279.999.999.000
7	8/25/2021	20.000.001.000		259.999.998.000
8	11/25/2021	20.000.001.000		239.999.997.000
9	2/25/2022	20.000.001.000		219.999.996.000
10	5/25/2022	20.000.001.000		199.999.995.000
11	8/25/2022	20.000.001.000		179.999.994.000
12	11/25/2022	20.000.001.000		159.999.993.000
13	2/24/2023	20.000.001.000		139.999.992.000
14	5/25/2023	20.000.001.000		119.999.991.000
15	8/25/2023	20.000.001.000		99.999.990.000
16	11/24/2023	20.000.001.000		79.999.989.000
17	2/23/2024	20.000.001.000		59.999.988.000
18	5/24/2024	20.000.001.000		39.999.987.000
19	8/23/2024	20.000.001.000		19.999.986.000
20	12/19/2024	19.999.986.000		-

2) Pinjaman Reguler Pembangunan RSM Tipe C

Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Pinjaman Daerah kepada PT SMI dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan RSM Tipe C Pemerintah Provinsi Sulut sebesar Rp100.000.000.000,00. Pelaksanaan pinjaman dilaksanakan berdasarkan Akte Perjanjian Pembiayan Nomor 3 Tanggal 12 Februari 2019, sebagai berikut :

a) Pasal 9 tentang Penarikan Fasilitas Pembiayaan, dimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan pihak kedua dapat melakukan penarikan fasilitas pembiayaan selama *Availability Period* Fasilitas Pembiayaan, dan dilaksanakan sesuai dengan permohonan pihak kedua, setelah pelaksana kegiatan mengajukan pembayaran kegiatan kepada pihak kedua;
b) Pelaksanaan Pembayaran Bunga Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan "bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulanan (triwulanan) yang pemberlakuannya dimulai sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan, Pembayaran bunga dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada akhir triwulan selanjutnya disebut sebagai "tanggal pembayaran bunga";
c) Bunga yang ditetapkan sebagai kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah 8,53% atas Pembangunan RSM Tipe C Pemeritah Provinsi Sulawesi Utara.

Rincian penarikan pinjaman sebagai berikut.

Tabel 5.3.100 Penarikan Pinjaman

Perangkat Daerah	Nilai Pinjaman	Penarikan	Nilai (Rp)	Tahun Penarikan
Rumah Sakit Mata	100.000.000.000,00	Jumlah	100.000.000.000,00	
		Uang Muka	14.092.628.549,00	2019
		Termin 1	3.629.342.560,00	2020

Perangkat Daerah	Nilai Pinjaman	Penarikan	Nilai (Rp)	Tahun Penarikan
		Termin 2	4.558.612.800,00	2020
		Termin 3	3.867.504.640,00	2020
		Termin 4	6.110.124.480,00	2020
		Termin 5	2.761.239.520,00	2020
		Termin 6	4.936.762.320,00	2020
		Termin 7	8.215.361.040,00	2020
		TERMIN 8 Dan 9	13.327.970.240,00	2020
		Termin 10	9.965.170.600,00	2021
		Termin 11	10.782.278.080,00	2021
		Termin 12	11.265.957.305,00	2021
		Termin Akhir	6.476.847.866,00	2021

Pembayaran pokok dan bunga pinjaman untuk Pembangunan RSM Tipe C periode terakhir telah dibayarkan pada bulan Desember Tahun 2024 yang diikuti dengan diterbitkannya Surat Direktur Utama PT SMI Nomor S-4/SMI/DU/0125 tanggal 6 Januari 2025 perihal Keterangan Lunas atas Fasilitas Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan fasilitas pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 3 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp100.000.000.000,00 telah lunas. Rincian pembayaran pokok dan bunga pinjaman untuk Pembangunan RSM Tipe C adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.101 Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Pembangunan RSM TIPE C

Periode Pembayaran	Tanggal Jatuh Tempo	Pembayaran Pokok Pinjaman	Pembayaran Bunga Pinjaman	Sisa Pokok Pinjaman
1	2/25/2020	-	227.086.785	
2	5/20/2020	-	-	
3	8/25/2020	-	-	
4	11/25/2020	-	831.868.022	
5	2/25/2021	-	1.397.063.093	
6	5/25/2021	6.234.877.120	1.862.180.330	
7	8/25/2021	6.697.509.166	2.095.548.460	
8	11/25/2021	6.697.509.166	1.958.758.121	
9	2/25/2022	6.697.509.166	1.812.759.864	
10	5/25/2022	6.697.509.166	1.614.392.670	
11	8/25/2022	6.697.509.166	1.520.763.351	
12	11/25/2022	6.697.509.166	1.374.765.091	
13	2/24/2023	6.697.509.166	1.226.766.832	
14	5/25/2023	6.697.509.166	1.049.442.889	
15	8/25/2023	6.697.509.166	936.770.316	
16	11/24/2023	6.697.509.166	790.772.056	
17	2/23/2024	6.697.509.166	644.773.799	
18	5/24/2024	6.697.509.166	489.253.920	
19	8/23/2024	6.697.509.166	352.777.284	
20	12/19/2024	6.697.503.722	244.865.467	

3) Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020

Dasar Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 25 tanggal 25 September Tahun 2020, Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 25 tanggal 25 September Tahun 2020 Nomor PERJ-170/SMI/1220, serta Perubahan II Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 25 tanggal 25 September Tahun 2020 Nomor PERJ-023/SMI/0321 dengan nilai pinjaman sebesar Rp723.700.194.189,00, sebagai berikut.

1) Pasal 4 tentang jangka waktu pinjaman menyebutkan masa penarikan pinjaman adalah sejak penarikan Pertama sampai dengan paling lambat 15 Maret 2021 dengan Tenor Pinjaman adalah 96 Bulan termasuk Masa tenggang 24 Bulan;

2) Pasal 5 tentang Bunga dan Biaya Pinjaman menyebutkan Atas setiap Pinjaman berdasarkan Perjanjian, dikenakan:
   a) Bunga sebesar 0%;
   b) Biaya pengelolaan 0,185% dengan ketentuan:
      (1) Untuk pertama kalinya sebesar 0,185% dari Limit Pinjaman, yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Desember 2020; dan
      (2) sebesar 0,185% per tahun dari Jumlah baki debet/*outstanding*/terutang pada tanggal ulang tahun Perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ulang tahun Perjanjian yang berkenaan.
   c) Biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dari Jumlah kumulatif Pinjaman yang dicairkan, dikenakan satu kali yang dibayarkan pada saat Pencairan Tahap Ketiga Pinjaman atau selambatnya sebelum tanggal terakhir *Availability Period*.
3) Pasal 10 tentang Pembayaran Pokok dan Bunga menyebutkan bahwa Pembayaran Pokok dan Bunga dilakukan dengan cara diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU sebagaimana diatur dalam PMK Pinjaman PEN Daerah, dengan ketentuan:
   a) Angsuran pokok dibayarkan setiap tanggal perhitungan DTU oleh DJPK setiap akhir bulan setelah Masa Tenggang berakhir dengan jadwal indikatif sebagaimana dinyatakan pada Lampiran II Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman;
   b) Angsuran pokok pada periode terakhir adalah sebesar nilai pencairan Pinjaman dikurangi nilai pokok Pinjaman yang telah dibayar;
   c) Besaran DTU yang dapat diperhitungkan pada tahun berkenaan ditentukan berdasarkan hasil rekonsilisasi antara DJPK dan PIHAK PERTAMA;
   d) Besarnya angsuran pokok setiap bulan adalah masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari nilai DTU yang dapat diperhitungkan pada tahun berkenaan.
4) Apabila Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membayar seluruh sisa pokok pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo maka seluruh pokok pinjaman akan lunas pada tanggal pembayaran dipercepat tersebut.

Perangkat Daerah Pelaksana Sulawesi Utara Tahun 2020 berjumlah enam perangkat daerah dengan penarikan pertama pada tanggal 8 Desember 2020. Seluruh dana atas pelaksaaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah terserap terakhir pada 28 Desember 2021, sehingga saldo dana PEN Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.102 Penarikan Dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2024

No	Perangkat Daerah	Saldo Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	98.951.130.747,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	535.945.256.600,21
3	Dinas Perumahan Dan Permukiman	83.152.724.490,52
4	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	4.987.750.568,35
5	Dinas Perhubungan	12.324.710.364,08
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-
Total		705.361.572.770,16
Pembulatan		705.361.572.770,00

Sebagaimana diatur di dalam Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 25 Tanggal 25 September Tahun 2020 pada pasal 11, dan berdasarkan S-1095/SMI/DU/0923 tanggal 14 September 2023 perihal Penyampaian Hasil *Site Visit* Fasilitas Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dan *Reminder* atas Pemenuhan Dokumen, sisa dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 yang tidak terserap dan masih berada dalam RKUD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah senilai Rp48.288.999,79. Melalui SP2D Nomor: 14311/5-02.0-00.0-00.2.0.1/XI/2023 tanggal 9 November 2023, telah disetorkan kembali ke rekening PT SMI sebesar Rp48.289.000,00 dan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran pokok pinjaman.

Penambahan kewajiban jangka panjang disebabkan adanya penundaan pembayaran angsuran pokok Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 pada tahun 2024 senilai Rp39.186.757.180,00. Untuk pembayaran pokok pinjaman PEN 2020 periode tahun 2025 senilai Rp106.018.078.550,95 yang terdiri dari pembayaran Pokok Pinjaman senilai Rp105.969.789.550,95 dan Pengembalian Dana PEN 2020 yang tidak terealisasi senilai Rp48.289.000,00.

4) Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021

Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan Sumber Dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021, dengan Dasar Pelaksanaan, PERJ- 130/SMI/0821 tanggal 27 Agustus 2021, Perubahan I Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-130/SMI/0821 tanggal 27 Agustus 2021 Nomor PERJ-176A/SMI/1121 tanggal 27 Oktober 2021 dengan nilai pinjaman sebesar Rp552.000.000.000,00, sebagai berikut.

a. Pasal 4 tentang Jangka Waktu pinjaman menyebutkan masa penarikan pinjaman adalah sejak penarikan Pertama sampai dengan paling lambat 31 Desember 2021 dengan Tenor Pinjaman adalah 96 Bulan;
b. Pasal 5 tentang Bunga dan Biaya Pinjaman menyebutkan Atas setiap Pinjaman berdasarkan Perjanjian, dikenakan:
   (1) Bunga sebesar 6,19% per annum. Bunga dihitung dari Pinjaman yang ditarik dan diperhitungkan langsung dari penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan dan tata cara pada PMK tentang Pinjaman PEN Daerah. Pengenaan Bunga dimulai sejak tanggal penarikan pertama Pinjaman dan dikenakan setiap bulan;
   (2) biaya pengelolaan 0,185% dengan ketentuan:
      a) Untuk pertama kalinya sebesar 0,185% dari Limit Pinjaman, yang dibayarkan selambat-lambatnya sebelum efektifnya Perjanjian; dan
      b) sebesar 0,185% per tahun dari Jumlah baki debet/outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun Perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ulang tahun Perjanjian yang berkenaan.
   (3) Biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dari Jumlah kumulatif Pinjaman yang dicairkan, dikenakan satu kali yang dibayarkan pada saat Pencairan Tahap Ketiga Pinjaman atau selambatnya sebelum

tanggal terakhir masa pencairan pinjaman.

c. Pasal 10 tentang Pembayaran Pokok dan Bunga menyebutkan bahwa Pembayaran Pokok dan Bunga dilakukan - dengan cara diperhitungkan langsung terhadap - penyaluran DTU sebagaimana diatur dalam PMK Pinjaman PEN Daerah, dengan ketentuan:
   1) Angsuran pokok dibayarkan setiap tanggal perhitungan DTU oleh DJPK setiap akhir bulan setelah Masa Tenggang berakhir dengan jadwal indikatif sebagaimana dinyatakan pada Lampiran II Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman;
   2) Angsuran pokok pada periode terakhir adalah sebesar nilai pencairan Pinjaman dikurangi nilai pokok Pinjaman yang telah dibayar;
   3) Besaran DTU yang dapat diperhitungkan pada tahun berkenaan ditentukan berdasarkan hasil rekonsilisasi antara DJPK dan PIHAK PERTAMA;
   4) Besarnya angsuran pokok setiap bulan adalah masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari nilai DTU yang dapat diperhitungkan pada tahun berkenaan.
d. Apabila Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membayar seluruh sisa pokok pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo maka seluruh pokok pinjaman akan lunas pada tanggal pembayaran dipercepat tersebut.

Perangkat daerah pelaksana kegiatan-kegiatan yang mendukung Program PEN Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 berjumlah enam perangkat daerah dengan penarikan pertama tanggal 9 November 2021 dan terakhir pada Maret 2022. Penarikan Dana Pinjaman PEN Daerah sampai dengan 31 Desember 2024, uraiannya sebagai berikut.

Tabel 5.3.103 Saldo Dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 s.d. 31 Des 2024

No	Perangkat Daerah	SaldoAwal (Rp)	Bertambah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Kesehatan Daerah	29.785.839.544,36	0,00	29.785.839.544,36
2	Dinas PUPRD	280.975.681.216,28	0,00	280.975.681.216,28
3	Dinas PERKIM	221.826.066.642,97	0,00	221.826.066.642,97
4	Dinas Perhubungan Daerah	4.757.478.232,00	0,00	4.757.478.232,00
5	Dinas Pariwisata Daerah	2.864.119.827,74	0,00	2.864.119.827,74
6	Dinas ESDMD	0,00	0,00	1.874.191.803,17
Total		540.209.185.463,35	0,00	542.083.377.266,52
Pembulatan		540.209.185.463,00	0,00	542.083.377.266,00

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 2 dan angka 3 Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-130/SMI/0821, bahwa Jangka waktu Pinjaman ditetapkan selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yaitu dimulai sejak tanggal pencairan Pinjaman pertama kali ("Jangka Waktu Pinjaman"), dan Pemberian Pinjaman ini dilaksanakan tanpa *grace period*/masa tenggang (nol bulan).

Penarikan Pertama atas Pinjaman PEN Tahun 2021 adalah pada tanggal 9 November 2021 sehingga Kewajiban Pengembalian Pinjaman sudah terhitung pada bulan Desember berdasarkan Baki Debet yang dipotong atas Bagian Dana Alokasi Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bulan berikutnya.

Sebagaimana diatur di dalam Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ- 130/SMI/0821 tanggal 27 Agustus 2021 pada pasal 11, dan berdasarkan S-1095/SMI/DU/0923 tanggal 14 September 2023 perihal Penyampaian Hasil *Site Visit* Fasilitas Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dan *Reminder* atas Pemenuhan Dokumen,

sisa dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 yang tidak terserap dan masih berada dalam RKUD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah senilai Rp. 1.843.409,00 melalui SP2D Nomor: 14310/5-02.0-00.0-00.2.0.1/XI/2023 tanggal 9 November 2023, telah disetorkan kembali ke rekening PT SMI dan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran pokok pinjaman.

Penundaan pembayaran angsuran pokok Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 pada tahun 2024 senilai Rp22.564.104.496,00. Untuk pembayaran pokok pinjaman PEN 2021 periode tahun 2025 senilai Rp60.063.560.265,00 yang terdiri dari pembayaran Pokok Pinjaman senilai Rp60.061.716.956,00 dan Pengembalian Dana PEN 2021 yang tidak terealisasi senilai Rp1.843.309,00.

5.3.3 EKUITAS

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
EKUITAS	**9.521.188.165.917,75**	**9.450.707.553.106,66**

Saldo akhir ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.521.188.165.917,75 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun Anggaran 2023/saldo awal ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.450.707.553.106,66 ditambah dengan kenaikan sebesar Rp70.480.612.811,09 (Rp60.723.595.635,58+Rp9.757.017.175,51) karena surplus/defisit-LO dan adanya perubahan ekuitas atas penambahan nilai aset tetap dan penyertaan modal.

5.4. Penjelasan Atas Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Transfer dan Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 disajikan komparatif dengan tahun 2023 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Laporan Operasional per 31 Desember 2024

No. Urut	Uraian	REF	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL	**5.4.1**				
7.	**PENDAPATAN-LO**	**5.4.1.1**	**3.807.251.320.348,46**	**3.771.566.711.570,55**	**35.684.608.777,91**	**0,95**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**5.4.1.1.1**	**1.532.883.948.039,46**	**1.408.125.443.776,19**	**124.758.504.263,27**	**8,86**
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1.1	1.241.696.897.640,00	1.194.888.132.827,27	46.808.764.812,73	3,92
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.1.2	189.435.198.580,66	180.930.834.126,00	8.504.364.454,66	4,70
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.1.3	71.782.282.545,00	100.347.608,00	71.681.935.037,00	71.413,77
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.1.4	29.968.569.273,80	32.201.129.314,92	(2.214.560.041,12)	(6,88)
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**5.4.1.1.2**	**2.250.342.649.939,00**	**2.300.477.332.356,00**	**(49.834.682.417,00)**	**(2,16)**
7.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	5.4.1.1.2.1	2.240.202.450.939,00	2.265.896.036.356,00	(25.695.585.417,00)	(1,18)
7.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	5.4.1.1.2.2	10.840.199.000,00	33.579.296.000,00	(22.939.097.000,00)	(68,31)
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO**	**5.4.1.1.3**	**23.524.722.370,00**	**62.963.935.438,36**	**(39.439.213.068,36)**	**(62,64)**
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO		23.524.722.370,00	62.963.935.438,36	(39.439.213.068,36)	(62,64)
7.3.2	Pendapatan Hibah - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
8	**BEBAN**	**5.4.1.2**	**3.777.986.157.940,91**	**3.515.703.133.700,76**	**262.283.024.240,15**	**7,46**
8.1.1	Beban Pegawai	5.4.1.2.1	1.425.734.277.899,00	1.206.855.725.423,00	219.078.552.476,00	18,16
8.1.2	Beban Persediaan	5.4.1.2.2	411.997.619.732,98	363.692.493.962,85	48.306.125.780,13	13,28
8.1.2	Beban Jasa	5.4.1.2.3	438.601.526.795,45	438.137.020.169,00	464.506.626,45	0,11
8.1.2	Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.4	35.713.579.251,00	37.341.089.680,00	(627.510.429,00)	(1,68)
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.5	85.304.550.677,00	90.946.510.731,00	(5.641.960.054,00)	(6,20)
8.1.3	Beban Bunga	5.4.1.2.6	22.923.346.615,61	30.971.737.888,72	(8.048.389.273,11)	(25,99)
8.1.4	Beban Subsidi	5.4.1.2.7	2.756.070.000,00	14.861.735.159,00	(12.105.665.159,00)	(81,46)
8.1.5	Beban Hibah	5.4.1.2.8	259.921.590.488,01	201.948.833.827,82	56.972.756.671,19	28,21
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.9	1.087.345.000,00	1.047.898.400,00	39.446.600,00	3,76
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.10	23.455.128.733,00	5.068.059.419,50	18.387.069.313,50	362,80
8.1.8	Beban Lain-lain	5.4.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.1.2.12	196.391.287.691,48	208.186.290.283,51	(11.797.002.592,03)	(5,67)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.1.2.13	59.649.377.363,51	67.805.849.731,35	(8.056.471.367,84)	(11,92)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.1.2.14	213.209.322.245,07	259.469.515.571,18	(46.260.193.326,11)	(17,83)
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.1.2.15	446.378.280,80	682.584.545,17	(236.206.264,37)	(34,60)
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.1.2.16	0,00	1.560.651.060,00	(1.560.651.060,00)	(100,00)
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.1.2.17	3.292.433.601,33	4.162.446.654,66	(870.012.553,33)	(20,90)
8.2.8	Beban Penyusutan Properti Investasi	5.4.1.2.18	1.698.268.239,67	115.223.230,00	1.583.045.009,67	1.373,89
8.3.1	Beban Bagi Hasil	5.4.1.2.19	595.884.052.136,00	678.247.468.974,00	17.636.583.162,00	3,05
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	5.4.1.2.20	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**5.4.1.3**	**29.265.162.407,55**	**255.863.577.869,79**	**(226.578.415.462,24)**	**(88,55)**
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	**5.4.2**				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.2.1	32.683.719.395,26	38.184.886.381,02	(5.501.166.994,76)	(14,41)

No. Urut	Uraian	REF	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	(%)
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.2	341.500.602,00	0,00	341.500.602,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.2.3	1.136.409.202,23	0,00	1.136.409.202,23	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**5.4.2.5**	**31.888.810.786,03**	**38.184.885.381,02**	**(6.296.075.594,99)**	**(16,48)**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**5.4.2.6**	**61.173.973.193,58**	**294.048.464.250,81**	**(232.874.491.057,23)**	**(79,20)**
	POS LUAR BIASA	**5.4.3**				
8.4.1	Beban Tak Terduga	5.4.3.1	460.377.558,00	371.182.409,00	79.195.149,00	21,34
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**5.4.3.2**	**(460.377.558,00)**	**(371.182.409,00)**	**(79.195.149,00)**	**21,34**
	SURPLUS /DEFISIT-LO	**5.4.4**	**60.723.595.635,58**	**293.677.281.841,81**	**(232.953.686.206,23)**	**(79,32)**

Penjelasan secara rinci atas Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

5.4.1. Kegiatan Operasional

5.4.1.1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.807.251.320.348,46 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.771.566.711.570,55 Pendapatan – LO Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp35.684.608.777,91 atau 0,95%. Adapun rincian saldo Pendapatan – LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.2 Pendapatan – LO Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.532.883.948.039,46	1.408.125.443.776,19	124.758.504.263,27	8,86
2	Pendapatan Transfer	2.250.842.649.939,00	2.300.477.332.356,00	(49.634.682.417,00)	(2,16)
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	23.524.722.370,00	62.963.935.438,36	(39.439.213.068,36)	(62,64)
	Jumlah	**3.807.251.320.348,46**	**3.771.566.711.570,55**	**35.684.608.777,91**	**0,95**

5.4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.532.883.948.039,46. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.408.125.443.776,19 realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO mengalami kenaikan sebesar Rp124.758.504.263,27 atau 8,86% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.3 Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.241.609.897.640,00	1.194.893.132.827,27	46.806.764.812,73	3,92
2	Pendapatan Retribusi Daerah	189.435.198.580,86	180.930.834.126,00	8.504.364.454,86	4,70
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	71.762.282.545,00	100.347.508,00	71.661.935.037,00	71.413,77
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.986.569.273,60	32.201.129.314,92	(2.214.560.041,12)	(6,88)
	Jumlah	**1.532.883.948.039,46**	**1.408.125.443.776,19**	**124.758.504.263,27**	**8,86**

Adapun rincian untuk masing-masing saldo Pendapatan Asli Daerah – LO dirincikan sebagai berikut:

5.4.1.1.1.1.Pendapatan Pajak Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024 sebesar Rp1.241.699.897.640,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.194.893.132.827,27 realisasi Pendapatan Pajak Daerah–LO mengalami kenaikan sebesar Rp46.806.764.812,73 atau 3,92%. Penyebab kenaikan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dipengaruhi beberapa factor diantaranya perekonomian Sulawesi Utara yang semakin baik, kepatuhan wajib pajak yang meningkat, serta upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak yang terus dilakukan untuk mendorong kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Rincian nilai Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024 menurut objek pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.4 Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	412.525.504.037,00	392.378.044.696,00	20.147.459.341,00	5,13
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	278.168.511.228,00	267.063.535.975,00	11.104.975.253,00	4,16
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	335.271.376.648,00	328.668.177.922,21	6.603.198.725,79	2,01
4	Pajak Air Permukaan – LO	7.076.607.540,00	4.299.398.742,06	2.777.208.797,94	64,60
5	Pajak Rokok – LO	208.559.597.393,00	202.483.975.492,00	6.075.021.891,00	3,00
6	Pajak Alat Berat – LO	98.900.804,00	0,00	98.900.804,00	0,00
	Jumlah	1.241.699.897.640,00	1.194.893.132.827,27	46.806.764.812,73	3,92

Nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp1.241.699.897.640,00 berasal dari :

a.	Realisasi Pajak Daerah - LRA		1.236.030.479.089,00
b.	Penambahan :		
	Piutang PKB		7.138.751.940,00
	Pajak Rokok		5.285.771.533,00
		Total Penambahan	12.424.523.473,00
c.	Pengurangan :		
	Piutang PKB		6.755.104.922,00
		Total Pengurangan	6.755.104.922,00
d.	Pendapatan Pajak Daerah - LO		1.241.699.897.640,00

Penambahan Piutang Pajak Tahun 2024 sebesar Rp12.424.523.473,00,00 adalah sebagai berikut :

a. Rincian Penambahan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.138.751.940,00 dapat dilihat pada Lampiran III.1 laporan keuangan ini.

b. Penambahan Piutang Pajak Rokok sebesar Rp5.285.771.533,00 yang merupakan potongan Dana Transfer Pajak Rokok yang diperhitungkan untuk BPJS pada Bapenda (Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-166/PK.5/2024, tanggal 12 Desember 2024)

Rincian Pengurangan Piutang Pajak Tahun 2024 sebesar Rp6.755.104.922,00 dapat dilihat

pada Lampiran III.2 laporan keuangan ini.

5.4.1.1.1.2.Pendapatan Retribusi Daerah – *LO*

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2024 sebesar Rp189.435.198.580,66. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp180.930.834.126,00 realisasi retribusi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.504.364.454,66 atau 4,70%. Kenaikan Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran Masyarakat yang meningkat dalam membayar retribusi dan peningkatan kualitas SDM yang mengelola retribusi daerah. Rincian nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Rincian Retribusi Daerah – LO

NO.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	5.767.044.121,66	5.981.406.475,00	(214.362.354,34)	(3,58)
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	179.134.230.358,00	167.482.322.423,00	11.651.907.935,00	6,96
3	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO	0,00	16.237.800,00	(16.237.800,00)	(100,00)
4	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.092.310.818,00	2.312.507.284,00	(1.220.196.466,00)	(52,77)
5	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	524.724.600,00	537.969.850,00	(13.245.250,00)	(2,46)
6	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	9.575.000,00	115.475.043,00	(105.900.043,00)	(91,71)
7	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	74.580.000,00	39.250.000,00	35.330.000,00	90,01
8	Retribusi Pemakaian Alat-LO	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00
9	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO	303.985.000,00	361.978.000,00	(57.993.000,00)	(16,02)
10	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO	92.854.000,00	0,00	92.854.000,00	0,00
11	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	0,00	360.896.450,00	(360.896.450,00)	(100,00)
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	400.133.650,00	631.123.000,00	(230.989.350,00)	(36,60)
13	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	280.175.000,00	0,00	280.175.000,00	0,00
14	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	12.600.000,00	5.600.000,00	7.000.000,00	125,00
15	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO	1.373.864.005,00	1.707.682.800,00	(333.818.795,00)	(19,55)
16	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	99.559.000,00	74.685.000,00	24.874.000,00	32,95
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	66.500.000,00	(66.500.000,00)	(100,00)
18	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO	35.640.000,00	1.236.600.000,00	(1.200.960.000,00)	(97,10)
19	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	218.073.028,00	0,00	218.073.028,00	0,00
	Jumlah	189.435.198.580,66	180.930.834.126,00	8.504.364.454,66	4,70

Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp189.435.198.580,66 berasal dari :

a.	Realisasi Retribusi Daerah - LRA	182.910.540.123,66
b.	Penambahan :	
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis(Klaim BPJS)	21.066.125.157,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	91.000.000,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.855.000,00
	Total Penambahan	21.158.980.157,00
c.	Pengurangan :	
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Klaim BPJS)	94.468.000,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis(Klaim BPJS) TA 2022	14.625.341.700,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.980.000,00
	Total Pengurangan	14.634.321.700,00
d.	**Retribusi Daerah - LO**	**189.435.198.580,66**

Penambahan Pendapatan Retribusi - LO sebesar Rp21.158.980.157,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rincian Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis - LO sebesar Rp21.066.125.157,00 dapat dilihat pada Lampiran III.3 laporan keuangan ini.
b. Rincian Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka – LO sebesar Rp91.000.000,00 dapat dilihat pada Lampiran III.3 laporan keuangan ini.
c. Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp1.855.000,00 merupakan piutang retribusi dari tempat rekreasi Bukit Kasih Kanonang dan Sumaru Endu (Dinas Pariwisata).

Pengurangan Pendapatan Retribusi - LO sebesar Rp14.634.321.700,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengurangan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp94.468.000,00 dapat dilihat pada Lampiran III.4 laporan keuangan ini.
b. Rincian Pengurangan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis - LO sebesar Rp14.530.873.700,00 dapat dilihat pada Lampiran III.4 laporan keuangan ini.
c. Pengurangan Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp8.980.000,00 merupakan piutang retribusi dari tempat rekreasi Bukit Kasih Kanonang dan Sumaru Endu Tahun Anggaran 2023 (Dinas Pariwisata).

5.4.1.1.1.3.Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO merupakan bagian laba (dividen) atas penyertaan modal pada PT. Bank SulutGo. Untuk tahun 2024 realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO adalah sebesar Rp71.762.282.545,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp100.347.508,00 mengalami kenaikan sebesar Rp71.661.935.037,00 atau 71.413,77%.

Kenaikan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO sebesar Rp71.661.935.037,00 disebabkan karena adanya pembagian dividen atas keuntungan PT

Bank SulutGo berdasarkan hasil RUPS Tanggal 5 Februari 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang belum diakui Piutang pada tahun 2023.

5.4.1.1.1.4.Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp29.986.569.273,80. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp32.201.129.314,92 mengalami penurunan sebesar Rp2.214.560.041,12 atau 6,88%. Penurunan Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2024 disebabkan karena karena adanya penurunan pendapatan denda pajak dan pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR).

Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.4.6 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah – LO

NO.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	2.015.100,00	0,00	2.015.100,00	0,00
2	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO	1.343.999,00	0,00	1.343.999,00	0,00
3	Hasil Penjualan Komputer-LO	403.101,00	0,00	403.101,00	0,00
4	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester -LO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
5	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO	300.560,00	0,00	300.560,00	0,00
6	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi(Penggandaan)-LO	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
7	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO	3.634.765,00	0,00	3.634.765,00	0,00
8	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO	2.838.999,00	0,00	2.838.999,00	0,00
9	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO	9.180.106,00	0,00	9.180.106,00	0,00
10	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur/Waktu-LO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
11	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemberah-LO	711.000,00	0,00	711.000,00	0,00
12	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO	12.104.300,00	0,00	12.104.300,00	0,00
13	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO	1.165.800,00	0,00	1.165.800,00	0,00
14	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat RumahTangga Lainnya (Home Use) -LO	8.009.543,00	0,00	8.009.543,00	0,00
15	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam/Kebakaran-LO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
16	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
17	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan	5.600.098,00	0,00	5.600.098,00	0,00

NO.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	%
	Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO				
18	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00
19	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan StudioAudio-LO	235.008,00	0,00	235.008,00	0,00
20	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan StudioVideo dan Film-LO	761.000,00	0,00	761.000,00	0,00
21	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-AlatKomunikasi Telephone -LO	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
22	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat KedokteranUmum-LO	3.492.000,00	0,00	3.492.000,00	0,00
23	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat KesehatanKebidanan dan Penyakit Kandungan-LO	161.420,00	0,00	161.420,00	0,00
24	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat KedokteranTHT-LO	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
25	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
26	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display -LO	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
27	Hasil Penjualan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer -LO	3.123.065,00	0,00	3.123.065,00	0,00
28	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe -LO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
29	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer -LO	536.513,00	0,00	536.513,00	0,00
30	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
31	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00
32	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor-LO	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	0,00
33	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	6.206.510,00	0,00	6.206.510,00	0,00
34	Hasil Sewa BMD-LO	272.842.000,00	81.574.850,00	191.267.150,00	234,47
35	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	1.325.364.999,00	1.596.807.096,00	(271.442.097,00)	(17,00)
36	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	992.946.025,67	948.501.419,00	44.444.606,67	4,69
37	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	5.280.773.667,00	4.307.327.242,00	973.446.425,00	22,60
38	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	17.160.126,00	5.406.588,00	11.753.538,00	217,39
39	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	2.641.783,00	985,00	2.640.798,00	268.101,32
40	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	5.184.121.254,00	3.745.679.772,98	1.438.541.481,02	38,41

NO.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	%
41	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	1.588.343.788,32	283.782.216,00	1.304.561.572,32	459,71
42	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	2.913.634.633,73	9.378.950.997,41	(6.465.316.363,68)	(68,93)
43	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	90.241.578,00	(90.241.578,00)	(100,00)
44	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO	0,00	91.741.775,00	(91.741.775,00)	(100,00)
45	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO	66.949.070,00	0,00	66.949.070,00	0,00
46	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum-LO	643.500,00	0,00	643.500,00	0,00
47	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO	3.705.500,00	0,00	3.705.500,00	0,00
48	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Jeep-LO	877.800,00	436.495.885,00	(435.618.085,00)	(99,80)
49	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pribadi-LO	474.572.530,00	0,00	474.572.530,00	100,00
50	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep - Pemerintah Daerah-LO	9.084.600,00	0,00	9.084.600,00	0,00
51	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Minibus-LO	5.496.300,00	3.662.016.706,00	(3.656.520.406,00)	(99,85)
52	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO	4.008.736.700,00	0,00	4.008.736.700,00	0,00
53	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO	7.681.500,00	0,00	7.681.500,00	0,00
54	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO	35.126.500,00	0,00	35.126.500,00	0,00
55	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus- LO	0,00	15.331.416,00	(15.331.416,00)	(100,00)
56	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus -Pribadi-LO	8.342.400,00	0,00	8.342.400,00	0,00
57	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus -Umum-LO	1.468.500,00	0,00	1.468.500,00	0,00
58	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus -Pemerintah Daerah-LO	3.418.000,00	0,00	3.418.000,00	0,00
59	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-LO	0,00	(1.117.200,00)	1.117.200,00	(100,00)
60	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum-LO	76.400,00	0,00	76.400,00	0,00
61	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- Pick Up-LO	115.300,00	935.460.192,00	(935.344.892,00)	(99,99)
62	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up - Pribadi-LO	1.054.588.200,00	0,00	1.054.588.200,00	0,00
63	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up - Umum-LO	3.819.800,00	0,00	3.819.800,00	0,00
64	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up - Pemerintah Daerah-LO	8.545.100,00	0,00	8.545.100,00	0,00
65	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- Light Truck-LO	98.300,00	565.489.863,00	(565.391.563,00)	(99,98)
66	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck - Pribadi-LO	520.076.050,00	0,00	520.076.050,00	0,00
67	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck - Umum-LO	12.219.700,00	0,00	12.219.700,00	0,00
68	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck - Pemerintah Daerah-LO	2.985.400,00	0,00	2.985.400,00	0,00
69	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- Truck-LO	0,00	132.036.610,00	(132.036.610,00)	(100,00)
70	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Pribadi-LO	100.775.050,00	0,00	100.775.050,00	0,00

NO.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	%
71	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Umum-LO	24.621.100,00	0,00	24.621.100,00	0,00
72	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah-LO	851.800,00	0,00	851.800,00	0,00
73	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	0,00	1.240.300,00	(1.240.300,00)	(100,00)
74	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van - Pribadi-LO	3.000.600,00	0,00	3.000.600,00	0,00
75	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	307.900,00	1.295.226.523,00	(1.294.918.623,00)	(99,98)
76	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi-LO	1.444.494.800,00	0,00	1.444.494.800,00	0,00
77	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat-LO	2.248.200,00	0,00	2.248.200,00	0,00
78	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah-LO	5.867.400,00	0,00	5.867.400,00	0,00
79	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	0,00	1.322.900,00	(1.322.900,00)	(100,00)
80	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi-LO	1.015.800,00	0,00	1.015.800,00	0,00
81	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00
82	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO	716.000,00	2.900.800,00	(2.184.800,00)	(75,32)
83	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Jeep-LO	75.275.400,00	129.095.500,00	(53.820.100,00)	(41,69)
84	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Minibus-LO	529.420.500,00	1.428.514.550,00	(899.094.050,00)	(62,94)
85	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- Microbus-LO	864.000,00	5.340.000,00	(4.476.000,00)	(83,82)
86	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO	0,00	1.098.000,00	(1.098.000,00)	(100,00)
87	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	149.984.100,00	531.656.600,00	(381.672.500,00)	(71,79)
88	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	171.659.500,00	319.625.000,00	(147.956.500,00)	(46,29)
89	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	259.668.700,00	138.131.900,00	121.536.800,00	87,99
90	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	0,00	2.688.000,00	(2.688.000,00)	(100,00)
91	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua-LO	638.424.900,00	554.711.850,00	84.713.050,00	15,27
92	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	4.602.200,00	1.366.000,00	3.236.200,00	255,62
93	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga -LO	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	95.758.687,54	0,00	95.758.687,54	0,00
94	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	14.020.560,00	0,00	14.020.560,00	0,00
95	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	95.127.900,00	1.512.683.403,53	(1.417.555.470,53)	(93,71)
96	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	2.388.061.024,54	0,00	2.388.061.024,54	0,00

NO.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	%
97	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-GajiPokok PPPK-LO	81.329.852,00	0,00	81.329.852,00	0,00
98	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan KeluargaASN-Tunjangan Keluarga PNS-LO	4.688.770,00	0,00	4.688.770,00	0,00
99	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS-LO	10.043.786,00	0,00	10.043.786,00	0,00
	Total	29.986.569.273,80	32.201.129.314,92	(2.214.560.041,12)	(6,88)

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO sebesar Rp29.986.569.273,80 berasal dari :

a.	Realisasi Lain-lain PAD yang sah - LRA	30.346.101.638,13
b.	Penambahan :	
	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	95.879.999,00
	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	2.641.070,00
	Pendapatan Denda Pajak	3.858.180,00
	Total Penambahan	102.379.249,00
c.	Pengurangan :	
	Pendapatan Diterima Dimuka	350.000.000,00
	Hasil Kerjasama Daerah	107.972.733,33
	Pendapatan Denda Pajak	3.938.880,00
	Total Pengurangan	461.911.613,33
d.	**Lain-lain PAD yang sah - LO**	**29.986.569.273,80**

Penambahan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp102.379.249,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp95.879.999,00 rincian dapat dilihat pada Lampiran III.5 laporan keuangan ini.
b. Pajak Giro yang yang dipotong pihak bank seharusnya tidak dipotong di beberapa sekolah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.641.070,00
c. Pendapatan Denda Pajak pada beberapa UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp3.858.180,00 rincian dapat dilihat pada Lampiran III.5 Laporan Operasional.

Pengurangan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp461.911.613,33 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan diterima dimuka untuk pembayaran gedung joeang jan s/d desember 2024 sebesar Rp350.000.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
b. Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp107.972.733,33 rincian dapat dilihat pada Lampiran III.6 laporan keuangan ini.
c. Pendapatan Denda Pajak pada beberapa UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp3.938.880,00 rincian dapat dilihat pada Lampiran III.6 laporan keuangan ini.

5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer– LO

Realisasi Pendapatan Transfer – LO tahun 2024 adalah sebesar Rp2.250.842.649.939,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar

Rp2.300.477.332.356,00, mengalami penurunan sebesar Rp49.634.682.417,00 atau 2,16%. Penyebab penurunan Pendapatan Transfer – LO tahun 2024 dikarenakan terjadi peningkatan pembayaran Dana Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota serta penurunan transfer DBH dan DAK Fisik dari Pemerintah Pusat.

Tabel 5.4.7 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

No	Pendapatan Transfer - LO	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.240.202.450.939,00	2.266.898.036.356,00	(26.695.585.417,00)	(1,18)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	10.640.199.000,00	33.579.296.000,00	(22.939.097.000,00)	(68,31)
	Jumlah	2.250.842.649.939,00	2.300.477.332.356,00	(49.634.682.417,00)	(2,16)

a.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		2.131.577.594.004,00
b.	Penambahan :		
	Dana Alokasi Umum (DAU)		150.057.390.935,00
		Total Penambahan	150.057.390.935,00
c.	Pengurangan		
	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.792.335.000,00
		Total Pengurangan	30.792.335.000,00
d.	**Pendapatan Transfer - LO**		**2.250.842.649.939,00**

Penambahan Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp150.057.390.935,00 di Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

a. TDF-TKD TA.2024 sebesar Rp3.125.838.000,00
b. Pokok dan bunga pinjaman yang dipotong dari dana DAU sebesar Rp146.931.552.935,00 TA 2024.

Perhitungan pokok dan bunga pinjaman yang dipotong dari Dana DAU dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.8 Rincian PenambahanPendapatan Transfer – LO

No.	Bulan	Pokok Pinjaman	Bunga Pinjaman	Keterangan
1	Bulan Januari sd Agustus 2024	123.501.723.352,00	15.974.885.565,00	Untuk Pemotongan DAU Periode Penyaluran Bulan Januari s/d Desember Tahun 2024, Nominal Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KM.7/2023 Tanggal 20 Desember 2023
2	Bulan September sd Desember 2024	0,00	7.454.944.018,00	Untuk Pemotongan DAU Periode Penyaluran Bulan September s/d Desember Tahun 2024, Nominal Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KM.7/2024 Tanggal 26 Agustus 2024
	TOTAL	123.501.723.352,00	23.429.829.583,00	

Pengurangan Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp30.792.335.000,00 merupakan pembayaran Dana Bagi Hasil TA 2024.

5.4.1.1.2.1.Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.240.202.450.939,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.266.898.036.356,00, mengalami penurunan sebesar Rp26.695.585.417,00 atau 1,18%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tahun 2024 sebagai

berikut:

Tabel 5.4.9 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

NO	URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	123.262.597.000,00	145.882.568.000,00	(22.619.971.000,00)	(15,51)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.418.410.108.322,00	1.391.548.362.846,00	26.861.745.476,00	1,93
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	302.618.460.629,00	335.435.196.455,00	(32.816.735.826,00)	(9,78)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	395.911.284.988,00	394.031.909.055,00	1.879.375.933,00	0,48
	Jumlah	2.240.202.450.930,00	2.266.898.036.356,00	(26.695.585.417,00)	(1,18)

5.4.1.1.2.2.Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2024 adalah Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp10.640.199.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp33.579.296.000,00 mengalami penurunan sebesar sebesar Rp22.939.097.000,00 atau 68,31%.

5.4.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2024 adalah Pendapatan Hibah sebesar Rp23.524.722.370,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp62.963.935.438,36, maka mengalami penurunan sebesar Rp39.439.213.068,36 atau 62,64%. Penurunan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO atau Pendapatan Hibah Tahun 2024 disebabkan karena tidak adanya realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah, Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Tabel 5.4.10 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

NO	URAIAN	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	22.075.616.370,00	17.597.043.302,00	4.478.573.068,00	25,45
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	0,00	42.366.888.114,00	(42.366.888.114,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	2.430.476,00	(2.430.476,00)	(100,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	1.191.104.000,00	863.136.000,00	327.968.000,00	38,00
5	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO	258.002.000,00	270.210.500,00	(12.208.500,00)	(4,52)
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	1.834.227.046,36	(1.834.227.046,36)	(100,00)
	Jumlah	23.524.722.370,00	62.963.935.438,36	(39.439.213.068,36)	(62,64)

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO sebesar Rp23.524.722.370,00 berasal dari :

a. Realisasi Pendapatan Hibah - LRA 1.211.606.000,00
b. Penambahan :
   Hibah dari Pemerintah Pusat 22.075.616.370,00
   Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 237.500.000,00

	Total Penambahan	22.313.116.370,00
d.	**Pendapatan Hibah - LO**	**23.524.722.370,00**

Penambahan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO sebesar Rp23.313.116.370,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penambahan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp22.075.616.370,00 rincian dapat dilihat pada Lampiran III.7 laporan keuangan ini.
b. Penambahan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri - LO sebesar Rp237.500.000,00 merupakan hibah atas Aset Tetap Kendaraan Bermotor Khusus (mobil Ambulance) Dari Bank Mandiri sesuai BAST Nomor JBR.R10.Ar.MDO/ /2023 tanggal 20 Maret 2023 ke RSUD Tipe B pada UPTD RSUD Tipe B.

5.4.1.2. Beban – LO

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.777.966.157.940,91 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.515.703.133.700,76, mengalami kenaikan sebesar Rp262.263.024.240,15 atau 7,46%, yang terdiri dari:

Tabel 5.4.11 Rincian Beban – LO

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pegawai	1.425.734.277.899,00	1.206.655.725.423,00	219.078.552.476,00	18,16
2	Beban Persediaan	411.997.619.732,98	363.692.493.952,85	48.305.125.780,13	13,28
3	Beban Jasa	439.601.526.795,45	439.137.020.169,00	464.506.626,45	0,11
4	Beban Pemeliharaan	36.713.579.251,00	37.341.089.680,00	(627.510.429,00)	(1,68)
5	Beban Perjalanan Dinas	85.304.660.677,00	90.946.510.731,00	(5.641.850.054,00)	(6,20)
6	Beban Bunga	22.923.346.615,61	30.971.737.888,72	(8.048.389.273,11)	(25,99)
8	Beban Subsidi	2.756.070.000,00	14.861.735.159,00	(12.105.665.159,00)	(81,46)
9	Beban Hibah	258.921.590.499,01	201.948.833.827,82	56.972.756.671,19	28,21
10	Beban Bantuan Sosial	1.087.345.000,00	1.047.898.400,00	39.446.600,00	3,76
11	Beban Penyisihan Piutang	23.455.126.733,00	5.068.059.419,50	18.387.069.313,50	362,80
12	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	196.391.287.691,48	208.188.290.283,51	(11.797.002.592,03)	(5,67)
13	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	59.549.377.363,51	67.605.848.731,35	(8.056.471.367,84)	(11,92)
14	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	213.209.322.245,07	259.469.515.571,18	(46.260.193.326,11)	(17,83)
15	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	446.379.260,80	682.584.545,17	(236.205.284,37)	(34,60)
16	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	1.560.651.080,00	(1.560.651.080,00)	(100,00)
17	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.292.433.801,33	4.162.446.654,66	(870.012.853,33)	(20,90)
18	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.698.268.239,67	115.223.230,00	1.583.045.009,67	1.373,89
19	Beban Bagi Hasil	595.884.052.136,00	578.247.468.974,00	17.636.583.162,00	3,05
20	Beban Bantuan Keuangan	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**3.777.966.157.940,91**	**3.515.703.133.700,76**	**262.263.024.240,15**	**7,46**

5.4.1.2.1. Beban Pegawai – LO

Realisasi Beban Pegawai – LO tahun 2024 sebesar Rp1.425.734.277.899,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.206.655.725.423,00 mengalami kenaikan sebesar Rp219.078.552.476,00 atau 18,16%.

Tabel 5.4.12 Rincian Beban Pegawai

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	865.999.568.784,00	734.214.642.673,00	131.784.926.111,00	17,95
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	282.686.663.380,00	249.418.193.146,00	33.268.470.234,00	13,34
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	241.634.119.110,00	186.560.450.469,00	55.073.668.641,00	29,52
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	31.890.262.674,00	32.369.460.064,00	(479.197.490,00)	(1,48)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.293.445.627,00	1.625.459.331,00	(332.013.704,00)	(20,43)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.230.218.424,00	2.467.519.740,00	(237.301.316,00)	(9,62)
	Jumlah	1.425.734.277.899,00	1.206.655.725.423,00	219.078.552.476,00	18,16

Beban Pegawai – LO tahun 2024 sebesar Rp1.425.734.277.899,00 berasal dari :

a. Realisasi Belanja Pegawai – LRA 1.423.903.352.025,00

b. Penambahan :

- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 21.750.455.114,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 74.402.640,00

Total Penambahan : 21.824.857.754,00

c. Pengurangan :

- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 19.993.931.880,00

Total Pengurangan : 19.993.931.880,00

d. Beban Pegawai – LO : 1.425.734.277.899,00

Penambahan Beban Pegawai – LO sebesar Rp21.824.857.754,00 adalah sebagai berikut :

a. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp21.750.455.114,00 rincian dapat dilihat pada Lampiran III.8 laporan keuangan ini.

b. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebesar Rp74.402.640,00 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah.

Pengurangan Beban Pegawai - LO sebesar Rp19.993.931.880,00 rincian dapat dilihat pada Lampiran III.9 laporan keuangan ini.

5.4.1.2.2. Beban Persediaan - LO

Beban Persediaan – LO adalah tahun 2024 sebesar Rp411.997.619.732,98 Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp363.692.493.952,85 mengalami kenaikan sebesar Rp48.305.125.780,13 atau 13,28%.

Rincian Beban Persediaan - LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.13 Rincian Beban Persediaan

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	623.730.176,00	1.384.889.289,00	(761.159.113,00)	(54,96)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	7.894.137.218,00	8.013.893.396,00	(119.756.178,00)	(1,49)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.656.360.564,00	1.607.097.633,00	49.262.931,00	3,27
4	Beban Bahan-Bahan Baku	3.438.790.628,00	3.651.920.083,00	(213.129.555,00)	(5,84)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	287.452.500,00	733.507.061,00	(446.054.561,00)	(60,81)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	114.066.120,00	75.582.400,00	38.503.720,00	50,94

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.633.242.303,00	1.377.702.893,00	255.539.410,00	18,55
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	366.447.500,00	220.683.715,00	145.763.785,00	66,05
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	174.022.470,00	174.461.870,00	(439.400,00)	(0,25)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.211.583.610,00	5.066.054.653,00	145.528.957,00	2,87
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	554.576.682,00	473.309.582,00	81.267.100,00	17,17
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	278.490.120,00	(278.490.120,00)	(100,00)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	30.272.000,00	57.314.800,00	(27.042.800,00)	(47,18)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.077.727.254,00	6.403.181.103,00	(325.453.849,00)	(5,08)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.414.894.819,00	5.846.413.847,00	568.480.972,00	9,72
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.193.132.182,00	10.506.365.944,00	686.766.238,00	6,54
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.142.724.279,00	1.107.653.163,00	35.071.116,00	3,17
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8.578.427.232,00	7.479.371.470,00	1.099.055.762,00	14,69
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.758.647.091,22	5.551.835.813,78	206.811.277,44	3,73
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.601.006.870,00	2.437.491.985,00	163.514.885,00	6,71
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	69.697.810,00	56.797.620,00	13.130.190,00	23,13
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	704.786.888,00	85.439.000,00	619.347.888,00	724,90
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.172.405.250,00	530.550.800,00	641.854.450,00	120,98
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.499.353.477,00	3.362.341.064,00	137.012.413,00	4,07
25	Beban Obat-Obatan-Obat	34.401.362.962,37	57.332.000.002,47	(22.930.637.040,10)	(40,00)
26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	37.000.876.084,39	27.283.436.887,05	9.717.439.197,34	35,62
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	53.316.292.719,00	35.526.999.691,45	17.789.293.027,55	50,07
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	45.670.584.311,00	0,00	45.670.584.311,00	0,00
29	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	43.968.490,00	159.284.299,00	(115.315.809,00)	(72,40)
30	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.326.796.935,00	4.012.368.410,10	(2.685.571.475,10)	(66,93)
31	Beban Natura dan Pakan-Pakan	356.327.000,00	712.319.025,00	(356.992.026,00)	(50,12)
32	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	35.364.760,00	(35.364.760,00)	(100,00)
33	Beban Makanan dan Minuman Rapat	28.293.503.130,00	30.074.230.470,00	(1.780.727.340,00)	(5,92)
34	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.742.640.290,00	6.423.483.434,00	319.156.846,00	4,97
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	9.155.401.850,00	6.983.973.100,00	2.171.428.750,00	31,09
36	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.151.024.675,00	3.450.881.526,00	1.700.143.149,00	49,27
37	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.664.533.689,00	3.630.262.825,00	34.270.864,00	0,94
38	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	246.336.000,00	193.000.000,00	53.336.000,00	27,64
39	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.188.735.000,00	729.300.000,00	459.435.000,00	63,00
40	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	192.744.930,00	220.672.000,00	(27.927.200,00)	(12,66)
41	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	261.066.976,00	309.724.900,00	(48.657.924,00)	(15,71)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
42	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.845.153.655,00	1.359.497.000,00	485.656.655,00	35,72
43	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	602.091.500,00	149.516.650,00	452.574.850,00	302,69
44	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	175.189.250,00	167.957.000,00	7.232.250,00	4,31
45	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	137.419.250,00	158.961.178,00	(21.541.928,00)	(13,55)
46	Beban Pakaian KORPRI	224.343.600,00	360.718.000,00	(136.374.200,00)	(37,81)
47	Beban Pakaian Adat Daerah	362.870.000,00	346.400.000,00	16.470.000,00	4,75
48	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.629.166.000,00	662.999.600,00	966.166.400,00	145,73
49	Beban Pakaian Olahraga	626.886.250,00	1.531.936.378,00	(905.048.128,00)	(59,09)
50	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	5.023.500,00	4.924.500,00	99.000,00	2,01
51	Beban Barang dan Jasa BOS	110.280.552.623,00	115.489.963.032,00	(5.209.410.409,00)	(4,51)
	TOTAL	411.997.619.732,98	363.682.493.952,85	48.305.125.780,13	13,28

Beban Persediaan – LO tahun 2024 sebesar Rp411.997.619.732,98 berasal dari :

a.	Realisasi Belanja Persediaan – LRA	289.334.293.037,00
b.	Penambahan :	
	Beban Persediaan 2024	186.732.799.508,58
	Total Penambahan :	186.732.799.508,58
c.	Pengurangan :	
	Beban Persediaan 2023	64.069.472.812,60
	Total Pengurangan :	64.069.472.812,60
d.	**Beban Persediaan – LO :**	**411.997.619.732,98**

Penambahan Beban Persediaan – LO sebesar Rp186.732.799.508,58 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Beban Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp4.883.062.082,00
2. Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebesar Rp5.050.500,00
3. Beban Bahan-Isi Tabung Gas sebesar Rp533.683.044,00
4. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 253.489.360,00
5. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp179.331.825,00
6. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp730.312.391,00
7. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp10.823.800
8. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp261.932.180,00
9. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp470.729.037,22
10. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp221.025.893,00
11. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp15.500.000,00
12. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya sebesar Rp448.738.215,00
13. Beban Obat-Obatan-Obat sebesar Rp34.273.047.829,14
14. Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp27.282.970.799,22
15. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp6.513.359.281,00
16. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp5.830.000,00

17. Beban Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp99.039.827,00
18. Beban Natura dan Pakan-Pakan sebesar Rp24.235.000,00
19. Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebesar Rp240.085.822,00
20. Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp110.280.552.623,00

Rincian Penambahan Beban Persediaan – LO dapat dilihat pada Lampiran III.10 laporan keuangan ini.

Pengurangan Beban Persediaan – LO sebesar Rp64.069.472.812,60 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Beban Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp4.009.829.049,00
2. Beban Bahan-Isi Tabung Gas sebesar Rp179.676.530
3. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp316.629.220,00
4. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp278.369.014,00
5. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp495.657.746,00
6. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp5.656.850,00
7. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp234.682.590,00
8. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp535.176.478,00
9. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp249.830.631,00
10. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp24.640.000,00
11. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp222.000,00
12. Beban Obat-Obatan-Obat sebesar Rp33.852.750.372,77
13. Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp20.059.781.436,83
14. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp3.596.002.467,00
15. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp28.629.050,00
16. Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga sebesar Rp31.864.770,00
17. Beban Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp66.469.880,00
18. Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebesar Rp103.604.728,00

Rincian Pengurangan Beban Persediaan – LO dapat dilihat pada Lampiran III.11 laporan keuangan ini.

5.4.1.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa – LO adalah tahun 2024 sebesar Rp438.601.526.795,45 Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp438.137.020.169,00 mengalami kenaikan sebesar Rp464.506.626,45 atau 0,11%.

Rincian Beban Jasa - LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.14 Rincian Beban Jasa

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danParitia	3.459.961.500,00	6.441.442.500,00	(2.981.481.000,00)	(46,29)
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	555.400.000,00	1.403.090.000,00	(847.690.000,00)	(60,42)
3	Beban Honorarium Rohaniwan	13.900.000,00	32.800.000,00	(18.900.000,00)	(57,62)
4	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola TeknologiInformasi dan Pengelola Website	25.600.000,00	15.700.000,00	9.900.000,00	63,06
5	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000,00	351.250.000,00	(301.250.000,00)	(85,77)
6	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	30.598.336.730,00	50.977.638.068,00	(20.379.301.338,00)	(39,98)
7	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	76.127.263.367,00	72.328.763.203,00	3.798.520.164,00	5,25
8	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.620.136.150,00	1.018.501.500,00	601.634.650,00	59,07
9	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	15.390.921.075,00	15.330.626.005,00	60.295.070,00	0,39
10	Beban Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	16.335.175.798,00	16.375.440.950,00	(40.265.152,00)	(0,25)
11	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	1.259.494.000,00	824.043.700,00	445.450.300,00	54,06
12	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.068.918.325,00	3.040.991.650,00	(972.073.325,00)	(31,97)
13	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	256.063.500,00	310.550.550,00	(54.487.050,00)	(17,55)
14	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	150.000.000,00	13.000.000,00	137.000.000,00	1.053,85
15	Beban Jasa Tenaga Administrasi	48.440.288.864,00	43.444.946.430,00	4.995.342.434,00	11,50
16	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	24.054.014.684,00	24.388.177.648,00	(334.162.964,00)	(1,37)
17	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.524.021.180,00	4.066.431.760,00	(2.542.410.580,00)	(62,52)
18	Beban Jasa Tenaga Ahli	8.247.400.000,00	8.346.313.695,00	(98.913.695,00)	(1,19)
19	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	15.888.273.287,00	15.139.039.624,00	749.233.663,00	4,95
20	Beban Jasa Tenaga Keamanan	14.728.684.750,00	14.384.898.470,00	343.786.280,00	2,39
21	Beban Jasa Tenaga Caraka	245.308.750,00	296.811.600,00	(51.502.850,00)	(17,35)
22	Beban Jasa Tenaga Supir	4.308.869.700,00	4.122.718.710,00	186.149.990,00	4,52
23	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	195.350.000,00	192.190.000,00	3.160.000,00	1,64
24	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	468.059.000,00	558.429.900,00	(90.370.900,00)	(16,18)
25	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
26	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	280.150.000,00	387.539.000,00	(107.389.000,00)	(27,71)
27	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.534.232.000,00	1.814.947.900,00	(280.715.900,00)	(15,47)
28	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4.042.659.456,00	4.790.102.358,00	(747.442.902,00)	(15,60)
29	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	889.909.000,00	783.093.003,00	106.715.997,00	13,63
30	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat RumahTangga	438.356.764,00	308.467.800,00	129.888.964,00	42,11
31	Beban Jasa Kalibrasi	138.394.022,00	35.241.500,00	103.152.522,00	292,70
32	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.607.370.302,00	709.296.035,00	898.074.267,00	126,61
33	Beban Jasa Jalan/Tol	147.500.000,00	184.575.000,00	(37.075.000,00)	(20,09)
34	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	21.766.244.031,00	19.264.015.178,00	2.502.228.853,00	12,99
35	Beban Jasa Operator Kapal	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
36	Beban Tagihan Telepon	209.053.549,00	154.520.985,00	54.532.564,00	35,29
37	Beban Tagihan Air	1.610.078.724,00	1.566.845.337,00	43.233.387,00	2,76
38	Beban Tagihan Listrik	16.992.041.511,00	17.110.663.334,00	(118.621.823,00)	(0,69)
39	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	261.435.000,00	328.363.300,00	(66.928.300,00)	(20,38)
40	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.428.905.799,00	12.603.538.305,00	825.367.494,00	6,55
41	Beban Paket/Pengiriman	710.807.014,00	390.332.314,00	320.474.700,00	82,10
42	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.064.236.328,00	922.128.637,00	142.107.691,00	15,41
43	Beban Lembur	437.778.000,00	306.274.000,00	131.504.000,00	42,94
44	Beban Medical Check Up	44.718.000,00	13.686.560,00	31.031.440,00	226,73
45	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	20.000.000.000,00	24.325.860.400,00	(4.325.860.400,00)	(17,78)
46	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	(14.179.027,00)	14.179.027,00	(100,00)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
47	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.540.757.333,00	8.149.964.357,00	(609.207.024,00)	(7,47)
48	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	447.622.725,00	9.481.923.728,00	(9.034.301.003,00)	(95,28)
49	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	559.066.819,00	10.439.712.957,00	(9.880.646.138,00)	(94,64)
50	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	198.814.168,00	0,00	198.814.168,00	0,00
51	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	6.399.976.284,00	0,00	6.399.976.284,00	0,00
52	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	7.970.330.355,00	0,00	7.970.330.355,00	0,00
53	Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
54	Beban Sewa Electric Generating Set	234.005.030,00	362.295.000,00	(128.289.970,00)	(35,41)
55	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.622.828.640,00	2.463.691.860,00	(840.863.220,00)	(34,13)
56	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	204.850.000,00	265.862.000,00	(61.012.000,00)	(22,97)
57	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	137.000.000,00	(137.000.000,00)	(100,00)
58	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	325.600.000,00	(325.600.000,00)	(100,00)
59	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	22.682.600,00	56.620.000,00	(33.937.400,00)	(59,94)
60	Beban Sewa Kapal Terbang	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
61	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	555.278.820,00	564.650.000,00	(9.371.180,00)	(1,66)
62	Beban Sewa Mebel	2.650.671.412,00	3.830.924.404,00	(1.180.092.992,00)	(30,80)
63	Beban Sewa Alat Pendingin	343.985.160,00	457.500.000,00	(113.514.840,00)	(24,81)
64	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	621.427.230,00	760.480.000,00	(139.052.770,00)	(18,28)
65	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	805.493.450,00	861.688.200,00	(56.194.750,00)	(6,52)
66	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	561.900.000,00	516.500.000,00	45.400.000,00	8,79
67	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	382.144.590,00	576.355.000,00	(194.210.410,00)	(33,70)
68	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	264.437.589,00	177.700.000,00	86.737.589,00	48,81
69	Beban Sewa Hotel	7.217.101.500,00	7.272.950.206,00	(55.848.706,00)	(0,77)
70	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	16.400.000,00	67.600.000,00	(51.200.000,00)	(75,74)
71	Beban Sewa Audio Visual	0,00	95.200.000,00	(95.200.000,00)	(100,00)
72	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	705.758.574,00	0,00	705.758.574,00	0,00
73	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.995.582.974,00	3.370.573.882,00	(374.990.908,00)	(11,13)
74	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	266.903.665,00	642.188.912,00	(375.285.247,00)	(58,59)
75	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untukPekerjaan Teknik Sipil Air	1.010.458.530,00	596.230.950,00	414.227.580,00	69,47
76	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untukPekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.782.930.951,00	1.273.515.487,00	509.415.464,00	40,00
77	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	154.966.000,00	692.140.500,00	(537.184.500,00)	(77,61)
78	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan PemanfaatanRuang	112.923.075,00	222.799.200,00	(109.876.125,00)	(49,32)
79	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.223.072.043,00	3.895.354.624,00	(1.672.282.581,00)	(42,93)
80	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan KonstruksiBangunan Gedung	1.264.314.249,00	0,00	1.264.314.249,00	0,00
81	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan KonstruksiTeknik Sipil Transportasi	664.623.600,00	993.396.997,00	(328.773.397,00)	(33,10)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
82	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan TingkatKemurnian	51.000.000,00	48.000.000,00	3.000.000,00	6,25
83	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	558.909.635,00	0,00	558.909.635,00	0,00
84	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	294.993.500,00	386.932.000,00	(91.938.500,00)	(23,76)
85	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik	979.942.826,00	891.052.500,00	88.890.326,00	9,98
86	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.247.622.500,00	1.396.148.550,00	(147.524.050,00)	(10,57)
87	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	505.733.436,00	0,00	505.733.436,00	0,00
88	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	1.919.950.000,00	1.981.150.000,00	(61.200.000,00)	(3,09)
89	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	1.337.105.000,00	1.400.000.000,00	(62.895.000,00)	(4,49)
90	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	20.056.574.578,00	3.061.485.273,00	16.995.089.305,00	555,13
91	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	995.870.000,00	848.495.000,00	147.375.000,00	17,37
92	Beban Beasiswa	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00
93	Beban Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	76.140.000,00	4.932.000,00	71.208.000,00	1.443,80
94	Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan Mesin	8.356.105.994,45	0,00	8.356.105.994,45	0,00
95	Beban Barang Ekstra Komptable Aset Tetap Lainnya	58.550.800,00	0,00	58.550.800,00	0,00
	TOTAL	438.601.526.795,45	438.137.526.169,00	464.506.626,45	0,11

Beban Jasa – LO sebesar Rp 438.601.526.795,45 berasal dari :

a.	Realisasi Belanja Jasa – LRA	442.688.781.752,00
b.	Penambahan :	
	Hutang Beban Barjas TA 2024	32.863.941.688,45
	Total Penambahan :	32.863.941.688,45
c.	Pengurangan :	
	Pembayaran Hutang Beban Barjas TA 2023	36.951.196.645,00
	Total Pengurangan :	36.951.196.645,00
d.	**Beban Jasa – LO :**	**438.601.526.795,45**

Penambahan Beban Jasa – LO sebesar Rp32.863.941.688,45 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Beban Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp2.407.845.000,00
2. Beban Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp7.038.223.781,00
3. Beban Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp737.465.300,00
4. Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp1.153.625.725,00
5. Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp1.312.754.000,00
6. Beban Jasa Tenaga Perhubungan sebesar Rp92.789.750,00
7. Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebesar Rp158.095.000,00
8. Beban Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp3.527.561.700,00
9. Beban Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp1.732.239.225,00
10. Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp104.600.000,00
11. Beban Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp57.500.000,00
12. Beban Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp932.138.314,00
13. Beban Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp746.563.250,00
14. Beban Jasa Tenaga Caraka sebesar Rp5.500.000,00
15. Beban Jasa Tenaga Supir sebesar Rp312.500.000,00
16. Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebesar Rp14.405.000,00

17. Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp123.050.000,00
18. Beban Jasa Kalibrasi sebesar Rp102.994.197,00
19. Beban Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp1.037.722.794,00
20. Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp10.500.000,00
21. Beban Tagihan Telepon sebesar Rp4.192.420,00
22. Beban Tagihan Air sebesar Rp16.157.600,00
23. Beban Tagihan Listrik sebesar Rp371.440.369,00
24. Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp1.750.000,00
25. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp947.950.000,00
26. Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp697.890.922,00
27. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp36.367.462,00
28. Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp45.371.746,00
29. Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software sebesar Rp705.758.574,00
30. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebesar Rp5.229.765,00
31. Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebesar Rp9.102.000,00
32. Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan Mesin sebesar Rp8.356.106.994,45
33. Beban Barang Ekstra Komptable Aset Tetap Lainnya sebesar Rp58.550.800,00

Rincian Penambahan Beban Jasa – LO dapat dilihat pada Lampiran III.12 laporan keuangan ini.

Pengurangan Beban Persediaan – LO sebesar Rp36.951.196.645,00 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Beban Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp2.445.345.000,00
2. Beban Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp21.421.523.762,00
3. Beban Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp32.550.000,00
4. Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp155.240.600,00
5. Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp1.312.409.550,00
6. Beban Jasa Tenaga Perhubungan sebesar Rp89.800.100,00
7. Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebesar Rp242.560.000,00
8. Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp20.071.150,00
9. Beban Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp3.301.758.250,00
10. Beban Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp1.852.285.743,00
11. Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp1.037.717.400,00
12. Beban Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp31.200.000,00
13. Beban Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp874.867.720,00
14. Beban Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp971.738.800,00
15. Beban Jasa Tenaga Caraka sebesar Rp24.945.500,00
16. Beban Jasa Tenaga Supir sebesar Rp331.048.600,00
17. Beban Jasa Tenaga Juru Masak sebesar Rp17.500.000,00
18. Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebesar Rp33.862.500,00

19. Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp224.520.000,00
20. Beban Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp8.970.000,00
21. Beban Tagihan Telepon sebesar Rp3.890.471,00
22. Beban Tagihan Air sebesar Rp6.303.300,00
23. Beban Tagihan Listrik sebesar Rp487.867.737,00
24. Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp1.750.000,00
25. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp947.950.000,00
26. Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp437.817.326,00
27. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp29.834.884,00
28. Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp37.360.392,00
29. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebesar Rp230.848.400,00
30. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebesar Rp9.322.500,00
31. Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebesar Rp229.784.500,00
32. Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebesar Rp98.552.460,00

Rincian Pengurangan Beban Jasa – LO dapat dilihat pada Lampiran III.13 Laporan Operasional.

5.4.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan – LO tahun 2024 sebesar Rp36.713.579.251,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp37.341.089.680,00 mengalami penurunan sebesar Rp627,510,429,00 atau 1,68%.

Rincian Beban Pemeliharaan - LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.15 Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	201.137.047,00	422.103.362,00	(220.966.315,00)	(52,35)
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	488.069.620,00	494.727.394,00	(6.657.774,00)	(1,35)
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	484.893.066,00	446.483.840,00	38.409.216,00	8,60
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinasBermotor Perorangan	17.146.778.339,00	16.339.684.374,00	807.093.965,00	4,94
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	425.097.347,00	420.169.515,00	4.927.832,00	1,17
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Khusus	378.379.324,00	384.063.563,00	(5.684.239,00)	(1,48)
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat AngkutanApung Bermotor Khusus	1.206.970.154,00	626.969.825,00	580.000.329,00	92,51
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.742.579.933,00	2.110.407.243,00	(367.827.310,00)	(17,43)
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	137.599.675,00	144.032.500,00	(6.432.825,00)	(4,47)
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin	2.355.489.253,00	1.559.368.689,00	796.120.564,00	51,05

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
11	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-AlatKedokteran Umum	1.236.197.490,00	1.612.326.816,00	(376.129.326,00)	(23,33)
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	3.320.211.650,00	5.064.095.661,00	(1.743.884.011,00)	(34,44)
13	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Tempat Kerja Lainnya	(3.996.000,00)	0,00	(3.996.000,00)	0,00
14	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	149.962.110,00	160.084.200,00	(10.122.090,00)	(6,32)
15	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	2.184.916.023,00	2.306.759.026,00	(121.843.003,00)	(5,28)
16	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	3.929.352.769,00	4.134.640.410,00	(205.287.621,00)	(4,97)
17	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai danPenanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai danPenanggulangan Bencana Alam Lainnya	398.679.080,00	99.682.056,00	299.196.984,00	300,15
18	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	99.567.000,00	(99.567.000,00)	(100,00)
19	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	49.863.975,00	99.653.913,00	(49.789.938,00)	(49,96)
20	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	469.948.386,00	816.270.253,00	(346.321.867,00)	(42,43)
21	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	411.250.000,00	0,00	411.250.000,00	0,00
	Total	36.713.579.251,00	37.341.089.680,00	(627.510.429,00)	(1,68)

Beban Pemeliharaan sebesar Rp36.713.579.251,00 berasal dari :

a.	Realisasi Belanja Pemeliharaan – LRA	35.775.958.981,00
b.	Penambahan :	
	- Hutang Beban Pemeliharaan TA 2024	372.775.080,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	568.841.190,00
	Total Penambahan :	941.616.270,00
c.	Pengurangan :	
	- Pembayaran Hutang Beban Pemeliharaan TA 2023	3.996.000,00
	Total Pengurangan :	3.996.000,00
d.	**Beban Pemeliharaan – LO :**	**36.713.579.251,00**

Penambahan Beban Pemeliharaan sebesar Rp941.616.270,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Pemeliharaan Alat besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya TA 2024 sebesar Rp5.106.000,00 pada UPTD Rumah Sakit Mata.
b. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin TA 2024 sebesar Rp199.950.000,00 pada UPTD RSUD Tipe B.
c. Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum TA 2024 sebesar Rp163.723.080,00 pada UPTD RSUD Tipe B.
d. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor TA 2024 sebesar Rp23.996.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
   1. Reklasifikasi aset tetap Bangunan Gedung Kantor (KIB B) yang seharusnya menambah Barjas Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp 20.000.000,00 pada Balai Pelatihan Kesehatan.
   2. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-

Bangunan Gedung sebesar Rp3.996.000,00 pada UPTD Rumah Sakit Mata

e. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman (Reklasifikasi aset tetap Bangunan Tempat Kerja yang seharusnya menambah Barjas Pemeliharaan) sebesar Rp149.962.110,00 pada Biro Umum.

f. Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam (Reklasifikasi aset tetap Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya yang seharusnya menambah Barjas Pemeliharaan JJI) sebesar Rp398.879.080,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.

Pengurangan Beban Pemeliharaan sebesar Rp3.996.000,00 merupakan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman pada Rumah Sakit Mata.

5.4.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas – LO tahun 2024 sebesar Rp85.304.550.677,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp90.946.510.731,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.641.960.054,00 atau 6,20%.

Rincian Beban Perjalanan Dinas - LO dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.4.16 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	78.159.065.844,00	77.301.092.647,00	857.973.197,00	1,11
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.116.289.979,00	10.505.547.035,00	(4.389.257.060,00)	(41,78)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	57.000.000,00	(57.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	1.029.194.854,00	3.082.871.049,00	(2.053.676.191,00)	(66,62)
	Jumlah	**85.304.550.677,00**	**90.946.510.731,00**	**(5.641.960.054,00)**	**(6,20)**

5.4.1.2.6. Beban Bunga - LO

Beban Bunga – LO tahun 2024 sebesar Rp22.923.348.615,61. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp30.971.737.888,72 mengalami penurunan sebesar Rp8.048.389.273,11 atau 25,99% dan seluruhnya berasal dari Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank pada PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).

Penambahan dan Pengurangan Beban Bunga – LO selama tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Realisasi Belanja Bunga – LRA	8.879.864.279,00
b.	Penambahan :	
	- Bunga Pinjaman yang dipotong dari DAU dan penambahan hutang bunga	45.797.914.599,00
	Total Penambahan :	45.797.914.599,00
c.	Pengurangan :	
	- Pengurangan hutang bunga	31.754.430.262,39
	Total Pengurangan :	31.754.430.262,39
d.	**Beban Bunga – LO :**	**22.923.348.615,61**

Penambahan Beban Bunga – LO sebesar Rp45.797.914.599,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perhitungan bunga pinjaman yang dipotong dari dana DAU sebesar Rp23.429.829.583,00 (sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

39/KM.7/2023 Tanggal 20 Desember 2023) Tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Hutang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp22.368.085.016,00 Tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagai berikut :
   - Biaya pengelolaan pinjaman PEN 2020 (0,185%) sebesar Rp808.500.283,00.
   - Bunga pinjaman PEN 2021 sebesar Rp20.966.279.434,00.
   - Biaya pengelolaan pinjaman PEN 2021 (0,185%) sebesar Rp593.305.299,00.

Pengurangan Beban Bunga – LO sebesar Rp31.754.430.262,39 merupakan pengurangan hutang bunga jangka Panjang Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Tahun 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

5.4.1.2.7. Beban Subsidi - LO

Beban Subsidi – LO tahun 2024 sebesar Rp2.756.070.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp14.861.735.159,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp12.105.665.159,00 atau 81,46%.
Adapun Rincian Beban Subsidi – LO tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.17 Rincian Beban Subsidi

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Subsidi kepada BUMN	60.000.000,00	10.930.893.159,00	(10.870.893.159,00)	(99,45)
2	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	2.696.070.000,00	3.930.842.000,00	(1.234.772.000,00)	(31,41)
	Total	2.756.070.000,00	14.861.735.159,00	(12.105.665.159,00)	(81,46)

Beban Subsidi – LO sebesar Rp2.756.070.000,00 berasal dari :

a.	Realisasi Belanja Subsidi – LRA	4.324.568.033,00
b.	Penambahan :	0,00
c.	Pengurangan :	
	- Koreksi atas hutang subsidi ke PT. Garuda Airlines	1.568.498.033,00
	Total Pengurangan :	1.568.498.033,00
d.	**Beban Subsidi – LO :**	**2.756.070.000,00**

Pengurangan Beban Subsidi – LO sebesar Rp1.568.498.033,00 merupakan koreksi atas hutang subsidi ke PT. Garuda Airlines pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah.

5.4.1.2.8. Beban Hibah

Beban Hibah – LO tahun 2024 sebesar Rp258.921.590.499,01. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp201.948.833.827,82 mengalami kenaikan sebesar Rp56.972.756.671,19 atau 28,21%.

Rincian Beban Hibah - LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.18 Rincian Beban Hibah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	139.550.000.000,00	9.065.000.000,00	130.485.000.000,00	1.439,44
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	19.456.206.647,83	0,00	19.456.206.647,83	0,00

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
3	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	5.963.000.000,00	(5.963.000.000,00)	(100,00)
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.377.098.412,00	26.622.089.353,82	7.755.009.058,18	29,13
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	(3.071.139.353,82)	80.754.572.450,00	(83.825.711.803,82)	(103,80)
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.140.000.000,00	24.770.750.000,00	(10.630.750.000,00)	(42,92)
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	199.833.200,00	166.800,00	0,08
9	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	44.803.635.098,00	44.962.298.424,00	(158.663.326,00)	(0,35)
10	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikus Swasta	7.806.364.095,00	7.797.186.000,00	9.178.095,00	0,10
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.660.425.600,00	1.614.104.400,00	46.321.200,00	2,87
	Total	258.921.590.499,01	201.948.833.827,82	56.972.756.671,19	28,21

Beban Hibah – LO sebesar Rp258.921.590.499,01 berasal dari :

a.	Realisasi Belanja Hibah – LRA	426.928.841.939,00
b.	Penambahan :	
	- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	19.456.206.647,83
	Total Penambahan :	19.456.206.647,83
c.	Pengurangan :	
	- Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	187.463.458.087,82
	Total Pengurangan :	187.463.458.087,82
d.	**Beban Hibah – LO :**	**258.921.590.499,01**

Penambahan Beban Hibah sebesar Rp19.456.206.647,83 merupakan Hibah kepada Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

a. Hibah Aset Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp14.040.000.000,00 dari BKAD Ke BPK RI sesuai SK Nomor 699 Tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
b. Hibah Aset Tetap Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp5.416.206.647,83 dari Satuan Polisi Pamong Praja Ke Kejaksaan Tinggi Sulut sesuai SK Nomor 700 Tahun 2024 tgl 19 Desember pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengurangan Beban Hibah sebesar Rp187.463.458.087,82 merupakan Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran hutang paket Pekerjaan Peningkatan SPAM Desa Wanga Kabupaten Minahasa Selatan TA 2023 sebesar Rp1.096.360.602,66 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.

b. Pembayaran hutang paket Pekerjaan Pembangunan Christian Center Tahap II TA 2023 sebesar Rp2.295.728.751,16 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.
c. Koreksi atas Belanja Hibah yang Belum Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp73.790.816.111,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.
d. Koreksi nilai Beban Hibah yang seharusnya menambah beban Barjas BOS sebesar Rp110.280.552.623,00 pada Dinas Pendidikan Daerah.

5.4.1.2.9. Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial – LO tahun 2024 sebesar Rp1.087.345.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.047.898.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.446.600,00 atau 3,76%.

Rincian Beban Bantuan Sosial - LO dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.4.19 Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	390.000.000,00	140.000.000,00	250.000.000	178,57
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	87.450.000,00	85.250.000,00	2.200.000,00	2,58
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	81.600.000,00	209.648.400,00	(128.048.400,00)	(61,08)
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bideng (Pendidikan, Keagamaan dan Bideng Lainnya)	528.295.000,00	613.000.000,00	(84.705.000,00)	(13,82)
	Total	1.087.345.000,00	1.047.898.400,00	39.446.600,00	3,76

5.4.1.2.10. Beban Penyisihan Piutang - LO

Beban Penyisihan Piutang – LO Tahun 2024 sebesar Rp23.455.128.733,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp5.068.059.419,50 mengalami kenaikan sebesar Rp18.357.069.313,50 atau 362,80% karena adanya penerapan perubahan kebijakan akuntansi di Tahun 2024.

Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.20 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan	22.116.904.006,00	4.285.469.385,00	17.830.434.621,00	416,07
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	2.823.100,00	454.923.535,00	(451.700.435,00)	(99,38)
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.224.711.736,50	(31.698.349,00)	1.256.410.085,50	(3.963,65)
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	(35.625,00)	17.665,00	(53.290,00)	(301,67)
5	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	39.190.000,00	0,00	39.190.000,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	264.107,00	0,00	264.107,00	0,00
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	72.271.406,50	359.747.183,50	(287.475.775,00)	(79,91)
	Total	23.455.128.733,00	5.068.059.419,50	18.387.069.313,50	362,80

Beban Penyisihan Piutang – LO sebesar Rp23.455.128.733,00 berasal dari :

a.	Penambahan :	
	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan	22.115.904.006,00
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	2.823.100,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.838.065.495,20
	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	39.190.000,00
	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	264.107,00
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	72.271.408,50
	Total Penambahan :	28.068.518.116,70
b.	Pengurangan :	
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.613.353.758,70
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	35.625,00
	Total Pengurangan :	4.613.389.383,70
c.	**Beban Penyisihan Piutang – LO :**	**23.455.128.733,00**

Rincian penambahan Beban Penyisihan Piutang – LO dapat dilihat pada Lampiran III.14 laporan keuangan ini. Sedangkan rincian pengurangan Beban Penyisihan Piutang – LO dapat dilihat pada Lampiran III.15 laporan keuangan ini.

5.4.1.2.11.Beban Lain-Lain

Tidak ada Realisasi Beban Lain-lain di tahun 2024 dan 2023.

5.4.1.2.12. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp196.391.287.691,48. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp208.188.290.283,51, terjadi penurunan sebesar Rp11.797.002.592,03 atau 5,67%. Penyebab Penurunan karena pengadaan peralatan dan mesin tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2024

5.4.1.2.13. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp59.549.377.363,51. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp67.605.848.731,35, terjadi penurunan sebesar Rp8.056.471.367,84 atau 11,92%. Penyebab Penurunan karena pengadaan gedung dan bangunan tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2024.

5.4.1.2.14. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp213.209.322.245,07. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp259.469.515.571,18, terjadi penurunan sebesar Rp46.260.193.326,11 atau 17,83%. Penyebab Penurunan karena pengadaan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2024.

5.4.1.2.15. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp446.379.260,80. Jika dibandingkan dengan tahun 2023sebesar Rp682.584.545,17, terjadi penurunan sebesar Rp236.205.284,37 atau 34,60%. Penyebab Penurunan karena pengadaan Aset Tetap Lainnya tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2024.

5.4.1.2.16. Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban Penyusutan Aset Lainnya merupakan Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp1.560.651.060,00, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.560.651.060,00 atau 100,00%. Penyebab Penurunan karena pada tahun 2024 tidak ada Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa.

5.4.1.2.17. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp3.292.433.801,33. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp4.162.446.654,66, terjadi penurunan sebesar Rp870.012.853,33 atau 20,90%. Penyebab Penurunan karena koreksi Aset Tidak Berwujud yang menjadi Beban Sewa Aset Tidak Berwujud. Rincian dapat dilihat pada Lampiran III.16 laporan keuangan ini.

5.4.1.2.18. Beban Penyusutan Properti Investasi

Beban Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp1.698.268.239,67. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp115.223.230,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.583.045.009,67 atau 1.373,89%. Penyebab kenaikan karena pengadaan Properti Investasi tahun 2024 lebih besar daripada tahun 2023. Rincian dapat dilihat pada Lampiran III.17 laporan keuangan ini.

5.4.1.2.19. Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil tahun 2024 sebesar Rp595.884.052.136,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp578.247.468.974,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.636.583.162,00 atau 3,05%.

Rincian Beban Bagi Hasil sebesar Rp595.884.052.136,00 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5.4.21 Rincian Beban Bagi Hasil

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	365.834.630.293,00	353.619.815.981,00	12.214.814.312,00	3,45
2	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	230.049.421.843,00	224.627.652.993,00	5.421.768.850,00	2,41
	Jumlah	**595.884.052.136,00**	**578.247.468.974,00**	**17.636.583.162,00**	**3,05**

Beban Bagi Hasil sebesar Rp595.884.052.136,00 berasal dari :

a.	Realisasi Belanja Bagi Hasil – LRA		578.425.561.892,00
b.	Penambahan :		
	Pajak Rokok		5.285.771.533,00
	Hutang DBH Pajak TA 2024		269.165.965.500,00
		Total Penambahan	274.451.737.033,00
c.	Pengurangan :		
	Pembayaran Hutang DBH Pajak TA 2023		256.993.246.789,00
		Total Pengurangan	256.993.246.789,00
d.	**Beban Bagi Hasil – LO :**		**595.884.052.136,00**

Penambahan Beban Bagi Hasil sebesar Rp274.451.737.033,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebesar Rp5.285.771.533,00 merupakan potongan Dana Transfer Pajak Rokok yang diperhitungkan untuk BPJS pada Badan Pendapatan Daerah.
b. Hutang DBH Pajak TA 2024 sebesar Rp269.165.965.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
    1. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebesar Rp185.669.669.882,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
    2. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebesar Rp88.782.067.151,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pengurangan Beban Bagi Hasil sebesar Rp256.993.246.789,00 merupakan pembayaran hutang Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebesar Rp151.705.936.242,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
b. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebesar Rp105.287.310.547,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

5.4.1.2.20.Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100%.

5.4.1.3. Surplus/Defisit Dari Operasi

Surplus/Defisit dari kegiatan operasi tahun anggaran 2024 surplus sebesar Rp29.285.162.407,55 Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 surplus sebesar Rp255.863.577.869,79 mengalami penurunan sebesar Rp226.578.415.462,24 atau 88,55%.

5.4.2. Kegiatan Non Operasional

5.4.2.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO Tahun 2024 sebesar Rp32.683.719.386,26 Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp38.184.886.381,02 mengalami penurunan sebesar Rp5.501.166.994,76 atau 14,41%. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO ini merupakan penyesuaian atas penyertaan modal Pemprov Sulut pada PT. Bank SulutGO sesuai kebijakan akuntansi dengan metode ekuitas TA 2024.

5.4.2.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2024 sebesar Rp341.500.602,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp341.500.602,00 atau 0,00%. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO merupakan reklasifikasi atas pelunasan hutang yang oleh pihak ketiga sudah tidak akan ditagih kembali. Rinciannya dapat dilihat pada Lampiran III.18 laporan keuangan ini.

5.4.2.3. Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO

Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.136.409.202,23 Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp0.00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.136.409.202,23 atau 0,00%. Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO merupakan penghapusan aset tetap sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024. Rinciannya dapat dilihat pada Lampiran III.19 laporan keuangan ini.

5.4.2.4.Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Tidak ada Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2024 dan 2023.

5.4.2.5. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO

Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional – LO Tahun 2024 sebesar Rp31.888.810.786,03 seluruhnya berasal dari Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional – LO. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp38.184.886.381,02 mengalami penurunan sebesar Rp6.296.075.594,99 atau 16,49%.

5.4.2.6. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa – LO

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa – LO Tahun 2024 surplus sebesar Rp61.173.973.193,58 yang seluruhnya berasal dari Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa – LO. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp294.048.464.250,81 mengalami penurunan sebesar Rp232.874.491.057,23 atau 79,20%.

5.4.3. Pos Luar Biasa

5.4.3.1. Beban Luar Biasa/Tak Terduga - LO

Beban Luar Biasa/Tak Terduga - LO adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban Luar Biasa/Tak Terduga untuk Tahun 2024 sebesar Rp450.377.558,00 merupakan pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp79.195.149,00 atau 21,34%. Beban Luar Biasa/Tak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp371.182.409,00 merupakan pengembalian sisa dana pinjaman PEN Tahun 2020 dan 2021 serta penanggulangan bencana.

5.4.3.2. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa - LO

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa - LO untuk Tahun 2024 sebesar (Rp450.377.558,00) seluruhnya bersumber dari Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar (Rp371.182.409,00) maka terjadi penurunan sebesar Rp79.195.149,00 atau 21,34%.

5.4.4. Surplus/Defisit - LO

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LO dan Beban - LO tahun anggaran 2024 dihasilkan Surplus – LO sebesar Rp60.723.595.635,58 Jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp293.677.281.841,81 terjadi penurunan sebesar Rp232.953.686.206,23 atau 79,32%.
Surplus – LO sebesar Rp60.723.595.635,58 dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan – LO	3.807.251.320.348,46
Beban – LO	3.777.966.157.940,91
Surplus/Defisit Operasi	29.285.162.407,55
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31.888.810.786,03
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	61.173.973.193,58
Pos Luar Biasa	450.377.558,00
Surplus/Defisit – LO	**60.723.595.635,58**

5.5. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan kas yang dihasilkan atau digunakan oleh kegiatan operasional pemerintah daerah dalam periode waktu tertentu meliputi semua aktivitas yang terkait dengan kegiatan utama pemerintah daerah.

5.5.1.1. Arus Kas Masuk

Terdapat arus kas masuk dari aktivitas operasi TA 2024 sebesar Rp3.653.762.583.812,79, sedangkan arus kas masuk dari TA 2023 sebesar Rp3.538.185.274.966,21, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp115.577.308.846,58 atau 3,27% yang rinciannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.5.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.1.1	**Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**		
	Pajak Daerah	1.236.030.479.089,00	1.186.354.255.171,27
	Retribusi Daerah	182.910.540.123,66	171.202.529.811,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	71.762.282.545,00	70.918.058.953,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.270.082.051,13	32.269.973.841,94
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.131.577.594.004,00	2.076.188.476.387,00
	Pendapatan Hibah	1.211.606.000,00	1.251.980.802,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**3.653.762.583.812,79**	**3.538.185.274.966,21**

5.5.1.2. Arus Kas Keluar

Terdapat arus kas keluar dari aktivitas operasi TA 2024 sebesar Rp3.297.103.495.173,00, sedangkan arus kas keluar dari TA 2023 sebesar Rp2.934.783.736.144,00, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp362.319.759.029,00 atau 12,35% yang rinciannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.5.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.1.2	**Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**		
	Belanja Pegawai	1.423.903.352.025,00	1.204.327.865.998,00
	Belanja Barang dan Jasa	853.103.584.447,00	906.534.798.730,00
	Belanja Bunga	8.879.864.279,00	16.194.564.352,00
	Belanja Subsidi	4.324.568.033,00	13.293.237.126,00
	Belanja Hibah	426.928.841.939,00	190.226.012.667,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.087.345.000,00	1.047.898.400,00
	Belanja Tidak Terduga	450.377.556,00	371.182.409,00
	Belanja Bagi Hasil	578.425.561.892,00	597.788.176.462,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	5.000.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**3.297.103.495.173,00**	**2.934.783.736.144,00**

5.5.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Tabel 5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**356.659.088.639,79**	**603.401.538.822,21**

Saldo Akhir Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 sebesar Rp356.659.088.639,79, mengalami penurunan sebesar Rp246.742.450.182,42 atau

40,89% jika dibandingkan dengan arus kas bersih TA 2023 yang sebesar Rp603.401.538.822,21. Kas tersebut mengalami penurunan disebabkan karena peningkatan yang signifikan dari arus kas keluar pada Belanja Pegawai dan Belanja Hibah. Peningkatan tersebut menyebabkan arus kas bersih menjadi menurun karena peningkatan pada arus kas keluar tidak didukung oleh peningkatan pada arus kas masuk dari aktivitas operasi.

Tabel 5.5.4 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Arus Kas Masuk	3.653.762.583.812,79	3.538.185.274.988,21
2	Arus Kas Keluar	3.297.103.495.173,00	2.934.783.736.144,00
	Arus Kas Bersih	**356.659.088.639,79**	**603.401.538.822,21**

Pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat penurunan arus kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi, yaitu selisih antara arus kas masuk dari pendapatan operasi dengan arus kas keluar dari belanja operasi, akan tetapi belanja operasi masih mampu dibiayai dengan pendapatan operasi yang diperoleh selama TA 2024.

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari Aktivitas Investasi laporan keuangan menunjukkan pergerakan kas masuk dan keluar yang terkait dengan investasi jangka panjang pemerintah daerah, seperti pembelian aset tetap, penjualan aset, dan penyertaan modal daerah.

5.5.2.1. Arus Kas Masuk

Terdapat arus kas masuk yang berasal dari aktivitas investasi sebesar Rp76.019.587,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.5 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.2.1	**Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi**		
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	58.113.077,00	0,00
	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	11.700.000,00	0,00
	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	6.206.510,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**76.019.587,00**	**0,00**

5.5.2.2. Arus Kas Keluar

Terdapat arus kas keluar yang berasal dari aktivitas investasi sebesar Rp440.830.760.409,00 pada TA 2024 dan sebesar Rp473.879.478.944,00 pada TA 2023, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp33.048.718.535,00 atau 6,97% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.6 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.2.2	**Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**		
	Belanja Modal Tanah	19.396.472.650,00	36.218.106.606,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.240.316.697,00	165.792.109.225,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.608.636.649,00	110.419.926.917,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.516.297.364,00	90.808.712.427,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.911.185.149,00	20.640.623.767,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.157.652.900,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**440.830.760.409,00**	**473.879.478.944,00**

5.5.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Tabel 5.5.7 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(440.754.740.822,00)	(473.879.478.944,00)

Saldo akhir Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi di TA 2024 sebesar (Rp440.754.740.822,00) mengalami peningkatan sebesar Rp33.124.738.122,00 atau 6,99% dari tahun sebelumnya (Rp473.879.478.944,00). Hal tersebut berasal dari penurunan arus kas keluar dari aktivitas investasi yang disebabkan oleh belanja modal yang menurun dari tahun sebelumnya karena terdapat beberapa kendala yang ditemui pada saat pengadaan aset tetap dan penurunan pada penyertaan modal daerah.

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih TA 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.8 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Arus Masuk Kas	76.019.587,00	0,00
2.	Arus Keluar Kas	440.830.760.409,00	473.879.478.944,00
	Arus Kas Bersih	(440.754.740.822,00)	(473.879.478.944,00)

Pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kas bersih yang berasal dari aktivitas investasi non keuangan, yaitu selisih antara arus kas masuk dari pendapatan penjualan aset tetap dengan arus kas keluar berupa belanja modal. Hal itu dapat diartikan bahwa arus kas keluar berupa belanja modal tidak diimbangi dengan arus kas masuk dari pendapatan penjualan aset tetap, namun dapat dibiayai dari arus kas masuk dari aktivitas operasi dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara aktivitas pendanaan diperoleh dari pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka pembayaran pinjaman sebesar Rp106.790.020.220,00.

5.5.3.1. Arus Kas Masuk

Tidak terdapat arus kas yang masuk dari aktivitas pendanaan pada TA 2024.

Tabel 5.5.9 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.3.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan		
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00

5.5.3.2. Arus Kas Keluar

Terdapat arus kas yang keluar dari aktivitas pendanaan pada TA 2024 sebesar Rp106.790.020.220,00 dan sebesar Rp106.790.040.664,00 pada TA 2023, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp20.444,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.10 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.3.2	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan		
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	106.790.020.220,00	106.790.040.664,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	106.790.020.220,00	106.790.040.664,00

Rincian pembayaran pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp106.790.020.220,00 tertera dalam tabel berikut:

Tabel 5.5.11 Pembayaran Pinjaman

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	RSUD, Periode Februari 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 14 tgl 17 Oktober 2018 Pada PT SMI sesuai Srt No: : S-24/SMI/DPPPP/DPPU-3/0224 Tgl 13/2/24	20.000.001.000,00
2	RS MATA, Periode Februari 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 03 Tgl 12 Februari 2019 Pada PT SMI sesuai Srt No: : S-24/SMI/DPPPP/DPPU-3/0224 Tgl 13/2/24	6.697.509.166,00
3	RSUD, Periode Mei 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 14 Tanggal 17 Oktober 2018 Pada PT SMI sesuai Srt No: S-73/SMI/DPPPP/DPPU-3/0524 Tgl 6 Mei 2024	20.000.001.000,00
4	RS MATA, Periode Mei 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 03 Tanggal 12 Februari 2019 Pada PT SMI sesuai Srt No: S-73/SMI/DPPPP/DPPU-3/0524 Tgl 6 Mei 2024	6.697.509.166,00
5	RSUD, Periode Agustus 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 14 Tanggal 17 Oktober 2018 Pada PT SMI sesuai Srt No: S-128/SMI/DPPPP/DPPU-3/0824 Tgl 6 Agustus 2024	20.000.001.000,00
6	RS MATA Periode Agustus 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 03 Tgl 12 Februari 2019 Pada PT SMI sesuai Srt No: S-128/SMI/DPPPP/DPPU-3/0824 Tgl 6 Agustus 2024	6.697.509.166,00
7	RS MATA, Periode Desember 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 03 Tgl 12 Februari 2019 pd PT. SMI sesuai srt No: S-222/SMI/DPPPP/DPPU-3/1124 Tgl 29 Nov 2024	6.697.503.722,00
8	RSUD, Periode Desember 2024 Berdasarkan Perjanjian Nomor 14 Tgl 17 Oktober 2018 Pada PT. SMI sesuai srt No: S-222/SMI/DPPPP/DPPU-3/1124 Tgl 29 November 2024	19.999.986.000,00
TOTAL		106.790.020.220,00

5.5.3.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Tabel 5.5.12 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(106.790.020.220,00)	(106.790.040.664,00)

Saldo akhir Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan di TA 2024 sebesar (Rp106.790.020.220,00), mengalami peningkatan sebesar Rp20.444,00 atau 0,00% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar (Rp106.790.040.664,00). Hal tersebut berasal dari penurunan arus kas keluar aktivitas pendanaan yang sesuai dengan skema pembayaran pada akhir pinjaman.

Tabel 5.5.13 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2.	Arus Keluar Kas	106.790.020.220,00	106.790.040.664,00
	Arus Kas Bersih	(106.790.020.220,00)	(106.790.040.664,00)

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas

transitoris Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

5.5.4.1. Arus Kas Masuk

Terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris pada TA 2024 sebesar Rp245.005.206.876,05 dan sebesar Rp220.899.456.522,00 pada TA 2023, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp24.105.750.354,05 atau 10,91% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.14 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	2024		2023	
		Penerimaan PFK BUD	Penerimaan PFK SKPD	Penerimaan PFK BUD	Penerimaan PFK SKPD
1	IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai	6.746.519.813,00	0,00	5.756.845.931,00	0,00
2	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai	39.369.973.466,00	0,00	36.064.440.229,00	0,00
3	BPJS Kesehatan PNS	10.736.783.158,00	0,00	40.736.760.642,00	0,00
4	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.387.106.005,00	0,00	1.163.030.832,00	0,00
5	Jaminan Kematian (JKM)	4.160.216.598,00	0,00	3.489.054.188,00	0,00
6	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	348.053.791,00	5.523.014,00	106.879.641,00	5.577.500,00
7	PPh Pasal 21 Honorium Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	45.927.389.842,00	249.585.884,00	37.509.924.378,00	421.830.408,00
8	PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	3.207.865.607,00	572.881.087,85	3.782.743.368,00	553.888.946,00
9	PPh Pasal 23 Jasa	1.601.578.863,00	461.259.384,00	1.465.766.132,00	681.744.654,00
10	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	25.901.800,00	0,00	0,00	0,00
12	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	41.346.964,00	67.629.928,00	51.248.385,00	78.882.066,00
13	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	7.634.796.623,00	1.857.170,00	5.722.023.103,00	3.439.322,00
14	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	67.615.280.330,00	4.727.351.726,20	82.486.864.743,00	5.354.124.997,00
15	Tapenum	0,00	0,00	457,00	0,00
16	Beras (BULOG)	338.000,00	0,00	0,00	0,00
17	BPJS Kesehatan PPPK	5.472.405.366,00	0,00	1.718.111.295,00	0,00
18	IWP(3.25%) Iuran Wajib Pegawai	4.143.568.074,00	0,00	1.625.135.489,00	0,00
19	BPJS Kesehatan Non PNS 4%	7.632.360.236,00	0,00	10.131.339.802,00	0,00
20	BPJS Kesehatan Non PNS 1%	1.998.876.793,00	0,00	0,00	0,00
21	BPJS Kesehatan PNS 4%	27.312.850.066,00	0,00	0,00	0,00
22	BPJS Kesehatan PNS 1%	3.256.087.469,00	0,00	0,00	0,00
23	Koreksi SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**238.919.316.992,00**	**6.085.887.884,05**	**213.800.168.606,00**	**7.099.287.917,00**
			245.005.206.876,05		**220.899.456.522,00**

5.5.4.2. Arus Kas Keluar

Terdapat arus kas keluar dari aktivitas transitoris pada TA 2024 sebesar Rp244.742.805.668,05 dan pada TA 2023 sebesar Rp220.899.908.464,00, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp23.842.897.204,05 atau 10,79% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.15 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	2024		2023	
		Pengeluaran PFK BUD	Pengeluaran PFK SKPD	Pengeluaran PFK BUD	Pengeluaran PFK SKPD
1	IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai	6.746.519.813,00	0,00	5.756.845.931,00	0,00
2	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai	39.369.973.466,00	0,00	36.064.440.229,00	0,00
3	BPJS Kesehatan PNS	10.736.783.158,00	0,00	40.736.760.642,00	0,00
4	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.387.106.005,00	0,00	1.163.030.832,00	0,00
5	Jaminan Kematian (JKM)	4.160.216.598,00	0,00	3.489.054.188,00	0,00
6	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	348.053.791,00	5.523.014,00	106.879.641,00	5.577.500,00

No	Uraian	2024		2023	
		Pengeluaran PFK BUD	Pengeluaran PFK SKPD	Pengeluaran PFK BUD	Pengeluaran PFK SKPD
7	PPh Pasal 21 Honoridll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	45.027.389.842,00	246.481.314,00	37.509.924.376,00	421.630.409,00
8	PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	3.207.865.607,00	671.060.880,85	3.792.743.388,00	553.888.948,00
9	PPh Pasal 23 Jasa	1.479.211.088,15	572.881.097,65	1.465.766.132,00	582.196.596,00
10	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	26.901.800,00	0,00	0,00	0,00
11	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	41.346.904,00	67.629.928,00	51.246.385,00	78.882.088,00
12	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	7.534.796.823,00	1.657.170,00	5.722.023.103,00	3.439.322,00
13	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	67.815.280.330,00	4.478.439.230,20	62.466.664.743,00	5.354.124.997,00
14	Taperum	0,00	0,00	457,00	0,00
15	Beras (BULOG)	338.000,00	0,00	0,00	0,00
16	BPJS Kesehatan PPPK	5.472.405.355,00	0,00	1.718.111.285,00	0,00
17	IWP(3.25%) Iuran Wajib Pegawai	4.143.588.074,00	0,00	1.525.135.469,00	0,00
18	BPJS KESEHATAN NON PNS 4%	7.632.360.235,00	0,00	10.131.338.802,00	0,00
19	BPJS KESEHATAN NON PNS 1%	1.998.876.793,00	0,00	0,00	0,00
20	BPJS KESEHATAN PNS 4%	27.312.850.088,00	0,00	0,00	0,00
21	BPJS KESEHATAN PNS 1%	3.256.087.468,00	0,00	0,00	0,00
22	Koreksi SILPA	0,00	2.181.838,00	0,00	0,00
	Total	230.796.861.215,15	5.945.864.482,90	213.800.168.805,00	7.099.739.869,00
			244.742.865.668,05		220.899.908.464,00

5.5.4.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Tabel 5.5.16 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	262.401.208,00	(451.942,00)

Saldo akhir arus kas bersih dari aktivitas transitoris TA 2024 sebesar Rp262.401.208,00 mengalami kenaikan sebesar Rp262.853.150,00 atau 58.160,81% dari tahun sebelumnya sebesar (Rp451.942,00). Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan realisasi belanja dari tahun sebelumnya yang mempengaruhi aktivitas transitoris serta masih terdapat saldo PFK TA 2024 yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.17 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Arus Kas Masuk	245.005.206.876,05	220.899.456.522,00
2.	Arus Kas Keluar	244.742.805.668,05	220.899.908.464,00
	Arus Kas Bersih	262.401.208,00	(451.942,00)

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas TA 2024 sebesar Rp62.518.945.537,68 mengalami penurunan sebesar Rp190.623.271.194,21 atau 75,30% dari tahun sebelumnya sebesar Rp253.142.216.731,89.

Tabel 5.5.18 Saldo Akhir Kas TA 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Akhir Kas	62.518.945.537,68	253.142.216.731,89

Jumlah tersebut merupakan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024. Saldo kas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.19 Rincian Saldo Akhir Kas TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	2024	2023
Kas di Kas Daerah	61.343.622.268,68	252.651.779.752,89
Kas di Bendahara Penerimaan	103.349.217,00	173.549.685,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	47.314.296,00	105.248.431,00
Kas Dana BOSP	750.781.927,00	27.882.805,00
Kas Lainnya	273.877.929,00	183.756.078,00
Setara Kas	0,00	0,00
TOTAL	62.518.945.537,68	253.142.216.731,89

5.6. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan perubahan nilai kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas saldo awal ekuitas tahun berjalan yang berasal dari saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya ditambah dengan surplus atau dikurang defisit dari Laporan Operasional serta adanya koreksi atau penyesuaian ekuitas sebagai dampak karena adanya perubahan kebijakan atau terjadinya kesalahan yang mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang akan berpengaruh dan yang menjadi penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	REF	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.6.1	9.450.707.553.106,66	9.244.199.703.635,09
SURPLUS / DEFISIT – LO	5.6.2	60.723.595.635,58	293.677.281.841,81
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.1	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3.2	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	5.6.3.3	9.757.017.175,51	(87.169.432.370,24)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	9.521.188.165.917,75	9.450.707.553.106,66

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo akhir ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.450.707.553.106,66 menjadi saldo awal ekuitas Tahun Anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan saldo awal ekuitas Tahun Anggaran 2023 maka terjadi kenaikan sebesar Rp206.507.849.471,57.

5.6.2. Surplus/Defisit – LO

Suplus/defisit - LO sebesar Rp60.723.595.635,58 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5.6.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Tidak ada nilai koreksi ekuitas persediaan pada tahun anggaran 2024

5.6.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Tidak ada nilai selisih revaluasi Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2024.

5.6.3.3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Adapun rincian Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp9.757.017.175,51 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6.2 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2024

No	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	Koreksi kesalahan pencatatan tahun sebelumnya	823.735.352,92	674.719.178,96	-149.016.173,96
2	Koreksi aset lain-lain yang sudah di catat pada KIB C	117.129.000,00	0,00	-117.129.000,00
3	Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara PT. Bank SulutGO TA 2024	30.000.000.000,00	0,00	-30.000.000.000,00
4	Pembayaran Penerusan Penyetoran Pajak PPH Pasal 4 Ayat (2) Ke RKUN	2.181.818,00	0,00	-2.181.818,00
5	Pengurangan Pokok Pinjaman Utang Jangka Panjang	0,00	50.132.409,00	50.132.409,00
6	Aset Lainnya	10.351.895.556,53	10.085.477.315,00	-266.418.241,53
7	Penambahan Aset Tetap Tanah	0,00	38.622.000.000,00	38.622.000.000,00
8	Penghapusan Aset Rusak Berat	618.970.000,00	0,00	-618.970.000,00
9	Penambahan aset tetap berdasarkan penilaian kembali	0,00	2.238.600.000,00	2.238.600.000,00
10	Ekstrakomptabel	8.381.631.254,45	8.381.631.254,45	0,00
11	Mutasi antar Perangkat daerah dan sekolah	162.124.568.594,26	162.124.568.594,26	0,00
	Jumlah	**212.420.109.576,16**	**222.177.126.751,67**	**9.757.017.175,51**

1. Koreksi atas kesalahan pencatatan tahun sebelumnya sebesar (Rp149.016.173,96) yaitu:

   a. Akumulasi penyusutan sebesar Rp296.075.276,45 bertambah sebesar Rp309.625.324,37 dan berkurang sebesar Rp13.550.047,92 yaitu:

Tabel 5.6.3 Mutasi Tambah Kurang Koreksi Akumulasi Penyusutan

Uraian	Total
Saldo Awal	0,00
Penambahan	***309.625.324,37***
SMA Negeri 1 Eris	1.500.000,00
SMA Negeri 1 Kakas	1.666.666,68
SMA Negeri 1 Kawengkoan	6.941.111,10
SMA Negeri 1 Langowan	177.992.625,06
SMA Negeri 1 Pineleng	757.244,45
SMA Negeri 1 Remboken	1.111.111,11
SMA Negeri 1 Tombariri	5.594.290,59
SMA Negeri 2 Pineleng	5.193.333,33
SMA Negeri 1 Sonder	78.555,56
SMAN 1 Tompaso	2.906.916,67
SMAN 2 Tompaso	138.868,89
SMA Negeri Keberbakatan Olahraga	518.600,00
SMK Negeri PP Kalasey	6.280.940,93
SMK Negeri Tombatu	25.811.750,00
SMK Negeri Tombatu	73.133.290,00
Pengurangan	***13.550.047,92***
RS Tipe B	8.750.047,92
DKP Wilayah I	4.800.000,00
Saldo Akhir	***296.075.276,45***

   b. Kesalahan pencatatan hutang SMAN 1 Touluaan seharusnya hutang pada SMK 1 Touluaan yang sudah lunas terbayar tahun sebelumnya tetapi dicatat pengurangan pada SMAN 1 Toluaan dan mengakibatkan saldo hutang minus pada SMAN 1 Toluaan sebesar (Rp44.279.400,00)

c. Kesalahan pencatatan tahun sebelumnya yang menambah nilai aset peralatan dan mesin pada RSUD Tipe C Bitung sebesar Rp42.264.443,25

d. Koreksi pencatatan Aset Tidak Berwujud (ATB) berdasarkan konfirmasi perangkat daerah bahwa ATB tersebut merupakan sewa (bukan milik Pemprov Sulut) yang tercatat dari 2020-2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persendian dan Statistik Daerah sebesar (Rp443.076.493,66) bertambah sebesar Rp322.829.411,34 dan berkurang sebesar Rp765.905.905,00.

2. Koreksi atas kesalahan pencatatan aset lain-lain yang sudah dicatat pada KIB C pada Dinas Pemuda dan Olahraga {bangunan Gedung Olahraga sebesar (Rp99.650.000,00) + (Rp17.479.000,00) = (Rp117.129.000)} sebesar (Rp117.129.000,00)

3. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara PT. Bank SulutGO TA 2024 menambah nilai ekuitas sebesar (Rp30.000.000.000,00) karena adanya perhitungan pada aplikasi secara otomatis menambah nilai penyertaan modal dan perlu dikoreksi kembali untuk mengembalikan nilai investasi pemerintah daerah berdasarkan perhitungan metode ekuitas.

4. Pembayaran Penerusan Penyetoran Pajak PPH Pasal 4 Ayat (2) tetapi di setor ke Kas Daerah seharusnya disetor ke RKUN tetapi oleh Dinas Pariwisata Prov. Sulut disetor ke kas daerah pada TA.2022 sehingga harus dikoreksi sebesar (Rp2.181.818,00).

5. Pengurangan Pokok Pinjaman Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk pengembalian sisa PEN 2020 dan 2021 disebabkan karena ada restrukturisasi pinjaman sehingga mengubah kembali nilai proycksi sebelumya nilai pengembalian pokok pinjaman (Rp230.341.875.981,00 - Rp230.291.743.572,00 = Rp50.132.409,00) sebesar Rp50.132.409,00.

6. Aset lainnya sebesar (Rp266.418.241,53), yaitu:

   a. Pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TGR) sebesar (Rp49.481.711,53), yaitu:

      (1) Badan Perbatasan Daerah sebesar (Rp6.000.000,00)

      (2) Sekretraiat Daerah sebesar (Rp43.481.711,53)

   b. Penambahan Piutang Aset Lainnya pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp46.084.500,00, yaitu:

Tabel 5.6.4 Penambahan Piutang Aset Lainnya

No	Uraian	Jumlah
1	UPTD PPD Bolmong	133.000,00
2	UPTD PPD Kotamobagu	6.630.100,00
3	UPTD PPD Manado	36.891.900,00
4	UPTD PPD Minahasa	1.814.100,00
5	UPTD PPD Minut	296.400,00
6	UPTD PPD Mitra	15.500,00
7	UPTD PPD Tomohon	403.500,00
	Total	***46.084.500,00***

   c. Pengurangan Piutang Aset Lainnya pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar (Rp263.021.030,00), yaitu:

Tabel 5.6.5 Pengurangan Piutang Aset Lainnya

No	Uraian	Jumlah
1	UPTD PPD Bolmong	-16.923.800,00
2	UPTD PPD Kotamobagu	-62.065.700,00
3	UPTD PPD Manado	-140.507.500,00
4	UPTD PPD Minahasa	-18.582.900,00
5	UPTD PPD Minut	-4.516.400,00
6	UPTD PPD Mitra	-229.000,00
7	UPTD PPD Tomohon	-19.342.500,00
8	UPTD PPD Bitung	-2.600,00
9	UPTD PPD Minahasa Tenggara	-155.100,00
10	UPTD PPD Minahasa Utara	-4.800,00
11	UPTD PPD Bolaang Mongondouw	-5.300,00
12	UPTD PPD Tomohon	-9.100,00
13	UPTD PPD Manado	-90.550,00
14	UPTD PPD Manado	-423.000,00
15	UPTD PPD Manado	-144.900,00
16	UPTD PPD Manado	-17.880,00
	Total	*-263.021.030,00*

d. Koreksi Piutang Lainnya pada sistem tercatat untuk pelimpahan uang persediaan pada beberapa perangkat daerah sebesar Rp0,00 penambahan sebesar Rp10.039.392.815,00 dan pengurangan sebesar Rp10.039.392.815,00 rincian dapat dilihat pada Lampiran IV.1 Calk LPE laporan keuangan ini.

7. Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp38.622.000.000,00, yaitu:
   a. Hasil Inventarisasi Tanah sesuai SK Gub Nomor 476 Tahun 2022 tgl 30 Desember 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp35.350.200.000,00
   b. Berdasarkan hasil NJOP berdasarkan surat No.900.05/BKAD/0672/2024 tanggal 17 Mei 2024 pada SMA Negeri 1 Wori sebesar Rp1.631.800.000,00
   c. Berdasarkan hasil NJOP berdasarkan surat No.900.05/BKAD/0672/2024 tanggal 17 Mei 2024 pada SMK Negeri 1 Wori sebesar Rp1.640.000.000,00
8. Penghapusan Aset Rusak Berat sebesar (Rp618.970.000,00) pada beberapa perangkat daerah, yaitu:
   a. SK No. 550 Tahun 2024 Tanggal 2 Oktober 2024 pada Dinas Pendidikan Daerah sebesar (Rp450.000.000,00)
   b. SK No. 728 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sbeesar (Rp154.425.000,00)
   c. SK No. 728 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 pada RS Mata sebesar (Rp11.420.000,00)
   d. dan SK No. 703 Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2024 pada RSUD Noongan sebesar (Rp3.125.000,00)
9. Penambahan Aset tetap hasil inventarisasi Jalan Khusus (KIB D) sesuai SK Gub No 476 tahun 2022 yang merubah nilai aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp2.238.600.000,00
10. Aset Ekstrakomptabel yang tidak dapat dikapitalisasi di bawah Rp1.000.000,00 TA. 2024 sebesar (Rp8.381.631.254,45) pada beberapa perangkat daerah dan sekolah-sekolah, yaitu:

a. Aset Ekstrakomptabel Perangkat Daerah sebesar (Rp241.190.260,25), rincian dapat dilihat pada Lampiran IV.2 Calk LPE laporan keuangan ini.

b. Aset Ekstrakomptabel sekolah (BOS) sebesar (Rp5.157.010.347,00), rincian dapat dilihat pada Lampiran IV.3 Calk LPE laporan keuangan ini.

c. Aset Ekstrakomptabel sekolah (DAK) sebesar (Rp2.822.500.647,20), rincian dapat dilihat pada Lampiran IV.4 Calk LPE laporan keuangan ini.

d. Aset Ekstrakomptabel Hibah sebesar (Rp160.930.000,00), yaitu:

Tabel 5.6.6 Aset Ekstrakomptabel Hibah

No	Uraian	Jumlah
1	SMK Negeri 1 Tombariri	(40.950.000,00)
2	SMK Negeri 1 Wori	(37.710.000,00)
3	SMK Negeri 1 Ratahan	(13.330.000,00)
4	SMK Negeri 2 Manado	(35.190.000,00)
5	SMK Negeri 6 Manado	(33.750.000,00)
	Total	*(160.930.000,00)*

11. Mutasi antar perangkat daerah sebesar Rp0,00, mutasi penambahan sebesar Rp162.124.566.594,26 dan mutasi berkurang sebesar Rp162.124.566.594,26 rincian dapat dilihat pada lampiran V Calk LPE laporan keuangan ini, yaitu:

a. Mutasi Aset tetap Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp0,00 mutasi bertambah sebesar Rp19.840.721.714,00 dan berkurang sebesar Rp19.840.721.714,00, rincian sekolah dapat dilihat pada Lampiran IV.5 Calk LPE laporan keuangan ini.

Tabel 5.6.7 Mutasi Peralatan dan Mesin BOS

No	Uraian	Jumlah
1	Electric generating set	62.249.000,00
2	Pompa	60.486.000,00
3	Alat bengkel bermesin lainnya	3.153.153,00
4	Alat penyimpan perlengkapan kantor	904.527.390,00
5	Alat kantor lainnya	1.818.496.770,00
6	Mebel	1.775.081.800,00
7	Alat pembersih	39.725.000,00
8	Alat pendingin	690.523.562,00
9	Alat rumah tanggal lainnya (home use)	902.523.950,00
10	Peralatan studio audio	156.563.000,00
11	Alat peraga praktek sekolah bidang studi:matematika	37.675.000,00
12	Alat peraga praktek sekolah bidang studi:ipa menengah	4.250.000,00
13	Alat peraga praktek sekolah bidang studi:kesenian	5.000.000,00
14	Personal computer	11.746.805.111,00
15	Peralatan personal computer	1.162.716.472,00
16	Peralatan jaringan	470.985.506,00
	Total	*19.840.721.714,00*

b. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (DAK) Rp0,00 mutasi bertambah sebesar Rp34.988.118.400,00 dan berkurang Rp34.988.118.400,00 dari Dinas Pendidikan ke beberapa sekolah, yaitu:

Tabel 5.6.8 Mutasi Peralatan dan Mesin DAK

No	Uraian	Jumlah
1	SLBN 1 Talaud	96.850.000,00
2	SMAN 1 Amurang Barat	99.960.000,00
3	SMAN 1 Belang	93.000.000,00
4	SMAN 1 Dimembe	93.000.000,00
5	SMAN 1 Eris	99.960.000,00
6	SMAN 1 Kalawat	93.000.000,00
7	SMAN 1 Kendahe	92.700.000,00

No	Uraian	Jumlah
8	SMAN 1 Maesaan	93.000.000,00
9	SMAN 1 Manado	93.000.000,00
10	SMAN 1 Motoling Barat	192.960.000,00
11	SMAN 1 Nusa Tabukan	92.700.000,00
12	SMAN 1 Sinonsayang	92.700.000,00
13	SMAN 1 Tombatu	92.700.000,00
14	SMAN 2 Langowan	92.700.000,00
15	SMAN 2 Ratahan	192.660.000,00
16	SMAN 2 Siau Barat	99.960.000,00
17	SMAN 4 Kotamobagu	93.000.000,00
18	SMAN Moronge	93.000.000,00
19	SMKN 1 Amurang Barat	2.199.960.000,00
20	SMKN 1 Lolak	3.289.354.600,00
21	SMKN 1 Manganitu Selatan	2.100.000.000,00
22	SMKN 1 Tondano	986.910.000,00
23	SMKN 1 Touluaan	2.094.061.300,00
24	SMKN 1 Tumpaan	1.495.964.600,00
25	SMKN 2 Tahuna	2.290.026.100,00
26	SMKN 3 Bitung	5.200.000.000,00
27	SMKN 3 Tahuna	2.491.577.300,00
28	SMKN 4 Bitung	2.083.458.800,00
29	SMKN 4 Manado	2.984.986.000,00
30	SMKN 5 Manado	2.675.892.200,00
31	SMKN 6 Manado	3.187.257.500,00
	Total	***34.988.118.400,00***

c. Mutasi Aset Tetap Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp0,00, mutasi bertambah sebesar Rp396.472.051,26 dan berkurang sebesar Rp396.472.051,26, yaitu:

(1) Biro Umum ke Badan Penghubung sebesar Rp217.043.478,26

(2) Biro Pembangunan ke Biro Umum sebesar Rp179.428.573,00

d. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (DAK) dari Dinas Pendidikan ke beberapa sekolah sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp68.640.610.007,00 dan berkurang sebesar Rp68.640.610.007,00

Tabel 5.6.9 Mutasi Gedung dan Bangunan DAK

No	Uraian	Jumlah
1	SLB Negeri 1 Talaud	383.216.138,00
2	SLB Negeri Lolak	1.038.990.116,00
3	SMA Negeri 1 Bintauna	2.456.233.053,00
4	SMA Negeri 1 Kawangkoan	1.001.796.701,00
5	SMAN 1 Manganitu Selatan	3.674.321.109,00
6	SMAN 1 Modoinding	682.250.000,00
7	SMA Negeri 1 Pinolosian	1.427.314.056,00
8	SMA Negeri 1 Siau Timur	1.838.492.934,00
9	SMA Negeri 1 Sinonsayang	3.482.444.473,00
10	SMA Negeri 1 Tabukan Selatan	1.386.719.475,00
11	SMA Negeri 1 Tampa Amma	1.440.500.499,00
12	SMA Negeri 2 Tareran	852.000.000,00
13	SMA Negeri 2 Tomohon	434.116.777,00
14	SMA Negeri 2 Tompaso	2.419.198.263,00
15	SMA Negeri 2 Tondano	282.000.000,00
16	SMA Negeri 3 Manado	1.392.835.234,00
17	SMA Negeri 3 Tahuna Barat	3.366.208.387,00
18	SMA Negeri 4 Kotamobagu	3.004.118.762,00
19	SMA Negeri Pinolosian	3.892.932.151,00
20	SMK Negeri 1 Amurang Barat	2.393.268.126,00
21	SMK Negeri 1 Lolak	4.110.365.000,00
22	SMK Negeri 1 Manganitu Selatan	3.396.668.445,00
23	SMK Negeri 1 Touluaan	1.675.848.000,00
24	SMK Negeri 1 Tumpaan	2.026.718.505,00

No	Uraian	Jumlah
25	SMK Negeri 3 Bitung	2.389.528.467,00
26	SMK Negeri 3 Tahuna	2.798.131.000,00
27	SMK Negeri 4 Bitung	192.621.389,00
28	SMK Negeri 4 Manado	4.834.843.224,00
29	SMK Negeri 5 Manado	3.250.270.000,00
30	SMK Negeri 6 Manado	4.433.180.396,00
31	SMK Negeri Moost	2.720.381.343,00
	Total	***69.640.610.007,00***

e. Mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor pada beberapa perangkat daerah sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp9.568.996.831,00 dan berkurang sebesar Rp9.568.996.831,00 yaitu:
   (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp199.933.331,00
   (2) Dinas Kesehatan ke UPTD RSUD Tipe B ke sebesar Rp9.369.063.500,00
f. Mutasi Aset Tetap Bangunan Tempat Pendidikan dari Dinas Pendidikan ke Sekolah-sekolah SMA/SMK/SLB Se-Prov.Sulut sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp7.432.744.242,00 dan berkurang sebesar Rp7.432.744.242,00 yaitu:
   (1) SMAN Keberbakatan Olahraga sebesar Rp4.922.779.759,00
   (2) SMKN 1 Suluun Tareran sebesar Rp2.509.964.483,00
g. Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Dinas Pendidikan ke Sekolah-Sekolah SMA/SMK/SLB Se-Prov. Sulut sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp21.256.903.349,00 dan berkurang sebesar Rp21.256.903.349,00 rincian dapat dilihat pada Lampiran IV.6 Calk LPE laporan keuangan ini.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.521.188.165.917,75 yang diperoleh dari Saldo Ekuitas Awal sebesar Rp9.450.707.553.106,66 dengan Saldo Surplus/Defisit LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp60.723.595.635,58 dan Koreksi Ekuitas lainnya sebesar Rp9.757.017.175,51. Bila dibandingkan dengan ekuitas akhir tahun 2023 sebesar Rp9.450.707.553.106,66 terjadi kenaikan sebesar Rp70.480.612.811,09 atau 0,75%. Nilai ekuitas akhir tersebut menjadi Nilai Ekuitas pada Laporan Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM

Provinsi Sulawesi Utara setelah kemerdekaan Indonesia termasuk dalam salah satu provinsi dari delapan provinsi yang ada saat itu. Pada tahun 1948, di Sulawesi dibentuk Negara Indonesia Timur, yang kemudian menjadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Kemudian, Negara Indonesia Timur dibubarkan dan bergabung ke dalam Republik Indonesia. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 Tahun 1959), selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, dibentuk Provinsi Sulawesi Utara. Tanggal 23 September 1964 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sulawesi Utara.

Domisili Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari negara Indonesia ditetapkan melalui berbagai regulasi yang menciptakan kerangka hukum untuk pengelolaan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Bentuk hukum Provinsi Sulawesi Utara adalah Daerah Otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut kerangka hukumnya, yaitu:

a) Badan Hukum Publik: Provinsi Sulawesi Utara berstatus sebagai Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan otonomi untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai amanat UU; dan
b) Dasar Pembentukan: Dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Utara (diperbarui dalam UU Nomor 23 Tahun 2014).

Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 00°15' – 05°34' Lintang Utara dan antara 123°07' – 127°10' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Negara Filipina dan Samudera Pasifik disebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 287 pulau dengan 59 pulau diantaranya berpenghuni. Terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 s.d. 1.995 dpl.

Luas wilayah yurisdiksi Sulawesi Utara sebesar 14.500 km^2 (termasuk pulau-pulau seperti Siau, Sangihe dan Talaud) secara administratif terbagi dalam 15 Wilayah Administratif Kabupaten/Kota, yaitu Kota Manado (157,25 km^2), Kota Bitung (304,00 km^2), Kota Tomohon (114,20 km^2), Kabupaten Minahasa (1.114,87 km^2), Kabupaten Minahasa Utara (932,20 km^2), Kabupaten Minahasa Selatan (1.409,97 km^2), Kabupaten Kepulauan Sangihe (746,57 km^2), Kabupaten Kepulauan Talaud (1.240,40 km^2), Kabupaten Bolaang Mongondow (6.446,06 km^2), Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (275,96 km^2), Kabupaten Minahasa Tenggara (710,83 km^2), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (1.843,92 km^2), Kota Kotamobagu (68,06 km^2), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (1.796 km^2), dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (860 km^2).

Tahun 2024 jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas kabupaten dan empat kota tercatat sebanyak 2.701,8

ribu jiwa. Untuk melaksanakan pemerintahan, maka melalui antara lain Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022, yang menjelaskan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah. Gubernur/Wakil Gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Unsur Pemerintahan Umum.

6.2. SIFAT OPERASI DAN KEGIATAN POKOK

Sifat operasi dan kegiatan pokok pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keamanan, serta mendorong pembangunan daerah Pemerintah Sulawesi Utara beroperasi sebagai badan publik otonom dengan karakteristik berikut:

a) Desentralisasi: Fokus pada urusan wajib (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) dan urusan pilihan (kelautan, pariwisata, pertanian);

b) Pelayanan Publik: Operasi berbasis kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar;

c) Akuntabilitas: Setiap kegiatan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit BPK;

d) Partisipatif: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan); dan

e) Berorientasi Pembangunan Berkelanjutan: Mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam operasi, sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah Urusan Pemerintahan Konkuren yang meliputi:

1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu:
    a. Pendidikan;
    b. Kesehatan;
    c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
    e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
    f. Sosial.
2) Urusan Pemerintahan Wajib yang bukan berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu:
    a. Tenaga Kerja;
    b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    c. Pangan;

d. Pertanahan;
e. Lingkungan Hidup;
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
h. Perhubungan;
i. Komunikasi dan Informatika;
j. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
k. Penanaman Modal;
l. Kepemudaan dan Olahraga;
m. Kebudayaan; dan
n. Perpustakaan.

3) Urusan Pemerintah Pilihan, yaitu:
a. Kelautan dan Perikanan;
b. Pariwisata;
c. Pertanian;
d. Kehutanan;
e. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
f. Perdagangan.

4) Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang, yaitu:
a. Sekretariat Daerah; dan
b. Sekretariat DPRD.

5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, yaitu:
a. Perencanaan;
b. Keuangan;
c. Kepegawaian;
d. Pendidikan dan Pelatihan;
e. Penelitian dan Pengembangan;
f. Pengelola Perbatasan Daerah; dan
g. Penghubung.

6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, yaitu Inspektorat.

7) Unsur Pemerintahan Umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

6.3 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MELANDASI KEGIATAN OPERASIONAL

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya terjadi perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Disamping itu, beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah, juga menjadi dasar pijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

6.4. MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Susunan Manajemen Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Gubernur : Olly Dondokambey, SE
- Wakil Gubernur : Drs. Steven O. E. Kandouw
- Sekretaris Daerah : Steve H. A. Kepel, ST., M.Si
- Asisten Pemerintahan dan Kesra : Drs. Denny Mangala, M.Si
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan : Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si
- Asisten Administrasi Umum : Dr. Fransiscus E. Manumpil, S.Pi, Menv, Mgmt

Para Pimpinan SKPD sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Nama Pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Pimpinan	NIP	Jabatan
1	Dinas Pendidikan	Dr. Femmy J. Suluh, M.Si	19700428 199010 2 001	Kepala Dinas Pendidikan
2	UPTD Balai Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan	Bravo Turangan, ST	19851113 201102 1 001	Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan
3	Cabang Dinas Siau Tagulandang Biaro	Walter E. Muntaha, S.Pd	19660926 198902 1 002	Kepala Cabang Dinas Siau Tagulandang Biaro
4	Cabang Dinas Tomohon – Minahasa	Fredi Kumaang, S.Pd	19700211 199403 1 010	Kepala Cabang Dinas Tomohon - Minahasa
5	Cabang Dinas Minahasa Utara dan Bitung	Drs. Femmy Mamahit	19670201 200701 2 022	Kepala Cabang Dinas Minahasa Utara dan Bitung
6	Cabang Dinas Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara	Arie E. Toloh, SE	19690820 200903 1 001	Kepala Cabang Dinas Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara
7	Cabang Dinas Bolaang Mongondow	Agil Panuta S.Pd	19680412 201008 1 001	Kepala Cabang Dinas Bolaang Mongondow
8	Cabang Dinas Sangihe	DRS. Jusran H. Gaharasi	19730717 199402 1 002	Kepala Cabang Dinas Sangihe
9	Cabang Dinas Talaud	Merry Sapit, S.Th., M.Pd	19701221 199702 2 003	Kepala Cabang Talaud
10	Cabang Dinas Bolaang Mongondow Selatan	Iswan Lupoja, S.Pd., M.Pd	19680902 198902 1 001	Kepala Cabang Dinas Bolaang Mongondow Selatan
11	Cabang Dinas Bolaang Mongondow Utara	Putra Kapiso, S.Pd	19791025 200902 1 001	Kepala Cabang Dinas Bolaang Mongondow Utara
12	Cabang Dinas Bolaang Mongondow Timur dan Kotamobagu	Hans H. Moonik, S.Pd., M.Pd	19750308 200604 1 006	Plt. Kepala Cabang Dinas Bolaang Mongondow Timur dan Kotamobagu
13	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Kalasey	Hanie Onibala, S.Pi, MSi	19730329 200604 2 013	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Kalasey

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Pimpinan	NIP	Jabatan
14	Dinas Kesehatan	dr. Debie K.R. Kalalo, MSc.PH	19641103 199802 2 001	Kepala Dinas Kesehatan
15	Balai Pelatihan Kesehatan	dr. Samuel M. C. Tanos	19771201 200903 1 002	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan
16	UPTD Rumah Sakit Mata Masyarakat	dr Hendrik P. Tairas	19651008 199803 1 009	Direktur UPTD Rumah Sakit Mata Masyarakat
17	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan	dr. Cristy I. Girsh, M.Kes	19710131 200003 2 003	Direktur UPTD Rumah Sakit Tipe C Noongan
18	UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. V. L Ratumbuysang	dr. Samuel L.A. R. Malingkas, SpM.(K)	19751121 200312 1 007	Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. V. L Ratumbuysang
19	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B	dr. Lidya E. Tulus, M.Kes	19741022 200210 2 002	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B
20	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	dr. Irina M. Rompas, Sp.PK	19801128 200603 2 004	Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
21	UPTD Rumah Sakit Manembo-nembo Tipe C	dr. Nicolas C. Tinayoh, M.Kes	19741022 200212 2 002	Direktur Rumah Sakit Manembo-nembo Tipe C
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Ir. Decy Pasth, ST. M.Si	19671210 199403 2 005	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
23	UPTD Wilayah I Dinas PUPRD	Fenje Karundeng, SST., MT	19670807 199802 1 002	Kepala UPTD Wilayah I Dinas PUPRD
24	UPTD Wilayah II Dinas PUPRD	Anwar P.A. Lobud, ST	19670921 199103 1 009	Kepala UPTD Wilayah II Dinas PUPRD
25	UPTD Wilayah III Dinas PUPRD	Ilzvan K. Manoppo, SST	19670418 199402 1 003	Kepala UPTD Wilayah III Dinas PUPRD
26	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	Henry R. Rondonuwu, ST	19741209 200902 1 001	Kepala UPTD Balai Peralatan dan Pengujian
27	UPTD Air Minum	Ir. Davy S. Kawenglan, ST., MT	19720705 200003 1 014	Kepala UPTD Air Minum
28	UPTD Wilayah IV Dinas PUPRD	Erens Nusa, SE., ME	19710710 200501 1 009	Kepala UPTD Wilayah IV Dinas PUPRD
29	UPTD Balai Bina Teknik	Ir. Feybe F.J.W. Limbet, ST	19730208 200212 2 003	Kepala UPTD Balai Bina Teknik
30	UPTD Persampahan	Ir. Murniaty, ST	19690211 199803 2 003	Kepala UPTD Persampahan
31	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	Ir. Alexander I. Wattimena, ST., M. Si	19690416 199403 1 008	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah
32	Satuan Polisi Pamong Praja	Farly R. Kolamban, SE	19690831 199503 1 001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
33	Dinas Sosial	dr. Rinny Tamuntuan	19651002 199103 2 010	Kepala Dinas Sosial
34	UPTD Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar "Senja Cerah"	Lusye M. Budiman, S.Sos., M.Si	19691119 199503 2 002	Kepala UPTD Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar "Senja Cerah"
35	UPTD Balai Penyantunan Sosial Anak dan Remaja Terlantar "MAKAARUYEN"	Flora M. Worotitjan, S.Sos., M.Si	19680305 198803 2 009	Kepala UPTD Balai Penyantunan Sosial Anak dan Remaja Terlantar "MAKAARUYEN"
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rahel R. Rotinsulu, S.STP, M.Si	19760920 199511 2 001	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
37	UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	Denny M. Mewengkang, S.Pd	19680531 199803 1 005	Kepala UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja
38	UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja	Mario L. G. Wuisan, S.Sos	19680412 201001 1 005	Kepala UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja
39	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wanda L.C. Musu, S.E., M.E	19670805 198803 2 002	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
40	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Marsel S. Silom, SE	19760724 200604 1 004	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
41	Dinas Pangan Daerah	dr. Jemmy J.R. Lampus, M.Kes	19650122 199503 1 002	Kepala Dinas Pangan Daerah
42	UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Daerah	Dra. Ceska R. Sulu, M.Si	19680325 200212 2 001	Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Daerah
43	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Ir. Lini Mokodompit, MM	19680202 198802 1 002	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah
44	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah	Christodhanna S.M. Sondakh, SH	19680823 199003 1 007	Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Darwin Mulopin, S.Sos, MM	19671103 199703 1 005	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
46	Dinas Perhubungan Daerah	Izak R. P. Rey, SE., M.Si.	19690706 199803 1 005	Kepala Dinas Perhubungan Daerah
47	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Yeminanto Mesdia, ST	19710823 199803 1 012	Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
48	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Daerah	Evans S. Liow, S.Sos., MM	19720903 199803 1 005	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Daerah
49	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah	Tahlis Gallang, S.IP, MM	19730306 199311 1 001	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah
50	UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dra. Jahja P. Gultom, MAP	19660530 199703 1 008	Kepala UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
51	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hermina S. D. Korompis, SP, M.Sc	19740807 200003 2 002	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Pimpinan	NIP	Jabatan
52	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jemmy Ringkuangan, AP, MSi	19640509 198702 1 016	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
53	Dinas Kebudayaan Daerah	Jani N Lukas, S.Pi, M.Si	19690321 199603 1 003	Kepala Dinas Kebudayaan Daerah
54	UPTD Taman Budaya dan Museum	Jani N Lukas, S.Pi, M.Si	19690321 199603 1 003	Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum
55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev	19750108 200803 1 001	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
56	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dr. Ir. Tiemsbe Adam, M.Si	19690212 199403 2 006	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
57	UPTD Balai Perbenihan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan	Synthia I. Rondonuwu, S.ST.Pi, M.Si	19771025 200003 2 003	Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan
58	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa	Tommy G.E. Poseumah,SE	19781017 200312 1 005	Kepala UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa
59	UPTD Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung	Ir. Sonny A. Tambuwun	19660827 199303 1 004	Kepala UPTD Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung
60	UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah I	Alfonsius Lumondo, S.Pi., MM.Per	19740113 200212 1 009	Kepala UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah I
61	UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah II	Jefta T. Sumenti, SH	19690910 199109 1 002	Kepala UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah II
62	UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah III	Ir. Margaretha. L. Bela, MM	19670315 200003 2 002	Kepala UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah III
63	UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV	Sumirat Pondaba, S.IP	19800331 200701 1 017	Kepala UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV
64	Dinas Pariwisata	Henry R. W. Kaligis, SH	19671203 199303 1 001	Kepala Dinas Pariwisata
65	Dinas Pertanian dan Peternakan	Wilhelmina J. N Pangemanan, S.Pt., M.Si	19771121 200903 2 001	Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah
66	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ir. Veckie F. Rompas, M.Si	19660804 200604 1 001	Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
67	UPTD Balai Perlindungan dan Pengujian Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nova R. O. Sumolang, SP, M.Si	19671105 199403 1 005	Kepala UPTD Balai Perlindungan dan Pengujian Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura
68	UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian	Rein R.C. Saroinsong, SP.M.Si	19670807 199703 1 006	Kepala UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian
69	UPTD Balai Pengembangan Bibit Ternak dan Benih Pertanian	Ir. Deilly M. C. Kumendong, MAP	19661203 199503 2 005	Kepala UPTD Balai Pengembangan Bibit Ternak dan Benih Pertanian
70	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dianne O.J. Sengke, STP	19741217 200112 2 001	Plt. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
71	Dinas Perkebunan Daerah	Yetty F. Roring, SP	19631202 198503 2 012	Kepala Dinas Perkebunan Daerah
72	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan	Joulce H. Kumendong, SP, M.Si	19710108 200212 2 001	Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
73	UPTD Balai Pengujian, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan	Ir. Ummi Nadjamuddin	19660823 199303 2 003	Kepala UPTD Balai Pengujian, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
74	Dinas Kehutanan Daerah	Rainier N. Dondokambey, S.Hut	19750706 199311 1 001	Kepala Dinas Kehutanan Daerah
75	UPTD Balai Perbenihan dan Pemuteran Alam	Fani E. Koreagkang, S.Pi,Aj.Ak, MM	19690927 199903 1 003	Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pemuteran Alam
76	UPTD Model Unit IV Poigar	Pandy F. S. Sumual, S.Hut	19780206 201001 1 010	Kepala UPTD Model Unit IV Poigar
77	UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa H.V. Worang	Billy Wolelang, SH	19681102 201102 1 001	Kepala UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa H.V. Worang
78	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit I	James F. M Runtuwene, SH	19730715 200212 1 007	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit I
79	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II	Rinal Bunse, S.Hut	19831025 201201 1 001	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II
80	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III	Djainudin Janis, S. IP	19700601 199203 1 012	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III
81	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit V	Nofita Karongkong, S.Pd., MAP	19711119 199103 2 004	Kepala UPTD KPH Unit V
82	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit VI	Steven E. Korangyang, SSTP	19690927 199610 1 001	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit VI
83	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Drs. Fransiscus Maindoka	19660627 198802 1 008	Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
84	UPTD Balai Pengujian dan Pelatihan Pertambangan	Arlen A. Rumondor, SIP	19811203 200901 1 009	Kepala UPTD Balai Pengujian dan Pelatihan Pertambangan
85	Cabang Dinas Wilayah I	Ir. Marthon H. Kendou, ST, MSi	19690324 199902 1 002	Kepala Cabang Dinas Wilayah I
86	Cabang Dinas Wilayah II	Risi A. Onibala	19870922 201102 2 001	Kepala Cabang Dinas Wilayah II
87	Cabang Dinas Wilayah III	Arlet A. Wowiling, SH., M.Si.	19720413 199903 1 004	Kepala Cabang Dinas Wilayah III
88	Cabang Dinas Wilayah IV	Dra. Grave Th. E. Matantu, M.Si	19740822 199303 1 001	Kepala Cabang Dinas Wilayah IV
89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daniel A. Mewengkang, SE., M.Si	19651231 199103 1 080	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Pimpinan	NIP	Jabatan
90	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikat Mutu barang	Tuty P. Saerang, ST	19801130 201102 2 001	Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikat Mutu barang
91	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	DRS. Andra K. Mawuntu	19690709 199010 1 002	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
92	Biro Hukum	DR. Flora Krisen, SH, MH	19690206 199403 2 009	Plt.Kepala Biro Hukum
93	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ir. Ferapdy Kaligis, MAP	19650530 199103 1 012	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
94	Biro Perekonomian	Reza A.W. Dotulong S.S.T, M.App.Ec	19820424 200212 1 001	Kepala Biro Perekonomian
95	Biro Administrasi Pembangunan	Lukman Lapodengan, SE., M.Si	19700513 199803 1 007	Kepala Biro Administrasi Pembangunan
96	Biro Organisasi	DR. Flora Krisen, SH, MH	19690206 199403 2 009	Kepala Biro Organisasi
97	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Welde R. Poli, SP, MA	19700325 199803 1 009	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
98	Biro Umum	Ni Luh Putu Ari C, SSTP M.SI	19801007 199912 2 001	Plt. Kepala Biro Umum
99	Biro Administrasi Pimpinan	Christian A.R. Iroth, S.STP	19800102 200012 1 002	Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan
100	Sekretariat DPRD	Welem Niklas Silangen, S.Sos, M.SI	19720627 200012 1 002	Sekretaris DPRD
101	Badan Penghubung Daerah Prov. SulUt	Christian Singal, S.Komp., M.Si	19650929 199403 1 009	Kepala Badan Penghubung Daerah
102	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Johnny A.A.Suak, SE.M.Si	19690405 200912 1 001	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
103	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ir. Adolf H. Tamengkel	19660330 199704 1 001	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
104	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Henry R.W. Kaloly, SH	19671203 199303 1 001	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
105	Inspektorat Daerah	Dr. Jemmy S. Kumendong, M.Si	19700613 199010 1 001	Plt.Inspektur Daerah
106	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Elvira M. Katuuk, ST, ME	19700520 200604 2 009	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
107	Badan Pendapatan Daerah	June E. Silangen, SE.Ak., MM	19720612 200212 1 009	Kepala Badan Pendapatan Daerah
109	UPTD PPD di Manado	Christian Mingkid, S.Sos	19661225 198802 1 007	Kepala UPTD PPD di Manado
110	UPTD PPD di Minahasa	Harold F. Lumempouw, SH, MH	19730520 201102 1 001	Kepala UPTD PPD di Minahasa
111	UPTD PPD di Bitung	Arthur H. Tuela, SE	19750628 200003 1 002	Kepala UPTD PPD di Bitung
112	UPTD PPD di Sangihe, Talaud dan Sitaro	Stanly W. O. Ticoalu, SSTP., M.Si	19761025 199711 1 001	Kepala UPTD PPD di Sangihe, Talaud dan Sitaro
113	UPTD PPD di Kotamobagu, Bolsel	Landy A. Daud, SH, M.Si	19710722 199803 1 002	Kepala UPTD PPD di Kotamobagu, Bolsel
114	UPTD PPD di Minahasa Selatan	Stanly Senimsang, SE	19611012 201001 1 009	Kepala PPD di Manado
115	UPTD PPD di Tomohon	Harlal P. Wulus, SIP	19660817 200701 1 035	Kepala UPTD PPD di Tomohon
116	UPTD PPD di Minahasa Utara	Agnes T. Rembet, SP	19720516 200212 2 003	Kepala UPTD PPD di Minahasa Utara
117	UPTD PPD di Minahasa Tenggara	June E. Silangen, SE.Ak., MM	19720612 200212 1 009	Kepala UPTD PPD di Minahasa Tenggara
118	UPTD PPD di Bolmong, Bolmut, Boltim	Stephanus S. Nangin, S.Kom	19680928 200604 1 005	Kepala UPTD PPD di Bolmong, Bolmut, Boltim
119	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Clay J. H. Dondokambey, S.STP., MAP	19830614 200112 1 001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
120	Badan Kepegawaian Daerah	Dr. Jemmy S. Kumendong, M.Si	19700612 199010 1 001	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
121	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Drs. Marhaen R. Tuniwa, M.Pd	19650930 198602 1 004	Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
122	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Drs. Joi E. B. Oroh	19650101 199303 1 029	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan daerah

6.5. KEWAJIBAN KONTIJENSI

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6.2 Rekapitulasi Penanganan Perkara Litigasi (dalam proses) Gugatan kepada Gubernur di Badan Peradilan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Total Perkara	Jenis Perkara			Tingkatan Badan Peradilan								Perkara Selesai		
				Proses		PTIPT.TUN		Mahkamah Agung						
	Perdata	Pertawanan	TUN	PN	TUN	Menunggu Upaya Hukum	Banding	Menunggu Upaya Hukum	Kasasi	Menunggu Upaya Hukum	PK	Inkracht 2024	Dicabut 2024	Diputus 2024
33	29	2	2	2	1	1	1	1	7	6	4	4	6	-
Jumlah	33			23								4	6	-

Tabel 6.3 Rekapitulasi Perkara Litigasi (dalam proses) di Badan Peradilan Gugatan kepada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Total Perkara	Jenis Perkara			Tingkatan Badan Peradilan								Perkara Selesai		
				Proses		PTIPT.TUN		Mahkamah Agung						
	Perdata	Pertawanan	TUN	PN	TUN	Menunggu Upaya Hukum	Banding	Menunggu Upaya Hukum	Kasasi	Menunggu Upaya Hukum	PK	Inkracht 2024	Dicabut 2024	Diputus 2024
13	11	-	2	-	-	3	-	2	2	-	1	5	-	-
Jumlah	13			8								5	-	-

Rincian dapat dilihat pada Lampiran V.1 dan V.2 laporan keuangan ini.

6.6. INFORMASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Berikut ini merupakan rekapitulasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 6.4 Rekapitulasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)

Uraian	Total (Rp)
Sewa	2.768.846.878,00
Kerja Sama Pemanfaatan	90.027.800.000,00
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	7.035.000.000,00

Rincian dapat dilihat pada Lampiran V.3, V.4 dan V.5 laporan keuangan ini.

Tabel 6.5 Daftar Pemanfaatan Barang Milik Daerah-Kendaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 (Pinjam Pakai)

No	Nama OPD	Nama Instansi/ OPD Lain sebagai Pengguna Aset	Tanggal Mulai Pinjam Pakai	Tanggal Berakhir Pinjam Pakai	Nomor BAST	Tanggal BAST	Bukti Dokumen
1	Biro Umum Setda Prov Sulut	Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara	10/11/2015	10/01/2016	024/2368,1/Sekr.Ro.Umum	10/11/2015	Ada
2	Biro Umum Setda Prov Sulut	Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara	03/12/2015	03/02/2016	024/2369,1/Sekr.Ro.Umum	03/12/2015	Ada
3	Biro Umum Setda Prov Sulut	Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara	18/11/2015	18/01/2016	024/2372,1/Sekr.Ro.Umum	18/11/2015	Ada
4	Biro Umum Setda Prov Sulut	Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara	03/12/2015	03/02/2016	024/2371.1/Sekr.Ro.Umum	03/12/2015	Ada
5	Biro Umum Setda Prov Sulut	Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara	16/02/2022	16/02/2024	024/42/B. Umum	16/02/2022	Ada
6	Biro Umum Setda Prov Sulut	Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara	19/09/2024	19/09/2024	024/386/B. Umum	19/09/2024	Ada

No	Nama OPD	Nama Instansi/ OPD Lain sebagai Pengguna Aset	Tanggal Mulai Pinjam Pakai	Tanggal Berakhir Pinjam Pakai	Nomor BAST	Tanggal BAST	Bukti Dokume n
7	Biro Umum Setda Prov Sulut	Badan Intelijen Negara	17/11/2015	17/01/2016	024/9/118	17/11/2015	Ada
8	Biro Umum Setda Prov Sulut	Pangkalan Angkatan Laut Manado TNI AL	10/11/2015	10/01/2016	024/9/116	10/11/2015	Ada
9	Biro Umum Setda Prov Sulut	TNI AD	10/11/2015	10/01/2016	024/2367.1/S ekr.Ro.Umum	10/11/2015	Ada
10	Biro Umum Setda Prov Sulut	Kejaksaan Tinggi Daerah Provinsi Sulawesi Utara	10/11/2015	10/01/2016	024/2370.1/S ekr.Ro.Umum	10/11/2015	Ada
11	Biro Umum Setda Prov Sulut	TNI AD	01/09/2021	01/09/2022	024/694/B.Um um	01/09/2021	Ada
12	Biro Umum Setda Prov Sulut	Kejaksaan Tinggi Daerah Provinsi Sulawesi Utara	10/11/2015	10/01/2016	024/9/115	10/11/2015	Ada
13	Biro Umum Setda Prov Sulut	Pengadilan Tinggi Negeri Manado	17/11/2015	17/01/2016	024/9/117	17/11/2015	Ada
14	Biro Umum Setda Prov Sulut	Badan Intelijen Negara	10/03/2024	10/03/2024	024/148/B. Umum	10/03/2024	Ada
15	Biro Umum Setda Prov Sulut	Kejaksaan Tinggi Daerah Provinsi Sulawesi Utara	11/10/2024	11/10/2024	024/440/B.Um um	11/10/2024	Ada
16	Biro Umum Setda Prov Sulut	Pangkalan Angkatan Laut Manado TNI AL	05/02/2021	04/02/2022	024/21.653/S ekr-ro.Umum	05/02/2021	Ada
17	Biro Umum Setda Prov Sulut	Pangkalan Angkatan Udara Manado TNI AU	10/11/2015	10/01/2016	024/2366.1/S ekr.Ro.Umum	10/11/2015	Ada
18	Biro Umum Setda Prov Sulut	Pangkalan Angkatan Laut Manado TNI AL	24/08/2022	24/08/2027	024/603/B. Umum	24/08/2022	Ada
19	Biro Umum Setda Prov Sulut	Polisi Militer	-	-	-	-	Tidak
20	Biro Umum Setda Prov Sulut	Kejaksaan Tinggi Daerah Provinsi Sulawesi Utara	12/05/2015	Selama yang Bersangkut an masih Memangku Jabatan	024/308.1/B. Umum	12/05/2015	Ada
21	Biro Umum Setda Prov Sulut	TNI AD	29/03/2019	29/03/2024	024/310/B.Um um	29/03/2019	Ada

6.7. INFORMASI TANAH YANG MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN DAN YANG TIDAK MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN

Berikut merupakan informasi tanah yang memiliki bukti kepemilikan dan yang tidak memiliki bukti kepemilikan sebagaimana tersaji pada tabel.

Tabel 6.6 Rekapitulasi Tanah yang Memiliki Bukti Kepemilikan Tahun 2024

Daerah	Jumlah Sertifikat
Kota Manado	172
Kota Bitung	25
Kota Tomohon	5
Kota Kotamobagu	11
Kabupaten Minahasa	67
Kabupaten Minahasa Utara	27
Kabupaten Minahasa Selatan	44
Kabupaten Minahasa Tenggara	14
Kabupaten Bolsang Mongondow	26
Kabupaten Bolsang Mongondow Timur	11
Kabupaten Bolsang Mongondow Utara	7
Kabupaten Bolsang Mongondow Selatan	7
Kabupaten Kepulauan Talaud	31
Kabupaten Kepulauan Sangihe	24

Daerah	Jumlah Sertifikat
Kabupaten Kepulauan Sitaro	22
Pulau Jawa	8
TOTAL	501

Rincian dapat dilihat pada Lampiran V.6 laporan keuangan ini.

Tabel 6.7 Rekapitulasi Tanah yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan Tahun 2024

Daerah	Jumlah Sertifikat
Kota Manado	23
Kota Tomohon	1
Kota Kotamobagu	1
Kabupaten Minahasa	7
Kabupaten Minahasa Utara	5
Kabupaten Minahasa Selatan	1
Kabupaten Minahasa Tenggara	1
Kabupaten Bolaang Mongondow	7
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	6
Kabupaten Kepulauan Sangihe	2
Kabupaten Kepulauan Sitaro	1
TOTAL	56

Rincian dapat dilihat pada Lampiran V.7 laporan keuangan ini.

6.8. INFORMASI ASET TETAP

Berdasarkan BAST 1038/22/Sekr-BKAD 030/22.5950/Sekr-BKAD tanggal 14 Juli 2022, terdapat 23 Gedung dan Bangunan yang merupakan P3D tahap 4 dari Kabupaten Minahasa Selatan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang belum dicatat di KIB C pada E-BMD karena belum memiliki informasi tahun perolehan dan nilai perolehan. Adapun perincian Gedung dan Bangunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6.8 Perincian Gedung dan Bangunan yang Belum Tercatat pada KIB C

No.	Nama Gedung	Jenis Bangunan	Luas (m^2)	Letak/Alamat
1	GEDUNG B		73	PPI Amurang
2	GEDUNG C		169	PPI Amurang
3	GEDUNG D		133	PPI Amurang
4	GEDUNG E		211	PPI Amurang
5	GEDUNG F	Bak Air	23	PPI Amurang
6	GEDUNG H		142	PPI Amurang
7	GEDUNG I		10	PPI Amurang
8	GEDUNG J		12	PPI Amurang
9	GEDUNG K		14	PPI Amurang
10	GEDUNG L		226	PPI Amurang
11	GEDUNG M		165	PPI Amurang
12	GEDUNG N		23	PPI Amurang
13	GEDUNG O		105	PPI Amurang
14	GEDUNG P		55	PPI Amurang
15	GEDUNG R		187	PPI Amurang
16	GEDUNG S		49	PPI Amurang
17	GEDUNG T		180	PPI Amurang
18	GEDUNG U		52	PPI Amurang
19	GEDUNG V	Pagar SPBU	202	PPI Amurang
20	GEDUNG V1	Gedung SPBU	18	PPI Amurang
21	GEDUNG W		10	PPI Amurang
22	GEDUNG X		41	PPI Amurang
23	GEDUNG BB	Pos Jaga	3	PPI Amurang

6.9. INFORMASI TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Rekap Nilai Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas temuan BPK TA 2016-2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 6.9 Data TGR Tahun 2016-2024

No	Perangkat Daerah	Nilai Rekomendasi TGR		Total Selesai		Total Sisa TGR		Persentase	
		NF	F	NF	F	NF	F	NF	F
1	BIRO PEMERINTAHAN & OTONOMI DAERAH_WI_1	3	2.990.916,00	3	2.990.916,00	0	-	100%	0%
2	BIRO HUKUM_WI_1	3	4.200.000,00	3	4.200.000,00	0	-	100%	40%
3	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI DAERAH_WI_1	9	152.120.259,00	6	101.013.154,00	3	90.937.054,00	67%	67%
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK DAERAH_WI_1	6	1.0199.934,00	6	14.186.334,00	0	-	100%	100%
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & DAERAH_WI_1	7	7.429.514,00	6	7.429.514,00	1	-	86%	100%
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK_WI_1	3	266.376,00	3	266.376,00	0	-	100%	100%
7	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT_WI_1	6	3.752.136,00	6	3.752.136,00	0	-	100%	100%
8	DINAS PENDIDIKAN DAERAH_WI_1	87	7.321.684.417,81	75	3.859.676.796,04	12	3.461.989.636,67	86%	53%
9	DINAS KESEHATAN DAERAH_WI_1	43	9.214.203.172,99	41	7.923.444.417,93	2	290.758.755,00	95%	99%
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH_WI_1	9	10.702.126,00	9	10.693.886,00	0	99.640,00	100%	99%
11	DINAS SOSIAL DAERAH_WI_1	16	20.506.974,00	15	20.506.974,00	1	-	94%	100%
12	DINAS ADM KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL & KB DAERAH_WI_1	5	1.243.730,00	5	1.243.730,00	0	-	100%	100%
13	DINAS KEPEMUDAAN & OLAHRAGA DAERAH_WI_1	10	1.071.939.734,00	10	667.114.734,00	0	114.939.000,00	100%	99%
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH_WI_1	8	469.693.203,02	5	459.939.779,98	3	34.082.914,24	63%	98%
15	BIRO PEREKONOMIAN_WI_2	6	1.074.632,00	6	1.074.632,00	0	-	100%	100%
16	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH_WI_2	8	297.993.692,00	8	235.993.692,00	0	62.000.000,00	100%	80%
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH DAERAH_WI_2	2	60.153.272,00	2	7.653.272,00	0	52.500.000,00	100%	13%
18	DINAS PARIWISATA DAERAH_WI_2	17	1.731.697.521,95	17	67.3 991.303,20	0	1.664.705.158,76	100%	4%
19	DINAS PERTANIAN & PETERNAKAN DAERAH_WI_2	34	2.502.127.609,64	34	2.502.127.609,64	0	-	100%	100%
20	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN DAERAH_WI_2	19	3.313.225.095,75	18	1.003.257.447,00	0	2.340.967.648,75	100%	32%
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH_WI_2	14	219.076.504,00	14	219.076.504,00	0	-	100%	100%
22	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN_WI_2	3	1.931.604,00	3	1.931.604,00	0	-	100%	100%
23	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG DAERAH_WI_2	70	44.768.215.750,00	69	22.445.736.889,67	5	22.320.478.860,41	99%	50%
24	DINAS PANGAN DAERAH_WI_2	4	8.933.000,00	4	8.933.000,00	0	-	100%	100%
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH_WI_2	9	32.538.979,00	9	32.538.979,00	0	-	100%	100%
26	DINAS KEHUTANAN DAERAH_WI_2	11	369.940.971,35	11	302.088.618,92	0	33.744.452,47	100%	82%
27	DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL DAERAH_WI_2	14	350.933.973,00	14	97.762.955,00	0	253.970.918,00	100%	28%
28	DINAS PERKEBUNAN DAERAH_WI_2	12	397.896.280,00	11	397.896.280,00	1	-	92%	100%
29	BIRO UMUM_WI_3	45	7.915.177.978,70	45	4.440.619.636,92	0	3.174.667.441,68	100%	56%
30	SEKRETARIAT DPRD_WI_3	26	1.573.299.358,49	24	516.043.094,20	2	1.057.343.564,29	92%	33%
31	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN DAERAH_WI_3	27	7.314.777.019,34	24	4.021.625.110,45	3	3.293.151.908,89	89%	55%
32	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN DAERAH_WI_3	30	3.099.099.146,71	27	2.109.364.342,91	3	979.743.803,80	90%	68%
33	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH_WI_3	71	5.099.052.671,95	61	5.095.470.754,95	10	2.181.917,00	86%	100%
34	BADAN PENGUPATAN DAERAH_WI_3	32	3.451.343.926,00	31	642.754.747,00	1	2.803.589.179,00	97%	19%
35	BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH_WI_3	2	13.490.000,00	2	7.000.000,00	0	6.490.000,00	100%	52%
36	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN_WI_3	4	89.393.673,00	3	14.734.905,33	1	73.658.768,67	75%	17%
37	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN & STATISTIK DAERAH_WI_3	21	327.193.139,06	21	320.999.824,00	0	6.193.639,06	100%	98%
38	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH_WI_3	9	235.031.134,00	8	235.031.134,00	1	-	89%	100%

No	Perangkat Daerah	Nilai Rekomendasi TGR		Total Setoran		Total Sisa TGR		Persentase	
		NF	F	NF	F	NF	F	NF	F
39	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN DAERAH_WL_2	7	86.711.177,50	6	32.910.535,00	1	53.791.352,50	86%	38%
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH_WL_3	34	902.724.631,00	27	484.088.631,00	7	18.635.000,00	79%	90%
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH_WL_3	13	832.508.769,05	10	318.388.649,24	3	514.210.126,81	77%	38%
42	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH_WL_3	9	23.597.096,00	9	19.203.497,00	0	3.393.599,00	100%	85%
43	BADAN PENGHUBUNG DAERAH_WL_4	8	335.703.865,00	7	135.330.452,00	1	315.517.413,00	88%	34%
44	INSPEKTORAT_WL_4	6	7.332.570,00	4	7.332.570,00	2	-	67%	100%
45	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP DAERAH_WL_4	22	484.744.060,00	21	166.415.503,00	1	318.328.455,00	95%	34%
46	BIRO PENGADAAN BARANG & JASA_WL_5	9	12.666.266,00	8	12.666.266,00	1	-	89%	100%
47	BIRO ORGANISASI _WL_5	3	3.015.310,00	2	3.015.310,00	1	-	67%	100%
48	RSUD TIPE B_WL_1	11	1.821.659.719,97	9	410.279.929,97	2	1.411.279.787,00	82%	23%
49	RSUD TIPE C NOONGAN_WL_1	15	564.650.337,97	12	553.782.729,97	3	11.073.608,00	80%	98%
50	BS MATA _WL_1	10	382.139.017,46	9	382.139.017,46	1	-	90%	100%
51	RS TIPE C MANEMBO-NEMBO BITUNG_WL_1	11	843.931.092,80	5	833.931.092,80	6	10.000.000,00	45%	99%
52	RSJ. Prof. Dr. V.L. RATUMBUYSANG_WL_1	10	293.409.144,00	5	112.054.760,00	2	181.354.384,00	50%	38%
53	BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN_WL_1	0	1.634.040,00	0	1.634.040,00	0	-	0%	100%
54	UPTD BPPK DINAS KESEHATAN DAERAH_WL_1	0	-	0	-	0	-	0%	0%
	TOTAL	882	106.204.693.251,30	782	61.630.478.668,68	88	44.703.671.680,62	94%	58%

6.10. INFORMASI PENDATAAN DAFTAR BARANG KOLEKSI MUSEUM

Merujuk pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual serta Kebijakan Akuntansi Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini merupakan daftar barang koleksi museum, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 6.10 Informasi Pendataan Daftar Barang Koleksi Museum Tahun 2024

No	Nama Koleksi	Jumlah	Tahun Perolehan	Tempat Perolehan	Cara Perolehan
1	Klasifikasi/Jenis Arekeologi	252	1971 s/d 1997	Manado, Minahasa, Sanghe Talaud, Bolaang Mongondow, Gorontalo,	Hasil Eskavasi (Temuan), Sumbangan, Ganti Rugi
2	Klasifikasi/Jenis Etnografi	438	1971 s/d 1977	Irian Jaya, Sangir Talaud, Minahasa, Manado, Gorontalo, Sulawesi Tengah	Sumbangan, Hasil Eskavasi (Temuan), Ganti Rugi
3	Klasifikasi Numismatika	3.015	1977 s/d 1997	Minahasa, Manado, Sangir Talaud, Tahuna, Gorontalo, Bolaang Mongondow, Irian Jaya, Bitung	Sumbangan, Ganti Rugi, Pengadaan Rutin, Pengadaan, Pengadaan Proyek, Sumbangan (Ibu Pandean), Temuan, Ganti Rugi Proyek
Total		3.705			

6.11. ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG MENDUKUNG PERCEPATAN PENURUNAN DAN CAPAIAN *STUNTING* DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Stunting jika dikutip dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah batas atau standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Ada pula pengertian *stunting* menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2,00 SD/standar deviasi *(stunted)* dan kurang dari -3,00 SD *(several stunted)*. Dapat disimpulkan bahwa *stunting* merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya sehingga mengakibatkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.

Penyebab *stunting* adalah kurangnya asupan gizi yang diperolah oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama atau di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dimulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usianya menurut standar kesehatan di Indonesia. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya *stunting* yaitu pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti saran air bersih dan tidak tersedianya sarana fasilitas sanitasi dasar yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Berikut ini merupakan data anggaran dan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung percepatan penurunan *stunting* di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

Tabel 6.11 Data Realisasi Belanja APBN Berdasarkan Jenis Kewenangan TA 2024

No	Instansi/OPD	Sub Kegiatan	Anggaran dan Realisasi Semester II - 2024		Intervensi		Sumber Pendanaan APBD/APBN/ DAK/BOK/ BOKB
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	300.000.000,00	299.953.200,00	99,99	SPESIFIK	APBD
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.042.000.000,00	1.013.751.440,00	97,66	SPESIFIK	APBD
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	24.975.000,00	20.574.500,00	82,71	SENSITIF	APBD
		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	13.125.000,00	5.727.626,05	44,48	SENSITIF	APBD
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50.000.000,00	30.259.900,00	52,82	SENSITIF	APBD
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	450.000.000,00	419.668.134,00	93,26	SENSITIF	APBD
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	75.000.000,00	54.347.874,00	72,46	SENSITIF	APBD
3	Dinas Pangan	Pengembangan Desa BISA	360.000.000,00	360.000.000,00	100	SENSITIF	APBN
		Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi Untuk Siswa (GENIUS)	1.147.600.000,00	1.147.600.000,00	100	SPESIFIK	APBN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	120.944.700,00	120.944.700,00	100	SENSITIF	APBD
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemasaran Dan Promosi Hasil Kelautan Dan Perikanan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) Dan Pemberian Bantuan Bahan Olahan Berbahan Dasar Ikan	42.000.000,00	42.000.000,00	100	SPESIFIK	APBD
		Operasional Pendampingan Sasaran Kelompok Resiko Stunting	7.360.720.000,00	3.538.206.000,00	48,08	SENSITIF	APBN (BOKB)

No	Instansi/OPD	Sub Kegiatan	Anggaran dan Realisasi Semester II - 2024		Intervensi		Sumber Pendanaan APBD/APBN/ DAK/BOK/ BOKB
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan	6.988.200.000,00	3.040.149.000,00	43,99	SENSITIF	APBN (BOKB)
		Audit Kasus Stunting	1.222.880.000,00	439.432.259,00	35,94	SENSITIF	APBN (BOKB)
5	BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)	Mini Lokakarya Kecamatan	2.787.711.000,00	738.379.918,00	26,49	SENSITIF	APBN (BOKB)
		Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	2.677.789.000,00	976.379.484,00	36,54	SENSITIF	APBN (BOKB)
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	55.704.000,00	55.704.000,00	100	SENSITIF	APBD

Kondisi Prevalensi *Stunting* di Sulawesi Utara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan survei berskala nasional sejak tahun 2019 dimana sumber datanya dari survei yang menyasar rumah tangga dengan anak balita serta dilakukan oleh enumerator terlatih yang memiliki latar belakang pendidikan gizi. Dalam pelaksanaan SSGI ini telah menjadi amanat Perpres No. 72 Tahun 2021 Kemenkes bertanggung jawab untuk mempublikasikan data prevalensi *stunting* kabupaten/kota setiap tahunnya. Perbedaan antara data nasional dan Sulawesi Utara juga menyoroti bahwa Sulawesi Utara memiliki prevalensi *stunting* yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional selama periode ini.

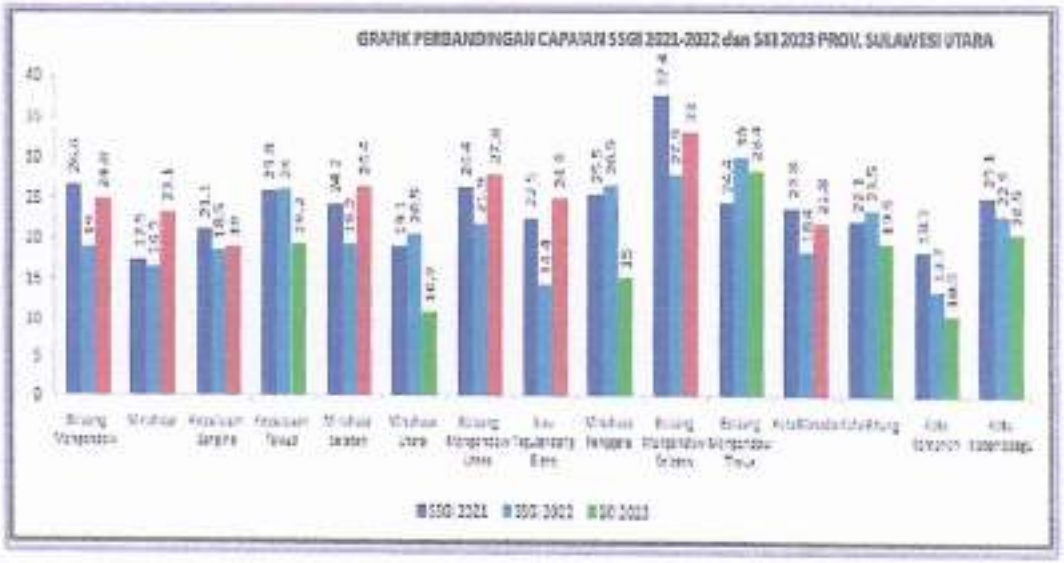
SSGI berfokus khusus pada pengukuran status gizi penduduk Indonesia, terutama pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan anak-anak usia sekolah. Tujuan utama dari SSGI adalah untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai prevalensi berbagai masalah gizi, termasuk *stunting, wasting, underweight, dan overweight*. Data yang dihasilkan dari SSGI digunakan untuk merancang dan mengevaluasi program-program intervensi gizi, serta untuk memantau kemajuan dalam pencapaian target-target gizi nasional dan internasional. Pengumpulan data SSGI biasanya melibatkan pengukuran antropometri, wawancara mengenai kebiasaan makan, serta pemeriksaan status mikronutrien seperti anemia.

Data SSGI, prevalensi balita *stunting* di Provinsi Sulawesi Utara bervariasi di antara kabupaten dan kota. Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki prevalensi *stunting* tertinggi sebesar 24,80%, sedangkan Kota Tomohon memiliki prevalensi terendah sebesar 13,70%. Perubahan signifikan di beberapa wilayah. Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sitaro mengalami peningkatan drastis. Ini menandakan adanya masalah yang perlu segera ditangani untuk mengurangi angka *stunting* di wilayah tersebut. Di sisi lain, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih memiliki angka *stunting* yang tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan dari 33,00% menjadi 27,90%.

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kota Bitung berhasil menurunkan prevalensi *stunting* secara signifikan, hal tersebut menunjukkan keberhasilan program intervensi yang dijalankan serta menandakan adanya perbaikan dalam penanganan *stunting*.

Berikut Grafik Prevalensi *Stunting* Menurut Survei SSGI.

Grafik 6.12 Grafik Prevalensi *Stunting* Menurut SSGI



Adapun prevalensi balita *stunted* per kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara-SSGI 2024 hasil pengukuran dari masing-masing puskemas ke Provinsi tersebut menunjukan angka prevalensi *stunting* di Sulawesi Utara tahun 2024 posisi bulan Agustus sebesar 1,55%, atau berjumlah 1.835 balita. Angka tersebut merupakan hasil pengukuran balita dari 88,70% balita yang telah terdata, atau berjumlah 118.138 balita telah diukur dari 133.194 balita yang telah terdata.

Tabel 6.13 Rincian Balita yang Telah Terdata

Prevalensi Balita Stunted Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara-SSGI 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	Jml Balita yang Diukur						Jml Balita Stunting (hasil ukur)					
		Agustus 2022	Februari 2023	Oktober 2023	Februari 2024	Agustus 2024	%Entry Pengukuran Balita	Agustus 2022	Februari 2023	Oktober 2023	Februari 2024	Agustus 2024	%Balita Stunting
	SULAWESI UTARA	121.843	113.607	121.364	111.179	118.138	88,70	3.731	2.870	3.498	2.102	1.835	1,55
1	Bolaang Mongondow	13.073	11.128	12.210	11.368	11.776	94,16	170	97	151	46	66	0,56
2	Minahasa	14.468	8.045	14.431	14.236	14.082	91,17	173	129	180	109	141	0,91
3	Kep. Sangihe	6.315	6.522	6.794	6.021	5.984	170,00	278	215	227	119	113	3,02
4	Kep. Talaud	4.342	3.823	4.228	3.973	4.035	87,81	416	408	296	290	145	2,88
5	Minahasa Selatan	13.471	12.979	12.487	12.102	12.196	95,03	341	351	422	424	313	3,56
6	Minahasa Utara	11.345	10.590	9.888	10.104	9.998	87,53	313	335	98	153	90	0,94
7	Bolaang Mongondow Utara	5.208	3.231	5.087	2.404	4.709	98,32	219	97	85	100	147	3,26
8	Kep. Siau Tagulandang Biaro	3.142	2.412	3.074	2.118	2.935	82,14	53	20	58	19	24	0,83
9	Minahasa Tenggara	7.210	6.831	6.805	4.859	6.890	94,69	122	122	79	40	40	0,62
10	Bolaang Mongondow Selatan	9.194	9.442	9.452	9.467	9.581	98,78	281	186	161	149	117	0,81
11	Bolaang Mongondow Timur	9.512	9.401	9.560	9.618	9.489	95,99	181	218	220	172	100	2,31
12	Manado	18.081	14.572	18.881	17.978	14.581	77,46	58	74	104	76	102	0,92
13	Bitung	7.828	8.137	9.264	8.027	7.870	95,12	269	161	251	288	111	2,73
14	Tomohon	4.148	3.941	4.258	3.965	4.036	98,17	12	12	18	10	18	0,41
15	Kotamobagu	7.049	5.127	5.540	4.917	5.037	87,61	339	330	329	321	273	4,91

Data akhir E-PPGM tahun 2024 pengukuran bulan Oktober 2024 Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) bertujuan agar tenaga pelaksana gizi dan pemangku kebijakan di daerah lebih mudah dalam mengambil keputusan dan tindakan apa yang akan dilakukan, baik secara komunitas maupun individu. Aplikasi ini merupakan pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat dengan teknologi elektronik untuk merekam data individu dan hasil penimbangan, terutama di posyandu serta mengolah hasil input data tersebut menjadi status gizi dan pemangku kebijakan di daerah lebih mudah dalam mengamati permasalahan gizi

Tabel 6.14 Data Final E-PPGM Tahun 2024

DATA PREVIMENSI BALITA STUNTING
PENGUKURAN BULAN AGUSTUS 2024
(Penarikan : 10 Oktober 2024)

NO	KABUPATEN/KOTA	SASARAN BALITA (PUSDATIN 2024)	JUMLAH BALITA D ENTRY	JUMLAH BALITA DIUKUR	%	STUNTING	%	WASTING	%	UNDERWEIGHT	%
1	Bolaang Mongondow	21.748	15.674	14.775	94,26	56	0,38	471	3,19	547	3,70
2	Minahasa	21.800	16.253	14.981	92,17	101	0,67	147	0,98	207	1,38
3	Kep. Sangihe	8.105	5.584	5.551	100	113	2,02	281	5,03	393	7,04
4	Kep. Talaud	7.167	5.122	5.010	97,81	145	2,89	163	3,25	300	5,99
5	Minahasa Selatan	14.679	12.939	12.206	95,03	311	2,53	123	1,00	419	3,41
6	Minahasa Utara	15.508	10.211	9.959	97,53	96	0,96	225	2,26	304	3,05
7	Bolmong Utara	7.209	4.941	4.759	96,32	160	3,36	197	4,14	343	7,21
8	Kep. Siaro	4.108	3.200	2.635	82,34	14	0,53	36	1,37	81	3,07
9	Minahasa Tenggara	8.561	7.075	6.699	94,69	60	0,90	119	1,78	192	2,87
10	Bolmong Selatan	7.084	5.347	5.282	98,78	117	2,22	235	4,45	492	9,31
11	Bolmong Timur	5.919	5.711	5.480	95,96	160	2,92	126	2,30	259	4,73
12	Kota Manado	30.438	18.780	14.551	77,48	100	0,69	155	1,07	255	1,75
13	Kota Bitung	19.824	11.796	7.670	65,02	211	2,75	189	2,46	319	4,16
14	Kota Tomohon	7.050	4.309	4.230	98,17	18	0,43	9	0,21	25	0,59
15	Kota Kotamobagu	10.530	6.252	4.227	67,61	173	4,09	138	3,26	215	5,09
	Sulawesi Utara	189.731	133.194	118.138	88,70	1.835	1,55	2.614	2,21	4.351	3,68

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah balita *stunting* dan persentase pengukuran berdasarkan E-PPGBM di Sulawesi Utara periode Februari 2024, terdapat empat Kab/Kota yang mengalami kenaikan jumlah Balita *Stunting* yaitu Kab. Bolaang Mongondow (+8), Kab. Minahasa Tenggara (+18), Kab. Bolaang Mongondow Timur (+31), Kota Manado (+24). Berdasarkan hasil rilis atau publikasi dari kedua data tersebut, yakni antara SSGI dan E-PPGBM terdapat perbedaan sifat yang menentukan perbedaan kegunaan data. SSGI digunakan untuk monitoring dan evaluasi kemajuan intervensi gizi di tingkat nasional dan daerah. Sementara, data E-PPGBM berguna untuk memonitor pertumbuhan balita setiap bulannya dan termasuk ke dalam surveilans program gizi. Data E-PPGBM juga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penetapan sasaran program gizi di daerah karena bersifat *real-time*. Penggunaan kedua data ini harus digunakan secara tepat sesuai fungsinya.

6.12. DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

1. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Penunjang PPD Tahun 2024

Tabel 6.15 Tabel Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Penunjang PPD Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah (PPD)	Pendanaan Tahun 2024	
		Anggaran	Realisasi
1	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.396.340.178,00	3.355.130.354,00
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	83.211.000,00	82.901.920,00
3	Program Penataan Desa	155.875.000,00	154.282.460,00
4	Program Pengelolaan Pendidikan	427.419.821.725,00	355.347.179.624,00
5	Program Rehabilitasi Sosial	3.373.293.665,00	3.215.258.553,00
6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	318.386.900,00	314.689.788,00
7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	21.527.985.777,00	20.591.924.733,00
8	Program Pengembangan Ekspor	4.235.855.100,00	1.923.776.892,00

2. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Penunjang PN Tahun 2024

Tabel 6.16 Tabel Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Penunjang PN Tahun 2024

No	Prioritas Nasional (PN)	Pendanaan Tahun 2024	
		Anggaran	Realisasi
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	255.880.400,00	252.495.000,00
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	251.772.285,00	226.804.614,00
3.	Program Pemasaran Pariwisata	2.851.303.200,00	2.837.535.373,00
4.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.749.008.757,00	5.460.535.170,00
5.	Program Pengelolaan Hutan	2.607.022.500,00	2.600.247.100,00
6.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.657.330.800,00	1.228.657.460,00
7.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1.196.067.299,00	1.174.048.721,00

3. Rincian Dukungan Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2024

Tabel 6.17 Tabel Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Penunjang PPD Tahun 2024

No	Sasaran	Capaian 2024	Keterangan
	Pilar 1 – Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan		
1	**Pilar 1. A4** Jumlah kabupaten/kota menyediakan kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan *stunting*	15	Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Kep. Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu
2	**Pilar 1. A8** Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*	11	Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu
	Pilar 2 – Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat		
1	**Pilar 2. B1** Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan *stunting* bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11	Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu
	Pilar 3 – Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif		
1	**Pilar 3. A2** Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*	15	Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Kep. Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu
2	**Pilar 3. A14** Jumlah kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*	15	Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Kep. Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon,

No	Sasaran	Capaian 2024	Keterangan
			Kota Kotamobagu
3	**Pilar 3. A15** Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan *Stunting*	15	Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Kep. Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu
4	**Pilar 3. B5** Jumlah kabupaten/kota dengan *Age Spesific Fertility Rate*/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1000	15	Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Kep. Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu
	Pilar 5 – Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset dan Inovasi		
1	**Pilar 5. A5 Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah Provinsi**	Ya	
2	**Pilar 5. B5 Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan *stunting***	15	Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Kep. Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu

6.13. INFORMASI DANA DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA DAERAH URUSAN BERSAMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berikut ini merupakan data realisasi belanja APBN berdasarkan jenis kewenangan TA 2024, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6.18 Data Realisasi Belanja APBN Berdasarkan Jenis Kewenangan TA 2024

Dekonsentrasi TA 2024

No	Nmdekon	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DK	170021	BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara	1.025.759.000,00	1.025.428.401,00	99,97%
2	DK	484183	BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara	412.149.000,00	400.652.251,00	97,21%

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk ketaatan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan *(stakeholder)* guna meningkatkan *good governance*. Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa target kinerja APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 yang tercermin pada indikator keberhasilan program dan kegiatan menurut urusan pemerintah baik wajib maupun pilihan dapat tercapai dengan baik secara keseluruhan. Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.653.838.603.399,79 atau 92,13% dari target sebesar Rp3.965.839.828.596,00.

b. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasikan sebesar Rp3.707.934.255.582,00 atau 93,67%, Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp2.718.227.555.723,00 atau 92,94%, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp410.830.760.409,00 atau 92,15% Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp450.377.558,00 atau 4,74% dan Transfer terealisasi sebesar Rp578.425.561.892,00 atau 99,98%.

c. Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Saldo SiLPA per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.233.493.032,68.

Berdasarkan Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2024, dapat diketahui bahwa:

a. Aset Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp10.784.975.603.819,41 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp285.049.894.268,61, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp874.247.120.484,75, Aset Tetap sebesar Rp8.152.164.792.556,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp1.473.513.796.510,05. Secara keseluruhan, nilai Aset mengalami penurunan sebesar Rp164.586.197.481,61 dari nilai Aset tahun sebelumnya sebesar Rp10.949.561.801.301,02.

b. Kewajiban Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp1.263.787.437.901,66 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp565.056.644.153,61 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp698.730.793.748,05.

c. Ekuitas (kekayaan bersih) Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp9.521.188.165.917,75.

Sebagai penutup dapat disampaikan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Mayjen (TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE